



PROSIDING

SEMINAR DAN PUBLIKASI
HASIL PENELITIAN DOSEN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) WATAMPONE



PROSIDING
SEMINAR DAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN
DOSEN STAIN WATAMPONE

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STAIN Watampone
Tahun 2017



PROSIDING

**Seminar dan Publikasi Hasil Penelitian
Dosen STAIN Watampone**

Editor

Muh. Yakub
Raodahtul Jannah
A. Yusran Kasim
Andi Asrullah

Desain Sampul dan Tata Letak

Wahyudi Hasyim

Penerbit

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jln. Hoscokroaminoto
Bone

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala pujaan dan pujian hanya kepada Allah Swt atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga buku Prosiding Seminar dan Publikasi Hasil Penelitian dosen STAIN Watampone tahun 2017. Buku prosiding ini memuat sejumlah hasil penelitian Dosen STAIN Watampone, baik yang sudah diseminarkan maupun yang belum diseminarkan. Sudah menjadi kemestian bahwa setiap hasil penelitian dosen dipublikasikan, baik dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk prosiding. Kehadiran prosiding ini dipandang sebagai salah satu bentuk ekspose dan sosialisasi hasil temuan akademik dosen STAIN Watampone berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerbitan prosiding hasil penelitian menemukan momentumnya dalam mendinamisir budaya akademik di lingkungan perguruan tinggi, khususnya STAIN Watampone.

Disadari sepenuhnya bahwa buku prosiding hasil penelitian dosen STAIN Watampone dapat terwujud atas dukungan dan kerjasama semua pihak. Dengan demikian, diucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua STAIN Watampone, Prof. Dr. A. Nuzul, SH, M.Hum yang telah memfasilitasi semua kegiatan penelitian pada program pengabdian kepada masyarakat, khususnya penerbitan prosiding ini.
2. Segenap panitia seminar dan publikasi hasil penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya, sehingga semua tahapan kegiatan dapat terlaksana.
3. Para dosen/peneliti yang telah menjadi contributor hasil penelitian yang dimuat dalam prosiding ini.

Terlepas dari kekurangan Buku Prosiding ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan bangsa, Negara dan agama. Akhirul kalam, saran dan kritik konstruktif dari semua pihak menjadi kehormatan tersendiri bagi kami demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Kepala p3m

Rahmatun Nair, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197310162003121001

DAFTAR ISI

Prosiding Seminar dan Publikasi Hasil Penelitian Dosen
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	iii

Bagian Pendidikan

Pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone Pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian Rina Novianty, Asriana	2-8
Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional dan Lingkungan Belajar terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa STAIN Watampone Munawarah, Mulianty	9-15
Estimasi Kurva Regresi untuk Model Hubungan antara Imajinasi, Kognisi, dan Keperibadian Terhadap Kecerdasan Emosional Mahasiswa STAIN watampone Hasan Basri	16-25
A Mentoring and Publication Program Toward The Lecturers Journals: Challeges And Changes Into Indexed and Reputable International Journal Aschawir Ali	26-32
Pengaruh Kemampuan Pengambilan Keputusan dan Jiwa Wirausaha Kepala Madrasah terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah di Kota Watampone H. M. Rapi	33-43
Manajemen Pembelajaran Dosen dalam Meningkatkan Motivasi belajar Mahasiswa PGMI STAIN Watampone Nurlina	44-56

Urgensi Nilai-nilai Pendidikan Islam Terhadap Semangat Entrepreneurship Pada Usaha Kecil Di Pasar Palakka Kabupaten Bone	
Abdullah RB	57-62
Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Terhadap Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (Kkm) Studi Multi Kasus di SMAN 13 Bone dan MAN 3 Bone	
Arisal Fitriani	63-73
Mesjid di Watampone (Suatu Kajian Tentang Sejarah dan Pemanfaatan Fungsi Mesjid Al-Mujahidin dan Mesjid Raya Watampone)	
Ridhwan	74-87
Analisis Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Lingkungan Hidup Serta Kaitannya dengan Islam Pada Mahasiswa PGMI STAIN watampone	
Suriani Nur	88-96
 Bagian Hukum	
Problematika Hukum Mengenai Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan di Pengadilan (Analisis Terhadap Keabsahan Pemanggilan, Pembuktian Dan Hak Tergugat yang Diberi Putusan Verstek)	
Rosita	98-106
<i>Human Trafficking</i> dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No. 1716/PID/2016/PN.Watampone)	
Hj. St. Rahmawati	107-118
Implementasi Regulasi Zakat Pada Upz Kementerian Agama Kabupaten Bone	
Muhammad Hasbi, Mujahidin, Kamiruddin	118-129
 Bagian Ekonomi	
Anatical Procedur Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan	
Muhammad Yamin, Raodatul Jannah	131-138

Tradisi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Masyarakat Bone Perspektif Normatif, Sosiologis, Yuridis, dan Ekonomi A. Nuzul, Abdulahanaa	139-151
---	----------------

Bagian Sosiologi

Klaim Kebenaran Dalam Keberagaman (Studi Analisis terhadap pernikahan Pada Wahda islamiah Kab. Bone) Abdul Hakim	153-163
---	----------------

Sosiolinguistik dalam Kontektualisasi Naskah Keagamaan Islam Klasik Agh. Junaid Sulaeman Nursyirwan	164-174
--	----------------

Ritus Batu Tanre (Paham dan Praktik Keagamaan Masyarakat Cakkeware Cenrana-Bone) Sudirman, Misbahuddin	175-189
---	----------------

Penyebab Dan Motif Penguasaan <i>Tana Somp</i> a Pada Etnik Bugis Bone Provinsi Sulawesi Selatan A. Sarjan, Syarifuddin Yusmar	190-198
---	----------------

Bagian Dakwah

Keberagaman Muballig di Kota Watampone dalam Mengamalkan Hadis Da'if Sebagai sumber dakwah Junaid Bin Junaid	200-209
---	----------------

Persepsi Masyarakat Terhadap Kredibilitas Muballig STAIN Watampone dalam Menyampaikan Ceramah Agama di Kota Watampone Ruslan S	210-217
--	----------------

Khalifah, Al-Da'wah Lla Al-Khair, Amr Ma'ruf Nahyi Al-Munkar dalam Alquran Menurut Penapfsiran Hijbu Tahrir Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Mahasiswa Islam (Studi Kasus di Sulawesi Selatan pada Tahun 2017) A. Sumpeno	218-226
--	----------------

Bagian Pendidikan

**PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN DISIPLIN BELAJAR
TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI
EKONOMI SYARIAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN WATAMPONE PADA MATA KULIAH METODOLOGI
PENELITIAN**

Rina Novianty¹ dan Asriana²

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian; (2) Pengaruh Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian; (3) Pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar secara bersama-sama terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 3 tahun akademik 2017/2018 sebanyak 212 mahasiswa. Sampel yang diambil sebanyak 43 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian; (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin belajar terhadap hasil belajar mahasiswa program studi ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi islam STAIN Watampone pada mata kuliah metodologi penelitian; (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar dan disiplin belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar mahasiswa program studi ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi islam STAIN Watampone pada mata kuliah metodologi penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Kata Kunci : *Motivasi Belajar, Disiplin Belajar, Hasil Belajar*

Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung selama hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan sebagai suatu sistem, tidak lain dari suatu totalitas fungsional yang terarah pada suatu tujuan. Setiap subsistem yang ada dalam sistem tersusun dan tidak dapat dipisahkan dari rangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang berhubungan secara dinamis dalam suatu kesatuan. Tujuan pendidikan merupakan arah bagi anak didik, akan dibawa ke arah mana anak didik. Oleh karena itu, tujuan sebagai suatu patokan untuk dicapai, yang dilakukan pendidik dan anak didik secara bersama-sama dan dengan komitmen bersama-sama pula harus dilakukan dengan baik.¹

Pendidikan adalah segala jenis pengalaman kehidupan yang mendorong timbulnya minat belajar untuk mengetahui dan mengerjakan sesuatu yang telah diketahui itu. Bahkan pendidikan berlangsung sepanjang zaman (*life long education*). Artinya sejak lahir sampai pada hari kematian seluruh kegiatan manusia adalah kegiatan pendidikan.²

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara tenaga pendidik dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa adalah adanya motivasi. Dengan adanya motivasi, mahasiswa akan belajar lebih keras, ulet, semangat, tekun dalam proses belajar mengajar. Dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal yang perlu dibangkitkan dalam proses pembelajaran di kelas. Tujuan motivasi adalah menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan.

Motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan terutama dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang menentukan tingkatan kegiatan, konsistensi, serta arah dari tingkahlaku manusia. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor instrinsik maupun faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berupa hasrat dan keinginan berhasil serta dorongan kebutuhan belajar dan harapan akan cita-cita. Faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik.

Motivasi belajar sangat dibutuhkan guna meningkatkan semangat belajar seseorang sehingga mempunyai minat untuk belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi tentu sangat diperlukan. Sebab, seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan

¹Abdul Hasim, dkk, *Landasan Pendidikan: menjadi guru yang baik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 29.

²Anwar, *Pendidikan Kecakapan Hidup* (Bandung: Alfabeta, 2006), h.43.

aktivitas belajar. Bagi mahasiswa yang selalu memperhatikan materi pelajaran yang diberikan, bukanlah masalah bagi tenaga pengajar karena di dalam diri mahasiswa tersebut ada motivasi. Lain halnya dengan mahasiswa yang tidak ada motivasi di dalam dirinya, maka motivasi ekstrinsik yang merupakan dorongan dari luar dirinya mutlak diperlukan. Di sini tugas tenaga pengajar adalah membangkitkan motivasi mahasiswa/peserta didik sehingga ia mau belajar.³

Motivasi Belajar

Istilah motivasi berasal dari kata latin “*movere*” yang berarti “menggerakkan”. Berdasarkan pengertian ini makna motivasi menjadi berkembang. Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya *Proses Belajar Mengajar* menerangkan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.⁴

Motivasi belajar adalah kekuatan pendorong dan pengarah perbuatan belajar. Pendorong dalam arti pemberi kekuatan yang memungkinkan perbuatan belajar dijalankan.⁵

Pengarah dalam arti pemberi tuntunan kepada perbuatan belajar kearah tujuan yang telah ditetapkan. Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada seseorang yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung.⁶

Motivasi belajar adalah sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai.⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak/dorongan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal) yang membuat seseorang melakukan proses belajar dalam rangka untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

³Pupuh F dan Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar: melalui penanaman konsep umum dan konsep Islami* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 19-20

⁴Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: BumiAksara, 2004), h. 157.

⁵Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Bumi Aksara, 2001), h.158.

⁶Haris Mudjiman, *Belajar Mandiri: Self Motivated Learning* (Surakarta: LPP & UNS Press), h. 23.

⁷Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 23.

⁸Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 75.

Jenis - Jenis Motivasi

Adapun jenis-jenis motivasi terbagi dua yaitu:

a. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan). Motivasi ekstrinsik seringkali dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti penghargaan dan hukuman. Sebagai contoh, seorang siswa dapat belajar dengan keras untuk sebuah ujian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai bagus di mata pelajaran tersebut.

b. Motivasi Intrinsik

Motivasi instrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri (sebuah tujuan itu sendiri). Sebagai contoh, seorang siswa dapat belajar dengan keras untuk sebuah ujian karena ia menyukai mata pelajaran tersebut.⁸

Disiplin Belajar

Istilah disiplin berasal dari bahasa latin "*Disiplina*" yang menunjuk kepada kegiatan belajar dan mengajar. Istilah tersebut sangat dekat dengan istilah dalam bahasa Inggris "*Disciple*" yang berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin.⁹

Dalam bahasa Indonesia, istilah disiplin sering terkait dan menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti kepatuhan seorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena dorongan atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. Sebaliknya istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Zuriah (2011: 83) yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan berdisiplin apabila melakukan pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan waktu dan tempatnya serta dikerjakan dengan penuh kesadaran, ketekunan, keikhlasan atau tanpa paksaan dari pihak manapun.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dalam hatinya serta dilakukan secara teratur tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dikaitkan dengan kegiatan pendidikan di sekolah, disiplin merupakan salah satu faktor yang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Disiplin memegang peranan penting dalam

⁸John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 204.

⁹Tulus Tu'u, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa* (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 30.

¹⁰Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 83.

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta proses pembelajaran yang teratur sekaligus penting bagi keberhasilan prestasi belajar peserta didik. Dengan adanya disiplin dapat membantu peserta didik mengoptimalkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, disiplin belajar adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan atau tata tertib untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Hasil belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.¹¹

Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut Nawawi dalam K. Brahim, hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.¹²

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk pendidikan.¹³

Setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan selalu mengharapkan hasil yang dicapai secara maksimal. Dalam proses belajar mengajar, untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar sudah tentu memerlukan ukuran. Salah satu alat ukur yang digunakan adalah tes. Dengan mengukur hasil belajar, maka seseorang dapat mengetahui tingkat penguasaan materi yang diajarkan. Hasil belajar merupakan tolak ukur dalam dunia pendidikan, setelah menjalani proses pembelajaran maka peserta didik akan mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan apa telah dilakukannya. Hasil belajar tersebut dinyatakan berupa huruf dan angka mutu.

¹¹Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 22-23..

¹²Ahmad Susanto, *Teori Belajar Mengajar Di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kenacana, 2013), h. 5

¹³Ahmad Susanto, *Teori Belajar.....*h. 9

Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel motivasi belajar mahasiswa (X1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa (Y) program studi ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi islam STAIN Watampone pada mata kuliah metodologi penelitian, sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.
2. Variabel disiplin belajar mahasiswa (X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa (Y) program studi ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi islam STAIN Watampone pada mata kuliah metodologi penelitian, sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.
3. Terdapat pengaruh signifikan variabel motivasi belajar mahasiswa (X1) dan disiplin belajar mahasiswa (X2) secara bersama-sama terhadap hasil belajar mahasiswa (Y) program studi ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi islam STAIN Watampone pada mata kuliah metodologi penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Daftar Pustaka

- Abdul Hasim, Mohamad Surya, Rus Bambang S, *Landasan Pendidikan: menjadi guru yang baik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Anni, Tri, Catharina, *Psikologi Belajar*, Semarang: UPT UNNES, 2006.
- Anwar, *Pendidikan Kecakapan Hidup*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Choirini S.C, "Pengaruh Kreativitas Guru Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Jurusan Agama Pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batang". Skripsi STAIN Pekalongan, 2016.
- Pupuh F dan Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar: melalui penanaman konsep umum dan konsep Islami*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Hamalik, Oemar, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Haris, Mudjiman, *Belajar Mandiri: Self Motivated Learning*, Surakarta: LPP & UNS Press, 2005.
- Hamzah B. Uno & Masri kuadrat, *Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran*, Jakarta; Bumi Aksara, 2009.
- Ismayanti, Maya, "Pengaruh Kedisiplinan, Kompetensi Dan Kinerja Guru Pai Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di MTS N Se-Kabupaten Blitar". Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

- Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Riduwan dan Akdon, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Santrock, John W, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sudijono, Anas, *Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. XII; Jakarta: PT Bumi Askara, 2013.
- Susanto, *Teori Belajar Mengajar di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kenacana, 2013.
- Tu' u, Tulus, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

**PENGARUH KOMPETENSI PEDAGOGIK, KOMPETENSI
PROFESIONAL DAN LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP
MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA
STAIN WATAMPONE**

Munawarah¹ dan Mulianty²

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar mahasiswa secara simultan maupun parsial. Dengan mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar, maka diharapkan motivasi belajar yang ada pada diri mahasiswa lebih meningkat dari sebelumnya. Motivasi merupakan hal penting dalam proses pembelajaran, karena motivasi merupakan penggerak pada diri mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar.

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Stain Watampone semester 5 yang berjumlah 50 mahasiswa. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, angket dan dokumentasi. Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda karena penelitian ini menggunakan tiga variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan: $Y = 4,008 + 0,187X_1 + 1,266X_2 + 0,0037X_3$. Dengan Y (motivasi belajar mahasiswa), X₁ (kompetensi pedagogik), X₂ (kompetensi profesional), X₃ (lingkungan keluarga).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Statistik Deskriptif Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS uji regresi ganda menunjukkan bahwa hasil Fhitung sebesar 16,803 lebih besar dari Ftabel 2,81 (16,803 > 2,81) maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan lingkungan keluarga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa. Pengaruh X₁ terhadap Y sebesar 0,496 dengan nilai hubungan parsial sebesar 4% pada taraf

signifikansi 0,005, sedangkan X2 terhadap Y sebesar 1,226 dengan nilai hubungan parsial sebesar 39,3% pada taraf signifikansi 0,025 dan X3 terhadap Y sebesar 0,213 dengan nilai hubungan parsial sebesar 7% pada taraf signifikansi 0,000. Jadi semakin baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan lingkungan keluarga semakin baik pula motivasi belajar mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seluruh variabel bebas yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa baik secara simultan maupun parsial.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, pendidikan merupakan upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi tumpuan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

¹⁴Di dalam pasal 1 butir 20 UU.No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di lingkungan pendidikan tinggi, interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah yakni : a) ranah kognitif yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran b) ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran c) ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani dan d) ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk bekerja sama. Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, terutama oleh dosen maka perlu ada mekanisme untuk mengawasinya.

Proses kegiatan belajar akan berjalan dengan baik apabila tenaga pengajar mampu menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan peserta didik termotivasi melakukan aktivitas belajar, oleh karena itu seorang pendidik/tenaga pengajar harus memiliki kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik,

¹⁴Undang-undang SISDIKNAS 2003 (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.2.

pengembangan kurikulum, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, sedangkan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan¹⁵.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,008 + 0,187X_1 + 1,266X_2 + 0,037X_3$$

Dari persamaan tersebut nilai konstantanya 4,008 yang berarti secara rata-rata variabel diluar model tetap memiliki motivasi belajar sebesar konstanta meskipun variabel independennya sama dengan nol. Nilai koefisien b1 sebesar 0,187. Ini menunjukkan ketika kompetensi Pedagogik meningkat sebesar satu poin maka motivasi belajar juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,187 poin. Nilai koefisien b2 sebesar 1,266. Ini menunjukkan ketika Kompetensi profesional mengalami peningkatan sebesar satu poin, motivasi belajar juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,1266 poin. Nilai besaran koefisien b3 sebesar 0,037 Ini menunjukkan ketika variabel Lingkungan keluarga meningkat sebesar satu poin maka motivasi belajar juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,037 poin. Secara simultan kompetensi pedagogik, kompetensi Profesional, dan lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hasil uji statistik (Uji F) secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, artinya secara bersama-sama baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan lingkungan keluarga berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Adapun nilai korelasi keempat Kompetensi tersebut terhadap motivasi belajar mahasiswa adalah sebesar 0,723. Berdasarkan nilai koefisien korelasi tersebut maka hubungannya tergolong kuat. Seberapa besar pengaruh keempat kompetensi tersebut terhadap motivasi belajar mahasiswa dapat dilihat dari koefisien determinasi. Dari hasil pengolahan data koefisien determinasi menunjukkan angka 0,523. Artinya bahwa 52,3

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 19, *Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta tahun 2005)

% motivasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan lingkungan keluarga. Sedangkan 47,7 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi pedagogik berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dalam kompetensi pedagogik mencakup bagaimana kesiapan dosen memberikan kuliah, bagaimana dosen harus mampu mengatur dan menertibkan kegiatan perkuliahan, memiliki kemampuan menghidupkan suasana kelas, penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas, harus mampu memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran, keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar, harus mampu menyesuaikan antara materi ujian dengan tujuan mata kuliah dan harus memberikan penilaian secara jujur. Dari aspek tersebut yang digunakan untuk mengukur kompetensi pedagogik kemudian dihubungkan dengan motivasi belajar mahasiswa maka secara teoritis kompetensi pedagogik akan berpengaruh terhadap motivasi belajar artinya jika kompetensi pedagogik baik maka akan meningkatkan motivasi belajar. Pengujian koefisien kompetensi pedagogik terhadap motivasi belajar mahasiswa menunjukkan nilai $\text{sig } 0,015 < 0,05$. Ini berarti penelitian ini menunjukkan secara parsial kompetensi pedagogik berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Kompetensi profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang dimiliki oleh dosen. Untuk mengukur kemampuan dosen dilihat dari kompetensi profesional disini peneliti mengukurnya dengan melihat kemampuan dosen dalam menjelaskan pokok bahasan, kemampuan dosen dalam memberikan contoh yang relevan dengan konsep yang sedang diajarkan, dosen menguasai isu-isu mutakhir berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan dan dosen juga memiliki kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi. Atas dasar tersebut penulis menyimpulkan bahwa secara teoritis kompetensi profesional berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai sig sebesar 0,000. Karena nilainya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi Profesional berpengaruh terhadap motivasi belajar, artinya jika dosen memiliki kompetensi profesional yang baik maka akan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar. Dari hasil pengolahan data

dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai sig sebesar 0,014. Karena nilainya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar. Jadi semakin baik dan mendukung lingkungan keluarga maka semakin baik pula motivasi belajar mahasiswa. Namun sebaliknya jika lingkungan keluarga tidak baik dan tidak mendukung maka motivasi belajar mahasiswa dapat menurun. Artinya jika dosen memiliki kompetensi profesional yang baik maka akan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan lingkungan keluarga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS uji regresi ganda menunjukkan bahwa hasil Fhitung sebesar 16,803 lebih besar dari Ftabel 2,81 ($16,803 > 2,81$) maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan lingkungan keluarga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan garis regresi $Y = 33,924 + 0,496X_1$. Koefisien regresi untuk variabel kompetensi pedagogik 0,496 diuji keberartiannya dengan uji t. Hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,015. Karena nilai signifikansi $0,015 < 0,05$ maka Kompetensi Pedagogik berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Statistik Deskriptif Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone.
2. Persamaan garis regresi $Y = 15,584 + 1,226X_2$. Koefisien regresi untuk variabel kompetensi profesional 1,226 diuji keberartiannya dengan uji t. Hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka Kompetensi Profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Statistik Deskriptif Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone.
3. Persamaan garis regresi $Y = 38,745 + 0,213X_3$. Koefisien regresi untuk variabel lingkungan keluarga 0,213 diuji keberartiannya dengan uji t. Hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,014. Karena nilai signifikansi $0,014 < 0,05$ maka lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Statistik Deskriptif Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone.

4. Ada pengaruh secara simultan antara kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar. Diperoleh Fhitung sebesar 16,803 lebih besar dari Ftabel 2,81 ($16,803 > 2,81$) ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Statistik Deskriptif Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone. Koefisien Korelasi berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,723. Karena nilai koefisien korelasi bernilai positif, maka dapat dinyatakan bahwa variabel kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nilai r square sebesar 0,523 nilai tersebut berarti 53,2% perubahan pada variabel motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan lingkungan keluarga, sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Anisah Aan, *Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional Guru Dan Pengetahuan Kewirausahaan Siswa Terhadap Motivasi Berwirausaha*, Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi, Volume 1 Nomor 2, September 2013.
- Dalyono. M, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007
- Dimiyati dan Mudjiono. (2006). *Belajar dan Perkembangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kurniawan Eko, *Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Lingkungan Belajar terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK Antonius Semarang*. Skripsi. Semarang: UNNES. 2012
- Muhibbin Syah. (2005). *Psikologi Belajar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan*.
- Rifa'I Achmad, dan Catharina, T. Anni, *Psikologi Pendidikan Semarang* : Unnes Press, 2009
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011
- Sukmadinata. N.S, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Sudarwan, Danim, *Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi* Bandung : Alfabeta, 2010

- Slameto, *Belajar dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya*. ed. rev. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet. XII; Jakarta: PT Bumi Askara, 2013
- Undang-undang SISDIKNAS 2003*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Widiawahyuni Ni Putu Eka Sri, *Pengaruh Kompetensi Pedagogik Terhadap Kemampuan Guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran IPS Di SMP Negeri Kota Singaraja*, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 5 Nomor: 1 Tahun: 2015
- Yamin Martinis, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2006
- Yamin, M dan Maisah.2010. *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada.

**ESTIMASI KURVA REGRESI UNTUK MODEL HUBUNGAN ANTARA
IMAJINASI, KOGNISI, DAN KEPERIBADIAN TERHADAP
KECERDASAN EMOSIONAL MAHASISWA
STAIN WATAMPONE**

Hasan Basri

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Analisis data yang terdiri atas banyak variabel menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan. Salah satu metode analisis data yang biasa dipakai, yaitu analisis regresi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode kuadrat terkecil dalam mengestimasi kurva regresi untuk model hubungan antara imajinasi, kognisi, dan keperibadian terhadap kecerdasan emosional mahasiswa STAIN Watampone. Diberikan pasangan data $(X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{ki}, Y_i)$, $i = 1, \dots, n$, yang diasumsikan mengikuti model regresi parametrik, $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i$, maka jumlah kuadrat semua error dalam model adalah $\sum \varepsilon_i^2 = \sum (Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki}))^2$ atau dalam notasi matriks $\mathbf{e}'\mathbf{e} = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})$.

Untuk memperoleh nilai dugaan $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ yang meminimumkan $\mathbf{e}'\mathbf{e}$, maka diperoleh $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{y}$ yang merupakan penduga dari parameter yang diestimasi melalui metode kuadrat terkecil. Pembuktian secara teoritis, menunjukkan bahwa pendugaan kuadrat terkecil ini dapat dikatakan bersifat linear terbaik dan tak bias atau BLUE (*best linear unbiased estimator*).

Selanjutnya, diberikan data terapan, yaitu pengaruh imajinasi, kognisi, dan keperibadian terhadap kecerdasan emosional. Hasilnya, secara bersama-sama imajinasi, kognisi, dan keperibadian berpengaruh nyata terhadap kecerdasan emosional mahasiswa di STAIN Watampone. Dari uji parsial, diketahui bahwa secara sendiri-sendiri faktor imajinasi, kognisi, dan keperibadian masing-masing berkontribusi terhadap kecerdasan emosional mahasiswa, namun kelihatannya yang paling dominan adalah faktor imajinasi.

Kata kunci: Analisis regresi, Metode kuadrat terkecil, Kecerdasan emosional, Mahasiswa STAIN Watampone.

Pendahuluan

Pada saat ini banyak persoalan atau fenomena yang sedang dipelajari tidak hanya menyangkut sebuah karakteristik atau atribut dan sebuah variabel saja, akan tetapi menyangkut beberapa variabel. Misalnya pada bidang pendidikan, untuk mempelajari hubungan (korelasi) dan atau pengaruh sebagian peubah atau variabel terhadap variabel lainnya akan melibatkan dua atau lebih variabel.

Oleh karena itu, analisis data yang terdiri atas banyak variabel menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan. Apabila terdapat data yang terdiri atas dua atau lebih variabel, adalah sewajarnya untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel itu berhubungan. Hubungan yang didapat tidak bersifat kausal, dan biasanya ditampilkan dalam sebuah model bersifat numerik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Studi yang menyangkut masalah ini dikenal sebagai analisis regresi.

Analisis regresi merupakan suatu proses statistik untuk mengestimasi hubungan antara variabel-variabel, yakni berupa teknik-teknik memodelkan dan melakukan analisis beberapa variabel atas dasar bentuk hubungan antara satu variabel tak bebas dan satu atau lebih variabel bebas (prediktor)¹⁶.

Model atau persamaan regresi untuk populasi, secara umum akan dituliskan dalam bentuk,

$$\mu_{y.x_1, x_2, \dots, x_k} = f(X_1, X_2, \dots, X_k \mid \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \dots\dots\dots (1.1)$$

dengan $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ parameter-parameter yang ada dalam regresi itu.

Berdasarkan banyaknya variabel bebas, model regresi secara umum pada persamaan (1.1) disebut regresi sederhana jika hanya ada satu variabel bebas dan disebut regresi berganda jika ada dua atau lebih variabel bebas.

Dalam hal terdapat tiga variabel bebas yang disertakan dalam analisis, maka persamaan (1.1) menjadi model regresi yang berganda (*multiple regression*) untuk populasi dengan tiga buah variabel bebas. Sehingga di bawah asumsi linear, bentuk persamaan regresi tersebut dikenal sebagai regresi linear berganda dengan model:

$$\mu_{y.x_1, x_2, x_3} = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \theta_3 X_3 \dots\dots\dots (1.2)$$

dengan parameter $\theta_0, \theta_1, \theta_2$, dan θ_3 , yang mana jika ditaksir oleh masing-masing a_0, a_1, a_2 , dan a_3 , maka regresi berdasarkan sampel adalah,

$$\hat{Y} = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 \dots\dots\dots (1.3)$$

dimana simbol \hat{Y} dibaca Y topi yang menyatakan taksiran nilai Y hasil observasi yang diasumsikan statistical dan random atau stokhastik.

Aplikasi dari teknik analisis data seperti yang disebutkan di atas telah banyak ditemukan di berbagai bidang kajian, termasuk diantaranya untuk

¹⁶ Scott J. Amstrong, "Illusion in Regression Analysis", *International Journal Forecasting*, Volume 28, 2012, h. 689

pemodelan dan analisis data dalam riset masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Hal ini cukup beralasan karena salah satu implikasi dari analisis regresi adalah bertujuan melakukan prediksi atau taksiran, sementara itu fakta menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan dewasa ini, melakukan prediksi pada beberapa hal adalah sebuah keniscayaan¹⁷.

Variabel Acak dalam Model Regresi

Dalam analisis regresi dibedakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tak bebas. Untuk menghindari kekacauan penggunaan simbol variabel, maka variabel bebas biasanya disimbolkan dengan X dan variabel tak bebas biasanya disimbolkan dengan Y. Dalam studi hubungan kebergantungan (dependensi), variabel bebas X identik dengan faktor yang berpengaruh, sehingga biasanya disebut juga sebagai variabel independen atau variabel penjelas (eksplanasi) atau variabel prediktor. Sedangkan variabel tak bebas Y identik dengan variabel yang dipengaruhi, dan biasanya juga disebut sebagai variabel dependen (bergantung) atau variabel respon.

Sebagaimana diterangkan di atas, yang dimaksud dengan variabel prediktor ialah variabel yang nilainya dapat ditentukan atau diatur atau variabel yang nilainya dapat diamati namun tidak dapat dikendalikan. Sedangkan variabel yang terjadi karena akibat perubahan yang disengaja, atau karena adanya perubahan, atau karena efek (pengaruh) dari variabel prediktor, adalah merupakan variabel respon. Oleh karena perbedaan antara prediktor dan respon tidak selalu tampak jelas, maka penentuan variabel mana yang bebas dan mana yang tak bebas dalam beberapa hal memang tidak mudah dapat dilaksanakan. Studi yang cermat, diskusi yang seksama, berbagai pertimbangan, kewajaran masalah yang dihadapi dan pengalaman akan membantu memudahkan penentuan. Namun sebagai penanda awal, dapat dikatakan bahwa variabel yang mudah didapat atau tersedia sering dapat digolongkan kedalam variabel bebas sedangkan variabel yang terjadi karena variabel bebas itu merupakan variabel tak bebas.

Dalam model regresi, gugus (series) data merupakan data berpasangan. Artinya, bahwa setiap titik data tertentu pada series data adalah diperoleh dari pengamatan pada obyek/subyek yang sama. Jadi banyaknya data sampel (n) pada masing-masing variabel selalu sama.

¹⁷Mutijah, "Prospek Statistik Nonparametrik Metode Brown-Mood dalam Pendidikan Tinggi: Suatu Aplikasi dalam Analisis Regresi Linier Sederhana", *Insania*, Volume 12, 2007, h. 369

Mahasiswa dan Kecerdasan Emosional

Mahasiswa adalah orang yang belajar (pelajar) di perguruan tinggi.¹⁸ Sedangkan perguruan tinggi merupakan suatu paguyuban antara tenaga akademik dan mahasiswa yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang benar.¹⁹

Mahasiswa merupakan suatu golongan dari masyarakat yang mempunyai dua sifat, yaitu manusia muda dan calon intelektual, dan sebagai calon intelektual, mahasiswa harus mampu untuk berpikir kritis terhadap kenyataan sosial, sedangkan sebagai manusia muda, mahasiswa seringkali tidak mengukur resiko yang akan menimpa dirinya.

Mahasiswa dalam perkembangannya berada pada kategori remaja akhir yang berada dalam rentang usia 18-21 tahun, usia ini berada dalam tahap perkembangan dari remaja (*adolescence*) menuju dewasa muda (*young adulthood*). Pada usia ini, perkembangan individu ditandai dengan pencarian identitas diri, adanya pengaruh dari lingkungan, serta sudah mulai membuat keputusan terhadap pemilihan pekerjaan atau karirnya.

Mahasiswa merupakan individu yang belajar dan menekuni disiplin ilmu yang ditempuhnya. Dalam menjalani serangkaian kuliah, sangat dipengaruhi oleh kemampuan mahasiswa itu sendiri, karena pada kenyataannya diantara mahasiswa ada yang sudah bekerja, berkeluarga atau disibukkan oleh kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian, mahasiswa penuh dengan segala dinamikanya, dan sudah menjadi barang tentu pula membutuhkan berbagai kompetensi, salah satunya kompetensi emosional sebagai tambahan dari kemampuan kognitifnya.²⁰

Dalam pembicaraan mengenai kecerdasan emosional, maka terlebih dahulu perlu dibicarakan tentang emosi. Dalam kamus Bahasa Indonesia, emosi adalah perasaan batin yang kuat; keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis (seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subyektif).²¹

Emosi berkenaan dengan perasaan afek dan merupakan reaksi fisik dan psikis, sehingga menyiratkan bahwa kecenderungan untuk bertindak menjadi bagian dasar emosi.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 895

¹⁹ Andi Hakim Nasution, *Pola Induksi Seorang Eksperimentalis*, (Bogor: IPB Press, 2002), h. 134

²⁰ Cary Cherniss dan Daniel Goleman, *The Emotionally Intelligent Workplace: How to Select for, Measure, and Improve Emotional Intelligence in Individuals, Groups, and Organizations*, (San Francisco: John Wiley & Sons, 2001), h. 44

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 387

Dalam aktifitas sehari-hari, apabila dibutuhkan sesuatu dan kemudian tidak terpenuhi atau tidak mungkin diperoleh, maka akan memunculkan emosi seperti marah, takut, tidak puas, depresi, dan lainnya. Emosi memberi sinyal ketika ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu keinginan dan tidak tercapai. Sehingga dikatakan emosi seperti bercerita tentang sesuatu yang aneh.²² Reaksi ini terjadi di bagian sistem limbik pada kepala manusia.

Dengan demikian, secara umum emosi merupakan respon yang utuh pada organisme yang menyangkut getaran fisiologis (*physiological arousal*), ekspresi perilaku, dan kesadaran pengalaman. Beberapa teori emosi diberikan sebagai berikut:

- a. Teori James-Lange, menyatakan bahwa pengalaman emosi adalah kesadaran fisiologis untuk memberikan tanggapan (*responses*) pada rangsangan getaran emosi (*emotion-arousing stimuli*).
- b. Teori Cannon-Bard, menyatakan bahwa suatu stimulus getaran emosi secara simultan akan memicu: 1) respon fisiologis dan 2) pengalaman subyektif dari emosi.
- c. Teori dua faktor (teori emosi Schachter-Singer), menyatakan bahwa pengalaman emosi itu, kalau bukan sebagai getaran fisik biasa berarti ia adalah etiket (*label*) kognitif.²³

Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis.²⁴

Emosi berkaitan dengan perubahan akibat sesuatu yang tak biasa, merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Berdasarkan beberapa uraian di atas, emosi dapat dijelaskan sebagai suatu perasaan afek atau perubahan fisik dan psikis yang mendorong individu untuk memberikan respon atau bertingkah laku terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar diri sendiri.

Kecerdasan atau inteligensi (*intelligence*) adalah suatu istilah psikologi yang berarti kemampuan membuat reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru,

²² Sean McPheat, *Emotional Intelligence*, (London: MTD Training & Ventus Publishing Aps, 2010), h. 3

²³ David G. Myers, *Psychology*, (Washington DC: Worth Publisher, 2010), h. 499

²⁴ Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, (New York: Bantam Book, 1995), h. 4

membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru.²⁵

Dalam neuropsikologi, kecerdasan merupakan konsep abstrak berkaitan dengan biologi (kerja otak) yang dapat dijelaskan dengan kadar tingkatan, dan terukur melalui perilaku. Perspektif ini memunculkan beberapa teori berdasarkan postulatnya masing-masing antara lain, teori Halstead dengan 4 faktor kecerdasan (*C=integrative field, A=abstraction, P=power, D=directional*), teori Luria dengan model *brain-behavior*, dan lainnya.²⁶

Kecerdasan dalam psikologi adalah immaterial, dan merupakan sebuah konsep konstruksi sosial. Kecerdasan adalah kemampuan belajar dari pengalaman, penyelesaian masalah, dan menggunakan pengetahuan untuk beradaptasi terhadap hal baru.²⁷

Rangkaian pemaparan di atas menyajikan gambaran kasar bahwa kecerdasan emosional adalah semacam abstraksi kemampuan belajar dari perbandingan antara stimulus dan ingatan-ingatan yang berkaitan dengan emosi.

Konsep kecerdasan emosional pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Salovey dan Mayer, yang mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu intelegensi sosial yang meliputi kemampuan seseorang memantau emosi dirinya dan orang lain, memilah emosi dirinya dan orang lain, dan menggunakan informasi ini untuk menuntun pikirannya.²⁸

Meskipun demikian, gagasan yang mirip dari konsep tersebut di atas telah ada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat *timeline* beberapa deskripsi penulis seperti berikut:

- 1) 1930an, Edward Thorndike: Kecerdasan sosial, memperoleh hubungan baik dengan orang lain.
- 2) 1940an, David Wechsler: Mengajukan komponen afektif inteligensi untuk kesuksesan hidup.
- 3) 1950an, Para Ahli Psikologi Humanistik (antara lain, Abraham Maslow): Menjelaskan bagaimana membangun kekuatan emosional.
- 4) 1975, Howard Gardner: Mengenalkan konsep kecerdasan berganda dalam bukunya *The Shattered Mind*.
- 5) 1985, Wayne Payne: mengenalkan terminology kecerdasan emosional dalam disertasi doktoralnya yang diberi judul '*A Study of Emotion: Developing Emotional Intelligence; Self Integration; Relating to Fear, Pain and Desire*'.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 560

²⁶ Arthur MacNeill Horton, dan Danny Wedding, *Neuropsikologi*, (New York: Springer, 2008), h. 69

²⁷ David G. Myers, *Psychology*, (Washington DC: Worth Publisher, 2010), h. 406

²⁸ Robert M. Carrothers, "Measuring Emotional Intelligence of Medical School Applicants", *Academic Medicine*, Volume 75, 2000, h. 457

- 6) 1987, Keith Beasley dan Reuven Bar-On: Menggunakan terminology 'Emotional Quotien (EQ)' pada artikel dalam sebuah majalah bernama Mensa untuk Keith Beasley, dan pada versi thesis tak terpublikasikan untuk Reuven Bar-On.
- 7) 1990, Peter Salovey dan John Mayer: Mempublikasikan artikel *landmark* 'Emotional Intelligence' dalam jurnal *Imagination, Cogniton, and Personality*.
- 8) 1995, Daniel Goleman: Mempopulerkan konsep kecerdasan emosional dalam bukunya *Emotional Intelligence: Why it Can Matter More Than IQ*.
- 9) 1996, Beberapa riset kecerdasan emosional: Identifikasi faktor-faktor emosional dan sosial yang penting dalam kesuksesan bekerja.²⁹

Salovey dan Mayer beranggapan bahwa, kecerdasan emosional sesungguhnya menjadikan kerjasama emosi dan kecerdasan, dimana emosi sebagai sumber informasi yang sangat berguna, dapat membantu seseorang untuk memahami dan mengarungi lingkungan sosial. Oleh karena itu, mereka mengusulkan definisi formal kecerdasan emosional sebagaimana disebutkan di atas.³⁰

Untuk membangun kesadaran yang lengkap terhadap kecerdasan, Gardner dalam bukunya yang berjudul *Intelligences Reframed: Multiple intelligences for the 21st century*, menegaskan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan yang monolitik yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada spektrum kecerdasan yang berganda yaitu, logika, linguistic, spasial, music, kinestetik, naturalist, intrapersonal dan interpersonal. Kemudian ditambahkan kecerdasan eksistensi dan kecerdasan moral dalam kaitannya dengan usulan mengenai kecerdasan tentang kultur dan spiritual.³¹

Simpulan

1. Diberikan data $(X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{ki}, Y_i)$, $i = 1, \dots, n$, yang diasumsikan mengikuti model regresi parametrik, $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i$, maka jumlah kuadrat semua error dalam model adalah,

$$S = \sum \varepsilon_i^2 = \sum (Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki}))^2$$

$$= \sum (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_{1i} - \beta_2 X_{2i} - \dots - \beta_k X_{ki})^2$$
 Dengan nilai dugaan $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ adalah masing-masing $b_0, b_1, b_2, \dots, b_k$, dapat dengan mudah diperoleh melalui notasi matriks. Sehingga dalam notasi matriks didefinisikan,

²⁹ Sean McPheat, *Emotional Intelligence*, (Londonn: MTD Training & Ventus Publishing Aps, 2010), h. 31

³⁰ Peter Salovey dan Daisy Grewal, "The Science of Emotional Intelligence", *American Psychological Society*, Volume 14, 2005, h. 281

³¹ Marcia Huges, Henry L. Thompson, dan James Bradford Terrel, *Developing Emotional and Social Intelligence*, (San Francisco: Pfeiffer and Wiley Imprint, 2009), h. 3

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \dots & x_{k1} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \dots & x_{k2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_{1i} & x_{2i} & \dots & x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_{1n} & x_{2n} & \dots & x_{kn} \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_j \\ \vdots \\ b_k \end{bmatrix}, \mathbf{e} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_i \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}, \text{ dan } \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

dimana series data $i = 1, 2, \dots, n$ dan koefisien $j = 0, 1, \dots, k$. Dari hasil optimalisasi minimum jumlah kuadrat error diperoleh vektor $\mathbf{b} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$; \mathbf{b} adalah matriks berordo $(k+1) \times 1$ yang menunjukkan koefisien-koefisien regresi yang merupakan penduga dari parameter yang diestimasi melalui metode kuadrat terkecil. Pembuktian secara teoritis menunjukkan, bahwa pendugaan kuadrat terkecil ini dapat dikatakan bersifat linear terbaik dan tak bias atau BLUE (*best linear unbiased estimator*).

2. Berdasarkan uji signifikan koefisien regresi, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan kebergantungan (dependensi) Y atas X1, X2, dan X3 secara nyata/signifikan. Dengan kata lain, secara bersama-sama imajinasi, kognisi, dan keperibadian berpengaruh nyata terhadap kecerdasan emosional mahasiswa di STAIN Watampone. Dari uji parsial, diketahui bahwa secara sendiri-sendiri faktor imajinasi, kognisi, dan keperibadian masing-masing berkontribusi terhadap kecerdasan emosional mahasiswa, namun kelihatannya yang paling dominan adalah faktor imajinasi.

Daftar Pustaka

- Amstrong, Scott J. "Illusion in Regression Analysis", International Journal Forecasting, Volume 28, 2012, h. 689-693
- Carrothers, Robert M. "Measuring Emotional Intelligence of Medical School Applicats", Academic Medicine, Volume 75, 2000, h. 456-463
- Cherniss, Cary, dan Extein, Melissa. "Emotional Intelligence: What Does the Research Really Indicate", Educational Psychologist, Volume 4, 2006, h. 240-256
- Cherniss, Cary dan Goleman, Daniel. The Emotionally Intelligent Workplace: How to Select for, Measure, and Improve Emotional Intelligence in Individuals, Groups, and Organizations, San Francisco: John Wiley & Sons, 2001
- Draper, N. R., dan Smith, H. Analisis Regresi Terapan, Edisi Kedua (terjemahan). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Gerungan, W., A. Psikologi Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Goleman, Daniel. Emotional Intelligence (terjemahan). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Working With Emotional Intelligence (terjemahan). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000

- Gottman, John. Kiat-kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional (terjemahan). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Gujarati, Damodar N., Basic Econometric. New York: McGraw-Hill Companies, Inc., 2003
- Horton, Arthur MacNeill, dan Wedding, Danny. Neuropsychology. New York: Springer, 2008
- Huges, Marcia, Thompson, Henry L., dan Terrel, James Bradford. Developing Emotional and Social Intelligence. San Francisco: Pfeiffer An Wiley Imprint, 2009
- Irwanto. Psikologi Umum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Jr., Richard J. Heuer. Psychology of Intelligence Analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, CIA, 1999
- Lewin, Kurt. Resolving Social Conflicts. New York: Harper and Brothers, 1948
- Liang, Chaoyun dkk. "The Exploration of Indicators of Imagination", The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 2, 2012, h. 364-379
- Ma, Baoyu, "Philosophy of Science and Technology Education Based on Linear Regression Theory", Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, Volume 6, 2014, h. 1416-1419
- McPheat, Sean. Emotional Intelligence. London: MTD Training & Ventus Publishing Aps, 2010
- Myers, David G. Psychology. Washington DC: Worth Publisher, 2010
- Mayer, John D. dkk. "Emotional Intelligence: New Ability or Eclectic Traits", American Psychological Association, Volume 63, 2008, h. 503-521
- "Emotional Intelligence: Theoretical Findings, and Implications", Psychological Inquiry, Volume 15, 2004, h. 197-215
- Mudzakir, Ahmad. Psikologi Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 1997
- Mutijah, "Prospek Statistik Nonparametrik Metode Brown-Mood dalam Pendidikan Tinggi: Suatu Aplikasi dalam Analisis Regresi Linier Sederhana", Insania, Volume 12, 2007, h. 369-387
- Nasution, Andi Hakim. Pola Induksi Seorang Eksperimentalis, Bogor: IPB Press, 2002
- Pillay, Anand, "Model Theory", Indian Council of Philosophical Research, Volume 27, 2010, h. 127-141
- Rawlings, John O., Pantula, Sastry G., dan Dickey, David A. Applied Regression Analysis: a research tool. New York: Springer-Verlag New York, Inc., 1989
- Riyanto, Yatim. Metodologi Penelitian Pendidikan. Cetakan Kedua. Surabaya: Penerbit SIC, 2001
- Saifuddin, Azwar. (1997). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1997

- Salovey, Peter dan Grewal, Daisy. "The Science of Emotional Intelligence", American Psychological Society, Volume 14, 2005, h. 281-295
- Saphiro, Lawrence E. Mengajarkan Emotional Intelligence Pada Anak. Jakarta : Gramedia, 1998
- Sudjana, Metoda Statistika. Bandung: Tarsito, 2002
- Sudjana, Nana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Cetakan ketujuh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Suryabrata, Sumadi. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998 .
- Syah, Muhibbin. Psikologi Pendidikan dengan Suatu Pendekatan baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Talibo, Ishak W. "Membangun Kecerdasan Emosional dalam Pespektif Pendidikan Islam", Iqra', Volume 5, 2008, h. 13-29
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Tjundjing, Sia. "Hubungan Antara IQ, EQ, dan QA dengan Prestasi Studi Pada Siswa SMU". Jurnal Anima, Volume 17, 2001, 64-79
- Wilis, Ratna D. Teori-Teori Belajar. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996
- Winkel, WS. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta: Gramedia, 1997

A MENTORING AND PUBLICATION PROGRAM TOWARD THE LECTURERS JOURNALS: CHALLENGES AND CHANGES INTO INDEXED AND REPUTABLE INTERNATIONAL JOURNAL

Aschawir Ali

Dosen STAIN Watampone

Introduction

This research has given the larger access for the lecturers of STAIN Watampone particularly to develop their scientific works. They must develop their insight through writing activity and have information access to join international conferences which have the certain domain of scientific works such as international proceeding books and indexed international journals. Related on this, Marcia Devlin and Alex Radloff (2014:230) stated that the programs resulted in peer-reviewed and other publications, as well as increasing the participants' knowledge and confidence related to academic writing and publishing for certain place and time.

In Indonesia context, there are many academicians community such as TEFLIN international conference that deals with the Teaching English as a Foreign Language, TESOL Indonesia, and the others terms of International conferences in each University level. Then, indexed international journal or peer-reviewed journal is an indexed and reputable journal by Scopus, ERA (Excellence in Research of Australia), ISI (International Scientific Index), Scimagojr (Journal indexed result and journal rank), Scholarly Open Access, Web of Science, Elsevier, EBSCOhost, and MLA (Modern Language Association).

In this matter, publication of scientific papers in scientific journals is one of the

The conditions of scientific works of the lecturers' STAIN Watampone context

The real condition of the scientific works of STAIN Watampone lecturers particularly about international journal has some restrictions. Why it can be occurred in the formal setting. Firstly, it gets influenced on institutional policy, lecturers' orientation and belief, and the original information access about international journals. These have significantly got impact of the recent-research project further. The institutional policy should be well-proportional and professional management in scientific

activity. In this case, it should build up the newest system to have the huge contribution institutionally.

The qualified-research project must have the research-interest mapping, content, competency, performance, assessments, evaluation, and transparency. These components should be synchronized, well-running, and targeting to reach the research goals. Implementing the system above, it has big impacts to the lecturer's orientation and belief. Mostly the lecturers get in "comfort zone" and it has been influenced the lecturers' belief. The facts that journals in this collage have unqualified works nationally or national accredited. This is the evidence of miss-oriented in scientific activities. This systemic impacts were not encourage the lecturers to believe their selves to do the scientific writing activities. The obstacles shew the real context that it should rebuild up, revision, reconsolidation, reenergizing, and reposeful properly and professionally. In order that the information access about index and reputable international journals can be reach for whole the elements campus needed.

The factors of the lecturers' scientific papers development

There were couples of factors the lecturers' scientific works influences. First, using nominal focus group in offline setting had some obstacles such as lecturers' time management, lecturers' competency, lecturers' ideology and identity. These were the indicators that NFG (Nominal Focus Group) technique had used in online setting by using social media and e-mail to accommodate the data, analyze the data, review the data up to acceptable and appropriate articles. Time management to do the NFG activities by using sort of question to strengthen the lecturers' journal that have represented on the online ways. The lecturers had plenty of activities in campus and out of the campus that can accommodate by internet access to deliver kind of the data needed and interest to stabilize and encourage this project. In social media such as What's Up (WA) has represented on audio and video activities as vital and authentic data. Lecturers' competency become one of the fundamental this project to create sort of the reputable articles.

This competency had great role and responsible to do the best study to fulfill up the articles weaknesses. The track records of the lecturers should be testing by presenting their articles on international seminar or conferences. This academic setting was become evidence to measure the capacity and quality of their works. Ideology and identity of lecturers had the own domain that also had related on the believeness of the lecturers to perform the original journals. The fact that had been influenced the lecturers' ideology to be the scientist and professional learners. Lecturer term have two domain primarily. First, they are scientist and second they are professional man. Comfort zone has been huge systemic impact for the lecturers to move on the futuristic and adventuristic learners. The

opportunity setting had been offered to do the works normatively and ceremonial project only. Therefore, the lecturers' identities become destructive personally and have big impact for the academic environment. Students and lecturers become asset of the campus which had influenced of purity, vision and mission in one institution. The institution identity becomes paradox, absurd, and need to revitalization to be research-college orientation.

The lecturers' work with the locally-developed scientific papers

Starting from institution system that should have intention and attention to the journal domains and prefer the professional and proportional lecturers to hand over all the articles problems. The institution has power to overcome this problems, putting on the right man to the right place, budgeting aid, rebuild up the system, transparency, and evaluating the articles journey. Financial matter that has not been main obstacles again, as a real evidence that the government has supported the lecturers to do the research project within the real concept and system under religion minister affairs particularly about research field centralistically. The centralistically research project has own powerful and all the journals will evaluate in certain place and professional reviewing process.

Locally-developed scientific papers have been implementing for long time in academic setting since STAIN Watampone exist. The encouragement and serious of this project should be primarily oriented. The base reason for this case is classical problem. Budgeting is vital element for subsidizing this academic activity. No one journals of STAIN Watampone have national accreditation level. This is kind of striking forward to support and enlightening the academic works journey to be more reliable and sample toward national and international journal. In the observing process, it has afforded step by step to be acceptable journal in national scale. Hopefully, in the future time, this project can be translated into English and all the elements of this study can be collaborated and fulfilled it properly and professionally.

Conclusion

Based on the finding and discussion, the researcher puts forward conclusion as follows:

Choosing the language for appropriate audience. Scientific writing typically requires a formal and professional tone. The revising process is the great steps to modify the scientific writing of the lecturers become the proper scientific work. In this process, it introduces the authorizing and supervising process of works. Lecturer's article becomes an reputable or indexed article if he/she gain the great target and fulfill the research activity in the campus locally, nationally, and internationally level. Therefore, it needs focus on the proper methodology to do this project. It

starts in research design namely instructional design and followed by the method of nominal focus group in offline and online setting. The part of this research and more specific in “knife” analysis is qualitative content analysis. And the result of this research is primarily urgent to aid the academic world particularly about the research affairs. This result hope that has big implication to the lecturers, teachers and students-research world.

This academic institution with sentences level issues, additional tips, tone and formally in academic writing. Hopefully the lecturers get engage and dynamic discipline about their academic writing life. Therefore, the researcher should take this research based on the lecturers’ journal in proceeding form which has been in peer-reviewed process.

Suggestion

Considering the conclusion above, the researcher gives some suggestions as follows:

1. English lecturers and teachers should be creative to create and manage the materials for the process of learning and teaching English to the students such as by using English academic lecturers’ writing that was proved and develop for the writing skill in narrative writing knowledge discipline.
2. English lecturers and teachers should give opportunities, motivations, and alternative ways in teaching English writing to enhance their writing proficiency such as by using lecturers’ work by using data article that was proved as interesting visual material and applicable in learning English as Foreign Language in the class academically.
3. The researcher expects that English teacher can apply the English pictures in learning and teaching English as Foreign Language in the class. Then, since the researcher has some restrictiveness in this research, the researcher suggests to the others researchers to conduct furthermore research related to this problem; particularly, the modes of writing are description, persuasion, and exposition which are not only focused on narrative writing.

Recommended that the references quotes should base on the reputable and indexed publishing such as in Scimagojr (Scholarly Journal Rank) that is proved by Scopus powerful. This is the core distinguishing of the qualified international books and journals around the world. This is also indicated that is the fresh and health references to validate the research project.

BIBLIOGRAPHY

Berk, R. A.. *Survey of 12 Strategies to Measure Teaching Effectiveness*. John Hopkins University. USA. Retrieved from <http://www.isetl.org/ijtlhe/>

- International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*. Vol. 17, Number 1, 48-62. ISSN 1812-9129. 2005
- Bloor, M., Frankland, J., Thomas, M. & Robson, K. *Focus Groups in Social Research* (London, Sage). 2001
- Boice, R.. *Professors as Writers: A Self-Help Guide to Productive Writing*. Stillwater, Oklahoma: New Forums Press. 1990
- Breen, R. L. *A practical Guide to Focus-Group Research*. *Journal of Geography in Higher Education*, 30, 463-475. Routledge. 2006.
- Broglioli, D. et al. *An Introductory Guide for Authors*. Artistic interpretation by Frédérique Swist. IOP Publishing, Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6BE, UK . *New Journal of Physics* 13 123007. Retrieved from <http://www.authors.iop.org>. 2011
- Carey, M. A. & Smith, M. W. *Capturing the Group Effect in Focus Groups: A Special Concern in Analysis, Qualitative Health Research*, 4(1), 123-127. Routledge.1994
- Ellis, T. J., and Levy, Y. *Framework of Problem-Based Research: A Guide for Novice Researchers on the Development of a Research-Worthy Problem*. Nova Southeastern University Graduate School of Computer and Information Sciences Fort Lauderdale, Florida, USA. *Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline* Volume 11, 2008. ellist@nova.edu, levyy@nova.edu. 2008
- Faryadi, Q. *How to Write Your PhD Proposal: A Step-By-Step Guide*. Faculty of Science and Technology Department of Computer Science. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Malaysia. *American International Journal of Contemporary Research* Vol. 2 No. 4; April 2012.
- Hogler R and Gross M. *Journal Rankings and Academic Research: Two Discourses About the Quality of Faculty Work*. *Management Communication Quarterly* 23(1): 107-126. Routledge. 2009
- Hopkins, D. and Ahtaridou, E. *A Teacher's Guide to Classroom Research, Fourth Edition*. McGrew Hill Company: Open University Press. USA. 2008
- Johnson, A. *It's Good to Talk: The Focus Group and The Sociological Imagination*. *Sociological Review*, 44(3), 517-538. Routledge. 1996
- Jones, J. H. *A Style Guide for Scientific Research Papers*. Stanford University. 2005.
- Kitzinger, J. *The Methodology of Focus Groups: The Importance of Interaction Between Research Participants*. *Sociology of Health and Illness*, 16(1), 103-121. Routledge. 1994a.
- Kitzinger, J. *Introducing Focus Groups*, *British Medical Journal*, 311, 299-302. Routledge.1995.
- Liao, P., and Witsil, A. 2008. *A Practical Guide to Opportunity Assessment Method*. RTI Press. USA.

- Lomax, P., & McLeman, P. *The Uses and Abuses of Nominal Group Technique in Polytechnic Course Evaluation*. *Studies in Higher Education*, 9, 183–190. Routledge. 1984
- Marcia Devlin & Alex Radloff. *A Structured Writing Programme for Staff: Facilitating Knowledge, Skills, Confidence and Publishing Outcomes*, *Journal of Further and Higher Education*, 38:2, 230-248, DOI: 10.1080/0309877X.2012.722194. Routledge. 2014.
- Margareta Sandström Kjellin. *Focus group dialogues as a method for identifying a school's developmental needs*. *European Journal of Teacher Education*, 31:4, 379-388, DOI: 10.1080/02619760802420818. Routledge. 2008
- Marlene Z. Cohen et al. *Scientific Impact: Opportunity and Necessity*. Western Journal of Nursing Research. Sage Publication. 2010.
- McGrail, M.R., C.M. Rickard, and R. Jones. *Publish or perish: A systematic review of interventions to increase academic publishing rates*. *Higher Education Research & Development* 25, no. 1: 19–35. 2006
- Morss, K., and R. Murray. *Researching Academic Writing within a Structured Programme: Insights and Outcomes*. *Studies in Higher Education* 26, no. 1: 35–52. Routledge. 2001
- Nestel, D., Ivkovic, A., Hill, R. A., Warrens, A. N., Paraskevas, P. A., McDonnell, J. A., & Browne, C. *Benefits & Challenges of Focus Groups in the Evaluation of a New Graduate Entry Medical Programme*. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 37, 1–17. Routledge. 2012.
- Parker, A., & Tritter, J. *Focus Group Method & Methodology: Current Practice & Recent Debate*. *International Journal of Research & Method in Education*, 29, 23–37. Routledge. 2006.
- Porter, J. *Be Careful How You Ask! Using Focus Groups & Nominal Group Technique to Explore the Barriers to Learning*. *International Journal of Research & Method in Education*, 36, 33–51. Routledge. 2013
- Qian, J., and E. Krugly-Smolka. "Chinese Graduate Students' Experiences with Writing a Literature Review." *TESL Canada Journal* 26 (1): 68–86. Routledge. 2008
- Varga-Atkins, T., & McIsaac, J. *Using the Nominal Group Technique with Clickers to Research Student Experiences of E-learning: A Project Report*. Written for the ELESIG Innovations in Education and Teaching International 11Small Grants Scheme. Liverpool: University of Liverpool. Retrieved from <http://slideshare/1iHXXgG>. Routledge. (2011a).
- Warburton, J., and P. Macauley. "Wrangling the Literature: Quietly Contributing to HDR Completions." *Australian Academic & Research Libraries* 45 (3): 159–175. doi:10.1080/00048623.2014.928992. Routledge. 2014.

- Wilhelm, W. J., and D. Kaunelis. "Literature Reviews: Analysis, Planning, and Query Techniques." *Delta Pi Epsilon Journal* 47 (2): 91-106. Routledge. 2005.
- Wilkinson, D.. *The Researcher's Toolkit: The Complete Guide to Practitioner Research*. Routledge Falmer. London. 2000
- Wilson, V. *Focus Groups: A Useful Qualitative Method for Educational Research?* *British Educational Research Journal*, 23, 209-224. Routledge. 1997.
- Writing for International Publication: An Interview with Nugrahenny T. Zacharias, Handoyo P. Widodo and Willy A. Renandya*. Board Editors: TEFLIN Journal
- Yongyan Li. "Publish SCI papers or no degree": Practices of Chinese Doctoral Supervisors in Response to the Publication Pressure on Science Students, *Asia Pacific Journal of Education*, DOI: 10.1080/02188791.2015.1005050. Routledge. 2015.

**PENGARUH KEMAMPUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN
JIWA WIRAUUSAHA KEPALA MADRASAH TERHADAP
KINERJA GURU MADRASAH ALIYAH
DI KOTA WATAMPONE**

H. M. Rapi

Dosen STAIN Watampone

Pendahuluan

Madrasah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Madrasah yang lahir dari komunitas masyarakat yang memiliki komitmen keagamaan (*religiousity*) dalam kegiatan pendidikannya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas agama Islam mengemban misi yaitu; sebagai lembaga pencerdasan masyarakat muslim Indonesia, sebagai lembaga pelopor peningkatan kesejahteraan masyarakat muslim Indonesia, dan sebagai lembaga pemeliharaan dan pengembang nilai-nilai dan budaya keislaman bagi masyarakat muslim.¹

Di sini, tampak jelas bahwa tujuan pendidikan madrasah adalah mengantarkan peserta didik untuk mencapai ketangguhan spiritual, keunggulan intelektual, dan kematangan emosional secara lebih baik, seperti yang dilukiskan Allah dalam QS. al-Mujalah/58:11.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa ilmu yang dimiliki seseorang berperan besar untuknya dalam mencapai ketinggian derajat dibandingkan dengan yang lain. Menurut M. Qurais Shihab yang dimaksud dengan *alladzina utu al-'ilma* yang diberi pengetahuan adalah mereka yang beriman

¹Departemen Agama RI, *Manajemen Madrasah Aliyah* (Jakarta: PPAI Tingkat Menengah Dirjen Binbaga Islam, 1998), h. 7

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 2002), h. 7

dan menghiasi diri dengan pengetahuan. Dengan demikian, derajat seseorang bisa menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai Ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan, atau tulisan maupun dengan keteladanan.³

Apa yang terkandung dalam penjelasan ayat tersebut di atas, semakin mengokohkan eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersendikan nilai-nilai ajaran agama Islam serta mengedepankan nilai-nilai budaya melalui keteladanan para guru.

Kecenderungan dewasa ini, madrasah semakin menunjukkan eksistensinya dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Pertumbuhan madrasah patut diapresiasi dan diperhitungkan dalam kontalasi pendidikan nasional. Betapa tidak keberadaan lembaga pendidikan madrasah mulai dari *Raudathul athfal* (RA) sampai Madrasah Aliyah (MA) telah mencapai 67.970 lembaga dengan menampung 7.498.201 peserta didik berkontribusi sekitar 20% terhadap APK nasional, sesuatu pencapaian yang sangat berarti. Selain itu, posisi madrasah yang mayoritas berada di daerah pedesaan, pinggiran bahkan terpencil telah menempatkannya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki andil cukup besar terhadap perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah pedesaan. Sebagaimana data Emis 2013, peserta didik di madrasah yang berasal dari golongan ekonomi lemah dengan penghasilan < 1 juta adalah sebanyak 68% dari jumlah total anak yang mencapai 7 juta lebih. Karena itu, sangat tidak pantas bila madrasah yang memiliki andil sangat besar terhadap pembangunan bangsa ini dimarginalkan.⁴

Pengambilan Keputusan

Pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan inti dari kepemimpinan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang secara sadar harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki para pemimpin dalam setiap organisasi.

Dalam perspektif manajemen organisasi, aktivitas penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) seluruhnya merupakan kegiatan pengambilan keputusan. Sangat tepat ungkapan yang mengatakan bahwa, kehidupan sehari-hari seseorang eksekutif, manajer, kepala, ketua, direktur, rektor, bupati, gubernur, menteri, panglima, presiden, atau pejabat apapun, sesungguhnya adalah kehidupan yang selalu bergemul dengan pengambilan keputusan.¹

³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasial al-Qur'an* (Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 79

⁴Dedi Djubaedi, *Madrasah Untuk Indonesia Masa Depan* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Kementerian Agama RI, 2012), h. 9

¹ Jonathan Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 47

Pendapat di atas menunjukkan betapa pentingnya pengambilan keputusan bagi kelangsungan hidup organisasi. Itulah sebabnya, mengapa kemampuan mengambil keputusan merupakan indikator utama yang menjadi tolak ukur untuk melihat efektifitas kepemimpinan seseorang, baik yang telah maupun yang akan menduduki jabatan pimpinan dalam suatu organisasi. Apa sesungguhnya defenisi keputusan dan pengambilan keputusan itu? Memang terdapat sejumlah pandangan yang dikemukakan oleh beberapa pakar dan ahli manajemen tentang hal itu, di antara pendapat Christopher Hodgkinson yang menyatakan bahwa "*decision making is process whereby one arrives at a cois*" (mengambil keputusan adalah sebuah proses untuk sampai pada suatu pilihan).² Maringan Masry Simbolon berpendapat bahwa, keputusan ialah suatu tindakan pemilihan di mana pimpinan menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu.³ Tjipto dan Diana memberikan pengertian bahwa pengambilan keputusan merupakan proses atau mekanisme di mana serangkaian fakta kegiatan dipilih dari antara sejumlah kegiatan yang ada.⁴ Pengambilan keputusan sebagai proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi berhubungan dengan penyelesaian suatu permasalahan.⁵ Sedangkan Gibson berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemikiran dan pertimbangan yang mendalam yang dihasilkan dalam sebuah keputusan.

Mengacu pada defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah serangkaian kegiatan atau mekanisme memilih suatu alternatif cara bertindak melalui cara-cara yang efisien setelah dilakukan berbagai pertimbangan secara mendalam agar dapat sampai kepada suatu pilihan yang terbaik.

Teknik dan Prosedur Pengambilan Keputusan

Pentingnya tahapan dalam pengambilan keputusan, dikemukakan oleh para ahli, antara lain Manullang, bahwa untuk memperoleh sebuah keputusan yang efektif, sekurang-kurangnya harus melalui enam tahap. Masing-masing tahap memiliki metode dan perangkatnya sendiri. Jika salah satu tahap ditiadakan atau tidak dilaksanakan dengan sempurna, keseluruhan proses akan rusak dan kemungkinan bagi kegagalan akan bertambah. Tahapan tersebut adalah; (1) identifikasi masalah (2) merumuskan masalah atau mencari alternatif, (3) membandingkan atau mengevaluasi beberapa alternatif pemecahan (4) mengidentifikasi akibat atau konsekuensi, (5) memilih alternatif (menetapkan pilihan) terbaik, dan

²Christopher Hodgkinson, *Administratif Philosophy Value and Motivation in Administrative Life* (Trowbridge: Great Britain Redwood Books Ltd, 1996), h. 50

³Maringan Masri Simbolong, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen* (Cet. I. Bekasi: Ghalia Indonesia, 2004), h. 83

⁴Fandi Tjipto dan Diana Anastasia, *Total Quality Management* (Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 182

⁵Jonatan Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik*, .h. 47

(6) berpegang kepada keputusan (implementasi) dan evaluasi akibat-akibat dari pengambilan keputusan.⁶ Pendapat senada dikemukakan Stoner, bahwa proses dasar pengambilan keputusan mencakup; (1) pendiagnosaan, (2) pembatasan masalah (3) penentuan sumber masalah, (4) pengembangan dan evaluasi alternatif pemecahan yang paling memuaskan, (5) implementasi keputusan.⁷

Berdasarkan pandangan tersebut di atas tergambar bahwa untuk menghasilkan keputusan yang ideal, sebaiknya dilakukan melalui tahapan-tahapan khusus. Tujuannya adalah agar segala konsekuensi dari lahirnya sebuah keputusan dapat dipertimbangkan secara matang.

Adapun proses pengambilan keputusan rasional menurut T. Hani Handoko, sekurang-kurangnya mencakup tiga tahap yaitu;

- 1) Identifikasi dan diagnosis masalah
Para manajer sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit ditemukan, atau bahkan sering hanya mengidentifikasi gejala masalah bukan penyebab mendasar. Bila ingin memperbaiki situasi, maka pertama-tama harus menemukan apa yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya dan kemudian menentukan bagian-bagian masalah yang harus dipecahkan.
- 2) Pengumpulan dan analisis data
Setelah permasalahan-permasalahan dirumuskan, maka harus memutuskan langkah-langkah selanjutnya, yaitu menentukan data apa saja yang akan dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat.
- 3) Pengembangan alternatif
Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan para manajer terhindar dari kecenderungan mengambil keputusan selalu cepat dan membuat kemungkinan pencapaian keputusan yang lebih efektif.
- 4) Evaluasi alternatif-alternatif
Setelah mengembangkan sekumpulan alternatif, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menilai efektivitasnya.
- 5) Pemilihan alternatif terbaik
Pemilihan alternatif merupakan evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia disertai pertimbangan yang mendalam.
- 6) Implementasi keputusan
Implementasi keputusan menyangkut lebih dari sekedar pemberian perintah. Para pemimpin harus menetapkan anggaran atau *schedule* kegiatan, mengadakan dan mengalokasikan sumber daya-sumber daya yang diperlukan, serta menugaskan tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tugas-tugas tertentu.
- 7) Evaluasi hasil-hasil keputusan

⁶Gibson Ivancevich dan Donnelly, *Organisasi dan Manajemen: Prilaku-Struktur-Proses* (Edisi 9) terjemahan: Zuhad Ichayauddin (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 142

⁷M. Manullang, *Pedoman Praktis Pengambilan Keputusan* (Yogyakarta: BPFE, 1994), h. 8

Implementasi keputusan harus dimonitor terus-menerus. Harus dilakukan evaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan.⁸

1. Kepala Madrasah Sebagai *Decision Making* (Pengambil Keputusan)

Kepala madrasah sebagai pengambil keputusan (*decision making*), terletak pada fungsi dan peranan manajerialnya. Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan, kepala madrasah harus mengetahui cara pengambilan keputusan yang efektif, diantaranya: (1) lakukan survei dengan skala yang besar, (2) cari tindakan alternatif dengan pilihan banyak, (3) cari informasi baru yang berhubungan dengan alternatif-alternatif yang dipilih, (4) pertimbangkan informasi baru yang diperoleh di dalam memberikan penilaian terhadap alternatif yang dipilih, (5) pertimbangkan segi positif dan negatif dari alternatif yang telah dipilih sebelum mengambil keputusan, (6) uji secara hati-hati biaya dan resiko dari efek negatif dan positif, (7) dan buatlah langkah detail melaksanakan dan memonitor alternatif yang dipilih.⁹

Kesalahan dalam mengambil keputusan akibat sejumlah prosedur tidak dilaksanakan dengan baik, akan berdampak pada lahirnya keputusan yang tidak berkualitas. Keadaan ini dipastikan membawa dampak pada menurunnya kinerja organisasi secara keseluruhan. Karena itu, kemampuan pengambilan keputusan menjadi instrumen yang menentukan kinerja seorang pemimpin. Aksioma ini berlaku bagi pemimpin dalam organisasi pendidikan. Kepala madrasah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya di lembaga pendidikan yang dipimpinnya, harus memahami secara mendalam tahapan-tahapan dalam mengambil keputusan.

Pendapat senada dikemukakan William F. Glueck dan Laurence seperti dikutip Farida Hanun, bahwa seorang kepala madrasah dalam pengambilan keputusan perlu menguasai proses pengambilan keputusan dengan menggunakan teori dan berbagai pendekatan. Lebih jauh disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran antara pendekatan intuitif, analitis dan politis.¹⁰

Berdasarkan kajian berbagai teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan kepala madrasah adalah tindakan dan perilaku kepala madrasah dalam memutuskan suatu masalah dengan memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan fakta/informasi.

Indikator yang dijadikan acuan untuk mengukur kemampuan tersebut adalah: (1) kemampuan dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis

⁸Tani Handoko, *Manajemen* (Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 134

⁹Kementerian Agama RI, *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan (Volume 6 Nomor 1)*. (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2008), h. 87

¹⁰Kementerian Agama RI, *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, h. 89

masalah; (2) kemampuan pengumpulan dan analisis data yang relevan; (3) kemampuan mencari dan mengembangkan alternatif tindakan; (4) kemampuan menganalisis dan mengevaluasi alternatif; (5) kemampuan menilai alternatif terbaik; (6) kemampuan memilih alternatif terbaik (mengambil keputusan); (7) kemampuan mengimplementasi keputusan, dan (8) kemampuan memonitoring hasil-hasil implementasi atau pelaksanaan keputusan.

Kemampuan Pengambilan Keputusan Kepala Madrasah

Rentang skor teoritik individu responden untuk variabel kemampuan pengambilan keputusan kepala madrasah, berdasarkan banyaknya butir pernyataan dalam instrument yang digunakan adalah 27 sampai dengan 135. Sedangkan rentang skor empirik atau skor hitung berdasarkan data yang diperoleh terdistribusi dari 62,00 sampai dengan 135,00. Setelah dianalisis didapatkan ukuran pemusatan dan penyebaran berupa *mean* sebesar 101,06, *median* 100,00, *modus* 92,00, serta standar deviasi sebesar 11,504.

Berdasarkan analisis data, didapatkan jumlah skor hitung sebesar 15765, sedangkan skor kriterium adalah 21060. Dengan demikian kualitas pencapaian nilai kemampuan pengambilan keputusan kepala madrasah dibandingkan dengan skor kriterium adalah $15765/21060 \times 100\% = 74,86\%$ dari nilai yang diharapkan. Capaian tersebut secara kualitatif tergolong klasifikasi cukup. Sebaran skor di antara *mean* dan standar devisa disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Pengambilan Keputusan

No	Skala Angka	Skala (1-10)	Klasifikasi	Frekuensi	Persen
1	>121,00	9 - 10	Amat Baik	10	6,41
2	109,00 - 121,00	7 - 8	Baik	29	18,59
3	96,00 - 108,00	5 - 6	Cukup	68	43,59
4	83,00 - 95,00	3 - 4	Kurang	40	25,64
5	<83,00	1 - 2	Sangat Kurang	9	5,77
	Jumlah			156	100,00

Sumber: Hasil analisis data

Sebaran penilaian responden terhadap kemampuan pengambilan keputusan kepala madrasah di antara *mean* (rata-rata hitung) sebagaimana tersaji dalam tabel di atas, didapatkan gambaran bahwa sebanyak 68 orang (43,49%) responden memberi nilai dalam interval nilai rata-rata, sebanyak 39 orang (25,00%) memberi nilai di atas *mean* atau skor rata-rata atau klasifikasi nilai amat baik dan baik, dan sebanyak 49 orang (31,41%) memberi skor di bawah skor rata-rata, atau pada rentang kategori nilai kurang dan sangat kurang. Berdasarkan pencapaian skor hitung terhadap

skor kriterium, tergambar bahwa kualitas kemampuan Kepala Madrasah Aliyah di kota Watampone dalam mengambil keputusan menurut penilaian responden tergolong klasifikasi cukup.

Apabila dilihat masing-masing persentase pencapaian skor hitung terhadap skor kriterium untuk setiap dimensi (tabel 4.1) dari 7 (tujuh) dimensi yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemampuan kepala madrasah dalam mengambil keputusan sebagaimana diuraikan di atas, pencapaian tertinggi adalah pada dimensi pengumpulan dan analisis data sebesar 81,51% (kategori baik), sedangkan pencapaian terendah adalah pada dimensi kemampuan dalam identifikasi dan diagnosis masalah dengan pencapaian sebesar 63,73% (kategori kurang).

Kewirausahaan

Secara konseptual, pengertian wirausaha oleh para ahli cukup beragam. Jhon J. Kao mengatakan bahwa wirausaha adalah *a person who undertakes a wealth-creating and value adding process, through incubating ideas, assembling resources and making things happen*. Wirausaha adalah seseorang yang mampu menghasilkan atau menciptakan nilai tambah melalui pematangan ide-idenya dan menyatukan sumberdaya yang dimilikinya serta mewujudkannya.¹¹

Defenisi tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang *entrepreneur* adalah, orang yang kreatif, berani mengambil resiko, inovatif dalam menggunakan sumber daya, selalu aktif dalam mengambil peran dan berkreasi untuk mendapatkan yang diimpikannya. Jadi, seseorang wirausaha selalu berpikir untuk mencari peluang, memanfaatkan peluang, serta menciptakan peluang yang dapat memberikan keuntungan. Wirausaha mencakup bagaimana melakukan sesuatu, menemukan cara kerja yang baru, atau melakukan sekumpulan tindakan atau keahlian tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan kata lain seseorang yang berjiwa wirausaha adalah yang selalu dapat memanfaatkan setiap peluang dengan sebaik-baiknya, tidak melewatkan setiap waktu tanpa usaha dan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Jiwa Wirausaha Kepala Madrasah

Implementasi nilai-nilai wirausaha dalam pengelolaan pendidikan sangat penting, sebab bagaimanapun juga seluruh *stake holders* madrasah mengharapkan adanya upaya perbaikan mutu dengan memanfaatkan seluruh sumber daya secara optimal. Kepala madrasah sebagai pihak yang memegang kendali, harus mampu melihat setiap peluang yang ada untuk memulai suatu usaha perbaikan secara berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip kewirausahaan bagi kepala sekolah sebagaimana disusun Direktorat Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: bertindak kreatif dan

¹¹Jhon J. Kao, *Entrepreneurship, Sreativity and Organization; Tex, Cases and Reading* (Englewood Cliffs, Harvard Bussiness School- Prentice Hall, 1989), h. 84

inovatif, pemberdayaan potensi sekolah, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan warga sekolah. ketiga hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Tindakan kreatif dan inovatif, meliputi; (1) menciptakan pembaruan, (2) merumuskan arti dan tujuan perubahan (inovasi) sekolah, (3) menggunakan metode, teknik dan proses perubahan sekolah, (4) menciptakan dan memanfaatkan peluang, (5) menciptakan program inovasi dan kreativitas, (6) menciptakan keunggulan komparatif, (7) mempromosikan sekolah.
2. Memberdayakan potensi sekolah, meliputi; (1) merencanakan program pemberdayaan potensi sekolah, (2) melaksanakan kegiatan pemberdayaan potensi sekolah, (3) menjalin kerja sama dengan masyarakat baik lembaga pemerintah maupun swasta.
3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan warga sekolah, melalui aktivitas; (1) menumbuhkan iklim yang mendorong kebebasan berfikir untuk menciptakan kreativitas dan inovasi, (2) mendorong warga sekolah untuk melakukan eksperimentasi, perkasa/keberanian moral untuk melakukan hal-hal baru, (3) memberikan *rewards* atas hasil-hasil kreativitas warga sekolah, dan (4) menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan warga sekolah.¹⁶

Menurut Marno, sebagai inovator, kepala madrasah harus: (1) memiliki gagasan baru (proaktif) untuk inovasi dan perkembangan madrasah, atau memilih yang relevan untuk perkembangan lembaganya, (2) kemampuan mengimplementasikan ide yang baru tersebut dengan baik, dan (3) kemampuan mengatur lingkungan kerja sehingga lebih kondusif (pengaturan tata ruang kantor, kelas, perpustakaan, halaman, interior, mushollah atau masjid) untuk bertugas dengan baik.¹⁷

Mengacu pada pandangan tersebut di atas, maka untuk mengungkap sejauh mana kepala madrasah mampu menerapkan prinsip-prinsip wirausaha dalam mengemban tugas dan fungsinya sebagai pemimpin pendidikan, dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi pokok, yaitu kreativitas dan inovasi, kemampuan mengambil resiko, dan pemberdayaan potensi sekolah/madrasah.

Kinerja Guru

Istilah "kinerja" merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai "penampilan", "unjuk kerja", atau "prestasi".¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kinerja diartikan sebagai: sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja.¹⁹

¹⁶Kementerian Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Kepala Sekolah* (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2006), h. 177

¹⁷Marno dan Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Bandung: PT. Refika Adiatma, 2013), h. 39

¹⁸Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* (Yogyakarta: Gaya Media, 2005), h. 191

¹⁹Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 827

Adapun pengertian kinerja menurut pendapat sejumlah pakar berbeda-beda, tergantung sudut pandang masing-masing. Anwar Prabu Mangkunegara mengartikan kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nanang Fattah mendefinisikan kinerja sebagai akumulasi dari kompetensi dan motivasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prestasi kerja atau penampilan kerja (*performance*) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu.²⁰ Sedangkan Irawan, memiliki pandangan tentang kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati dan diukur.

Sejumlah pengertian tentang kinerja yang dikemukakan para ahli tersebut di atas dari sisi redaksi dan penekanan memiliki ciri khas tersendiri. Meskipun berbeda dalam berbagai aspek penekanan, namun tampaknya sepakat bahwa kinerja mengarah kepada apa yang dapat dilakukan seseorang yang menjadi tuntutan pekerjaannya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan pengambilan keputusan Kepala Madrasah Aliyah di Kota Watampone secara kualitatif masih berada pada kategori cukup.
2. Jiwa wirausaha Kepala Madrasah Aliyah di Kota Watampone secara kualitatif tergolong cukup
3. Kinerja guru Madrasah Aliyah di Kota Watampone secara kualitatif tergolong cukup.
4. Hasil uji signifikansi terhadap persamaan garis regresi dugaan adanya pengaruh kemampuan pengambilan keputusan kepala Madrasah Aliyah terhadap kinerja guru berupa analisis varians (uji-F) didapatkan nilai Fhitung sebesar 93,165 > Ftabel pada taraf signifikansi 5% (α 0,05) yakni sebesar 3,910. Nilai tersebut berkesesuaian dengan nilai signifikansi (P) sebesar 0,00 < 0,05. Dengan demikian hipotesis alternatif yang menyatakan "ada pengaruh positif yang signifikan kemampuan pengambilan keputusan kepala Madrasah Aliyah di Kota Watampone" diterima.

Daftar Pustaka

- Asmani, Makmur, *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan*. Yogyakarta: Diva Press, 2013
- Badruzzaman, *et.al. Elektabilitas Satuan Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Makassar: LEPHAS, 2012

²⁰Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 16

- Danim, Sudarwan, *Pengembangan Profesi Guru: Dari Prajabatan, Induksi, ke Profesional Mandiri*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Daryanto dan Muhammad Farid, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Malang: Gava Media, 2013
- Departemen Agama RI, *Manajemen Madrasah Aliyah*. Jakarta: PPAI Tingkat Menengah Dirjen Binbaga Islam, 1998
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1996
- Dedi Djubaedi, *Madrasah Untuk Indonesia Masa Depan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Kementerian Agama RI, 2012
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Handoko, Tani, *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 1998
- Hodgkinson, Christopher, *Administratif Philosophy Value and Motivation in Administrative Life*. Trowbridge: Great Britain Redwood Books Ltd, 1996
- Ivancevich, Gibson dan Donnelly, *Organisasi dan Manajemen: Prilaku-Struktur-Proses* (Edisi 9) terjemahan: Zuhad Ichayauddin. Jakarta: Erlangga, 1997
- Kepempan RI, *Permenegpan dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2010*.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 2002
- Kementerian Agama RI, *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan (Volume 6 Nomor 1)*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Kegamaan, 2008
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2006
- Keban, Yermias T., *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media, 2005
- Kao, Jhon J., *Entrepreneurship, Creativity and Organization; Text, Cases and Reading*. Englewood Cliffs, Harvard Business School- Prentice Hall, 1989
- Kunandar, *Guru Profesional; Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Manullang, M, *Pedoman Praktis Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: BPFE, 1994
- Marno dan Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Refika Adiatma, 2013

- Republik Indonesia, *Undang-undang RI. Nomor 14 Tahu 2005 tentang Guru dan Dosen Beserta Peraturan Pelengkap*. Jakarta: BP. Panca Bhakti Jakarta, 2006
- Satori, Djam'an, *Profesi Keguruan*. Jakarta: Iniversitas Terbuka, 2009
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan san Keserasial al-Qur'an*. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Salusu, Jonathan, *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Gramedia, 2000
- Simbolong, Maringan Masri, *Dasar-dasar Administrasi dan Managemen*. Cet. I. Bekasi: Ghalia Indonesia, 2004
- Tjipto, Fandi dan Diana Anastasia, *Total Quality Management*. Edisi Revisi. Yokyakarta: Andi Offset, 2001
- Winarno, *Pengembangan Sikap Entrepreneurship dan Intrapreneurship*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

MANAJEMEN PEMBELAJARAN DOSEN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASIBELAJAR MAHASISWA PGMI STAIN WATAMPONE

Nurlina

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola manajemen pembelajaran dosen di Prodi PGMI STAIN Watampone. Serta pengaruh manajemen pembelajaran dosen dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa Prodi PGMI STAIN Watampone.

Jenis penelitian yang penulis gunakan kuantitatif deskriptif dengan metode survei serta menggunakan analisis regresi linear. Objek pengambilan data di Prodi PGMI STAIN Watampone. Sebagai informan yaitu mahasiswa Prodi PGMI sebanyak 30 orang dengan teknik pengambilan sampel secara acak dalam *simple random sampling* (sederhana) beserta dosen Prodi PGMI sebagai penambah/penunjang informasi. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara semi struktur (komunikasi dua arah) sebagai pengambilan penambah data informasi, dilanjutkan penyebaran angket (*in depth interview*) kepada mahasiswa PGMI. Sumber data yakni data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian bahwa pola manajemen pembelajaran dosen Prodi PGMI terhadap mahasiswa Prodi PGMI STAIN Watampone pola manajemen pembelajaran dimulai dari perencanaan pembelajaran, mengorganisir sumber daya pembelajaran, pengelolaan kelas, kepemimpinan dalam pembelajaran, sampai pada evaluasi pembelajaran berjalan lancar dengan nilai interval berada diantara interval 41-43 dengan *frequency* 10 responden dengan presentase 33,33% pada kategori cukup. Sedangkan motivasi belajar mahasiswa Prodi PGMI dalam pembelajaran mulai dari factor intrinsic maupun faktor ekstrinsik sangat tinggi atau kuat, dengan nilai interval berada diantara interval 44-49 dengan *frequency* 12 responden dengan presentase 40,00% pada kategori sangat baik. Sehingga dengan adanya pola manajemen pembelajaran dosen Prodi PGMI yang terlaksana sesuai prosedur dengan mengacu pada teori fungsi-fungsi manajemen pembelajaran maka ditemukan hasil bahwa manajemen pembelajaran dosen Prodi PGMI mempunyai pengaruh yang baik terhadap motivasi belajar mahasiswa PGMI.

Kata Kunci: *Manajemen, pembelajaran, motivasi.*

Pendahuluan

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini salah satunya adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan Tinggi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi dosen, pengadaan buku dan media, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen kampus. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan manajemen dalam pembelajaran. Memasuki era perkembangan globalisasi yang sangat cepat maka bangsa Indonesia semakin sadar akan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu pada seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kualitas tentu diperlukan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan profesional dalam ilmu pengetahuan, teknologi serta kecerdasan spritual. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang demikian tentu prosesnya melalui organisasi pendidikan, dengan manajemen pembelajaran yang baik dalam pendidikan sebagai program kerja yang sangat vital untuk diaplikasikan dalam lembaga pendidikan.

Karena itu manajemen pembelajaran dalam pendidikan sangat penting dan perlu dikembangkan karena hanya melalui pendidikan yang bisa menghadapi dan menjawab tantangan dalam membangun bangsa dan negara yang kuat dan cerdas. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan dunia pendidikan dengan mengeluarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan sistem pendidikan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempertegas bahwa pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas sumber daya manusia Indonesia. Serta memperluas dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pemerintah melakukan berbagai usaha antara lain dengan memperluas kesempatan belajar.

Pendidikan merupakan penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia pada pembangunan bangsa. Maka rendahnya mutu pendidikan akan menghambat penyediaan sumber daya manusia untuk

mempunyai keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa Indonesia di berbagai sektor. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain pada masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi manajemen pembelajaran dalam organisasi pendidikan. Dalam pengelolaan proses pembelajaran dosen memiliki tugas dan kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran termasuk melakukan kegiatan tindak lanjutnya.

Salah satu faktor penyebab rendahnya kompetensi sumber daya manusia terhadap lulusan Perguruan Tinggi adalah tingkat kemampuan dosen dalam melaksanakan proses manajemen pembelajaran, itu bisa tercermin dari gaya mengajarnya. Aspek yang harus dimiliki seorang dosen dalam mengajar yaitu niat, tanggung jawab, komitmen, kiat, giat serta doa untuk membawa mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran tercapai maka tentu diperlukan manajemen pembelajaran yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal pola manajemen pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran, mengorganisir sumber daya pembelajaran, pengelolaan kelas, kepemimpinan dalam pembelajaran, sampai evaluasi.

Manajemen Pembelajaran

a. Pengertian Manajemen

Kegiatan manajemen pembelajaran atau pengelolaan pembelajaran dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan penilaian. Suasana pembelajaran akan mampu menciptakan lingkungan akademis yang harmonis dan produktif, jika fungsi-fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Kesesuaian antara implementasi fungsi-fungsi manajemen pembelajaran dengan tugas-tugas sumber daya dosen sangat penting bagi pengembangan lingkungan akademik yang tergabung dalam satuan organisasi pendidikan.

Karena manajemen merupakan proses yang khas bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan semua sumber daya yang ada. Karena manajemen sebagai suatu rangkaian aktifitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Jadi pengertian manajemen dikemukakan Parker (Stoner & Freeman, 2000) ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*). Sedang Sufyarma mengutip dari Stoner mengatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.³²

Dalam teori Manajemen Islam seseorang yang melakukan kebaikan akan diberi ganjaran di dunia dan akhirat. Ganjaran di dunia ini termasuk keuntungan material, dan pengakuan sosial, dan kesejahteraan psikologis dan di hari kemudian berupa kesenangan dan kemakmuran dari Allah S.W.T. Seseorang juga akan diberi pahala atas niat yang baik.³³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif artinya bahwa tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar dan terorganisir sesuai dengan jadwal.

b. Pengertian Pembelajaran

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Belajar pada hakekatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada diri individu yang sedang belajar. Dari konsep belajar muncul istilah pembelajaran.

Pembelajaran sebagai suatu rangkaian kegiatan (kondisi, peristiwa, kejadian, dsb) yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi pembelajar, sehingga proses belajarnya dapat berlangsung mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan oleh pendidik, seperti halnya dengan konsep mengajar.

Pembelajaran mencakup semua kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia. Pembelajaran mencakup pula kejadian-kejadian yang diturunkan oleh bahan-bahan cetak, gambar, program radio, televisi, film, slide maupun kombinasi dari bahan-bahan itu. Bahkan saat ini berkembang pembelajaran dengan pemanfaatan berbagai program komputer untuk pembelajaran atau dikenal dengan *e-learning*.

³²Sufyarma, Kapita Selektta Manajemen Pendidikan (Bandung: CV. Alfabeta, 2004).

³³Husaini usman, Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan, edisi 3 (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 5.

Karena itu pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Pola Manajemen Pembelajaran Dosen Prodi PGMI STAIN Watampone.

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pola manajemen pembelajaran dosen prodi PGMI melalui teorimanajemen pembelajaran yaitu dari perencanaan pembelajaran, mengorganisir sumber daya pembelajaran, pengelolaan kelas, kepemimpinan dalam pembelajaran, sampai evaluasi pembelajaran dalam mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif artinya bahwa tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan dalam pembelajaran, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar dan terorganisir sesuai dengan jadwal dari pembelajaran.

Berdasarkan data informasi yang telah penulis dapatkan dari lapangan melalui penyebaran angket kemudian data di olah dengan metode analisis statistik, maka pola manajemen dosen tentang dari perencanaan pembelajaran, mengorganisir sumber daya pembelajaran, pengelolaan kelas, kepemimpinan dalam pembelajaran, sampai evaluasi pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembelajaran.

Merencanakan pembelajaran merupakan tugas dosen termasuk dosen yang ditempatkan di Prodi PGMI di bawah naungan lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Adapun salah satu fungsi manajemen pembelajaran yaitu perencanaan pembelajaran. Karena itu perencanaan yang dirancang oleh dosen dalam pembelajaran akan mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mencakup aktivitas memperkirakan kebutuhan belajar, memiliki pokok bahasan, tugas dan tujuan umum, meneliti ciri pembelajaran, menentukan isi pembelajaran dan analisis tugas dalam mencapai tujuan pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, memilih media, merinci pelayanan penunjang, mengevaluasi hasil belajar, dan memberikan uji awal untuk menentukan persiapan pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran lebih inovatif dan

menyenangkan sehingga kemampuan mahasiswa lebih meningkat sehingga ilmu yang peroleh dapat diaplikasikan dengan baik dalam masyarakat setelah menjadi output dari lembaga pendidikan.

Keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan oleh perencanaan yang matang. Karena melalui perencanaan yang dilakukan dengan baik, maka setengah keberhasilan sudah dapat tercapai, setengahnya lagi terletak pada pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perencanaan, dosen dapat menentukan strategi atau langkah secara sistematis untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Karena keberhasilan dari suatu kegiatan sangat ditentukan oleh perencanaan maka perencanaan pembelajaran dapat berperan sebagai acuan bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. Sebagai landasan pokok bagi dosen dan mahasiswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan.

Maka perencanaan pengajaran dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahan serta media atau alat apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut.

Agar prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembelajaran oleh dosen maka perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan apa yang mau dilakukan oleh dosen, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran.
- 2) Membatasi sasaran atas dasar tujuan intruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran.
- 3) Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran.
- 4) Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
- 5) Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan.

Berikut beberapa gambaran pola manajemen pembelajaran dosen terhadap mahasiswa prodi PGMI dalam perencanaan pembelajaran dari hasil pengolahan data informasi yang diperoleh melalui penyebaran angket dilapangan.

- a. Deskripsi dosen dalam membuat analisis tugas dalam hal menganalisis kebutuhan pembelajaran mahasiswa Prodi PGMI melalui perencanaan pembelajaran.

Tabel 4.1

Kategori	Frekuensi	Proporsi(%)
1	1	3,33
2	6	20,00
3	15	50,00
4	8	26,67
5	0	0,00
Jumlah	30	100

Tabel 4.1 di atas merupakan gambaran tentang pola manajemen dosen dalam membuat analisis tugas dalam hal menganalisis kebutuhan pembelajaran mahasiswa Prodi PGMI melalui perencanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil pengolahan data bahwa proporsi yang tertinggi berada pada kategori 3 dengan jumlah proporsi sebanyak 50% serta frekuensi tertinggi 15 dari beberapa frekuensi sebanyak 30 responden, sehingga penulis deskripsikan bahwa dosen dalam melakukan analisis kebutuhan dalam pembelajaran mahasiswa di Prodi PGMI hasilnya termasuk cukup karena proporsi tertinggi berada pada kategori 3.

- b. Deskripsi dosen dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar mahasiswa Prodi PGMI melalui perencanaan pembelajaran.

Tabel 4.2

Kategori	Frekuensi	Proporsi%
1	0	0,00
2	7	23,33
3	19	63,33
4	4	13,33
5	0	0,00
Jumlah	30	100

Tabel 4.2 di atas merupakan gambaran mengenai pola manajemen dosen dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar mahasiswa Prodi PGMI melalui perencanaan pembelajaran. Hasil olahan data informasi bahwa proporsi yang tertinggi yaitu 63,33% yang berada pada kategori 3 dengan frekuensi tertinggi 19 dari beberapa frekuensi yaitu 30 responden, sehingga penulis dapat mendeskripsikan bahwa dosen dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar mahasiswa Prodi PGMI melalui perencanaan pembelajaran termasuk cukup karena proporsi tertinggi berada pada kategori 3.

- c. Deskripsi dosen dalam menulis tujuan belajar mahasiswa Prodi PGMI melalui perencanaan pembelajaran.

Tabel 4.3

Kategori	Frekuensi	Proporsi%
1	1	3,33
2	5	16,67
3	9	30,00
4	15	50,00
5	0	0,00
Jumlah	30	100,00

Tabel 4.3 di atas merupakan gambaran tentang pola manajemen dosen dalam menulis tujuan belajar melalui perencanaan pembelajaran mahasiswa Prodi PGMI. Hasil olahan data bahwa proporsi yang tertinggi berada 50,00%, yang berada pada kategori 4 dengan frekuensi tertinggi sebanyak 15 dari beberapa frekuensi dengan 30 responden, karena itu penulis dapat deskripsikan bahwa dosen dalam menulis tujuan belajar melalui perencanaan pembelajaran mahasiswa Prodi PGMI hasilnya adalah baik karena berada pada proporsi tertinggi dengan kategori 4.

2. Mengorganisir Sumber Daya Pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran perlu ada suasana nyaman dan menyenangkan agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Hal yang demikian harus didukung dengan tampilan kelas yang menyenangkan dan menarik minat peserta didik untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Mengorganisir sumber daya pembelajaran dalam ruang kuliah pun berperan penting dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

Dalam penataan ruangan kuliah, yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan bentuk ruang, ukuran dan bentuk peralatan kuliah, jumlah mahasiswa yang ada dalam ruang dan yang terpenting adalah sarana dan prasarana dalam ruang yang dibutuhkan. Agar tercipta suasana belajar yang menggairahkan. Perlu diperhatikan pengaturan ruang kuliah dalam belajar penyusunan dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan peserta didik duduk berkelompok dan memudahkan dosen bergerak secara leluasa untuk membantu mahasiswa dalam belajar.

Karena itu pengelolaan ruang belajar agar nyaman berjalan dapat ditinjau dari beberapa pandangan:

- a. Pandangan otoriter bahwa pengelolaan kelas sebagai proses mengontrol tingkah laku mahasiswa atau seperangkat kegiatan dosen untuk mempertahankan ketertiban kelas.
- b. Pandangan permisif bahwa pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan dosen untuk memaksudkan kebebasan mahasiswa.
- c. Pandangan behavior modification adalah seperangkat kegiatan dosen untuk mengubah tingkah laku mahasiswa. (proses perubahan tingkah laku) ke arah positif.

- d. Pandangan proses kelompok, bahwa pengelolaan ruang belajar adalah seperangkat kegiatan dosen untuk menambahkan organisasi kelas yang efektif.

Berikut ini adalah deskripsi pola manajemen pembelajaran dosen dalam mengorganisir sumber daya pembelajaran terhadap mahasiswa Prodi PGMI STAIN Watampone.

- a. Deskripsi dosen dalam mempersiapkan, dalam hal memilih alat taktik (metode) yang tepat dalam mengorganisir sumber daya pembelajaran.

Tabel 4.4

Kategori	Frekuensi	Proporsi%
1	1	3,33
2	4	13,33
3	19	63,33
4	6	20,00
5	0	0,00
Jumlah	30	100

Tabel 4.4 di atas merupakan gambaran tentang pola manajemen dosen dalam mempersiapkan, dalam hal memilih alat taktik (metode) yang tepat dalam mengorganisir sumber daya pembelajaran mahasiswa Prodi PGMI. Dari hasil pengolahan data bahwa proporsi yang tertinggi berada angka 63,33% dengan kategori 3 dalam jumlah frekuensi yang tertinggi sebanyak 19 dari beberapa frekuensi dengan 30 responden, sehingga penulis dapat deskripsikan bahwa dosen dalam mempersiapkan, dalam hal memilih alat taktik (metode) yang tepat dalam mengorganisir sumber daya pembelajaran mahasiswa Prodi PGMI adalah cukup karena proporsi jawaban yang tertinggi berada pada kategori 3.

- b. Deskripsi dosen dalam memilih alat bantu belajar atau audio-visual yang tepat dalam mengajar.

Tabel 4.5

Kategori	Frekuensi	Proporsi%
1	4	13,33
2	2	6,67
3	15	50,00
4	9	30,00
5	0	0,00
Jumlah	30	100,00

Tabel 4.5 di atas merupakan gambaran tentang pola manajemen dosen dalam memilih alat bantu belajar atau audio-visual yang tepat dalam mengajar pada mahasiswa Prodi PGMI. Bahwa proporsi yang tertinggi sebanyak 50,00%, berada pada kategori 3 dengan frekuensi tertinggi 15 dari

beberapa frekuensi dengan 30 responden. Sehingga dapat penulis deskripsikan dari hasil olahan data bahwa dosen dalam memilih alat bantu belajar atau audio-visual yang tepat dalam mengajar mahasiswa Prodi PGMI adalah cukup karena proporsi yang tertinggi berada pada kategori 3.

- c. Deskripsi dosen dalam memilih besarnya kelas (jumlah murid yang tepat) untuk mengorganisir sumber daya pembelajaran.

Tabel 4.6

Kategori	Frekuensi	Proporsi%
1	4	13,33
2	14	46,67
3	9	30,00
4	3	10,00
5	0	0,00
Jumlah	30	100

Tabel 4.6 di atas merupakan gambaran mengenai pola manajemen dosen dalam memilih besarnya kelas (jumlah mahasiswa yang tepat) untuk mengorganisir sumber daya pembelajaran mahasiswa Prodi PGMI. Dari hasil olahan data bahwa dosen dalam memilih besarnya kelas (jumlah mahasiswa yang tepat) untuk mengorganisir sumber daya pembelajaran mahasiswa di Prodi PGMI berada pada proporsi 46,67% yang berada pada kategori 2 dengan frekuensi tertinggi 14 dari beberapa frekuensi dari 30 responden, jadi penulis mendeskripsikan bahwa dosen dalam mengorganisir sumber daya pembelajaran mahasiswa di Prodi PGMI adalah kurang. Artinya dosen tidak memilih besarnya kelas (jumlah mahasiswa) sebagai prioritas dalam mengorganisir kelas.

- d. Deskripsi dosen dalam memilih strategi yang tepat untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan, prosedur-prosedur serta pengajaran yang kompleks dalam pembelajaran.

Tabel 4.7

Kategori	Frekuensi	Proporsi%
1	1	3,33
2	10	33,33
3	17	56,67
4	2	6,67
5	0	0,00
Jumlah	30	100

Tabel 4.7 di atas merupakan gambaran pola manajemen dosen dalam memilih strategi yang tepat untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan, prosedur-prosedur serta pengajaran yang kompleks dalam pembelajaran mahasiswa Prodi PGMI. Dengan proporsi yang tertinggi sebanyak 56,67%, yang berada pada kategori 3 dengan tingkat frekuensi tertinggi 17 dari beberapa frekuensi dengan 30 responden sehingga penulis

dapat mendeskripsikan dari hasil olahan data bahwa dosen dalam memilih strategi yang tepat untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan, prosedur-prosedur serta pengajaran yang kompleks dalam pembelajaran mahasiswa Prodi PGMI mahasiswa adalah cukup karena proporsi yang tertinggi berada pada kategori 3.

Simpulan

Pola manajemen pembelajaran dosen berjalan cukup sesuai prosedur serta mempunyai pengaruh yang baik terhadap motivasi belajar mahasiswa Prodi PGMI yang sangat baik karena pelaksanaannya berdasarkan teori dari fungsi-fungsi manajemen pembelajaran melalui proses mulai dari perencanaan pembelajaran, mengorganisir sumber daya pembelajaran, pengelolaan kelas, kepemimpinan dalam pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran dan motivasi belajar dari faktor intrinsik juga faktor ekstrinsik. Pembuktian ini diperoleh berdasarkan hasil olah data dari angket yang diambil dari lapangan bahwa pengambilan keputusan dari H_1 di dukung jika t hitung $<$ t tabel pada $\alpha = 5\%$, Jadi pada tabel 5.1 jelas terlihat dalam kolom *significance* terdapat angka 0,047, berarti ini lebih kecil dari 0.05% sehingga manajemen pembelajaran dosen mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa PGMI.

Berdasarkan hasil analisis data keseluruhan yang diperoleh mengenai manajemen pembelajaran dosen bahwa prosentase manajemen pembelajaran dosen secara keseluruhan berada pada angka 33,33% dengan interval 41-43 pada tingkat *Frequency* 10 dari berbagai tingkat *Frequency* dengan 30 responden dari item pertanyaan sebanyak 14 butir. Sedang motivasi belajar mahasiswa Prodi PGMI diperoleh prosentase dari keseluruhan dari data yang diperoleh adalah 40,00% pada interval 44-49 dengan tingkat *Frequency* 12 dari berbagai tingkat *Frequency* dengan 30 responden dari item pertanyaan sebanyak 14 butir. Jadi pola manajemen pembelajaran dosen berada pada kategori cukup sedang motivasi belajar mahasiswa Prodi PGMI terdapat kategori sangat baik.

Jadi pengaruh pola manajemen pembelajaran dosen yang dilakukan cukup berjalan sesuai prosedur dari teori fungsi-fungsi manajemen pembelajaran terhadap motivasi belajar mahasiswa yang sangat baik. Sehingga hasil kesimpulan bahwa pengaruh manajemen pembelajaran dosen pada mahasiswa prodi PGMI adalah baik.

Daftar pustaka

- A. Mustafa, *Akhlaq Tasawuf* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005).
Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), Cet. VI.
Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*. (Jakarta: Gema Insani, 1995).

- Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi Kependidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Abu Ahmadi, Noer Salami, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Rosda karya, 2001).
- Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno. *Psikologi Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 1997).
- Ainamulyana.blogspot.com > *Pembelajaran* diakses Jun 11, 2016.
- Astaqauliyah. (2006). Dibuka pada tanggal 04 september 2008. Diakses dari <http://astaqauliyah.com/2006/05/20/peranan-organisasi-pembelajaran-dalam-meningkatkan-kompetensi-kerja/>.
- Azwar, S. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. (Edisi ke-2). (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1995).
- Bafadhal, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistim*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004).Cet. IV.
- Departemen Agama RI Dirjen Pendidikan Islam, *UU No.20 tahun 2003, tentang Sisdiknas*. (Jakarta : 2007).
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. 2004. *Kurikulum dan Standar Kompetensi SMA Mata Pelajaran Agama Islam*.
- Dewi Juliah Ratnaningsih, 2013. *pengembangan kisi-kisi instrumen*, <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/mmpi5202/indeks.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2013.
- Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Shariah Principles on Management in Practice*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- E. Mulyasa, *Manajemen berbasis sekolah, konsep, strategi, dan implementasi*. (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, cet 1 2002), hal 39.
- Gulo, *Strategi Belajar Mengajar*. (Jakarta : PT Grasindo, 2008).
- Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya (Analisis di Bidang Pendidikan)*. (Penerbit PT Bumi Akasara : Jakarta, 2011).
- <http://imbang88.wordpress.com/2010/04/01/fungsi-fungsi-manajemen-pembelajaran-dalam-penerapan-pembelajaran-pendidikan-luar-sekolah>.
- <http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/defenisi-sampling-dan-teknik-sampling>. disalin dan dipublikasikan melalui Eureka Pendidikan.
- Husaini usman, *Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, edisi 3 (Jakarta : Bumi Aksara, 2011).
- Husaini usman, *Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. edisi 3 (Jakarta : Bumi Aksara, 2011).
- Ibrahim Bafadal, *Dasar-dasar Manajemen dan Supervisi Taman Kanak-kanak*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004).
- Khalil Al-Musawi, *Bagaimana Menjadi Orang Bijaksana*. (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1998).
- Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
- Moekijat. *Kamus Manajemen*. (Alumni : Bandung,1984).

- Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008).
- Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007).
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
- Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. (Bandung PT.Remaja Rosdakarya, 2005), cet. III.
- Ricky W. Griffin, *Manajemen*, alih bahasa Gina Gania; editor Wisnu Candra Kristiaji (Jakarta : Erlangga, 2004).
- Sevilla, Consuelo G, *et. al Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City, (2007).
- Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Majid, *At-tarbiyah wa Thuruqut Tadris, Juz I*. (Mesir: Darul Ma'arif, t.th).
- Sufyarma, *Kapita Selektta Manajemen Pendidikan*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung Penerbit Alfabet, 2008).
- Suryabrata, Sumardi, *Psikologi Pendidikan*. (Jakarta: Rajawali, 1984).
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. (Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*. (Bandung : Alfabeta, 2009).
- Uno, H. B. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2006).
- W.S Winkel, *Psikologi Pengajaran*. (Jakarta: Grafindo, 1996).
- Wibowo, *Manajemen Perubahan*. (Jakarta: RajaGrafinso Persada, 2006).
- Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*. (Bandung. Penerbit Remaja Rosdakarya, 2009).

**URGENSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP
SEMANGAT ENTERPRENEURSHIP PADA USAHA KECIL DI PASAR
PALAKKA KABUPATEN BONE**

Abdullah RB

Dosen STAIN Watampone

Pendahuluan

Terjadinya kegagalan pada model pembangunan pada masa lalu, menyadarkan akan perlunya reorientasi baru dalam pembangunan, yaitu pendekatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan yang berwajah manusiawi. Pendekatan tersebut menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi. Proses pembangunan hendaknya sebagai suatu proses yang populis, konsentrasi pembangunan lebih pada ekonomi kerakyatan, dengan mengedepankan fasilitas pembangunan pada usaha rakyat kecil.

Bertolak dari model pembangunan yang humanize tersebut maka dibutuhkan program-program pembangunan yang memberikan prioritas pada upaya memberdayakan masyarakat. Dalam konteks *Good Governance* ada tiga pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan, yaitu masyarakat sipil, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu masyarakat menjadi pilar utama yang harus diberdayakan sejak awal.

Dalam pembangunan perekonomian rakyat untuk memberdayakan rakyat hendaklah disertai transformasi secara seimbang, baik itu transformasi ekonomi, social, budaya maupun politik. Sehingga akan terjadi keseimbangan antara kekuatan ekonomi, budaya, sosial dan budaya.

Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat dapat menjalankan pembangunan dengan diberikan hak untuk mengelola sumber daya yang ada. Masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Dengan demikian masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain.

Menurut Winarni dalam Sulistiyani, inti dari pemberdayaan ada tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setiap masyarakat

pasti memiliki daya, akan tetapi masyarakat tidak menyadari, atau bahkan belum diketahui. Oleh karena itu, daya harus digali, dan kemudian dikembangkan.

Pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*) di Indonesia masih kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan, masyarakat, maupun pemerintah. Banyak praktisi pendidikan yang kurang memperhatikan aspek-aspek penumbuhan mental, sikap, dan perilaku kewirausahaan peserta didik, baik di sekolah kejuruan maupun profesional sekalipun. Orientasi mereka, pada umumnya, hanya pada upaya-upaya menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Sementara itu, dalam masyarakat sendiri telah berkembang lama kultur feodal (*priyayi*) yang diwariskan oleh penjajahan Belanda. Sebagian besar anggota masyarakat memiliki persepsi dan harapan bahwa *output* dari lembaga pendidikan dapat menjadi pekerja (*karyawan, administrator atau pegawai*) oleh karena dalam pandangan mereka bahwa pekerja (terutama pegawai negeri) adalah *priyayi* yang memiliki status sosial cukup tinggi dan disegani oleh masyarakat.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif. Menurut Aaker desain penelitian adalah perencanaan terinci yang mengarah pada tujuan dari penelitian tersebut.³⁴ Sedangkan tujuan desain penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.³⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dalam penelitian yang dilakukan ini, desain *Deskriptif Kualitatif* digunakan untuk menggambarkan kondisi pedagang kaki lima pasar Palakka di Watampone dengan adanya pentingnya pemahaman nilai-nilai Islam terhadap semangat *Entrepreneurship* (kewirausahaan) usaha mikro di Kab. Bone.

Konsep Nilai Pendidikan Islam terhadap *Entrepreneurship* bagi masyarakat usaha kecil

Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) ini, namun di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup urgen dalam suatu yang

³⁴D.A. Aaker, dkk, *Marketing Research* (Hawkin: Mac. Millan Publishing Company, 2001), h. 24.

³⁵Burhan Mungim, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 68.

produktif. Integritas entrepreneur muslim tersebut terlihat dalam sifat-sifatnya, antara lain:

1. Taqwa, tawakal, zikir dan bersyukur.

Seorang entrepreneur muslim memiliki keyakinan yang kukuh terhadap kebenaran agamanya sebagai jalan keselamatan, dan bahwa dengan agamanya ia akan menjadi unggul. Keyakinan ini membuatnya melakukan usaha dan kerja sebagai dzikir dan bertawakal serta bersyukur pasca usahanya.

2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri

Selain kita harus bertaqwa kepada Allah dan berhubungan baik dengan sesama serta lingkungannya, manusia juga harus bisa menjaga hatinuraninya dengan baik seperti yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW dengan sifatnya yang sabar, pemaaf, adil, ikhlas, berani, memegang amanah, mawas diri dll.

3. Hubungan manusia dengan manusia

Agama Islam mempunyai konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan dll. Semua konsep tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berhubungan dengan manusia dengan manusia (*hablum minannas*) atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan, manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka hidup berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa dan bernegara. Mereka saling membutuhkan satu sama lain sehingga manusia dirsebut sebagai makhluk social. Maka tak ada tempatnya diantara mereka saling membanggakan dan menyombongkan diri., sebab kelebihan suatu kaum tidak terletak pada kekuatannya, harkat dan martabatnya, ataupun dari jenis kelaminnya karena bagaimanapun semua manusia sama derajatnya *dimata* allah, yang membedakannya adalah *ketaqwaannya*. Artinya orang yang paling *bertaqwa* adalah orang yang paling mulia disisi allah swt.

Urgensi Pemahaman Nilai Pendidikan Islam terhadap masyarakat Entrepreneurship di Kabupaten Bone

Keberhasilan seorang wirausahawan dalam Islam bersifat independen. Artinya keunggulannya berpusat pada integritas pribadinya, bukan dari luar dirinya. Hal ini selain menimbulkan kehandalan menghadapi tantangan, juga merupakan garansi tidak terjebak dalam praktek-praktek negatif dan bertentangan dengan peraturan, baik peraturan negara maupun peraturan agama. Berikut ini beberapa Integritas wirausahawan muslim tersebut terlihat dalam sifat – sifatnya, antara lain:

1. Hubungan Aqidah dengan akhlak dalam Kewirausahaan

Aqidah merupakan suatu keyakinan hidup yang dimiliki oleh manusia. Keyakinan hidup ini diperlukan manusia sebagai pedoman hidup untuk mengarahkan tujuan hidupnya sebagai makhluk alam. Pedoman hidup ini dijadikan pula sebagai pondasi dari seluruh bangunan aktifitas manusia.

Ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menjelaskan yang seharusnya dilakukan manusia kepada yang lainya, yang disebut dengan akhlak. Dengan akhlak yang baik seseorang akan bisa memperkuat aqidah dan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Ibadah yang dijalankan dinilai baik apabila telah sesuai dengan muamalah. Muamalah bisa dijalankan dengan baik apabila seseorang telah memiliki akhlak yang baik.

2. Hubungan aqidah dengan ibadah dalam Berwirausaha

Aqidah menempati posisi terpenting dalam ajaran agama Islam. Ibarat sebuah bangunan, maka perlu adanya pondasi yang kuat yang mampu menopang bangunan tersebut sehingga bangunan tersebut bisa berdiri dengan kokoh. Demikianlah urgensi akidah dalam Islam, Akidah seseorang merupakan pondasi utama yang menopang bangunan keislaman pada diri orang tersebut. Apabila pondasinya tidak kuat maka bangunan yang berdiri di atasnya pun akan mudah dirobuhkan.

Selanjutnya Ibadah yang merupakan bentuk realisasi keimanan seseorang, tidak akan dinilai benar apabila dilakukan atas dasar akidah yang salah. Hal ini tidak lain karena tingkat keimanan seseorang adalah sangat bergantung pada kuat tidaknya serta benar salahnya akidah yang diyakini orang tersebut. Sehingga dalam diri seorang muslim antara akidah, keimanan serta amal ibadah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat antara ketiganya.

Muslim apabila akidahnya telah kokoh maka keimanannya akan semakin kuat, sehingga dalam pelaksanaan praktek ibadah tidak akan terjerumus pada praktek ibadah yang salah. Sebaliknya apabila akidah seseorang telah melenceng maka dalam praktek ibadahnya pun akan salah kaprah, yang demikian inilah akan mengakibatkan lemahnya keimanan.

Pondasi aktifitas manusia itu tidak selamanya bisa tetap tegak berdiri, maka dibutuhkan adanya sarana untuk memelihara pondasi yaitu ibadah. Ibadah merupakan bentuk pengabdian dari seorang hamba kepada Allah. Ibadah dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah.

Simpulan

1. Konsep Nilai Pendidikan Islam terhadap *Entrepreneurship* bagi masyarakat usaha kecil dapat dilihat dengan adanya konsep aqidah, ibadah dan muamalah. Hal ini diharapkan masyarakat dalam menjalankan jual beli khususnya di pasar, maka sedapat mungkin

dapat mengaplikasikan sifat jujur, adil, niat suci, bersilatullahi dan menjalankan rukun Islam dengan baik.

2. Bagaimana urgensi pemahaman nilai Pendidikan Islam terhadap masyarakat *Entrepreneurship* di Kabupaten Bone bahwa seorang wirausaha sangat penting mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam berwirausaha, karena dengan ilmu yang dimiliki seorang wirausaha, maka tentu akan memberikan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan jual beli yang bersih dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Aaker, D.A, Dkk, *Marketing Research*, Hawkin: Mac. Millan Publishing Comani, 2001.
- Ananda, Fitra. *Analisi Perkembangan Usaha Mikro Dan Keci Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Hamahera Di Kota Semarangl .Makalah*. Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. Tidak diterbitkan.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Ed. Bahasa Arab Cet. II; Juz 35, , Semarang: CV Toha Putra, 1992.
- Princes Z. Heflin, *Be An Entrepreneur (Jadilah Orang Wirausaha)*, Ed. Pertama, Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan: Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Moleong, Lexy, J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi. Cet. 22; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Mungim, Burhan. *Peneltian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Nasution, S, *Metedologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Raselawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia*, Makalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011
- Rasyid, Sudrajat. *Kewirausahaan Santri*. Jakarta Timur : PT. Citrayudha Alamanda Perdana, 2005.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Cet. III; Yogyakarta: CV Adipura, 2004.
- Suharyadi. *Kewirausahaan : Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*. Cet. 2: Jakarta :Salemba Empat, 2008.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2005
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005.

- Umar Husain, *Research Methods In Finance And Banking*, Cet. 2; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2002.
- Widjaja Tunggal, Amin. *Dasar-dasar Manajemen Kewirausahaan*. Ed. Revisi; Jakarta: Harvarindo, 2008.
- Winardi, *Entrepreneur Dan Entrepreneurship*. Ed. 1: Jakarta Timur: Kencana, 2003.
- Zakiy Al-kaaf Abdullah, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Zimmerer, Thomas W, dkk, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Salemba Empat, 2008

**PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR TERHADAP
PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM MENETAPKAN
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
Studi Multi Kasus di SMAN 13 Bone dan MAN 3 Bone**

Arisal¹ dan Fitriani²
Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai “Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Terhadap Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) (Studi Multi Kasus di SMAN 13 Bone dan MAN 3 Bone)”. Hal yang penting dikaji dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang peran kepala sekolah sebagai supervisor terhadap peningkatan guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal.

Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut di atas digunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini merupakan studi multi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket. Teknik analisis data melalui reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan empat macam teknik, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran kepala sekolah sebagai supervisor terhadap peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) (studi multi kasus di SMAN 13 Bone dan MAN 3 Bone) yaitu sebagai supervisor kepala sekolah menjalankan perannya yaitu peneliti, konsultan dan penasihat, fasilitator, motivator dan pelopor pembaruan. Guru pada umumnya sudah mampu dalam menetapkan KKM, meskipun masih ada yang mengalami kesulitan.

Pendahuluan

Dunia pendidikan menghendaki sistem pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan mutu pendidikan berkaitan erat dengan usaha peningkatan profesional guru, yang pada akhirnya akan menentukan *output* dari pendidikan itu sendiri.

Namun pada kenyataannya, keadaan guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang

memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.³⁶

Secara umum, kualitas guru di Indonesia saat ini masih rendah hal ini dapat dilihat dari hasil uji kompetensi bagi guru yang sudah dilakukan. Guru SD menguasai kompetensi pedagogik rata-rata baru mencapai 38%, guru SMP 37,42%, guru SMA/SMK 37,18%. Kompetensi kepribadian, guru SD rata-rata baru mencapai 48%, guru SMP 49,56% dan guru SMA/SMK 51,52%. Kompetensi profesional, guru SD 35,33%, guru SMP 36,94% dan guru SMA/SMK 36,40%. Kompetensi sosial, guru SD 43,60%, guru SMP 46,10% dan guru SMA/SMK 44,70%.³⁷

Data di atas menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi para guru di Indonesia masih sangat rendah persentasenya, peningkatan tunjangan sertifikasi yang diberikan pemerintah ternyata belum mampu meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru sehingga kinerjanya pun belum maksimal. Bila pendidikan di Indonesia ingin maju sangat diperlukan tenaga pendidik atau guru yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap profesinya.

Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor

Eksekutor supervisi pendidikan di lapangan adalah kepala sekolah, penilik dan pengawas. Mereka adalah supervisor yang bertanggung jawab terhadap eksistensi dan dinamika sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan mampu membangkitkan potensi bangsa di masa depan. Peran ketiga supervisor tersebut sangat vital bagi pengembangan sekolah di era global sekarang. Ketiga supervisor ini mempunyai batas kewenangan masing-masing yang saling melengkapi, tidak bertabrakan dan bersebrangan.

Jika ketiganya bisa bekerja sama secara aktif dan sinergis maka akan menciptakan perubahan dahsyat dalam dunia pendidikan. Namun, jika ketiganya besebrangan maka bisa menyebabkan keregangan dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, sehingga harus dieliminasi sedini mungkin. Dari ketiga supervisor tersebut, yang paling strategis dan dominan dalam mendominasi kualitas lembaga pendidikan adalah kepala sekolah. Sebab, dia adalah aktor yang langsung terjun di

³⁶Herabudin, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 52.

³⁷Wawan4mi.blogspot.com/2012/07/jurnalkinerjaguru, 1 Juni 2017.

lapangan, menghadapi problematika dan dituntut melahirkan solusi yang tepat, cepat dan akurat sehingga berpengaruh terhadap eksistensi dan prestasi sekolah.

Salah satu tugas kepala sekolah sebagai supervisor yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Sergiovani dan Starrat menyatakan bahwa *"Supervision is a process designed to help teacher and supervisor learn more about their practice; to better able to use their knowledge and skills to better serve parents and schools; and to make the school a more effective learning community"*.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah; agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang efektif.

Kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah dan pemberi contoh kepada guru dan staf di sekolah. Kepala sekolah harus memahami tugas dan kedudukan guru di sekolah yang dipimpinnya. Sehingga, pembinaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan tidak membingungkan. Dalam menjalankan tugas ini, kepala sekolah harus memiliki pengetahuan dan kreativitas yang luas serta hubungan yang dekat dengan seluruh elemen yang ada di sekolah.

Peran kepala sekolah sebagai supervisor adalah sebagai berikut:³⁸

1. Merencanakan program tahunan sekolah
2. Merencanakan program akademik yang fokus pada persiapan program pengajaran
3. Merencanakan program yang kaitannya dengan kesiswaan.
4. Merencanakan bidang kepegawaian
5. Merencanakan pengadaan dana bagi keseluruhan administrasi pendidikan
6. Merencanakan bidang sarana dan prasarana.

Sebagai supervisor, kepala sekolah berkewajiban melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan dan administrasi sekolah. Dia harus menghubungkan seluruh personal organisasi dengan tugas yang dilakukannya sehingga terjalin kesatuan, keselarasan serta menghasilkan kebijaksanaan dan keputusan yang tepat. Tindakan pengoordinasian ini meliputi pengawasan, pemberian nilai, pengarahannya dan bimbingan

³⁸Jamal Ma'mur Asmani. *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah* (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 53-55.

terhadap setiap personel sekolah dengan melibatkan pihak lain, seperti bimbingan dan konseling, guru yang menangani kurikulum, wali kelas, petugas tata usaha, komite sekolah dan lain sebagainya.³⁹

Kemampuan Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Kemampuan melaksanakan tugas bagi seorang guru diperoleh melalui proses pendidikan. Kemampuan tersebut sangat diperlukan guna menjalankan fungsi profesinya. Dalam pengertian profesionalisme telah tersirat adanya suatu keharusan memiliki kemampuan agar profesi tersebut dapat berfungsi sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena pekerjaan atau kegiatan tersebut memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru, yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Seorang guru yang telah memiliki predikat kompeten akan menguasai tugas pokok dan fungsinya serta cakap dalam melaksanakan tugas secara profesional.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru berdasarkan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 dijelaskan bahwa ada 4 poin kompetensi guru sebagaimana dimaksud pasal 8 yang meliputi: 1) Kompetensi pedagogik 2) Kompetensi kepribadian 3) Kompetensi sosial dan 4) Kompetensi profesional yang di peroleh melalui pendidikan profesi.

Selanjutnya kompetensi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik yang meliputi:
 - a. Pemahaman terhadap peserta didik sehingga mampu memanfaatkan prinsip-prinsip kognitif peserta didik.
 - b. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran.
 - c. Evaluasi belajar dan
 - d. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian yang meliputi:
 - a. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil.
 - b. Kepribadian dewasa.

³⁹Herabudin. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, h. 210-212.

- c. Kepribadian yang arif.
 - d. Kepribadian yang berwibawa dan
 - e. Menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
3. Kompetensi sosial yang meliputi:
 - a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik.
 - b. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan dan
 - c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
 4. Kompetensi profesional meliputi:
 - a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi dan,
 - b. Menguasai struktur dan metode keilmuan.⁴⁰

Pada kompetensi pedagogik, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru adalah menyelenggarakan penilaian dan evaluasi belajar. Dalam evaluasi belajar dibutuhkan kemampuan guru untuk menentukan KKM, karena penilaian peserta didik harus memperhatikan keberadaan individu yang berbasis *mastery learning* (pembelajaran tuntas) berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimalnya serta untuk proses penilaian lebih lanjut.

Berikut ini akan dijelaskan pengertian, fungsi dan mekanisme dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal:

1. Pengertian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).⁴¹

KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva.

⁴⁰Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Cet. 3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.75-77

⁴¹<http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penetapan-kkm.pdf>. 26 Maret 2014.

Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal.

Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM.⁴²

Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap.

Secara garis besar disimpulkan, Kriteria Ketuntasan Minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.

2. Fungsi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)⁴³

- a. Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial atau layanan pengayaan;
- b. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. . Setiap kompetensi dasar (KD) dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui KD-KD yang belum tuntas dan perlu perbaikan;
- c. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat

⁴²<http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penetapan-kkm.pdf>. 26 Maret 2014.

⁴³<http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penetapan-kkm.pdf>. 26 Maret 2014.

dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolok ukur. Oleh karena itu hasil pencapaian KD berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang peta KD-KD tiap mata pelajaran yang mudah atau sulit, dan cara perbaikan dalam proses pembelajaran maupun pemenuhan saranaprasarana belajar di sekolah;

- d. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Pendidik melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain pendidik. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah;
 - e. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat.
3. Mekanisme Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
- a. Prinsip Penetapan KKM
Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut:⁴⁴
 - 1) Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui *professional judgement* oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan;
 - 2) Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan *intake* peserta didik

⁴⁴<http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penetapan-kkm.pdf>. 26 Maret 2014.

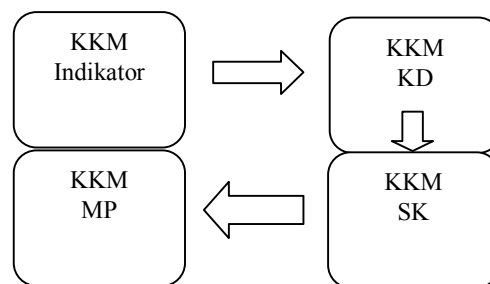
untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi

- 3) Kriteria ketuntasan minimal setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam Kompetensi Dasar tersebut. Peserta didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut;
- 4) Kriteria ketuntasan minimal setiap Standar Kompetensi (SK) merupakan rata-rata KKM Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam SK tersebut;
- 5) Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran, dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB/Rapor) peserta didik;
- 6) Indikator merupakan acuan/rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS). Soal ulangan ataupun tugas-tugas harus mampu mencerminkan/menampilkan pencapaian indikator yang diujikan. Dengan demikian pendidik tidak perlu melakukan pembobotan seluruh hasil ulangan, karena semuanya memiliki hasil yang setara;
- 7) Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal.

b. Langkah-Langkah Penetapan KKM

Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Langkah penetapan KKM adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan *intake* peserta didik dengan skema sebagai berikut:



⁴⁵<http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penetapan-kkm.pdf>. 26 Maret 2014.

- Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK hingga KKM mata pelajaran;
- 2) Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian;
 - 3) KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan;
 - 4) KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik.
- c. Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal adalah:⁴⁶
- 1) Tingkat kompleksitas, kesulitan/kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi, apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah kondisi sebagai berikut:
 - a) guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik;
 - b) guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi;
 - c) guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan;
 - d) peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi;
 - e) peserta didik yang cakap/terampil menerapkan konsep;
 - f) peserta didik yang cermat, kreatif dan inovatif dalam penyelesaian tugas/pekerjaan;
 - g) waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan/latihan;
 - h) tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar.
 - 2) Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah.
 - a) Sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat/bahan untuk proses pembelajaran;

⁴⁶<http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penetapan-kkm.pdf>. 26 Maret 2014.

- b) Ketersediaan tenaga, manajemen sekolah dan kepedulian *stakeholders* sekolah.
- 3) Tingkat kemampuan (*intake*) rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan

Penetapan *intake* di kelas X dapat didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, Nilai Ujian Nasional/Sekolah, rapor SMP, tes seleksi masuk atau psikotes; sedangkan penetapan *intake* di kelas XI dan XII berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya.

4. Analisis Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Pencapaian kriteria ketuntasan minimal perlu dianalisis untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil yang diperoleh. Tindak lanjut diperlukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun penilaian. Hasil analisis juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapan KKM pada semester atau tahun pembelajaran berikutnya.⁴⁷

Analisis pencapaian kriteria ketuntasan minimal bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian KKM yang telah ditetapkan. Setelah selesai melaksanakan penilaian setiap KD harus dilakukan analisis pencapaian KKM. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan analisis rata-rata hasil pencapaian peserta didik kelas X, XI, atau XII terhadap KKM yang telah ditetapkan pada setiap mata pelajaran. Melalui analisis ini akan diperoleh data antara lain:

- a) KD yang dapat dicapai oleh 75% - 100% dari jumlah peserta didik pada kelas X, XI, atau XII;
- b) KD yang dapat dicapai oleh 50% - 74% dari jumlah peserta didik pada kelas X, XI, atau XII;
- c) KD yang dapat dicapai oleh $\leq 49\%$ dari jumlah siswa peserta didik kelas X, XI, atau XII.

Manfaat hasil analisis adalah sebagai dasar untuk meningkatkan kriteria ketuntasan minimal pada semester atau tahun pembelajaran berikutnya. Analisis pencapaian kriteria ketuntasan minimal dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data perolehan nilai setiap peserta didik per mata pelajaran.

Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis data hasil penelitian, maka ada dua kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dapat diambil dalam penelitian, yaitu:

1. Peran Kepala Sekolah/Madrasah di SMAN 13 Bone dan MAN 3 Bone sangat baik, hal ini terlihat dari peran kepala sekolah sebagai peneliti,

⁴⁷<http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penetapan-kkm.pdf>. 26 Maret 2014.

konsultan atau penasihat, fasilitator, motivator dan pelopor pembaruan.

2. Kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal di SMAN 13 Bone dan MAN 3 Bone sudah cukup baik, guru dapat menentukan KKM dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung. Dan *intake* peserta didik.

Daftar Pustaka

- Asf, Jasmani dan Mustofa, Syaiful. *Supervisi Pendidikan: Terobosan Baru dalam Kinerja Peningkatan Kerja Pengawas Sekolah dan Guru*. Cet. 1: Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah*. Jogjakarta: DIVA Press, 2012.
- Fathurrohman, Pupuh dan Suryana, Aa. *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran*. Cet. 1; Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S. *Affective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Result Through Responsive and Naturalistic Approaches*. San Fransisco, California Jossey-Bass In, 1981.
- Halian. "KKM: antara Atandarisasi dan Gengsi", dalam <http://udugudug.wordpress.com/2011/04/10/kkm-antara-standarisasi-dan-gengsi/>, 1 Juni 2017.
- Herabudin. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- <http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penetapan-kkm.pdf>. 26 Maret 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Pribadi, Sasmito. "Kegiatan Workshop dengan Metode Kolaboratif dan Konsultatif sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Menetapkan KKM", *Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganesa*, ISSN 2356-3443, Vol. 3 No. 1, Januari 2016.
- Sodiq, Mohammad et.all, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data*. Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2003..
- Wawan4mi.blogspot.com/2012/07/jurnalkinerjaguru, 1 Juni 2017.
- Widodo. *Mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal dengan Bilangan Baku*, *Jurnal Pendidikan Penabur*, Edisi No. 13, Desember 2009

MESJID DI WATAMPONE
(Suatu Kajian Tentang Sejarah dan Pemanfaatan Fungsi Masjid Al-Mujahidin dan Masjid Raya Watampone)

Ridhwan

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Arikel ini membahas tentang sejarah berdiri dan pemanfaatan Masjid Tua Almujaahidin dan Masjid Raya Watampone Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Tua Almujaahidin didirikan oleh Fakihi Amrullah sekitar tahun 1632 Masehi. Ia adalah Kadhi pertama di Kerajaan Bone. Pembangunan Masjid Almujaahidin diperuntukkan kepada keluarga kerajaan Bone, sekaligus sebagai tempat pelaksanaan dan pembinaan pendidikan Islam. Sebelum kerajaan Bone berintegrasi dengan Negara Kesatuan Indonesia, Para Kadhi Kerajaan Bone menjadikan Masjid Tua Almujaahidin sebagai tempat aktifitas mereka. Fungsinya sebagai tempat pendidikan terus berlanjut, walaupun Bone tidak lagi sebagai Kerajaan. Sementara itu, Masjid Raya Watampone didirikan pada tahun 1940 di ibu kota kerajaan Watampone berdiri sebuah masjid yang dibangun oleh Andi Mappanyukki, Raja Bone ke-32 dan ke-34 (terakhir) bersama dengan Kadi Bone KH. Abdul Hamid. Adapun pemanfaatan/fungsinya, yakni fungsi ibadah dan fungsi sosial sebagai tempat pendidikan Islam

Kata kunci: Masjid Tua Almujaahidin, Masjid Raya Watampone

Latar Belakang

Sejak zaman Nabi Muhammad saw, masjid memiliki peran yang cukup signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan umat Islam. Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa dalam mendakwakan Islam, Nabi Muhammad menjadikan masjid sebagai basis utamanya.⁴⁸ Betapa penting posisi dan peran tersebut sehingga dapat dimengerti jika Al-Quran menyebut kata masjid dalam berbagai derivasinya, tidak kurang dari 22 kali, baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*) maupun plural (*jamak*).⁴⁹

⁴⁸Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Cetakan keempatbelas; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 25-26.

⁴⁹Lihat Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufakhras li al-Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), h. 124.

Barangkali bukanlah suatu kebetulan jika dalam peristiwa hijrah, sebelum Nabi Muhammad sampai di Yastrib, ia bersama kaum Muhajirin⁵⁰ lainnya singgah di desa Quba, selama empat hari. Di tempat ini Nabi mendirikan sebuah mesjid yang hingga saat ini dikenang sebagai Mesjid Quba. Demikian juga ketika Nabi sampai di Kota Yastrib (kelak menjadi kota Madinah), ia membangun sebuah mesjid yang kelak dikenang sebagai Mesjid Nabawi.⁵¹ Demikian juga dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad, yang diyakini oleh kalangan pengamal sufi sebagai prototipe pengalaman ketuhanan seorang muslim sejati⁵², juga tak lepas dari mesjid, yakni ketika Nabi berangkat dari Mesjid Haram di Mekkah⁵³ menuju Mesjid al-Aqsha di Palestina.⁵⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya menjadikan mesjid sebagai sarana gerakan sosial menuju penyempurnaan spiritual.

Berdasarkan latar pemikiran di atas, maka dipandang penting untuk meneliti eksistensi Mesjid di Kabupaten Bone. Penelitian ini difokuskan pada dua mesjid, yakni Mesjid Almujaahidin dan Mesjid Raya Watampone. Dikatakan penting sebab (1) belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang eksistensi Mesjid di Watampone dan (2) diasumsikan bahwa eksistensi mesjid di Watampone mempunyai relevansi dengan perkembangan kehidupan keberagamaan umat Islam di wilayah ini.

⁵⁰Istilah kaum Muhajirin sering disandingkan dengan kaum Anshar. Kaum Muhajirin mengacu kepada kaum muslimin Mekah yang ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Anshar mengacu kepada kaum muslimin Madinah yang menyambut dan menolong kedatangan Nabi Muhammad ketika hijrah.

⁵¹Uraian lebih lengkap tentang profil Mesjid Nabawi (Mesjid Nabi) dapat dibaca dalam Zuhairi Misrawi, *Madinah; Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad Saw.*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), h. 331-384.

⁵²Salah seorang sufi yang paling senang menggambarkan perjalanan Isra' dan Mi'raj sebagai simbolisme pengalaman ketuhanan seorang muslim adalah Maulana Jalaluddin Rumi (1207-1273 M). Dalam hal ini John Renard mengatakan bahwa: "Rumi telah menggunakan istilah itu (Mi'raj) untuk secara paradoks memberi hakikat abadi pengalaman seorang individu tentang Tuhan". Lihat John Renard "All The King's Falcon; Rumi On Prophets and Revelation", diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim Assagaf, *Rajali Sang Raja; Senandung Rumi Tentang Nabi dan Wahyu*, (Cetakan pertama; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 223. Seorang Sufi Besar Abad ke-13, Fariruddin al-Aththar, menyebut perjalanan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad tersebut sebagai contoh riil dari konsep *fana* dan *baqa*. Mi'raj menjadi sebuah paradigma penyatuan mistik dengan Tuhan, yakni kefanaan dalam Tuhan yang diuruti oleh kehadiran (*baqa*) dan kesadaran diri yang semakin tinggi. Lihat Karena Armstrong "Muhammad; A Biografi of Prophet" diterjemahkan oleh Sirikit Syah, *Muhammad Sang Nabi; Sebuah Biografi Kritis*, (Cetakan pertama; Surabaya: Risalah Gusti, 2001), h. 189-190.

⁵³Uraian lebih lengkap tentang profil Mesjid Haram di Mekah dapat dibaca dalam Zuhairi Misrawi, *Mekkah; Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, (Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara, 2009), h. 191-212.

⁵⁴Uraian singkat namun menarik tentang Mesjid al-Aqsha dapat dibaca dalam Nurholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Cetakan IV; Jakarta: Paramadina, 2002), h. 74. 79.

Rumusan Masalah

Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana eksistensi mesjid di Watampone. Masalah utama tersebut akan disorot dari dua aspek, yakni sejarah perkembangannya dan fungsinya bagi masyarakat muslim Watampone. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Mesjid Al-Mujahidin dan Masjid Raya Bone?
2. Bagaimana dinamika penggunaan Mesjid Al-Mujahidin dan Masjid Raya Bone?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan objeknya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah atau observasi historis.

1. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian ini adalah observasi historis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan historis diartikan sebagai sebuah proses pengumpulan data dan penafsiran gejala, peristiwa maupun gagasan yang terjadi pada masa lampau, untuk menemukan generalisasi dalam rangka memahami kenyataan-kenyataan sejarah.⁵⁵

2. Instrumen Penelitian

Jika dipahami bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, maka keberadaan instrumen sangat tergantung kepada objek dan sumber datanya. Terkait dengan penelitian ini, peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama. Namun demikian, akan digunakan instrumen pembantu seperti alat-alat dokumentasi dan daftar pertanyaan.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena objeknya adalah realitas masa lalu atau sejarah, maka data-data yang terkait umumnya tersedia dalam tiga bentuk, yakni (1) peninggalan meteri/benda, (2) peninggalan tertulis dan (3) peninggalan bukan tertulis, seperti cerita, kisah bahasa, kepercayaan, dan lain-lain.⁵⁶

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa objek penelitian ini sudah diteliti dalam sudut pandang yang lain, sehingga sebagian besar data-data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai referensi, baik dalam bentuk buku, laporan penelitian, disertasi, tesis, dan lain-lain. Namun demikian, untuk lebih menguatkan validitas data tersebut akan dilakukan upaya pendalaman dan perbandingan dengan data-data di lapangan.

⁵⁵Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metoda, dan Teknik* (Edisi Ketujuh; Bandung: Tarsito, 1982), h. 132.

⁵⁶Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metoda, dan Teknik*, h. 133.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik kutipan dan saduran untuk data-data tertulis dan teknik observasi, interviu, dan dokumentasi untuk data-data berupa peninggalan materi/benda dan data-data bukan tertulis.

Metode Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka metode atau pisau analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis historis. Dimulai dengan validasi data, kemudian membandingkan antara satu data dengan data lainnya. Setelah itu, dilakukan interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian, dan terakhir dilakukan penyimpulan. Hasil kesimpulan tersebut didekripsikan dalam bentuk narasi kualitatif.

Hasil Penelitian

1. Sejarah Pendirian dan Pemanfaatan Masjid Al-Mijaahidin

a. Sejarah Pendirian

Mesjid Al-Mujahidin Watampone, dikenal juga dengan nama *Masigi Laungnge* (Bugis) atau Masjid Tua. Diyakini oleh banyak kalangan di Bone bahwa mesjid inilah yang pertama dibangun di Bone.⁵⁷ Tidak ditemukan catatan yang jelas mengenai tanggal dan tahun berdirinya. Namun demikian, dalam catatan Asnawi Sulaiman, disebutkan bahwa Masjid Al-Mujahidin didirikan oleh Kadhi Kerajaan Bone yang pertama, Fakih Amrullah, sesat setelah menjadi Kadhi di Kerajaan Bone di lingkungan istana Kerajaan Bone.⁵⁸

Langkah pertama yang dilakukan oleh Faqih Amrullah sebagai kadi di Kerajaan Bone adalah membangun sebuah masjid di dekat istana Kerajaan Bone. Di masjid inilah *Patta Kalie* pertama memberikan bimbingan dan pengajaran kepada keluarga istana Bone.⁵⁹

Penting ditegaskan bahwa Fakih Amrullah bukanlah orang Bone, melainkan orang Gowa. Faqih Amrullah lahir di Gowa sekitar tahun 1603 M. Dari pihak ayah, ia adalah putra seorang keturunan Arab, Sayid Muhsin. Sayid Muhsin sendiri adalah putra dari Sayid Ba'Alwi bin Abdullah, seorang ulama yang datang dari Mekah dan menetap di Kerajaan Gowa tidak lama setelah Gowa menerima Islam.⁶⁰ Ibunya adalah putri I Malingkaan Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awwalul Islam (Raja Tallo) dan Mangkubumi Kerajaan Gowa, Raja Tallo yang pertama masuk

⁵⁷ Mahyuddin. Ketua Pengurus Masjid al-Mujahidin, Wawancara, Watampone, 2 November 2017.

⁵⁸

⁵⁹Lihat Asnawi Sulaiman, *Sejarah Singkat Keqadhian (Qadhi) Bone*, h. 14.

⁶⁰<http://www.tribun-timur.com/read/artikel/49050> Cetak Panrita Dari Bontoala, Salemo, Hingga Mangkoso, Kamis, 17 September 2009 | 15:58 WITA, diakses pada tanggal 5 Juni 2012.

Islam.⁶¹ Dengan demikian, dari jalur ibu ia adalah keluarga bangsawan Gowa.

Asnawi Sulaiman menyebutkan bahwa bahwa kadi pertama di Kerajaan Bone tidak diangkat oleh Raja Bone sebagaimana lazim pada pengangkatan Kadi Bone berikutnya, tetapi ia dikirim oleh Raja Gowa ke-15, Sultan Malikussaid (1639-1653 M). Asnawi Sulaiman tidak menyebutkan secara jelas angka tahun pengiriman Fakih Amrullah sebagai kadi di Kerajaan Bone. Ia hanya menyebutkan bahwa pengiriman tersebut terjadi pada masa pemerintahan Raja Bone ke-13 La Ma'daremmeng Sultan Muhammad Shalih Matinroe ri Bukaka (1632-1640 M).⁶²

Untuk memperkirakan tahun pengiriman Fakih Amrullah menjadi kadi yang sekaligus menandai awal pembangunan Mesjid al-Mujahidin, dapat dilakukan dengan membanding antara masa pemerintahan Raja Gowa Sultan Malikussaid dan Raja Bone La Ma'daremmeng Sultan Muhammad Shalih. Raja Gowa ke-15, Sultan Malikussaid, memerintah antara tahun 1639 sampai 1653 M,⁶³ sedangkan La Ma'daremmeng memerintah antara tahun 1632 sampai 1640.⁶⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengiriman Fakih Amrullah tersebut diperkirakan terjadi pada tahun pertama pemerintahan Raja Gowa Sultan Malikussaid (1639 M) yang bertepatan dengan akhir masa pemerintahan Raja Bone Lama'daremmeng Sultan Muhammad Shalih, yakni paroh pertama tahun 1640 M).⁶⁵

Jika kesimpulan di atas benar, maka dapat diperkirakan bahwa tahun berdirinya Mesjid al-Mujahidin adalah sekitar tahun 1639 M yang bertepatan dengan masa-masa berakhirnya pemerintahan Raja Bone Lama'daremmeng Sultan Muhammad Shalih Matinroe ri Bukaka (1632-1640 M).

b. Pemaanfaatan

Pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya pada tempat pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam. Secara umum sangat sedikit catatan semasa yang menggambarkan pelaksanaan pendidikan Islam pada masa-masa awal. Meskipun demikian, seorang pengamat Prancis bernama Gervaise meninggalkan catatan penting tentang pendidikan anak-anak bangsawan di Istana Gowa abak ke-17. Ia menulis:

⁶¹Lontara Pattorioloonga ri Gowa dikutip dari Asnawi Sulaiman, *Sejarah Singkat Singkat Keqadhian (Qadhi) Bone*, h. 14.

⁶²Lihat Asnawi Sulaiman, *Sejarah Singkat Keqadhian (Qadhi) Bone*, h. 14.

⁶³Lihat Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka; A History of South Sulawesi (Celebes) In the Seventeenth Century (Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*, h. 381.

⁶⁴Lihat Mattulada, *LATO: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 76.

⁶⁵Lihat Asnawi Sulaiman *Sejarah Singkat Keqadhian (Qadhi) Bone* (Cetakan I; Jakarta: Lembaga Solidaritas Islam al-Qashash, 2004), h 24.

Sesudah anak laki-laki berumur 5 atau 6 tahun, mereka lazim disuruh didik pada orang lain untuk mencegah pengaruh ibunya yang dapat mengakibatkan melemahnya sifat kejantanannya. Kalau mereka sudah berumur 7 atau 8 tahun mereka mulai belajar mengaji, menulis dan berhitung di bawah pimpinan seorang "Haji", satu jam pagi dan satu jam sore, selama dua tahun....⁶⁶

Penulis menduga kuat bahwa pola pendidikan yang berlaku di Gowa sebagaimana tergambar dalam kutipan di atas juga berlaku di Kerajaan Bone. Hal ini didasarkan pada keteragangan sebelumnya bahwa orang yang bertama melaksanakan pendidikan Islam secara resmi di Kabupaten Bone adalah Kadhi pertama Bone, Fakihi Amrullah, yang berasal dari Gowa.

Berkaitan dengan pembinaan pendidikan Islam di Masjid Al-Mujahidin, sampai awal abad ke-19 tidak ditemukan gambarannya secara rinci, misalnya tentang materi dan kitab-kitab yang dibaca dan lain-lain. Namun dapat diyakini bahwa sejak ditetapkannya Islam sebagai agama resmi Kerajaan Bone pendidikan Islam berupa pengajian-pengajian Al-Qur'an dan kitab kuning (*mangaji kitta*) sudah berlangsung.

Di era Raja Bone Arung Palakka (1667-1696 M) misalnya diyakini bahwa ketika itu pengajian Al-Qur'an dan kitab kuning tumbuh pesat, sebab Arung Palakka sendiri yang memberikan perintah. Dalam salah satu pidatonya tidak lama setelah dinobatkan menjadi Raja Bone, dalam acara pemotongan rambut Arung Palakka sebagaimana janjinya jika dapat mengalahkan Gowa tahun 1670 M, ia mengatakan:

"...mau sillelang mua bola nalimpungi awo', napobicarai bicaranna, naiya nabbicarang nasengge palorongngi welerenna, paddaungi raukkajunna, napoarajangngi Bone napoadecengngi palili'na, napoatuangngi tomaegae. Tapada letei petautta pelempu' togi mejekko togi. Tapada poanui akkeanung toriolota de'eppa bicara lawangngi. Naiya taola gau'na Puatta Matinroe ri Gucinna sangngadinna riakaperekenna. Iyatopa mennang ripoadakko, mau sillelang mua bola nalipungi awo', pada patettko langkara', tapeasserwi agamae. Iyatopa mennang ripallebbariakko palili' simemengenna Bone, rekko engkai suro ribatenna Bone muttama' riwanuammu maelo' marala, aja' mualai, iayanatu napoarajang Bone. Narekko tassirupai ada ripatteninganggekko arolano risurona Bone mulattu poadai ri Bonemu, tennalai tu Bonemu nakko tennapasilasai...

Terjemahnya:

"...walaupun hanya sebuah keluarga/rumah berpagar bambu, tetap diakui haknya untuk melaksanakan hukum adat yang dapat memelihara hubungan baik dan membesarkan kerajaan Bone demi kebaikan rakyat. Tetap berpegang teguh kepada hukum adat dan mengakui hak milik perorangan yang telah berlangsung sejak dahulu. Tetap berpegang teguh

⁶⁶ Lihat Andi Zainal Abidin Farid, *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*, h. 36.

kepada peraturan "*panngaderreng*" yang telah ditetapkan oleh *Puatta' La Tenrirawe, Bonkangnge, Matinroe ri Gucinna* (Raja Bone ke-7) kecuali kekafirannya. Selanjutnya, walaupun hanya sebuah keluarga/rumah yang berpagar bambu, agar didirikan langgar/masjid guna meneguhkan pelaksanaan syari'at agama Islam. selanjutnya, diumumkan, apa bila ada utusan pribadi raja Bone memasuki daerah untuk mengambil seseorang/sesuatu, jangan sekali-kali dihalangi. Itulah salah satu kebesaran Bone. Apa bila tindakan mereka bertentangan dengan adat yang berlaku, ikutilah mereka untuk menghadap raja Bone. Raja Bone tidak akan mengambil sesuatu dari kalian apabila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yang berdasarkan *panngaderreng*...⁶⁷

Dalam pidato tersebut, Arung Palakka jelas menyerukan kepada seluruh rakyat Bone untuk membangun *langkara* atau langgar (surau) di setiap kampung, agar masyarakat dapat memperdalam ilmu agama Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya islamisasi di Kerajaan Bone melalui pendidikan Islam terus berjalan.

Khusus di Masjid al-Mujahidin Asnawi Sulaiman menyebutkan bahwa setelah dibangun sekitar tahun 1639 M, Faqih Amrullah melaksanakan pendidikan dan pengkaderan bagi para juru dakwah dalam upaya pengembangan dakwah Islam di Kerajaan Bone. Salah seorang kader atau murid yang juga putranya sendiri adalah Syekh Ismail yang kelak menggantikannya sebagai Kadi Bone ke-4.⁶⁸ Proses pendidikan Islam yang dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin terus berlangsung, dan para Kadi Bone menjadi tokoh utamanya. Model pembelajaran yang digunakan dapat diduga mengikuti pola umum di Nusantara, yakni model *halaqah* yang kemudian dikenal dalam istilah pesantren dengan *bandongan* dan *sorogan*.

Eksistensi Masjid Al-Mujahidin sebagai masjid Kerajaan Bone, terus menjadi basis pendidikan Islam berupa pengajian Al-Qur'an dan kitab kuning (*mangaji tudang*) yang diselenggarakan oleh Kadi Bone dan para pembantunya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa beberapa orang Raja Bone yang didampingi Kadi Bone menjadi penganut sekaligus penyebar ajaran tarekat Khalwatiyah Yusufiyah. Bahkan ada yang dapat disebut ulama, karena menguasai bahasa Arab dan ilmu tarekat, serta menulis kitab, yakni La Tenritappu Sultan Ahmad Shaleh Syamsuddin (1775-1812) yang didampingi oleh Arab Harun, Kadi Bone ke-8.

Arab Harun adalah seorang yang dipandang banyak berjasa dalam menyebar-kan ajaran Tarekat Khalwatiyah Yusufiyah di Kerajaan Bone. Hal ini dapat diketahui dari aktivitasnya sebagai penyalin risalah tarekat ini. Atas permintaan La Tenritappu ia menyalin banyak karya Syekh Yusuf dan muridnya, Syekh Abdul Dhahir atau Tuan Rappang I Bodi. Menurut

⁶⁷*Lontara' Kerajang Soppeng* milik Andi Palaloi no. 8 halaman 26 dan *Lontara Kerajaan Soppeng* milik Andi Rajeng Petta Lebbi, No. 20 halaman 23 dan 31, dalam Andi Muhammad Ali, *Bone Selayang Pandang*, h. 51-52.

⁶⁸Lihat Asnawi Sulaiman, *Sejarah Singkat Keqadhian (Qadhi) Bone*, h. 14.

catatan Abu Hamid bahwa sekitar 30 buah risalah yang pernah disalin oleh Arab Harun. Risalah-risalah tersebut adalah: (1) *Fathu al-Rahman*, (2) *Matla' al-Saraair wa al-Zhawahir*, (3) *Mathalibu al-Salikin*, (4) *Fathu Kaifiyat al-Dzikri*, (5) *al-Barakat al-Sailaniyah*, (6) *al-Fawaaih al-Yusufiyat fi Bayaani al-Tahqiq*, (7) *Kaifiyat al-Manfai*, (8) *Tahshilu al-Inayah wa al-Hidayat*, (9) *Risalah Ghaayah al-Ikhtishaar wa al-Nihayah al-Intizdar*, (10) *Sirrul al-Asraar*, (11) *Daqaaiqul al-Asraar*, (12) *Bahjatu al-Tanwiyr*, (13) *Fassu Hikmat al-Ilahiyah*, (14) *al-A'yaanu al-Tsaabitah*, (15) *Tuhfat al-Mursalah*, (16) *Risalah al-Wudhuui*, (17) *Ma'rifah al-Tauhid*, (18) *Muqaddimah al-Fawaaid*, (19) *Asraaru al-Shalawaat*, (20) *Bahrnun al-Lahut*, (21) *Wahdat al-Wujuud*, (22) *Al-Fautsu al-A'zdam*, (23) *Bayaan Allah*, (24) *Nuurul Haadiy Ila Thariiqy al-Rasyaad*, (25) *Bidaayatu al-Mubtadiy*, (26) *Tahkshishu al-Ma'aarif*, (27) *Daf'u al-Bala'*, (28) *Ajaran Syekh Yusuf* (Bahasa Bugis), (29) *Futuhaatu al-Ilahiyyah*, (30) *Zubdatu al-Asraar*.⁶⁹

Karena ia adalah Kadi Bone, tentu saja aktifitas keilmuan Arab Harun lebih banyak dilakukan di Masjid Al-Mujahidin. Hal ini menjadikan Masjid Al-Mujahidin bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu, seperti salat, melainkan sebagai basis utama pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Islam di Kerajaan Bone. Kenyataan di atas juga menunjukkan bahwa materi pendidikan yang diajarkan oleh para Kadi Bone tidak terbatas pada dasar-dasar agama Islam, tetapi mencakup tasawuf.

Aktifitas pendidikan Islam di Masjid Al-Mujahidin semakin maju, ketika tahun 1809 M putra Arab Harun, Haji Pesona, tampil sebagai Kadi Bone ke-9 menggantikan ayahnya. Keilmuannya tidak diragukan, sebab ia pernah mengenyam pendidikan di Haramayn. Sebagai Kadi Bone, tentu saja tetap melanjutkan aktifitas keilmuan Kadi Bone sebelumnya, yang juga adalah ayahnya. Para masanya pendidikan Islam diduga kuat semakin berkembang, sebab di samping dia sendiri seorang ulama, ia diketahui didampingi seorang khatib (*katte'*) yang dikenal sebagai ulama besar pada masanya, yakni Syekh Abu Bakar Palakka yang bergelar *al-Khatib Bone*. Sebelum menjadi khatib Bone, ia pernah mengenyam pendidikan di Mekah. Syekh Abu Bakar Palakka juga diketahui pernah menyalin beberapa risalah fikih maupun tasawuf (*tarekat*), baik ketika masih di Mekah maupun ketika kembali ke Bone dan menjabat sebagai khatib. Dia digelar *al-Khatib Bone*⁷⁰

⁶⁹ Naskah-naskah hasil salinan Arab Harun di atas saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta No. A 108 (=C). Selesai disalin pada bulan Sya'ban 1221 H bertepatan dengan Oktober 1806 M). Lihat Abu Hamid, *Syekh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*, h. 143. Bandingkan dengan Nabilah Lubis, *Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makassari; Menyingkap Intisari Segala Rahasia* (Bandung: Mizan, 1996), h. 64.

⁷⁰Lihat <http://ulama.blogspot.com/2005/09/Syekh-abu-bakar-palakka.html>, Kamis 27-9-2013.

Berdasarkan catatan Wan Mohammad Shaghir Abdullah, diketahui bahwa *al-Khatib* Bone Abu Bakar Palakka setidaknya menyalin lima buah risalah, yakni:

1. *Risalatul Wudhu*, karya Tajuddin yang digelar dengan Tajul bin Arifin ibnu Sultan Utsman an-Naqsyabandi. Diselesaikan pada hari Sabtu, 26 Jumadil Awal di rumahnya di Palakka, tanpa menyebut tahun.
2. *Al-Risalah an-Naqsyabandiyah*, karya Syeikh Yusuf Tajul al-Khalwati Mankatsi. Dicatat pada halaman akhir, selesai penyalinan pada hari Sabtu, bulan Muharam, tanpa menyebut tahun. Pada salinan menggunakan nama ``al-Faqir Khatib Bone'', tanpa menyebut nama asli Haji Abu Bakar Bugis.
3. *Jam'ul Fawaid as-Sunbuliyah al-Muwashshalah ila Maratibh al-'Aliyah* karya gurunya, al-'Alim al-'Allamah al-'Arif ar-Rabbani Syeikh Muhammad As'ad bin Syeikh Muhammad Thahir as-Sunbul bin al-'Allamah Syeikh Muhammad Sa'id al-Makki.
4. *Daqaiq al-Asrar fi Tahqiqi Qawa'id as-Sirriyah wa Bayani Ahlillahil Arifin*, karya Syeikh Abul Fattah Abu Yahya Abdul Bashir ad-Dhariri, yaitu seorang murid Syeikh Yusuf Tajul Khalwati al-Mankatsi. Di akhir salinan dicatatkan, ``...Khatib Bone di rumah di negeri Palakka, selesai menyalin pada waktu Dhuha, hari Rabu, 9 Zulkaidah 1233 H''.
5. *Zubdah al-Asrar fi Tahqiqi Ba'dhi Masyarib al-Akhyar* karya Syeikh Yusuf at-Tajul Khalwati al-Makassari. Dicatat selesai menyalinnya pada 9 Ramadan 1235 H oleh Khatib Bone namanya Abu Bakar.⁷¹

Dari latar belakang keilmuannya (alumni Mekah) dan lima buah kitab yang disalin tersebut dapat dipastikan bahwa Syekh Abu Bakar Palakka adalah seorang ulama besar, sebagaimana ulama-ulama Nusantara alumni Haramayn. Sebagai Khatib di Kerajaan Bone yang mendampingi Haji Pesona (Kadi Bone) juga dapat diduga bahwa aktifitas keilmuannya dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin. Ilmu-ilmu yang diajarkannya juga dapat dipastikan merujuk pada ilmu fikih dan ilmu tarekat, seperti yang tertuang dalam beberapa kitab yang ia salin.

Pendidikan Islam yang berpusat di Masjid Al-Mujahidin kelihatannya terus berkembang ketika Kadi Bone dijabat oleh Kadi Bone ke-10, Syekh Ahmad (1823-1827 M) yang menggantikan Haji Pesona. Syekh Ahmad adalah adik Syekh Abu Bakar Palakka, Khatib Bone, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Selama menjabat Kadi Bone mendampingi tiga Raja Bone; I Mani Arung Data, La Mappaseling, dan La Parenrengi. Sama dengan kakaknya, Syekh Ahmad juga dikenal sebagai seorang menganut tarekat Khalwatiyah Yusufiyah. Dalam *Lontara' Akkarungeng ri Bone* disebutkan bahwa ia menjadi guru tarekat bagi Raja Bone I Mani Arung

⁷¹ Lihat Wan Mohammad Shaghir Abdullah, *Syekh Abu Bakar Palakka*, dalam [http://ulama.blogspot.com/200/09/Syeikh abu-bakar-palakka.html](http://ulama.blogspot.com/200/09/Syeikh_abu-bakar-palakka.html). Diakses pada Kamis 27-9-2013.

Data.⁷² Ia juga diketahui menyalin salah satu kitab karya Syekh Yusuf al-Makassari, yakni *Asrar ash-Shalah fi Tabyin Muqaranah an-Niyah bi Takbirah al-Ihram fi al-Fiqh wa at-Tashawuf `ala I'tiqad Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah wa Mazhab as-Syafi'i*. Selesai ditulis 25 bulan Haji, 1237 H/.⁷³

Pada pertengahan abad ke-19, Kadi Bone dijabat oleh KH> Adam (1847-1865, w. 1865 M). Walaupun tidak ditemukan catatan khusus mengenai aktivitas pendidikan Islam yang dijalankan oleh KH. Adam, tetapi pengalamannya menimba ilmu di Mekah selama kurang lebih 8 tahun sebelum menjabat sebagai Kadi Bone, tentu menjadi pertimbangan kuat bahwa ia memiliki kedalaman dan keluasan ilmu-ilmu keislaman. Asnawi Sulaiman menyebutkan bahwa ketika KH. Adam menjabat sebagai Kadi Bone, ia merenovasi Masjid Al-Mujahidin dan untuk pertama kalinya mendirikan bangunan khusus kantor *syara'* di depan Masjid Al-Mujahidin. Bangunan bekas kantor *syara'* tersebut masih dapat disaksikan hingga hari ini.⁷⁴

Selain itu, terdapat bukti yang dikatakan sebagai peninggalan KH. Adam yang hingga kini dapat disaksikan, yakni sebuah manuskrip kitab suci Al-Qur'an yang masih ditulis tangan. Pada lembaran akhir manuskrip Al-Qur'an ini terdapat keterangan bahwa "Al-Qur'an ini ditulis oleh al-Fakir Haji Abdussalam Al-Jawi Bugisi, pada tahun 1263 H." Didalamnya juga diterangkan bahwa ia (Haji Abdussalam) berasal dari Desa Pammana, sebuah desa yang terletak antara Wajo dan Bone. Al-Qur'an ini diperkirakan dibawa oleh KH. Adam dari Mekah, ketika ia kembali ke Bone setelah menyelesaikan pendidikannya.⁷⁵ Walaupun manuskrip ini bukan karya KH. Adam, namun peninggalan tersebut menjadi bukti bahwa ia adalah Kadi Bone yang mengajarkan Al-Qur'an di Masjid Al-Mujahidin.

Pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, Kadi Bone dijabat oleh KH. Muhammad Yusuf atau Kadi Bone ke-11 (1879-1905 M). Ia adalah putra KH. Adam. Seperti ayah dan beberapa pendahulunya, KH.

⁷²Andi Amir Sessu, *Lontara Akkarungeng ri Bone*,

⁷³Wan Mohammad Shaghir Abdullah, *Syekh Abu Bakar Palakka*, dalam <http://ulama.blogspot.com/2005/09/Syeikh-abu-bakar-palakka.html>. Diakses pada Kamis 27-9-2013.

⁷⁴Asnawi Sulaiman, *Sejarah Singkat Keqadhian (Qadhi) Bone*, h. 17.

⁷⁵Manuskrip ini disimpan oleh Drs. Haji Muhammad Syata (umur 92 tahun). Ia adalah keturunan ke-4 dari KH. Adam. Ia menjelaskan bahwa manuskrip ini diperoleh dari ayahnya, KH. Yunus bin Abd. Rasyid, Imam Macege, dari neneknya. Neneknya atau ibu dari KH. Yunus bin Abdul Rasyid adalah putri dari KH. Adam. Drs. Haji Muhammad Syata, *Wawancara*, Watampone 20 November 2013. Deskripsi singkat manuskrip tersebut adalah; panjang 50,6 cm dan lebar 20 cm. Tulisannya masih cukup jelas hingga masih dapat dibaca dengan jelas. Pada lembaran pembuka, yakni lembar Surat Al-Fatihah dan awal Surat Al-Baqarah terdapat hiasan berupa lukisan bunga paduan dua warna, merah dan hitam. Hiasan yang sama juga terdapat pada lebar pertengahan dan penutup.

Muhammad Yusuf juga pernah menempuh pendidikan di Mekah selama empat tahun.⁷⁶ Oleh karena itu, patut diduga bahwa KH. Muhammad Yusuf melanjutkan pengajian Al-Qur'an dan kitab kuning (*mangaji tudang*) di Masjid Al-Mujahidin. Terkait dengan hal ini, terdapat keterangan Abdul Rahman Getteng bahwa pesantren yang berdiri pertama kali di Sulawesi Selatan adalah di Watampone. Pesantren ini didirikan oleh *Petta* Yusuf, seorang ulama yang pernah menimba ilmu di Mekah.⁷⁷

Peneliti telah berusaha mencari data tentang *Petta* Yusuf yang mendirikan pesantren di Watampone tersebut, namun sama sekali tidak diperoleh keterangan selain bahwa pada masa lalu ulama yang mengadakan pengajian kitab kuning atau *mangaji kitta* di Watampone bernama *Petta* Yusuf adalah *Petta* Kali Yusuf atau Kadi Bone KH. Muhammad Yusuf yang membina pengajian kitab di Masjid Al-Mujahidin. Oleh karena itu, peneliti menduga kuat bahwa *Petta* Yusuf yang disebut Abd. Rahman Getteng tersebut adalah Kadi Bone ke-11 KH. Muhammad Yusuf yang oleh masyarakat Bone mengenalnya sebagai *Petta* Kalie Yusuf. Kemudian pesantren yang didirikan itu dapat dipastikan berupa pengajian kitab kuning atau *mangaji kitta* yang dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin Watampone.

Pada masa jabatan KH. Abdul Hamid, Kerajaan Bone kedatangan seorang ulama dari Mekah, yakni Syekh Mahmud Abdul Jawad.⁷⁸ Pada awal kedatangannya, ia mengadakan pengajian kitab di Masjid Al-Mujahidin atas dukungan Raja Bone La Mappanyukki Sultan Ibrahim dan Kadi Bone KH. Abdul Hamid. Dari pengajian inilah, kemudian pada tahun 1933 –atas prakarsa Raja dan Kadi Bone tersebut didirikan Madrasah Amiriyah Islamiyah di Watampone.⁷⁹ Ketika Raja Bone terakhir (ke-33) La Pa'benteng naik tahta, bersamaan itu pula diangkat KH. Sulaiman sebagai Kadi Bone ke-18 menggantikan KH. Abdul Hamid. Ia pun tetap melanjutkan pengajian di Masjid Al-Mujahidin.

Pada masa KH. Muhammad Rafi Sulaiman menjabat sebagai Kadi Bone, yakni mulai tahun 1962 sampai 1991, di Masjid Al-Mujahidin pendidikan Islam terus berjalan. Bahkan dalam bentuk yang lebih terorganisir, yakni berupa *madrasah diniyah*. Masyarakat Bone menyebutnya dengan istilah *Sekola Ara'*. Beberapa orang kiai turut membantu di antaranya adalah KH. Rahman Lalo dan KH. Khatib Taslim. Bahkan sampai era tahun 2000-an di Masjid Al-Mujahidin masih diselenggarakan *halaqah* pengajian kitab kuning setiap selesai salat magrib

⁷⁶Lihat Asnawi Sulaiman, *Sejarah Singkat Keqadhian (Qadhi) Bone*, h. 18.

⁷⁷Lihat Abd. Rahman Getteng, *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan; Tinjauan Historis dari Tradisi Hingga Modern*, h. 77-78.

⁷⁸ Lihat Ridhwan, *Pendidikan Islam di Bone: Studi Tentang Peran Kadi dalam Pengembangan Pendidikan Islam*, (Lhoksemawe Aceh: Unimal Press, 2016), h.

⁷⁹Haji Lihat Ridhwan, *Pendidikan Islam di Bone: Studi Tentang Peran Kadi dalam Pengembangan Pendidikan Islam*, h.

yang dibina oleh KH. Rusyaid Mattu, mantan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Watampone.⁸⁰

Seperti yang disaksikan oleh peneliti sendiri, bahwa di Masjid Al-Mujahidin hingga saat ini masih berjalan pengajian dasar Al-Qur'an berupa TK/TPA. Kemudian pada sore hari diselenggarakan pendidikan Islam dalam bentuk Madrasah Diniyah. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa pengajian kitab kuning atau *mangaji kitta*, sudah tidak ada lagi.

Sejaraah Pendirian dan Pemanfaatan Mesjid Raya Watampone

1. Sejarah Pendirian

Pada tahun 1940 di ibu kota kerajaan Watampone berdiri sebuah masjid yang dibangun oleh Andi Mappanyukki, Raja Bone ke-32 dan ke-34 (terakhir) bersama dengan Kadi Bone KH. Abdul Hamid. Masjid ini kemudian dikenal sebagai Masjid Raya Watampone.⁸¹

Sejak berdirinya masjid ini, salat jumat yang sebelumnya dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin, dipindahkan ke Masjid Raya Watampone. Oleh karena itu, para imam dan khatib Kerajaan Bone berkedudukan di masjid ini.⁸²

2. Pemanfaatan

Sejak semula masjid ini dijadikan sebagai tempat pengajian Al-Qur'an dan pengajian kitab kuning. Pengajian tersebut dibina oleh beberapa ulama yang juga menjabat sebagai Imam dan khatib Kerajaan Bone. Beberapa imam Masjid Raya Watampone yang juga sekaligus imam Kerajaan Bone yang terkenal adalah (1) KH. Abdul Jabbar, (2) KH. Kudaedah, dan (3) KH. Andi Poke. Kemudian khatibnya yang terkenal adalah (1) Khatib Haji Nuzu', (2) Khatib Haji Baco', (3) Khatib Haji Abbase, (4) Khatib Haji Muhammad Amin, (5) Khatib Haji Mallanre, (6) Khatib Haji Abu Bakar, dan (7) Khatib Haji Muhammad Said.⁸³

Memasuki era tahun awal tahun 1960-an sampai dengan akhir tahun 1970-an di Masjid Raya Watampone secara intensif berlangsung pengajian dasar dan *tahfidz* (penghafal) Al-Qur'an serta pengajian kitab kuning yang dibina oleh Imam Masjid Raya Watampone, K>H. Muhammad Junaid Sulaiman (*Gurutta Junaide*). Ia adalah putra dari KH. Sulaiman, Kadi Bone ke-18 dan saudara dari KH. Muhammad Rafi Sulaiman, Kadi Bone ke-20

⁸⁰Lihat Ridhwan, *Pendidikan Islam di Bone: Studi Tentang Peran Kadi dalam Pengembangan Pendidikan Islam*.

⁸¹Tahun berdirinya Masjid Raya Watampone dapat dilihat pada ingkripsi berbahasa Bugis bertulis Arab yang terdapat pada mimbar Masjid Raya Watampone. Dalam ingkripsi tersebut jelas tertulis; Masjid ini berdiri bertepatan dengan masa pemerintahan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Matinroe ri Gowa, tahun 1940".

⁸² Lihat Ridhwan, *Pendidikan Islam di Bone: Studi Tentang Peran Kadi dalam Pengembangan Pendidikan Islam*.

⁸³Lihat Ridhwan, *Pendidikan Islam di Bone: Studi Tentang Peran Kadi dalam Pengembangan Pendidikan Islam*.

(terakhir). Dalam menjalankan kegiatan pengajian tersebut KH. Muhammad Junaid Sulaiman dibantu oleh beberapa kiai lainnya, yakni (1) KH. Hudzaifah (*Gurutta Hudzaifah*), (2) KH. Abdul Hamid Jabbar (*Gurutta Hamid*), (3) KH. Dahlan (*Gurutta Dahlan*), (4) KH. Mas Yunus (*Gurutta Yunus*), (5) KH. Radhi Sulaiman (*Gurutta Radhi*). Beberapa kitab yang dikaji adalah (1) *Matnu al-Zubad*, (2) *Mushthala al-Hadits*, (3) *Tafsir Jalalain*, (4) *Tafsir ibn al-Katsir*, (5) *Al-Hadits al-Arba'iin*, (6) *Ilmu al-Arud*, (7) *Alfiyah Ibnu Malik*, dan (8) *Subul al-Salam*.⁸⁴

Berawal dari pengajian di Masjid Raya Watampone ini, KH. Muhammad Junaid Sulaiman (*Gurutta Junaide'*) mendirikan Pesantren Ma'had Hadis Biru yang secara resmi berdiri tahun 1972. Tentang hal ini akan dibahas pada bagian peran Kadi Bone dalam mengembangkan pendidikan formal.

Simpulan

1. Mesjid al-Mujahidin didirikan oleh Fakhri Amrullah, Kadhi Pertama Kerajaan Bone, sekitar tahun 1639 M. Adapun pemanfaatan/fungsinya tidak berbeda dengan fungsi mesjid pada masa Rasulullah sampai masa-masa berikutnya, yakni fungsi ibadah dan fungsi sosial. Fungsi sosial, yakni (a) sebagai tempat peradilan Islam dan (2) sebagai tempat pendidikan Islam;
2. Mesjid Raya Watampone didirikan oleh Raja Bone terakhir, Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim bersama dengan Kadhi Bone, KH. Abdul Hamid, pada tahun 1940. Adapun pemanfaatan/fungsinya, yakni fungsi ibadah dan fungsi sosial sebagai tempat pendidikan Islam;

Daftar Pustaka

- Asnawi Sulaiman *Sejarah Singkat Keqadhian (Qadhi) Bone*, Cetakan I; Jakarta: Lembaga Solidaritas Islam al-Qashash, 2004.
- Abu Bakar Aceh, *Sejarah Mesjid*, 1955.
- Azsyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru*, Cetakan I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- G.F. Pijper "Studien over de geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950", diterjemahkan oleh Tudjimah dan Yessi Augustin, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, Kedua; Jakarta: UI-Press, 1986.
- George Abraham Makdisi "The Rise of Humanism in Classical Islam and The Christian West" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh A. Syamsurizal dan Nurhidayah, *Cita Humanisme Islam; Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya Terhadap Renaissance Barat*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.

⁸⁴Lihat Ridhwan, *Pendidikan Islam di Bone: Studi Tentang Peran Kadi dalam Pengembangan Pendidikan Islam*.

- Handinoto dan Samuel Hartono, *Pengaruh Pertukangan Cina Pada Bangunan Masjid Kuno di Jawa Abad 15-16*. Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 35, No. 1, Juli 2007.
- Ira M. Lapidus "A History of Islaic Societies" diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jilid I dan II, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- John Renard "All The King's Falcon; Rumi On Prophets and Revelation", diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim Assagaf, *Rajali Sang Raja; Senandung Rumi Tentang Nabi dan Wahyu*, Cetakan pertama; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Kementerian Agama RI - *Masjid Tua Palopo* (<http://kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=tua>). Diakses tanggal 5 Februari 2013.
- Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Cetakan pertama; Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufakhras li al-Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
- Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Cetakan IV; Jakarta: Paramadina, 2002.
- Ridhwan, *Pendidikan Islam di Bone (Studi Historis Tentang Peranan Petta Kalie dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Bone)*, penelitian tidak dipublikasikan Watampone: P3M STAIN Watampone, 2012.
- Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibdah dan Kebudayaan*. Jakarta; Pustaka al-Husna, 1994.
- Trias Kuncahyono, *Jerusalem; Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Terakhir*, Cetakan pertama; Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara, 2008.
- Teddy Tjokrosaputro, *100 Masjid terindah di Indonesia*. Jakarta: PT Andalam Media, 2011.
- Umar Amin Hoesin, *Kultur Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Zuhairi Misrawi, *Madinah; Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad Saw.*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- , *Mekkah; Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara, 2009.

ANALISIS PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU LINGKUNGAN HIDUP SERTA KAITANNYA DENGAN ISLAM PADA MAHASISWA PGMI STAIN WATAMPONE

Suriani Nur

Dosen STAIN Watampone

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah Swt diberikan tugas untuk beribadah kepadaNya. Sebagai hamba yang memiliki tugas beribadah, maka kemudian Allah Swt memberikan fasilitas dengan menundukkan seluruh alam raya untuk manusia. Setelah manusia diciptakan, tidak serta merta ditinggalkan dalam kebodohan dan hidup merana di atas bumi tanpa daya, tetapi dianugerahi Allah Swt pengetahuan dan pengertian tentang alam semesta sehingga manusia dapat menggali rahasia yang tersembunyi di langit dan bumi untuk kemudian dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Kekayaan pengetahuan inilah yang dapat mengangkat kedudukan manusia di atas makhluk lainnya, kemudian menjadikan makhluk-makhluk itu berada di bawah kekuasaannya, sehingga setiap saat dapat dimanfaatkan untuk melayani manusia.⁸⁵ Allah Swt menjadikan segala yang ada di bumi untuk manusia, ditundukkanNya apa yang ada di bumi dan di langit termasuk menundukkan binatang, untuk menyempurnakan Nikmat-Nya.

Alam semesta raya ditundukkan oleh Allah Swt untuk dipergunakan manusia, bukan berarti manusia menjadi semena-mena terhadap alam. Islam memberikan pandangan yang lugas bahwa semua yang ada di bumi adalah merupakan karunia yang harus dipelihara agar semua yang ada menjadi stabil dan terpelihara. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada semua makhluk dengan menciptakan gunung, megembangbiakkan segala jenis binatang dan menurunkan partikel hujan dari langit agar segala tumbuhan dapat berkembang dengan baik.⁸⁶ Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang alami dan akan berlangsung mulai dari saat manusia dilahirkan sampai meninggal.

⁸⁵Afzalur Rahman. *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Quran*. (Jakarta: Mizan Media Utama, 2009), h.29.

⁸⁶Fahrudin M.Mangunjaya. *Konservasi Alam Dalam Islam*. (Cet I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) h.37.

Interaksi tadi berlangsung karena manusia memerlukan daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari⁸⁷.

Deskripsi Pengetahuan Tentang Lingkungan Pada Mahasiswa PGMI STAIN Watampone

Berdasarkan hasil tes pengetahuan lingkungan yang ditabulasikan dalam sebuah tabel (lihat Lampiran 1) kemudian dilakukan analisis data. Hasil analisis deskriptif kuantitatif data nilai test pengetahuan mahasiswa PGMI STAIN Watampone diperoleh dari perhitungan menggunakan *SPSS Statistic 20* (tersaji pada lampiran 5) dan dapat dilihat pada Table 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Analisis Deskriptif Data Nilai Pengetahuan

No	Uraian	Nilai
1	Skor Minimum	12
2	Skor Maksimum	25
3	Rentang Data	13
4	Rata-rata Hitung (Mean)	21
5	Median	21
6	Modus	20
7	Standar Deviasi	2.87

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.1, data hasil penelitian dengan jumlah butir 25 soal, jumlah sampel penelitian 21 orang mahasiswa PGMI diperoleh skor minimum 12; skor maksimum 25; rentang data 13; nilai rata-rata hitung (mean) 21; median (Me) 21; modus (mode) 20 dan standar deviasi 2.87.

Untuk mengetahui kategori skor maka disusun distribusi frekuensi kategori skor yang ditetapkan sebanyak lima interval yaitu; sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Jumlah butir soal 25, jumlah responden 25, skor minimum teoritis 0 dan skor maksimum teoritis 25 jumlah kelas kategori ditetapkan 5. Selanjutnya data hasil disusun ke dalam distribusi frekuensi pada Tabel 4.2.

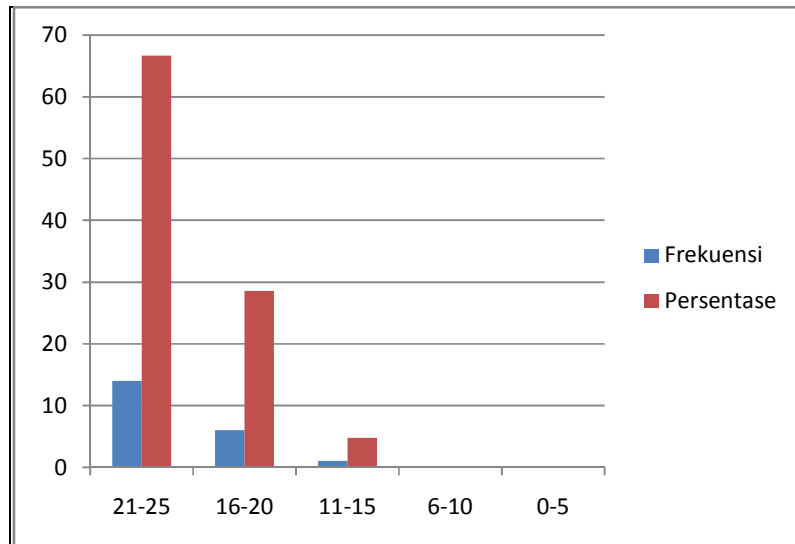
Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Hasil Perhitungan Nilai Test Pengetahuan Lingkungan Mahasiswa PGMI STAIN Watampone

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	21-25	14	67	Sangat Tinggi
2	16-20	6	29	Tinggi
3	11-15	1	5	Sedang
4	6-10	0	0	Rendah
5	0-5	0	0	Sangat

⁸⁷Akhadi Mukhlis. *Ekologi Energi*. (Cet I; Jakarta: Graha Ilmu, 2009), h.5.

Trendah		
Jumlah	21	100

Sumber: Data Primer, 2017



Gambar 4.2. Histogram Nilai Hasil Test Pengetahuan Lingkungan Mahasiswa PGMI STAIN Watampone

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa kondisi pengetahuan Mahasiswa PGMI pada frekuensi sedang berada di interval ke 3 yaitu range skor teoritis antara 11-15 sekitar 5% (1 orang dari total 21 responden). Hasil tersebut bermakna bahwa pengetahuan 1 orang responden memiliki nilai yang berada pada kategori Sedang. Kondisi lainnya yaitu kategori tinggi dengan frekuensi 29% (6 dari total 21 responden) terletak pada interval 2. Sedangkan kelompok responden kategori Sangat Tinggi dengan frekuensi 67% (14 orang dari total 21 responden) berada pada interval 1. Lebih jelasnya digambarkan melalui histogram pada Gambar 4.2

Berdasarkan hasil penelitian pada 21 orang mahasiswa PGMI semester 5 yang menjadi responden menunjukkan bahwa pengetahuan lingkungan mahasiswa PGMI STAIN Watampone semester 5 sudah sangat tinggi, karena ada 14 orang (64%) yang memiliki nilai tes pengetahuan yang Sangat Tinggi. meskipun masih ada 1 orang yang memiliki pengetahuan lingkungan masih alam kategori Sedang.

Deskripsi Sikap Terhadap Lingkungan Pada Mahasiswa PGMI STAIN Watampone

Berdasarkan hasil tes kecenderungan sikap lingkungan yang ditabulasikan dalam sebuah tabel (lihat Lampiran 3) kemudian dilakukan analisis data. Hasil analisis deskriptif data nilai test pengetahuan mahasiswa PGMI STAIN Watampone diperoleh hasil dari perhitungan

menggunakan *SPSS Statistic 20* (tersaji pada lampiran 6) dan dapat dilihat pada Table 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Analisis Deskriptif Data Nilai Sikap Mahasiswa PGMI STAIN Watampone

No	Uraian	Nilai
1	Skor Minimum	90
2	Skor Maksimum	119
3	Rentang Data	29
4	Rata-rata Hitung (Mean)	108
5	Median	111
6	Modus	114
7	Standar Deviasi	7.99

Sumber: Data primer, 2017

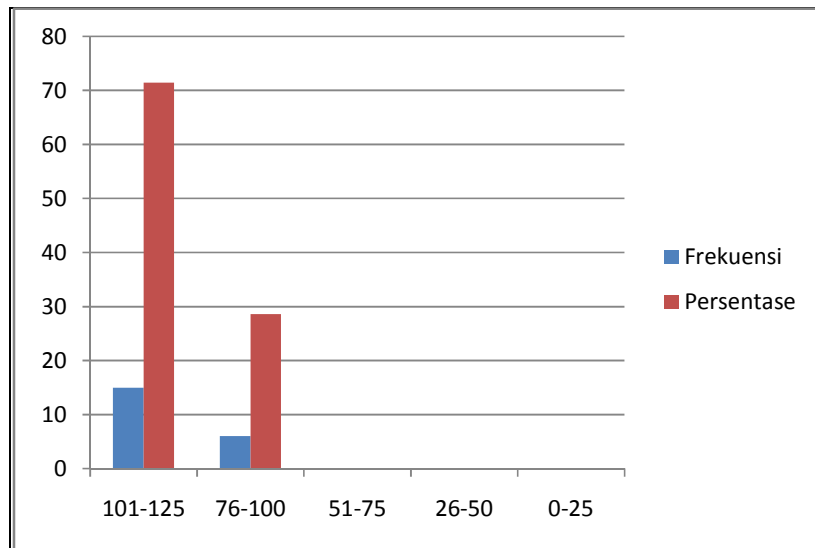
Berdasarkan Tabel 4.3, data hasil penelitian dengan jumlah butir 25 soal, jumlah sampel penelitian 21 orang mahasiswa PGMI diperoleh skor minimum 90; skor maksimum 119; rentang data 29; nilai rata-rata hitung (mean) 108; median (Me) 111; modus (mode) 114 dan standar deviasi 7.99.

Untuk mengetahui kategori skor maka disusun distribusi frekuensi kategori skor yang ditetapkan sebanyak lima interval yaitu; sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Jumlah butir soal 25, jumlah responden 21, skor minimum teoritis 0 dan skor maksimum teoritis 125 jumlah kelas kategori ditetapkan 5. Selanjutnya data hasil disusun ke dalam distribusi frekuensi pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Perhitungan Nilai Angket Sikap Terhadap Lingkungan Mahasiswa PGMI STAIN Watampone

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	101-125	15	71	Sangat Tinggi
2	76-100	6	29	Tinggi
3	51-75	0	0	Sedang
4	26-50	0	0	Rendah
5	0-25	0	0	Sangat Trendah
Jumlah		21	100	

Sumber: Data Primer, 2017



Gambar 4.3. Histogram Nilai Sikap Terhadap Lingkungan Mahasiswa PGMI STAIN Watampone

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa kondisi kecenderungan sikap terhadap lingkungan pada Mahasiswa PGMI STAIN Watampone berada di interval ke 2 yaitu range skor teoritis antara 76-100 sekitar 29% (6 orang dari total 21 responden mahasiswa PGMI). Hasil tersebut bermakna bahwa pengetahuan 6 orang responden memiliki nilai yang berada pada kategori Tinggi.

Kecenderungan sikap terhadap lingkungan pada mahasiswa PGMI STAIN Watampone semester 5 untuk range skor teoritis antara 101-125 berada pada interval pertama dengan persentase 76% (15 dari total 21 responden). Lebih jelasnya digambarkan melalui histogram pada Gambar 4.3.

Hasil ini menunjukkan bahwa kecenderungan sikap lingkungan mahasiswa PGMI STAIN Watampone sudah Sangat Tinggi, terlihat dari nilai responden yang sangat tinggi ada 15 orang (76%) dari total 21 orang responden.

Deskripsi Perilaku Lingkungan Hidup Pada Mahasiswa PGMI STAIN Watampone

Berdasarkan hasil tes perilaku lingkungan yang ditabulasikan dalam sebuah tabel (lihat Lampiran 4) kemudian dilakukan analisis data. Hasil analisis deskriptif data nilai test perilaku mahasiswa PGMI STAIN Watampone diperoleh dari perhitungan menggunakan *SPSS Statistic 20* (tersaji pada lampiran 7) dan dapat dilihat pada Table 4.5.

Tabel 4.5. Hasil Analisis Deskriptif Data Nilai Perilaku

No	Uraian	Nilai
1	Skor Minimum	75
2	Skor Maksimum	112
3	Rentang Data	37
4	Rata-rata Hitung (Mean)	95
5	Median	94
6	Modus	101
7	Standar Deviasi	8.49

Sumber: Data primer, 2017

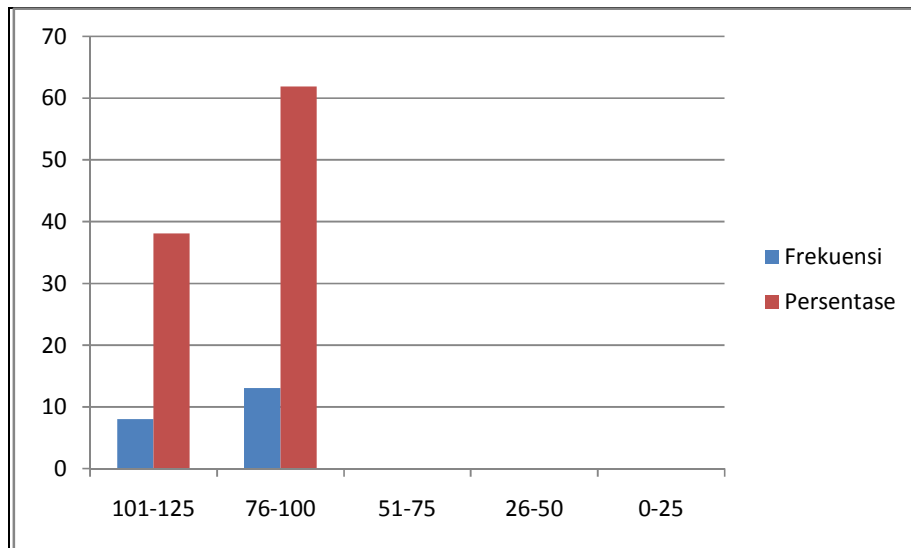
Berdasarkan Tabel 4.5, data hasil penelitian dengan jumlah butir 25 soal, jumlah sampel penelitian 21 orang mahasiswa PGMI diperoleh skor minimum 75; skor maksimum 112; rentang data 37; nilai rata-rata hitung (mean) 95; median (Me) 94; modus (mode) 101 dan standar deviasi 8.49.

Untuk mengetahui kategori skor maka disusun distribusi frekuensi kategori skor yang ditetapkan sebanyak lima interval yaitu; sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Jumlah butir soal 25, jumlah responden 21, skor minimum teoritis 0 dan skor maksimum teoritis 125 jumlah kelas kategori ditetapkan 5. Selanjutnya data hasil disusun ke dalam distribusi frekuensi pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Nilai Test Perilaku Lingkungan Mahasiswa PGMI STAIN Watampone

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	101-125	8	38	Sangat Tinggi
2	76-100	13	62	Tinggi
3	51-75	0	0	Sedang
4	26-50	0	0	Rendah
5	0-25	0	0	Sangat Trendah
		21	100	

Sumber: Data Primer, 2017



Gambar 4.4. Histogram Nilai Perilaku Lingkungan Mahasiswa PGMI STAIN Watampone

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa perilaku lingkungan Mahasiswa PGMI STAIN Watampone berada di interval ke 2 yaitu range skor teoritis antara 76-100 sekitar 62% (13 orang dari total 21 reponden mahasiswa PGMI). Hasil tersebut bermakna bahwa perilaku lingkungan mahasiswa PGMI STAIN Watampone 13 orang responden memiliki nilai yang berada pada kategori Tinggi. Perilaku lingkungan pada mahasiswa PGMI STAIN Watampone untuk range skor teoritis antara 101-125 berada pada interval pertama dengan persentase 38% (8 orang dari total 21 reponden). Lebih jelasnya digambarkan melalui histogram pada Gambar 4.4. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan sikap lingkungan mahasiswa PGMI STAIN Watampone sudah Sangat Tinggi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data secara kualitatif maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan lingkungan pada mahasiswa PGMI STAIN Watampone secara umum berada pada kategori Sangat Tinggi
2. Sikap terhadap lingkungan pada mahasiswa PGMI STAIN Watampone secara umum berada pada kategori Sangat Tinggi
3. Perilaku lingkungan pada mahasiswa PGMI STAIN Watampone secara umum berada pada kategori Tinggi
4. Pengetahuan, sikap dan perilaku lingkungan hidup kaitannya dengan Islam sangat erat. Agama Islam sangat menganjurkan agar manusia menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui *iqra* manusia berpengetahuan, bersikap positif pada lingkungan dan berperilaku

serta berakhlakul karim pada alam, karena dasar proses pendidikan bermakna adalah meng-Esa-kan Allah swt.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Mujiono. 2001. *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina
- Ajzen, I. & Fishbein, M. 1980. *Understanding Attitudes and Predicting social Behavior*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.
- Anita. W. 1993. *Educational Psychology*. Boston: Allyn and Bacon.
- Azwar, Saifudin. 2013. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bamberg, S. and Moser, G. 2007. Twenty Years After Hines, And Tomera. 2007 A New Meta Analysis Of Psycho-Social Determinants Of Proenvironmental Behavior. *The Journal Of Environmental Psychology*.
- Blake, J. 1999. Overcoming the 'value-action gap' in environmental policy: tensions between national policy and local experience, *Lokal environmental*.
- Bloom, Benjamin S. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. London: David Mc. Company Inc.
- Chiras, D.D. 1991. *Environmental Science: Action For Sustainable Future*. California: The Benjamin/Cummings Pub. Co. Inc.
- Clayton, S. & Myers, G. 2009. *Conservation psychology: understanding and promoting Human care for nature*. Oxford, UK: Blackwell.
- Gerungan. 2004. *Psikologi sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Hamzah, Syukri. 2013. *Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayati. 2009. Identifikasi Hambatan Perkembangan Belajar dan Pembelajaran. Workshop "Pengenalan Dan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus.
- Hines, J.M. Hungerford, H.R. & Tomera, A.N. 1986. Analysis and Synthesis of research on responsible pro-environmental behavior: meta-analysis. *The Journal Of Environmental Education*.
- Keraf, Sony. 2010. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Kollmuss, A & Agyeman. J. 2002. Mind The Gap: Why Do People Act Environmentally And What Are The Barriers To Proenvironmental Behavior? *The Journal Of Environmental Education Research*, Vol 8 No.3.
- Mangunjaya, F.M. 2005. *Konservasi Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2005. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, Afzalur. 2009. *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Quran*. Jakarta: Mizan Media Utama.
- Rusyan, Tabrani., dkk. 1992. *Pendekatan Dalam Roses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemarwoto Otto. 1997. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiono. 2013. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suriasumantri, Jujun S. 2010. *Filsafat Ilmu Sebuah pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yusuf, Maftuchah. 2000. *Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup*. Jakarta: lembaga studi dan inovasi pendidikan
- UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU RI No 20 tahun 2013 Tentang SISDIKNAS
- [http:// www. Alquran-digital.com](http://www.Alquran-digital.com)
- [http: ///stainwatampone.ac.id](http://stainwatampone.ac.id)

Bagian Hukum

**PROBLEMATIKA HUKUM MENGENAI KETIDAKHADIRAN
TERGUGAT DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN
(Analisis Terhadap Keabsahan Pemanggilan, Pembuktian Dan Hak
Tergugat yang Diberi Putusan Verstek)**

Rosita

Dosen STAIN Watampone

Pendahuluan

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering mengalami sengketa. Sengketa tersebut adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan keteganganyang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat mengajukan perkara gugatan kepada pengadilan (litigasi) sesuai dengan produser yang berlaku.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara baik gugatan (*contentiosa*) ataupun permohonan (*voluntaire*) yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia,

Oleh karena itu, pengadilan secara yuridis normatif dianggap sebagai sarana formal yang diharapkan berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Pengadilan dianggap mempunyai fungsi yang sangat mulia dan terhormat, suatu lembaga yang bebas dari segala pengaruh, atau dengan kata lain suatu penata yang mandiri atau onotom. Secara yuridis normatif pengadilan bahkan dikaitkan dengan tugas ketuhanan, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya akan melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan (kewajiban) dan

memperoleh apa yang seharusnya didapatnya (hak). Setiap manusia memiliki hak yang dapat diperolehnya sejak lahir (hak asasi) dan hak yang diperoleh karena diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Salah satu hak yang diberikan oleh perundang-undangan terkait dengan beracara di pengadilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan Pasal 28 D dan Pasal 28 H UUD 1945 serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diketahui bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Maksudnya, setiap orang yang memiliki masalah hukum berhak untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut melalui pengadilan tanpa mengenal status sosial, pendidikan dan tingkat ekonominya.

Ketika seseorang menggunakan haknya dengan mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan maka ia akan mulai beracara perdata dengan membuat gugatan, mendaftarkan gugatan, mengikuti persidangan dan terakhir jatuh putusan.

Persidangan di pengadilan seyogyanya berlangsung dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, yakni penggugat dan tergugat. Persidangan akan berlangsung sampai beberapa tahapan, mulai tahap mendamaikan antara penggugat dan tergugat, pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, konklusi atau kesimpulan, dan terakhir putusan hakim.⁸⁹

Rangkaian tahapan persidangan tersebut dalam kenyataan kadang tidak terlaksana seluruhnya. Hal ini disebabkan salah satu atau kedua belah pihak tidak pernah menghadiri persidangan. Dalam sidang pertama yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan para pihak telah dipanggil secara sah untuk hadir dalam sidang maka ada beberapa keadaan yang dapat terjadi pada persidangan pertama tersebut, yakni:

1. Penggugat tidak hadir, sedang tergugat hadir; atau
2. Tergugat tidak hadir, sedang penggugat hadir; atau
3. Tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan surat jawaban; atau
4. Penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir; atau
5. Penggugat atau tergugat sama-sama hadir.⁹⁰

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengkaji keadaan tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama sedangkan penggugat hadir. Perkara yang disidangkan dalam ketidakhadiran tergugat sedangkan penggugat hadir akan diberikan putusan verstek. Verstek merupakan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal yang telah ditentukan.

⁸⁸Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (andung: PT. Citra Aditya akti, 1997), h. 11

⁸⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 81

⁹⁰*Ibid*, h. 84

Metode

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone yang terletak di jalan MH. Thamrin Watampone. Lokasi penelitian ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa lembaga peradilan tersebut memiliki kompetensi absolut menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata. Lembaga peradilan tersebut telah banyak memutus perkara secara verstek atau diluarkehadiran tergugat dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan obyek penelitian yakni perkara perdata yang diberi putusan verstek.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal, yaitu penelitian studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses kerjanya hukum dalam masyarakat.⁹¹ Dengan kata lain, penelitian ini mengkaji dan menelaah kaidah hukum (*das sollen*), khususnya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Sekaligus mengkaji dan menelaah implementasinya (*das sein*) dalam masyarakat. Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana aturan hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum, begitu pula dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁹²

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan yuridis, yakni mendekati masalah yang dibahas dengan memperhatikan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara perdata khususnya tentang verstek.

b. Pendekatan empiris, yakni mendekati masalah yang dibahas dengan lebih menenkankan pada aspek fakta (*das sein*) atau perilaku yang diperankan dalam kaitannya pelaksanaan pemanggilan oleh jurusita pengadilan dan pemeriksaan perkara verstek oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone .

Apabila dilihat dari tujuan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena diharapkan dapat memberikan gambaran tentang suatu gejala atau suatu keadaan masyarakat tertentu. Penelitian deskriptif mengadakan deskripsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian deskriptif lebih spesifik dengan memusatkan perhatian

⁹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 43

⁹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 134-135

pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara variabel.⁹³

Pelaksanaan Pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Watampone

Salah satu tahap dalam hukum acara perdata sebelum sampai pada sidang pertama adalah dilakukan pemanggilan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang pertama di pengadilan yang berkompeten. Pemanggilan kepada para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengadilan.

Ketentuan pemanggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut, yakni:⁹⁴

1. Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu. Jurusita/jurusita pengganti berwenang melakukan tugasnya hanya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.
2. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya.

Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya maka panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat.

Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.

Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya maka panggilan dilakukan dengan cara mengumumkannya melalui surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

3. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya tiga hari kerja.

Perintah pemanggilan sidang ditentukan oleh penetapan ketua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, sehingga atas dasar penetapan tersebut jurusita melaksanakan pemanggilan kepada para pihak di tempat kediaman yang disebutkan dalam surat gugatan.

Berdasarkan Pasal 388 ayat (1) HIR diatur bahwa untuk melakukan pemanggilan, pemberitahuan, penyampaian yang bertujuan untuk melaksanakan perintah hakim dan putusan-putusan, maka jurusita dan petugas-petugas serta pejabat-pejabat umum memiliki kewenangan dan kewajiban yang sama.⁹⁵

Menurut Drs. Tayyib, SH., MH, pelaksanaan pemanggilan kepada penggugat dan tergugat dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti

⁹³S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. umi Aksara, 2003). h. 24

⁹⁴Mukti Arto, *op. cit.*, h. 61

⁹⁵D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h.66

yang sah di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Watampone dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja (tidak termasuk hari libur) sebelum sidang pertama. Apabila pihak yang dipanggil berada di wilayah hukum Pengadilan Agama lain, maka jurusita/jurusita pengganti harus meminta bantuan kepada Pengadilan Agama lain tersebut agar pihak yang bersangkutan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti setempat. Apabila jurusita/jurusita pengganti setempat telah melaksanakan pemanggilan kepada terdapat, maka ia harus mengirimkan relaas panggilan kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan tersebut⁹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa seorang jurusita hanya berwenang melakukan pemanggilan dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan, artinya jika pihak yang dipanggil berada di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka pemanggilan tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip delegasi. Dengan demikian, apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar Kabupaten Bone, maka pemanggilan harus dilakukan oleh jurusita pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal pihak yang dipanggil.

Peran Hakim Menilai Kebenaran Alat Bukti yang Diajukan Secara Sepihak oleh Penggugat Sebagai Dasar Untuk Memutus Perkara

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salahsatu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, sehingga hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara obyektif melalui pembuktian.

Pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan.

Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara perdata sangat terkait dengan konsep kebenaran formil yang dianut dalam hukum acara perdata. Kebenaran formil tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, hakim berfungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran dengan nilai fakta yang ada di persidangan dan terbatas apa yang diajukan oleh pihak dalam persidangan.

Ketentuan dalam hukum acara perdata, hakim memiliki kebebasan dalam menilai pembuktian. Apabila alat bukti cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan maka kewajiban hakim untuk mengabulkan gugatan tersebut.

⁹⁶Drs. Tayyib, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, Wawancara, Watampone, tanggal 28 November 2017

Pemeriksaan perkara perdata yang tidak dihadiri oleh tergugat berakibat pembebanan pembuktian hanya diberikan kepada satu pihak saja, yakni kepada pihak penggugat saja. Salah satu hal yang dilaksanakan di Pengadilan Agama kelas IA Watampone adalah melaksanakan proses pembuktian sebelum menjatuhkan putusan verstek. Hal ini merupakan sikap kehati-hatian para hakim agar jangan sampai putusan yang dijatuhkan merugikan pihak tergugat dan mengganggu kepentingan pihak lain (pihak ketiga) yang tidak turut terlibat di dalam perkara yang disengketakan.⁹⁷

Pemeriksaan perkara yang tidak dihadiri oleh tergugat di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone dilakukan secara sederhana tanpa harus melalui seluruh tahapan persidangan. Menurut Drs. Tayyib, SH., MH, pemeriksaan perkara verstek di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone biasanya dilakukan secara cepat dan sederhana, yakni tidak melalui tahap mediasi karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maksimal tiga kali pemanggilan dan pihak tergugat tetap tidak datang menghadap ke persidangan, maka persidangan perkara tersebut akan dilanjutkan yang dimulai dengan penyampaian gugatan oleh pihak penggugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan terakhir pembacaan putusan. Apabila hakim ragu-ragu atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka hakim dapat menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan asas *audi et alteram partem*, penggugat dan tergugat berhak untuk didengarkan oleh hakim, termasuk keduanya berhak untuk mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil masing-masing. Namun lain halnya dalam persidangan yang hanya dihadiri pihak penggugat, pembuktian otomatis hanya akan dilakukan oleh satu pihak yakni penggugat.

Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat yang Dijatuhi Putusan Verstek

Ciri khas dalam putusan verstek adalah menyangkut upaya hukum. Terhadap putusan yang dijatuhkan secara verstek karena tergugat tidak pernah hadir pada sidang pertama, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat adalah mengajukan upaya hukum perlawanan yang biasa disebut *verzet*, sedangkan bagi pihak penggugat jika merasa tidak puas dengan isi putusan verstek yang dijatuhkan, dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

Jadi bagi tergugat putusan verstek bukanlah sebagai putusan akhir sepanjang ia masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum *verzet* karena dengan diajukan *verzet* maka perkara akan dibuka lagi dari awal

⁹⁷Drs. Tayyib, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, Wawancara, Watampone, tanggal 28 November 2017

seakan-akan tidak pernah ada putusan. Namun jika tergugat tidak menggunakan upaya verzet maka putusan tersebut menjadi putusan akhir dan dapat dieksekusi pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Bagi penggugat, putusan verstek merupakan putusan akhir karena penggugat tidak diberikan hak untuk mengajukan verzet sebagaimana terhadap tergugat. Hak yang dimiliki oleh penggugat hanyalah banding ke pengadilan tinggi.

Adapun tenggang waktu pengajuan verzet adalah:

1. Jika diberitahukan langsung kepada tergugat, maka berlaku jangka waktu verzet selama 14 hari sejak pemberitahuan.
2. Jika tidak diberitahukan secara langsung kepada si tergugat, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari ke delapan setelah teguran/*aanmaning*.
3. Jika atas teguran/*aanmaning* tergugat tidak hadir, maka dapat diajukan sampai hari ke delapan sesudah dijalankan sita eksekusi.⁹⁸

Pengajuan upaya hukum verzet mengakibatkan perkara akan dibuka kembali dari awal seakan-akan tidak pernah ada putusan verstek. Tuntutan verzet dibuat seperti gugatan biasa, yaitu tertulis dan tandatangani oleh tergugat sendiri atau oleh kuasanya apabila ia telah menunjuk kuasa khusus. Pengajuan verzet ditujukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan verstek dengan tetap melakukan pendaftaran dan pembayaran panjar biaya perkara.

Adapun putusan hakim yang dijatuhkan atas upaya hukum verzet dapat mengandung beberapa kemungkinan, antara lain:

- a. Mengabulkan gugatan pihak tergugat (pelawan) sehingga oleh karenanya juga membatalkan putusan verstek. Berarti tergugat dianggap telah sanggup membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan juga mampu untuk membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat (terlawan).
- b. Menolak perlawanan dari tergugat (pelawan), sehingga oleh karenanya juga menguatkan putusan verstek. Dalam hal perlawanan pelawan ditolak berarti pelawan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya dan sebaliknya terlawan mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.
- c. Menyatakan perlawanan tidak dapat diterima sehingga oleh karenanya juga menguatkan putusan verstek. Dalam hal perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima jika perlawanan yang diajukan oleh tergugat melanggar aturan tertib beracara di pengadilan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

⁹⁸D.Y. Witanto, *op., cit.*, h. 149-154

1. Tatacara pelaksanaan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Watampone kepada para pihak yang terpanggil pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata walaupun belum maksimal. Jurusita menyampaikan surat pemanggilan paling lambat tiga hari kerja sebelum tanggal sidang pertama akan dilaksanakan. Surat panggilan diserahkan oleh jurusita langsung kepada yang terpanggil di alamatnya atau dititipkan di kepala desa/lurah apabila pihak yang terpanggil tidak dijumpai di alamatnya. Apabila yang terpanggil tidak diketahui keberadaannya maka akan dilakukan pemanggilan gaib, yakni mengumumkannya lewat siaran radio Suara Daya Indah (SDI) yang ada di Kabupaten Bone dan tidak mengumumkan lewat surat kabar yang wilayah pemasarannya bersifat nasional.
2. Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone yang menerima, memeriksa dan memutus perkara verstek tetap mewajibkan kepada pihak penggugat untuk melakukan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Namun proses pembuktian dilaksanakan secara sederhana dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara dengan tetap melakukan pemeriksaan kebenaran gugatan. Hal ini tidak melanggar asas *audi et alteram partem* karena sebelumnya pihak tergugat telah di panggil secara sah dan patut namun tidak menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah. Hal ini dianggap bahwa tergugat melepaskan haknya dan mengakui kebenaran gugatan penggugat. Oleh karena itu hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara tanpa memeriksa alat bukti tergugat.
3. Terhadap putusan yang dijatuhkan secara verstek karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perlindungan hukum yang dimiliki oleh tergugat adalah melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya hukum verzet. Verzet diajukan ke pengadilan tingkat pertama yang telah memberikan putusan verstek. Verzet diajukan dalam tenggang waktu selama 14 hari sejak pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat. Jika tidak diberitahukan secara langsung kepada si tergugat, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari ke delapan setelah teguran/*aanmaning*. Jika atas teguran/*aanmaning* tergugat tidak hadir, maka dapat diajukan sampai hari ke delapan sesudah dijalankan sita eksekutorial.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, *Menang Dalam Perkara Perdata*, Ujung Pandang: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 1997
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

- Anshoruddin, *Hukum pembuktian Menurut Hukum acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Bandung: Mandar Maju, 2013
- Effendi, Ahtiar, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian dalam perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Mertokusomo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Mujahid, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Imiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

**HUMAN TRAFFICKING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (Analisis Putusan No.
1716/PID/2016/PN.Watampone)**

Hj. St. Rahmawati

Dosen STAIN Watampone

Pendahuluan

Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga di atur pula oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah lainnya.⁹⁹

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya praktik perdagangan orang.

Perdagangan orang korban utamanya yaitu perempuan dan anak-anak ini merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi yang melibatkan berbagai kalangan dan bangsa. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari kejahatan antar bangsa yang terorganisasi (*transnational organized crime*) di samping tindak kejahatan terorganisasi lainnya seperti penyelundupan imigran, penyelundupan senjata api, korupsi, pencucian uang (*money laundering*) dan sebagainya.

Isu tentang perdagangan perempuan dan anak pertama kali dikemukakan pada sebuah konvensi internasional yang diadakan di Paris pada tahun 1885, pada konvensi ini belum ada konstitusi mengenai perdagangan orang dalam peraturan negara-negara peserta maupun dari konvensi yang sudah ada. Selain itu juga belum terdapat pula tindakan-tindakan preventif apalagi perlindungan bagi korban- korban *trafficking in women*.¹⁰⁰

Hal ini dapat dilihat pada konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention for the Elimination of Discrimination Against Women/ CEDAW*). Kemudian isi CEDAW tersebut

⁹⁹Chaidir Ali, *Filsafat Hukum* (Bandung: Memories Book, 1972), h. 5.

¹⁰⁰Benniger Carinet. All, *Violence Against Women* (Report, Switzerland: OMCT, 1999), h. 185.

diratifikasikan oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 dalam pasal 6 yang berbunyi: “ Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan Undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan eksploitasi pelacuran .”

Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak (*International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children*), seperti yang di amandemen dengan protokol yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Oktober 1947.¹⁰¹

Banyak kejadian sehari-hari yang membuat banyak orang peduli masalah hak- hak asasi manusia adalah semakin meningkatnya bentuk-bentuk pelanggaran hak anak didepan mata, dapat disaksikan bagaimana anak-anak kecil yang seharusnya duduk manis dibangku sekolah terpaksa mengemis dan remaja-remaja yang putus sekolah terpaksa menjadi pedagang asongan untuk bisa bertahan hidup dan semakin banyak anak-anak remaja putri yang dilacurkan.¹⁰²

Secara umum, pada dasarnya hak anak adalah hak asasi manusia. Hak anak seperti yang digambarkan pada konvensi PBB tentang hak-hak anak, pada dasarnya menyangkut hak-hak yang melekat pada anak sebagai karunia Tuhan.¹⁰³

Pengertian Perdagangan Orang Secara Umum

Definisi *trafficking*: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau member, atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.¹⁰⁴

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai *trafficking* tapi penulis mendefinisikan *trafficking* sebagai perdagangan. Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk

¹⁰¹LBH Apik, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan* (Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999), h. 4.

¹⁰²Mansoer Fakhri, *Bebas dari Neoliberalisme* (Cet. I. Jakarta: Insist Press, 2003), h. 87.

¹⁰³Mansoer Fakhri, *Bebas dari Neoliberalisme*, h. 89.

¹⁰⁴ Sari Dian Kartika, “Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum” (makalah di sampaikan pada semiloka sehari Woman Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya, Jakarta, 8 Agustus 2015).

memperoleh keuntungan. Memperdagangkan = menjual belikan secara niaga.¹⁰⁵

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerahtherimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut.¹⁰⁶

Misalnya:

1. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari.
2. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi.
3. Diambil organ tubuh.

Perdagangan anak adalah kegiatan sebagaimana diatas terhadap mereka yang belum berusia 18 tahun, klasifikasi ini merujuk pada konvensi hak anak yang dikeluarkan PBB dan sejak tahun 1990 telah di ratifikasi melalui kepres No. 36 tahun 1990.¹⁰⁷

Pasal 1 Konvensi tersebut menyatakan bahwa: *Seorang anak berarti setiap orang laki-laki atau perempuan yang berusia dibawah 18 tahun.*

Sedangkan menurut protokol PBB, yang dimaksud dengan perdagangan perempuan dan anak adalah:

“Segala tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan tangan, pemberangkatan, atau penerimaan perempuan dan anak dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, bujukan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi kerentanan (termasuk situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan bebas), atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai keinginan untuk menguasai orang lain”.¹⁰⁸

Pemicu Praktek Perdagangan Orang

Ada 2 (dua) faktor yang menjadi pemicu perdagangan perempuan dan anak: yaitu faktor pendorong dan penarik.

1. Faktor Pendorong¹⁰⁹

¹⁰⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta Balai Pustaka, 1988), h. 180.

¹⁰⁶Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan* (Jakarta:t.t.), h.1.

¹⁰⁷LBH Apik, *Waspada! Sindikat Perdagangan Anak Perempuan* (Jakarta: 2012), lembar info, seri 19, h.1.

¹⁰⁸ LBH Apik, *Suara Apik* (Edisi 20; Jakarta), h. 10.

¹⁰⁹LBH Apik, *Suara Apik*, h. 3.

a. Meningkatnya jumlah keluarga miskin.

Arus globalisasi dan kemiskinan yang semakin meluas sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah faktor yang berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah *trafficking*. Jika dilihat dari posisi perempuan yang selalu terpinggirkan, ter subordinat dari laki-laki dan nilai patriarki yang telah melekat dalam masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa berpotensi besar menjadi korban *trafficking* adalah perempuan dan anak.

Saat ini 37 juta jiwa dari 225 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga perdesaan membelanjakan kurang dari Rp 5.000,-/ hari.

b. Keterbatasan Lapangan Kerja.

Faktor keterbatasan lapangan kerja bagi para perempuan, ditunjang dengan minimnya kesempatan untuk bekerja, juga telah menciptakan kemiskinan yang semakin meluas bagi perempuan (*feminisme kemiskinan*) sehingga mendorong perempuan untuk berimigrasi (*feminismemigrasi*).

c. Lemahnya Negara dalam Menegakkan Hukum.

Faktor lain yang menjadi pemicu *trafficking* adalah lemahnya Negara dalam penegakkan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar (asasi) warga negara seperti hak untuk hidup bebas, bebas dari rasa takut dan hak atas pekerjaan yang layak.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan arus perdagangan perempuan dan anak meningkat. Sehingga tidak heran bila Komisi Hak Asasi PBB memasukkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai Negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menghapus perbudakan dan perdagangan manusia.

d. Meningkatnya angka putus sekolah diberbagai tingkat pendidikan.

e. Maraknya konflik sosial diberbagai daerah.

f. Keluarga tidak harmonis.

g. Perceraian akibat pernikahan dini.¹¹⁰

2. Faktor Penarik¹¹¹

a. Glamornya kehidupan di kota-kota besar

b. Mudahnya mendapatkan uang di kota-kota besar dan luar negeri

c. Adanya janji-janji yang menggiurkan dari para calo tentang

¹¹⁰ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Konsep Naskah Akademik Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafficking)*, (Jakarta: November, 2002), h. 8.

¹¹¹ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Konsep Naskah Akademik Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafficking)*, h. 10.

mudahnya mencari uang dikota

d. Kecanduan narkoba

e. Mudahnya mengakses informasi dan komunikasi

Selain 2 (dua) faktor di atas, ada juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya kepercayaan para konsumen (laki-laki hidung belang) bahwa berhubungan seks dengan anak-anak dapat sebagai obat kuat, obat awet muda, mendatangkan hoki tertentu.

Ada juga yang memandang bahwa anak-anak masih bersih dari penyakit kelamin karena belum banyak yang “memakainya” sehingga lebih menambah selera konsumen.

Orang tua kadangkala memandang anak-anak sebagai asset yang mendatangkan keuntungan besar, karena tingginya tingkat harga keperawanan.¹¹²

Permintaan pasar yang cukup tinggi, telah membuat sebagian orang tua tergiur untuk menjual anaknya kepada calo pelacuran. Di sisi lain kondisi ini, karena kondisi keluarga yang sangat kekurangan, terdapat indikasi bahwa anak sendiri yang menawarkan kepada calo pelacuran dengan harapan uang yang diperolehnya dapat digunakan untuk membiayai hidupnya.

Bentuk-bentuk Perdagangan Orang

Mempelajari kasus-kasus yang terungkap di media massa, bahwa fenomena perdagangan manusia tampaknya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk.

1. Perdagangan anak untuk dipekerjakan di jermal (lepas pantai)

Jumlah pekerja anak dibidang ini tidak dapat diketahui pasti. Dinas perikanan tingkat I menyatakan bahwa jumlah jermal telah berkurang dari 344 ditahun 1988 menjadi hanya 144 pada tahun 1997. Sedangkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan bahwa jumlah jermal yang aktif lebih banyak. Dengan perkiraan 603 sampai 1804 anak bekerja di dalamnya. Ini tidak termasuk jermal kecil yang disebut tangkul sebagian besar dari anak yang dipekerjakan berjenis kelamin laki-laki.¹¹³

2. Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga).

Anak-anak dan perempuan dewasa, tanpa persetujuan dan kehendak mereka dipekerjakan sebagai pekerja domestik, seringkali sebelumnya mereka dibanjiri janji-janji dan bujukan untuk disekolahkan dan dipekerjakan di tempat lain, atau memperoleh gaji yang besar.

¹¹² Suryanto, *Bekerjanya Sindikat Perdagangan Anak Perempuan* (Edisi XI; Jakarta: Child Trafficking News, 2012), h.28.

¹¹³ Publikasi Komnas Perempuan, *Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Mei 2015), h.122.

Perempuan diimangi-imingi janji dan kemudian dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga adalah fenomena yang telah lama berlangsung. Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa korban penyelundupan anak dan orang dewasa, umumnya berjenis kelamin perempuan. Dari kasus yang terungkap, usia korban yang termuda adalah 11 (sebelas) tahun. Kegiatan penyelundupan dan perdagangan anak untuk kerja domestik adalah untuk memenuhi permintaan lokal dan Internasional. Tujuan lokal pada umumnya adalah kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, sementara itu tujuan Internasional beragam, antara lain Brunei, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Emirat Arab, dan Saudi Arabia.¹¹⁴

3. Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pengemis

Kita mendapati bahwa di kota-kota besar sangat umum anak-anak dan perempuan menyebar dijalanan menjadi peminta-minta. Anak-anak yang teramat kecil bahkan bayi ikut dilibatkan. Ada indikasi balita dan bayi itu diperdagangkan atau disewakan untuk keperluan mengemis.

Penelitian di Batam dan Bali mengindikasikan adanya praktek-paraktek pemaksaan untuk mengambil anak-anak dari desa miskin untuk kemudian dipekerjakan dijalanan. Di Medan ditemukan kasus penyewaan anak dan bayi untuk mengemis. Kasus di Bali menunjukkan bahwa yang menjadi korban jenis perdagangan ini umumnya anak-anak berusia sangat muda antara 5 (lima) tahun hingga 9 (sembilan) tahun, dan ditemukan pula beberapa bayi berusia di bawah 1 tahun.¹¹⁵

4. Perdagangan perempuan dan anak untuk narkoba

Satu bentuk eksploitasi yang sangat mengerikan adalah pemanfaatan perempuan dan anak dalam berbagai bentuknya untuk peredaran NAPZA. Fakta ini telah ditemukan kembali, anak yang dijerat dalam perdagangan dan penyelundupan tipe ini dapat berusia sangat dini mulai dari usia 1 (satu) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

Belum ada kejelasan mengenai tujuan perdagangan anak. Meski demikian terungkap adanya kasus bayi yang diadopsi, dan ternyata kemudian bayi ini dibedah tubuhnya untuk dimasuki narkoba dan kemudian sang bayi dikirim. Dan ditemukan pula kasus dimana anak asuh diobjektivikasi sedemikian rupa dengan cara tubuhnya dimasuki

¹¹⁴ Publikasi Komnas Perempuan, *Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia*, h. 123.

¹¹⁵ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: SGIFF- CDA, the Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2015), h.139.

narkoba melalui dubur, dan sang anak kemudian dikirim keluar negeri. Ada indikasi bahwa posisi Bali sebagai daerah transit.¹¹⁶

5. Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks

Jarang sekali perempuan masuk dalam dunia prostitusi dengan kehendak sendiri. Masuknya perempuan dalam dunia pelacuran sangat dimungkinkan oleh berbagai faktor yang melingkupi mereka. Perdagangan perempuan tampaknya menjadi suatu yang lumrah/ terbuka. Orang tua, anggota keluarga lain, masyarakat dan aparat kesemuanya ikut terlibat.

Yayasan Kusuma Buana menemukan banyak usia 13-16 tahun yang dipekerjakan di lokasari Mangga Besar, Jakarta, sementara itu kompleks peacuran yang sering disebut “ terbesar di Asia Tenggara”, yakni kompleks pelacuran Dolly, Surabaya, diduga menampung sekitar 600-700 pekerja seks, dan 10% diantaranya di bawah umur. Sebagian dari mereka masuk dalam dunia pelacuran karena “dijual oleh orang tuanya sendiri”.¹¹⁷

6. Perdagangan anak sebagai konsumsi fedofil

Eksplorasi anak oleh fedofil dapat terjadi dimanapun. Kadangkala media membiarkan anak menjadi korban eksploitasi orang dewasa, tetangganya, guru atau pihak-pihak lain. Tetapi perdagangan anak sebagai konsumsi fedofil melibatkan jaringan tersendiri, sangat rapi terorganisir, bersifat Internasional dan melibatkan orang-orang asing.¹¹⁸

Korban fedofil pada umumnya anak laki-laki yang berusia 9-12 tahun. Penderita fedofil umumnya memiliki sikap santun yang merupakan upaya tipuan, terutama pada anak-anak, banyak orang tua korban yang terkecoh tanpa curiga sedikitpun.

Indonesia menjadi target alternatif untuk turisme seks anak (*Child Sexs Tourism*) dan jaringan feodfil internasional. Jaringan Fedofil Internasional telah menyusup diberbagai Negara. Dari hasil penelitian Universitas Udayana-Bali, diketahui bahwa jaringan tersebut telah menyusup pula di Indonesia, diantaranya diidentifikasi di daerah Karang Asem-Bali.

7. Perdagangan perempuan dalam bentuk “perkawinan trans-nasional”

¹¹⁶Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, h. 148.

¹¹⁷Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, h. 142.

¹¹⁸ Publikasi Komnas Perempuan, *Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Mei 2011), h.135.

Suatu fenomena yang mulai terungkap adalah bentuk perkawinan trans nasional yang tampaknya bisnis sangat menguntungkan bagi pihak-pihak didalamnya. Sebagai contoh adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan-perempuan keturunan cina di Kalimantan Barat untuk dikawinkan dengan lelaki “pemesan” dari Taiwan dan Hongkong.

Menurut data dari *Taiwan Economic Trade Organization* (TETO), perwakilan pemerintah Taiwan yang berwenang memberi visa, sejak tahun 1992 setiap tahunnya lebih dari 2.000 perempuan Indonesia menikah dengan lelaki Taiwan dan memperoleh izin untuk pergi ke Taiwan karena alasan perkawinan, penelitian berhasil memperlihatkan bahwa perkawinan yang dimasuki bukanlah bentuk perkawinan romantis-emosional, melainkan bentuk pertukaran. Yang ditukarkan adalah pemenuhan ekonomi pihak-pihak yang menyerahkan atau menggaet sang perempuan, khususnya orang-orang yang terlibat dengan bisnis ini, dengan tubuh dan keseluruhan diri perempuan.¹¹⁹

Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia ternyata tidak hanya untuk eksploitasi seks semata tetapi masih banyak lagi bentuk lain seperti perdagangan perempuan dan anak untuk pengemis, narkoba, adopsi palsu, pedophilia, pekerja jermal, dan terakhir yang kita ketahui untuk perkawinan trans-nasional. Pada kita tahu bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sacral dan suci, jadi ironis sekali jika perkawinan dijadikan sebagai ladang bisnis dan hanya untuk memperoleh keuntungan semata.

Disisi lain *trafficking* perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual mendatangkan keuntungan terbesar ke tiga setelah perdagangan senjata dan obat. Sesuai dengan tekad bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia serta penegasan HAM, *trafficking* perempuan dan anak harus menjadi isu utama yang harus diatasi.

Modus Kejahatan Perdagangan Orang

Umumnya pelaku yang biasanya sudah berupa jaringan atau sindikat mencari korbannya ditempat-tempat ramai, seperti pusat pertokoan, mall, café-café ada pula disekolah-sekolah dan tempat kursus. Banyak pula yang mencari di daerah pinggiran kota atau desa-desa miskin.¹²⁰

¹¹⁹Andy Yentriyani, *Trafficking Women lewat Perkawinan Trans Nasional: Indonesia-Taiwan dalam Kerangka Sistem Dunia*, Skripsi Sarjana Hukum, (Depok: Perpustakaan UI, 2014), h. 20.

¹²⁰ LBH Apik, *Lembar Info*, seri 19, h. 1.

Dan pola-pola perdagangan perempuan dan anak perempuan sebagai berikut:¹²¹

1. Perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi dipersiapkan oleh orang tua dibantu oleh masyarakat pada saat perekrutan.
2. Untuk pembantu rumah tangga dengan merekrut anak-anak perempuan dari desa untuk menjadi pembantu rumah tangga di kota, dengan penipuan, janji-janji untuk diberi pelatihan dan gaji besar.
3. Sebagai pengedar narkoba, anak-anak yang sudah ketergantungan narkoba ternyata tidak ditolong untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi justru dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan besar untuk mengedarkan dan menjual narkoba.
4. Penyalahgunaan kekuasaan yaitu, orang yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar, menyuruh perempuan dan anak-anak untuk mengikuti seseorang untuk bekerja ke suatu tempat yang ternyata perempuan dan anak tersebut dijual.¹²²

Penyebab maraknya tindak pidana *trafficking* di Indonesia disebabkan karena "cantiknya" teknik yang dilakukan para trafficker dalam merekrut dan membujuk para korban, agar masuk dalam perangkap mereka apalagi dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Tentu saja itu semua tidak terlepas dari lemahnya perempuan dalam menolak dan menghindari bujukan *trafficker*.

Akibat-akibat Perdagangan Orang

1. Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari banyak situasi yang sebenarnya perdagangan orang, misalnya pembantu rumah tangga yang tidak digaji selama bertahun-tahun.
 - a. Kekerasan mental terjadi ketika korban terisolasi dari luar karena ia tidak dapat berhubungan dengan keluarga, teman maupun lawan jenis. Mendapatkan makian yang merendahkan martabat kemanusiaannya.
 - b. Kekerasan fisik sudah terjadi ketika seseorang harus bekerja diluar jam kerja, dipukul, dijambak selain bentuk yang lebih jelas seperti perkosaan.
2. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat makin terpinggirkan sebagai korban perdagangan, karena tidak adanya penghormatan terhadap hak-hak asasi masyarakat khususnya hak asasi perempuan.

¹²¹Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Konsep Naskah Akademik Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafficking)*, (Jakarta: November, 2002), h. 10.

¹²²Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), *Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan* (Jakarta), h. 3.

3. Akibat kekerasan, pemerasan apalagi pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menimbulkan penderitaan yang sangat dalam dan membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan untuk bertahan hidup seorang perempuan.
4. Mengakibatkan perempuan dan anak-anak perempuan terjebak dalam bisnis pelacuran.
5. Stigmatisasi yang dikenakan pada perempuan dan anak yang pernah dieksploitasi dalam pelacuran misalnya merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.¹²³

Akibat yang ditimbulkan oleh *trafficking* sangat besar dampaknya terhadap kehidupan dan masa depan perempuan dan anak, perempuan dan anak merasa dirinya sudah tidak berharga lagi karena hak asasinya sebagai manusia telah dirampas. Merekapun harus menerima berbagai macam stigma yang buruk dari masyarakat, dan karena stigma itu pula bisa menghambat perkembangan psikologis dan kehidupan sosialnya.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, yang berkaitan tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis putusan No. 1716/PID/2016/PN.Watampone), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Definisi *trafficking*: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi, atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Dampak negatif dari *Trafficking* arus globalisasi dan kemiskinan yang semakin meluas sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah faktor yang berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah *trafficking*. Jika dilihat dari posisi perempuan yang selalu terpinggirkan, ter subordinat dari laki-laki dan nilai patriarki yang telah melekat dalam masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa berpotensi besar menjadi korban *trafficking* adalah perempuan dan anak.

Daftar Pustaka

- Ali, Chaidir. *Filsafat Hukum*. Bandung: Memories Book, 1972.
Alimi, Moh. Yasir et. all. *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Jakarta: LKIS, 1999.

¹²³Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), *Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan*, h. 4-5.

- Astuti, Indah Jati. "Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Studia Islamica* Fakultas Syaria'ah UIN Jakarta, 2007.
- Carin, Benniger et. all. *Violence Againts Women. A Report*, Switserland: OMCT, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta Balai Pustaka, 1988.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2001.
- Fakih, Mansoer. *Bebas dari Neoliberalisme*. Cet. I. Jakarta: Insist Press, 2003.
- Gosita, Arif. *Masalah Pekerja Anak di Indonesia, Sebagian Bagian dari Sistem Kesejahteraan Anak* (suatu makalah workshop pekerja anak). Jakarta: 15-16 Juli 1999.
- http://www.suara_merdeka.com/harian/0503/17/nas04.htm, diakses pada 11 Juni 2017.
- <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/1128-pandangan-islam-terhadap-perbudakan-dan-perdagangan-manusia.html>.
- Hasanudin, AF. *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Jurnal Ahkam 2003.
- Kartika, Sari Dian. "Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum" (makalah di sampaikan pada semiloka sehari Woman Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya, Jakarta, 8 Agustus 2015).
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. *Konsep Naskah Akademik Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafficking)*. Jakarta: November, 2002.
- Khamaeni, S.M. *Risalah Hak Asasi Wanita*. Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2004.
- Koalisi Perempuan Indonesia. *Makalah Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*. Jakarta: t.t.
- Komnas Perempuan. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Cet. I; Jakarta: SGIFF- CDA, the Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2015.
- Kusumah, Mulyono W. (ed). *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- LBH Apik. *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Galang, 2012
- al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Cet. III; Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.
- Publikasi Komnas Perempuan. *Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Mei 2015.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Anti Trafficking Jawaban atas Berbagai KasusKejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: Fahmina Institut, 2006.
- al-Qadir Abd. Audah. *At-Tasyri' Al-Islamiy*. Juz 1; Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, tt.

- Sabiq, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid II; Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Cet. IV; Jakarta: Mizan, 1993.
- Sudyadilaga, M. Alfatih. "Trafficking dalam Hadis dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian" dalam jurnal an-Nur vol. II, no. 5, September 2006.
- Suryanto. *Bekerjanya Sindikat Perdagangan Anak Perempuan*. Edisi XI; Jakarta: Child Trafficking News, 2012.
- Syarif, Ali Imran. "Trafficking dalam Perspektif Hadis dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan" dalam jurnal an-Nur vol. II, no. 6, September 2007.
- Undang-undang Perlindungan Anak. Cet. I; Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004),h.58.
- Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1999. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Yentriyani, Andy. *Trafficking Women lewat Perkawinan Trans Nasional: Indonesia-Taiwan dalam Kerangka Sistem Dunia*, Skripsi Sarjana Hukum. Depok: Perpustakaan UI, 2014.

IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT PADA UPZ KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

Muhammad Hasbi¹, Mujahidin² dan Kamiruddin³

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Karya ini membahas tentang bagaimana pengumpulan, dan pendistribusian zakat melalui UPZ Kementerian Agama di Kabupaten Bone, bagaimana implementasi regulasi zakat melalui UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bone, bagaimana pendayagunaan zakat melalui UPZ Kementerian Agama di kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini, yaitu: Pertama, untuk mengetahui proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat yang dikelola UPZ pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Untuk mengidentifikasi implementasi regulasi zakat pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, untuk mengetahui proses pendayagunaan zakat melalui UPZ Kementerian Agama di Kabupaten Bone.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang sumber data berupa primer dan data sekunder serta informan sebagai pendukung. Adapun data yang di ambil, yaitu: Data dari UPZ Kementerian Agama, hasil wawancara, hasil pengamatan langsung, dan angket. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis formal. Instrumen penelitian: wawancara, field note, dan dokumentasi. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara deskriptif, kritis, dan interpretatif. Teknik analisis data dengan menggunakan pengorganisasian data hasil wawancara, membuat reduksi data, membuat penafsiran data hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan, dan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian, pengumpulan harta zakat oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bone belum maksimal. Pendistribusian belum sesuai sasaran peruntukan zakat yaitu delapan asnaf. Implementasi regulasi zakat secara struktural sudah sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Pasal 10. Adapun pengumpulan zakat belum berjalan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 karena belum ada dana zakat yang dikumpulkan hanya terbatas infak para pegawai lingkup Kementerian Agama. Pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan infak di UPZ Kementerian Agama

Kabupaten Bone belum mengenai sasaran sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 bahwa peruntukannya delapan asnaf.

Implikasi dalam penelitian ini, yaitu: pertama, kebijakan pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Kementerian Agama harus dioptimalkan dengan melakukan sosialisasi secara intensif kepada para pegawai lingkup Kementerian Agama terutama memberikan pemahaman yang utuh tentang kewajiban berzakat, kedua, kepada pemimpin atau umara dalam lingkup Kementerian Agama memberikan himbauan melalui surat edaran kepada seluruh pegawai untuk menyalurkan zakatnya melalui UPZ, ketiga, UPZ Kementerian Agama agar terus berupaya untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada di lingkup Kementerian Agama dengan terus melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten agar pengumpulan zakat lebih optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan, implementasi, UPZ, regulasi zakat, dan pendayagunaan

Pendahuluan

Al-Qur'an telah menyebutkan dengan tegas kewajiban zakat. Zakat ditunaikan oleh manusia yang mengharapkan balasan Allah di akhirat dan kadang-kadang ditinggalkan oleh manusia yang kurang yakin akan balasan akhirat.¹²⁴ Zakat bukan hanya sekedar rukun Islam, akan tetapi menjadi penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Ini karena zakat memiliki dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horisontal.

Pengeluaran zakat bukan hanya menunggu keikhlasan calon *muzakki*, tetapi perlu ada tindakan dari pemerintah dengan cara: sosialisasi secara terstruktur, mengadakan pelatihan kepada para pengurus zakat, memberi himbauan, bahkan sanksi yang tidak mengeluarkan zakat. Artinya secara tidak langsung membuat sistem yang memaksa muslim mengeluarkan zakat apabila harta mencapai *nishab* dan *haul*. Hal ini penting karena dalam teks al-Qur'an 32 kali kata zakat diulang ini menunjukkan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar bahkan zaman khalifah Abu Bakar Assiddiq memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.¹²⁵

Jika seorang mukmin telah membayar zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajiban disisi Allah dan akan mendapat pahala sebagaimana yang telah dijanjikan-Nya (dimensi vertikal). Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, orang yang membayar zakat (*Muzakki*) tidak bisa terlepas dari urusan bersama (dimensi horisontal) karena zakat berkaitan dengan harta benda dan kepada siapa harta itu

¹²⁴Yusuf al-Qaradawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam* (Tc., Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), h. 87.

¹²⁵Kamiruddin, *Peran dan Fungsi Badan 'Amil Zakat dan Lembaga 'Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat* (Jurnal IAIN Palu), h. 6.

diberikan, sehingga sangat berkaitan dengan para penerima zakat (*mustahfiq*).

Berdasarkan praktiknya, zakat harus diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, para wajib zakat (*muzakki*>>) maupun para menerima zakat (*mustahfiq*), sampai pada pengelolannya oleh pihak ketiga. Hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Pemerintah atau lembaga inilah yang akan membantu para *muzakki*>> untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustahfiq* atau membantu para *mustahfiq* dalam menerima hak-haknya

Pada tataran inilah, zakat bukan merupakan urusan individu tetapi urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga swasta yang berhikmat untuk ikut mengatur pengelolaan zakat mulai dari pengutipannya dari *muzakki* >> hingga kepada pendistribusiannya kepada para *mustahfiq*.

Pengertian Zakat

Perkataan zakat ditinjau dari segi etimologi, berasal dari kata dasar (masdar) dari *تزكى - يزكى - تزكيا* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹²⁶ Misalnya dalam kalimat *تزكت الشجرة* yang artinya pohon itu tumbuh dan berkembang, dan *زكا رجل* yang artinya seorang itu baik.

Zakat merupakan sebuah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹²⁷ Kata zakat juga sering dikemukakan untuk makna "*thaharoh*" (suci). Allah SWT berfirman Surat Asy-Syams ayat 9 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Terjemahnya :

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu"

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah mensucikan dari kotoran.¹²⁸ Sedangkan zakat menurut syara' atau menurut terminologi yang dikemukakan oleh Asy-Syaukani "Zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sapa nisabnya kepada orang fakir dan selanjutnya yang

¹²⁶ Ahmad Warson Munawwir Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia, Cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 577,

¹²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III Ahli Bahasa Wahyudin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif Bandung, 1996) h. 5

¹²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Effendi dan Bahrudin Fananni, Cet. III, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 82

tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya".¹²⁹

Pengertian zakat menurut syara', adalah hak dan wajib di keluarkan dari harta. Madzhab maliki mendefinisikannya dengan "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian."¹³⁰

Macam-macam Zakat dan Nisabnya

a. Dasar hukumnya.

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan Alquran, hadis, ijma, sebagaimana terdapat dalam QS. al-An'am/6: 141 dan QS. al-Baqarah/2: 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
حَمِيْدٌ

Terjemahnya:

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"(QS. al-Anam/6: 141)¹³¹

Dalam ayat tersebut di atas ada kalimat "dan tunaikanlah haknya" oleh para mufassir ditafsirkan dengan zakat.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
حَمِيْدٌ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu

¹²⁹ Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujtahid Qadi Qudlati Al-Qathril Al-Yamani Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Asyaukani, *Nail Al-Author*, Jilid IV, (PT. Mishofil Al-Babi Halbi Mesir. t.th) h. 170

¹³⁰ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) h. 1985

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan / Penafsiran Al-Qur'an, h. 146.

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. al-Baqarah/2: 267)¹³²

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.

Berkaitan dengan kewajiban menunaikan zakat untuk hasil pertanian, maka selain ayat Alquran di atas maka sebagai landasan kedua adalah sabda Rasulullah saw sebagai berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir, bahwa beliau mendengar Nabi saw bersabda:

¹³³ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثراً العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر

Artinya :

“Pada yang disiram hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan al-usyur (persepuluh) dan pada yang disirami dengan mengangkut air nishfu al-usyr (setengah dari sepersepuluh/seperlima).”

¹³⁴ فيما سقت الانهار و العيم الشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر

Artinya :

“Pada apa-apa yang disiram dengan air sungai dan hujan sepersepuluh dan apa-apa yang disiram dengan pengairan (irigasi), maka zakatnya seperlima”. (H.R. Ahmad, Muslim, Nisai, dan Abu Dawud)

b. Nisab, ukuran, dan cara mengeluarkan zakatnya

Adapun nishabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Tidak ada zakat di bawah lima wasaq.” Wasaq adalah merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha’, pada masa Rasulullah saw, satu (1) sha’ sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu (1) Sha’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg.¹³⁵

¹³²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan / Penafsiran Al-Qur’an, h. 46

¹³³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 377

¹³⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 377.

¹³⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, Cet I (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 97

Adapun ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang artinya “Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10) dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka ia 1/20 atau 5%”.

Penunaian zakat pertanian tidak menunggu adanya *baul*, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari *senishab*) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Hewan Ternak

Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian tidak semua hewan ternak dapat dizakati. Para ulama sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga (3) jenis, yaitu unta, sapi, kambing/domba. Hal ini di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar yang artinya :

“Tiada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan lebih gemuk dan lebih besar dari masa di dunia, lalu ia menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai binatang-binatang itu melakukan hal itu, ia kembali lagi melakukannya dan demikian terus-menerus sehingga Allah selesai menghukum para manusia”.

Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablun min Allah wa hablun min al-Nas*. Pensyariaan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah.

Menurut Muhammad Daud Ali ada beberapa tujuan disyariatkannya zakat dalam hubungan adalah sasaran praktisnya, yaitu antara lain :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim.
- c. Menghilangkan sifat kikir dan loba bagi pemilik harta.
- d. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.

- e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- f. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan
- g. Membentangkan tali persaudaraan sesama umat manusia pada umumnya, tali persaudaraan umat islam pada khususnya.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin memenuhi kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sebagai sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan social.¹³⁶

Sementara Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan disyariatkan zakat adalah:

- a. Membersihkan dan mensucikan harta seseorang
- b. Mengembangkan dan menambah sesuatu pada harta kekayaan seseorang, karena berhubungan dengan hak orang lain dan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.
- c. Sebagai pertanggungangan sosial, dimana masyarakat yang mampu menanggung anggota masyarakat yang tidak mampu
- d. Mendekatkan hati orang kaya dengan orang miskin dan sebaliknya
- e. Pemerataan rizki

Memperkecil kalau tidak dapat menghilangkan pertentangan kelas dalam masyarakat karena perbedaan pendapatan yang sangat tajam

Hikmah Zakat

Kesenjangan dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Dan persyariatan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut, juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat islam.

Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengikis dan melepaskan sifat kekikiran dan ketergantungan terhadap aspek materi yang sering membelenggu jiwa seseorang. Fitrah manusia sejak diciptakan Allah terdiri dari aspek materi dan immateri, raga dan jiwa yang harus dijaga kebersihan dan keseimbangannya. Islam mengajarkan zakat, infaq dan s}adaqah sesungguhnya ingin menjaga kesucian fitrah diri manusia dan hartanya sekaligus.
- b. Menciptakan ketenangan dan ketenteraman baik pada muzakkinnya maupun mustahiqnya. Ketenteraman jiwa dan kebahagiaan bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain, tetapi bisa juga saat memberikan dan membantu meringankan beban dan kesulitan

¹³⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 40

orang lain. Ketenangan dan ketentraman ini muncul karena hubungan muzakki dan mustahiq menjadi harmonis layaknya hubungan saudara yang saling membantu, saling menjaga, dan melindungi satu sama lain.

- c. Mengembangkan segala hal yang baik, tidak hanya secara ekonomi individual, tetapi juga secara spiritual dan secara sosial.
Membebaskan diri muzakki dari pedihnya dan panasnya api neraka.¹³⁷

Pendistribusian Zakat di UPZ Kemenag Kab. Bone

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah menentukan bahwa pengelola zakat adalah pemerintah, melalui Badan *Amil* Zakat yang dibentuknya lalu dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelola zakat tersebut, baik Badan *Amil* Zakat maupun Lembaga *Amil* Zakat, bertugas mengumpulkan dana zakat dan dana lainnya sekaligus mendistribusikan dan mendayagunakannya, bahkan juga melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat.¹³⁸

Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk BAZNAS di setiap instansi tidak berhak menyalurkan dana zakat yang dikumpulkannya, tetapi dana zakat yang dikumpulkan diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten/Kota, kecuali dalam hal diperlukan, UPZ dapat melakukan pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Namun Karena kepengurusan BAZNAS Kab. Bone dalam keadaan transisi maka UPZ Kemenag melakukan pendistribusian terhadap infaq dan sadaqah yang dikumpulkannya.

Hasil pendistribusian UPZ Kemenag Kab. Bone.

1. Bantuan Panitia PPMI Komisariat STAIN Watampone memperingati hari lahir sanggar seni perisai sebanyak Rp. 100.000;
2. Festival Qasidah Rebana dan Paduan Suara Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Amali Kab. Bone Sebanyak Rp. 350.000;
3. Panitia Acara Lomba Kreativitas Seni Islami Kerukunan Keluarga Lassonrong Bersama Laskar Arung Palakka sebanyak Rp. 50.000;
4. Panitia Festival anak Shaleh Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah Kajuara sebanyak Rp. 350.000;
5. Pengurus Daerah Badan Kontrak Majelis Taklim (BKMT) Kab. Bone Program Safari Ramadhan sebanyak Rp. 500.000;
6. Bantuan pembangunan tempat wudhu masjid Nurul Ittihad sebanyak Rp. 500.000;
7. Bantuan sosial koran tabloid BADIK sebanyak Rp. 100.000.

Hasil pendistribusian yang dilakukan oleh UPZ Kemenag Kab. Bone semuanya mengarah kepada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi lokal, belum ada pendistribusian untuk fakir dan miskin atau

¹³⁷ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Cet. III (Yogyakarta: LPPI UMY, 2013) h. 220

¹³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 23 tahun 2011*,

delapan asnaf sebagaimana lazimnya peruntukan zakat. Namun ini tidak bertentangan dengan regulasi mengingat bahwa dana yang dikumpulkan adalah infaq dan sadaqah dari para pegawai.

Penutup

Demikian penelitian ini disusun yang bersifat sederhana dan mungkin masih banyak kekurangan, maka untuk menyempurnakannya penulis berharap dan mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna meningkatkan dan menyempurnakan penelitian ini. Dari peneliti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan semoga penelitian ini bermanfaat khususnya untuk peneliti dan umumnya untuk masyarakat Kabupaten Bone.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah, ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Cet. I; Jakarta :DarulHaq, 2004.
- Alwan, Abdullah Nasir. *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin. Jakarta:Lentera Nusa, 1985.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*,Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 1998.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an. Cet. I; Beirut, 2000.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2013.
- Parman, Ali. *Pengelolaan Zakat (disertai Contoh Perhitungan)*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Badan Amil Zakat Nasional, *Peraturan Baznas Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota*.
Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahnya, yayasan penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: 2011.
- Departemen Agama. *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta : 2007.
- Departemen Agama. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Jakarta : 2007.
- Departemen Agama. *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta : 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. X; Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Al-Buny, Djamaluddin Ahmad. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, cet. III; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sult}a>niyyahwal-Wila>yah al-Di>niyyah*, penerjemah Abdul Hayyi al-KattanidanKamaluddinNurdin. Cet. I; Jakarta: GemaInsani Press, 2000.
- InstruksiPresidenNomor 03Tahun 2014,*TentangOptimalisasiPengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional*.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Aktual, RefleksiSosialSeorangCendikiawan Muslim*. Cet. X; Bandung: Mizan, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: remajaRosdakarya: 2000.
- Zuhdi, Masjfuk.*MasailFiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Rais, Muhammad Amin. *Cakrawala Islam: antaraCitadanFakta*. Bandung: Mizan, 1987.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: SalembaDiniyah, 2002.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *FiqhEmpatMazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004
- Ali,MuhammadDaud. *SistemEkonomi Islam Zakat danWakaf*. Jakarta: UniversitasIndonesia Press, 1998.
- Rasyi>d Rid}a>, Muhammad. *Tafsi>r al-Mana>r*. Cet. I; Beiru>t: Da>r Ihya> al-Tura>s\ al-Arabi>, 2002.
- Ahmad, Mustaq. *EtikaBisnisdalam Islam*, penerjemah Samson Rahman. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Djatnika, Rahmat. *Pandangan Islam TentangInfaq, Shadaqah, Zakat danWakafsebagaiKomponendalam Pembangunan*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1983.
- Muin, Rahmawati. *ManajemenZakat*.Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sudijono, Anas. *PengantarStatistik Pendidikan*. Cet. XV; Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2005.
- Sedarmayanti.
Restruktirisasi danPemberdayaanOrganisasiuntukMenghadapiDinamikaP erubahanLingkungan. Bandung: MandarMaju, 2000.
- Hasan, Sofyan. *PengantarHukum Zakat danWakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Sudrajat, Subana, dan Moersetyo Rahadi. *Statistik Pendidikan*.Cet. II; Bandung: PustakaSetia, 2005.
- Sugiyono. *MetodePenelitianAdministrasiDilengkapiDenganMetode R&D*. Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi V. Bandung:Alfabeta, 1998.
- . *MetodePenelitian Pendidikan PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2010.

- Suharsonodan Muhammad, *Zakat Profesi dalam Tinjauan Syar'iyah*, www.Pkpu.or.id
- Sujana, *Metode Statistik*. Cet. I; Bandung: Tarsito, 1984.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Jamaluddin, Syakir. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Cet. III; Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2013.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.
- Spradley, James P. *Participation Observation*. New York: Rinerhart and Winston, 1990.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat.
- Al-Qarad}awiy, Yusuf. *Al-Ibadah fi al-Islam*. al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1995
- . *fiqh al-Zakah*. Cet. XXIV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*. Cet IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 2002
- al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.

Bagian Ekonomi

ANALYTICAL PROCEDURE TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhammad Yamin¹ dan Raodatul Jannah²

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari tiga prinsip dasar penyelenggaraan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini membahas tentang *analytical procedure* terhadap akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang terkait pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pengelolaan anggaran belanja daerah yang sejatinya harus dipertanggungjawabkan pengelolannya kepada publik. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana prosedur pelaksanaan akuntabilitas publik pemerintah daerah di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan. (2) bagaimana kelayakan akuntabilitas publik pemerintah daerah di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini bersifat eksploratif yang memaparkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kelayakan akuntabilitas publik pemerintah daerah Kabupaten Bone melalui data-data keuangan maupun non keuangan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan daerah yang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tahun 2014-2015.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan menunjukkan hasil bahwa prosedur pelaksanaan akuntabilitas publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana pihak akuntansi telah melaporkan semua laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan kemudian dilaporkan kepada masyarakat umum melalui media massa. Adapun mengenai kelayakan akuntabilitas publik untuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah kabupaten Bone belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukannya hal-hal yang mengganjal pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari tiga prinsip dasar penyelenggaraan *good governance*. Ketiga prinsip dasar tersebut meliputi, (a) Transparansi, mengandung arti keterbukaan. Transparansi pemerintahan dalam menjalankan manajemen pemerintahan, manajemen lingkungan, manajemen ekonomi, sosial dan politik; (b) Partisipasi, dapat dikategorikan dengan kalimat "turut ambil bagian". Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat demokrasi, penegakan Hak Asasi Manusia, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers dan mengakomodasi atau menampung aspirasi rakyat. (c) Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan¹³⁹.

Pemerintah Kabupaten Bone sejak tahun 2015 dan 2016 menunjukkan prestasi lebih baik dalam kaitannya dengan akuntabilitas pada aspek pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama dua kali berturut-turut yakni pada tahun 2015 dan 2016¹⁴⁰. Opini Wajar Tanpa Pengecualian secara teoretis dapat diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan *auditee* berdasarkan bukti dan keyakinan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini diberikan oleh auditor dengan pertimbangan bahwa (a) prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berlaku umum di Indonesia; (b) prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan; (c) laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi cukup yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman dan penafsirannya.¹⁴¹

Audit laporan keuangan yang dilakukan berdasarkan standar audit dan prinsip akuntansi yang berlaku umum pada suatu negara memiliki sejumlah keterbatasan yang melekat yang salah satunya adalah bahwa auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar yakni *reasonable cost and reasonable length of time*. *Reasonable Cost* dimaksudkan bahwa pembatasan biaya audit dapat menimbulkan terbatasnya pengujian, atau penarikan sampel dari catatan akuntansi atau data pendukung yang dilakukan secara selektif. Selain itu, auditor juga dapat memilih untuk menguji sistem pengendalian internal dan mendapatkan keyakinan dari sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik. *Reasonable length of time* dimaksudkan bahwa biasanya dalam laporan auditor atas demikian

¹³⁹ Ihyaul Ulum, Akuntansi Sektor Publik, (Malang : UMM Press, 2005), hlm 38.

¹⁴⁰ www.bone.go.id

¹⁴¹ Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat. Jakarta. 2001.

banyak perusahaan akan terbit dalam waktu tiga sampai lima minggu setelah tanggal neraca. Hambatan waktu ini dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh tentang laporan keuangan. Lebih lagi, hanya tersedia waktu yang demikian singkat untuk memisahkan ketidakpastian yang ada pada tanggal laporan keuangan.¹⁴²

Keterbatasan lainnya adalah kerangka kerja akuntansi yang diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan. Hal ini terkait dengan (a) prinsip akuntansi alternatif seperti pemilihan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan dan akibatnya terhadap laporan keuangan, dan (b) estimasi akuntansi, yang dimaksudkan bahwa estimasi adalah bagian yang melekat dengan proses akuntansi, dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramalkan bagaimana hasil dari suatu ketidakpastian. Suatu audit tidak dapat menambahkan ketepatan dan kepastian pada laporan keuangan apabila faktor-faktor tersebut tidak ada¹⁴³. Berdasarkan kondisi tersebut memungkinkan bahwa pernyataan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas suatu laporan keuangan entitas atau *auditee* terdapat kekurangan yang dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan.

Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Memiliki keindahan alam yang tiada tara. Laut dan daerah pegunungan menyatu dalam gugusan lukisan yang tak jenuh memandangnya.

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Memiliki luas wilayah kurang lebih 4.559 Km² atau 7,30% dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 27 Kecamatan, 328 Desa dan 44 Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Kabupaten Bone terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 19 (sembilan belas) Dinas, Lembaga Teknis Daerah yaitu 12 (dua belas) Badan, 7 (tujuh) Kantor dan 5 (lima) Staf Ahli Bupati serta 27 Kecamatan.

1. Sekretariat Daerah

¹⁴²Boynton, et.all, 2002. Modern Auditing Edisi Ketujuh Jilid 1, Erlangga. Jakarta.

¹⁴³Ibid.

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberi pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten.

2. *Sekretariat DPRD*

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur Staf yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

3. *Dinas*

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dinas yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone berjumlah 19 (sembilan belas), yaitu : Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. *Badan/Lembaga Teknis Daerah setingkat Badan*

Badan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab melaksanakan tugas penunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah, berupa penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Badan yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone berjumlah 12 (dua belas), yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Kesbangpol dan Linmas, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perpustakaan Arsip dan PDE, Badan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru (Tipe B), Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

5. *Kantor*

Kantor merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang melaksanakan tugas penunjang pemerintah daerah dalam meyelenggarakan kepentingan Otonomi Daerah. Kantor dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone berjumlah 7 (tujuh) terdiri dari : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pemadam Kebakaran, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Penelitian dan Pengembangan, Kantor Pengelola Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, Kantor Promosi dan Penanaman Modal, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. *Kecamatan*

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bone yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. Kabupaten Bone saat ini terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Bonto Cani
- b. Kecamatan Kahu
- c. Kecamatan Kajuara
- d. Kecamatan Salomekko
- e. Kecamatan Patimpeng
- f. Kecamatan Tonra
- g. Kecamatan Libureng
- h. Kecamatan Mare
- i. Kecamatan Ponre
- j. Kecamatan Cina
- k. Kecamatan Sibulue
- l. Kecamatan Barebbo
- m. Kecamatan Bengo
- n. Kecamatan Lappariaja
- o. Kecamatan Tellu Limpoe
- p. Kecamatan Lamuru
- q. Kecamatan Amali
- r. Kecamatan Ulaweng
- s. Kecamatan Ajangale

- t. Kecamatan Dua Boccoe
- u. Kecamatan Cenrana
- v. Kecamatan Tellu Siattingnge
- w. Kecamatan Palakka
- x. Kecamatan Tanete Riattang Barat
- y. Kecamatan Tanete Riattang
- z. Kecamatan Tanete Riattang Timur
- a.a Kecamatan Awangpone

Prosedur pelaksanaan akuntabilitas publik pemerintah daerah di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan akuntabilitas sebagai wujud dari pertanggungjawaban pemerintahan atas semua hal yang telah dikerjakannya. Seorang administrator publik harus mampu mengembangkan sikap-sikap yang menunjukkan adanya akuntabilitas terhadap rakyat. Rakyat lah yang akan menilai seberapa jauh para pejabat publik itu mampu menghasilkan suatu pekerjaan yang selalu ditunjukkan dengan akuntabilitas yang tinggi. Ketika para pejabat publik tidak mampu mempertanggungjawabannya berdasarkan asas transparansi, maka seringkali rakyat mengeluhkan dan cenderung menyatakan bahwa seorang pejabat itu tidak mampu bertindak sesuai dengan amanah mereka. Rakyat hanyalah dijadikan sebagai alat untuk mampu merealisasikan kepentingan para pejabat publik.

Pada sektor publik, instansi pemda kabupaten atau kota merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati atau walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten/Kota merupakan instansi pemerintah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, oleh karena itu mempunyai kewajiban membuat akuntabilitas kinerja sebagai suatu perwujudan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penggunaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Tuntutan akuntabilitas di sektor pemerintahan terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tidak adanya laporan keuangan memperlihatkan lemahnya akuntabilitas.

Penutup

Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban

pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Untuk prosedur pelaksanaan akuntabilitas publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana pihak akuntansi telah melaporkan semua laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan kemudian dilaporkan kepada masyarakat umum melalui media massa. Adapun mengenai kelayakan akuntabilitas publik untuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah kabupaten Bone belum sepenuhnya baik karena masih ditemukannya hal-hal yang mengganjal pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Salah satu penyebab masih kurangnya tingkat akuntabilitas publik pemerintah daerah Kabupaten Bone Dari setiap SKPD rata-rata menunjukkan realisasi anggaran belanja daerah yang cukup berhasil tapi hal ini tidak sesuai dengan realisasi program kerja yang dijalankan dari masing-masing SKPD.

Daftar Pustaka

- BPKP, 1999. Akuntabilitas, Tim Studi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, BPKP, Jakarta, hal.26.
- Boynton, et.all, 2002. Modern Auditing Edisi Ketujuh Jilid 1, Erlangga. Jakarta.
- Donald R. Cooper and C, 1995. William Emory, Business Research Methods, Fifth Edition, Irwin.,hal. 357.
- Douglas, Patricia, 1993. *Governmental and non provit organization*, h.36.
- Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta.
- Ihyaul Ulum, 2005, Akuntansi Sektor Publik, UMM Press, Malang.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat. Jakarta
- Ismail Mohamad dkk, 2004, Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Mahsun, 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Andi Press, Yogyakarta.
- Muhammad Yamin, 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja SKPD (Studi Pada SKPD Dinas Di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan), Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- , 2014. Menakar Praktek Akuntabilitas Keuangan Desa Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, Laporan Hasil Penelitian. STAIN Watampone. Watampone.
- Scott Ricard, 1997. et.all, *Auditing : a system approach*, Reston Publishing Co Inc Prentice Hall, Reston Virginia
- Widjaja, 2012, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Referensi Elektronik :

- Agus Subroto, 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di Desa-desa Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung), Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Paulus Israwan Setyoko, 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD), Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 11, Nomor 1, hal.14-24.

Perundang-undangan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**TRADISI KERJASAMA BAGI HASIL PERTANIAN MASYARAKAT
BONE PERSPEKTIF NORMATIF, SOSIOLOGIS,
YURIDIS, DAN EKONOMI**

A. Nuzul¹ dan Abdulahanaa²

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada terjadinya perubahan sosial, yuridis, dan ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut berpacu pada usaha pertanian. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang menggunakan pendekatan interdisipliner untuk menemukan kajian penyesuaian keadilan dalam aspek normatif, yuridis dan ekonomi. Peran akademisi, ulama, dan umara sangat diperlukan dalam proses transformasi norma-norma Islam bukan hanya dalam bidang ibadah, tetapi juga dalam bidang muamalah. Optimalisasi peran para akademisi dalam menemukan gagasan sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan umara dalam mengoptimalkan capaian keadilan sistem kerjasama pertanian di wilayahnya.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bone dengan menggunakan sampel pada sepuluh kecamatan, yaitu; Awangpone, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Barebbo, Cina, Mare, Salomekko, Tonra, dan Kajuara permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah; Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil dan mekanisme kerjasama pertanian masyarakat Bone? Dan bagaimana capaian keadilan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian masyarakat Bone dalam kajian normatif, sosiologis, yuridis, dan ekonomi?

Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian di kalangan masyarakat Kabupaten Bone adalah tidak tertulis (lisan). Bentuk ini berdasar pada tradisi dan masih bertahan sampai sekarang karena belum ada upaya yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk mengubahnya.

Bentuk bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bone terbagi dua bentuk yaitu; bagi bersih (*profit sharing*) dan bagi kotor. Mekanisme pengelolaan dan pembagian hasil kerjasama pertanian bergantung pada apa yang telah dibicarakan/disepakati bersama. Namun dalam melakukan pembicaraan guna mencari kesepakatan tidak menggunakan pedoman dasar. Pembicaraan berjalan mengalir saja tanpa ada patokan tentang unsur-unsur apa saja yang harus disebutkan.

Dengan berdasar pada rukun dan syarat-syarat tersebut maka sepiantas terlihat bahwa praktik kerjasama pertanian yang dilakukan di Kabupaten Bone belum sepenuhnya sesuai dengan norma muamalah. Dari segi rukun telah terpenuhi semuanya. Yang belum terpenuhi semua adalah syarat-syaratnya. Namun demikian, syarat-syarat yang belum disebutkan dalam akad kerjasama bagi hasil oleh masyarakat Kabupaten Bone dianggap dicukupkan dengan mengembalikan hal itu kepada tradisi yang berlaku di kalangan mereka.

Karakteristik masyarakat petani jika ditinjau dari segi sosiologis, maka hal yang menonjol adalah solidaritas, loyalitas, dan kerjasama (gotong-royong) dalam mengelola pertanian. Kerjasama pertanian dalam kajian sosiologi dipandang berjalan secara adil sepanjang nilai-nilai sosial itu diamalkan.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Bone berdasar pada hukum adat setempat, dilakukan secara lisan, dan hanya mendasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap dan perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa, dan tidak ditetapkan batas waktunya. Dengan demikian, belum berdasar pada Inpres No. 13 Tahun 1980 dan belum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960.

Kondisi kemafanan ekonomi petani penggarap rata-rata lebih lemah dibanding pemilik lahan. Pertumbuhan ekonomi petani penggarap juga cenderung mengalami stagnan. Petani penggarap tidak dapat meningkatkan pendapatannya hanya dengan mengandalkan hasil dari kerjasama pertanian yang dikelolanya. Pada umumnya petani penggarap melakukan kerjasama pertanian dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang dapat menopang kebutuhan pokok konsumsinya. Kondisi strata ekonomi yang berbeda itulah yang menyebabkan petani penggarap menganggap dengan adanya kerjasama bagi hasil pertanian itu maka ekonomi mereka terbantu.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang pernah berjaya berswasembada pangan pada era orde baru. Namun karena pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia tidak berbanding dengan pertambahan luas lahan pertanian, maka sekarang ini Indonesia tidak mampu lagi berswasembada pangan. Angka tenaga kerja pertanian (petani) setiap tahun cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk, sementara luas lahan pertanian cenderung mengalami penurunan akibat banyak yang beralihfungsi. Lahan pertanian yang masih bertahan yang berlokasi disekitar pemukiman masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan pun telah banyak yang beralih

kepemilikan, telah dijual oleh petani karena desakan kebutuhan dan himpitan ekonomi. Banyak petani yang menjual sawahnya kepada orang yang bukan petani dengan permintaan bahwa sawah itu tetap dia yang mengelolanya sekalipun bukan lagi miliknya dengan perjanjian bagi hasil.

Kondisi yang demikian menunjukkan betapa sulitnya bagi para petani miskin untuk mempertahankan mata pencahariannya, di satu sisi mereka terpaksa menjual sawahnya untuk memenuhi desakan ekonomi, sementara di sisi lain mereka tidak punya keahlian kerja, selain bertani. Oleh karena itu, tawaran kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil dapat menjadi solusi bagi mereka untuk kelangsungan mata pencahariannya guna menghidupi keluarga mereka. Data awal dari studi pendahuluan ditemukan bahwa rata-rata setiap desa yang ada di Kecamatan Awangpone lahan sawah pertaniannya lebih dari 30 % dikelola dengan perjanjian bagi hasil.¹⁴⁴ Sedangkan hasil penelitian Andi Sri Wahyuni di Kabupaten Sidenreng Rappang menemukan bahwa sebanyak 50% responden menggarap semua tanah milik orang lain. Sehingga dari sisi keseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) antara petani penggarap dengan tuan tanah cenderung tidak seimbang.¹⁴⁵

Posisi petani yang mengelola lahan pertanian dengan perajian bagi hasil dengan pemilik sawah cenderung menurut kepada tradisi yang sudah berlaku tanpa ada keberanian melakukan bargaining (penawaran) untuk hal-hal yang lebih menguntungkan dirinya atau hal-hal yang dianggap lebih adil.¹⁴⁶ Keadaan ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan petani mengenai landasan yuridis dan normatifnya.

Sistem kerjasama pertanian bagi masyarakat Bone telah berlangsung cukup lama secara turun temurun, sehingga sudah menjadi tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan. Sementara itu, masyarakat Bone dapat diidentikkan dengan masyarakat muslim. Areal pertanian yang tersebar di berbagai kawasan di Kabupaten Bone, baik di utara, selatan, timur dan barat, semuanya dikelola oleh masyarakat yang memeluk agama Islam. Sehingga sistem kerjasama pertanian yang dipraktikkan mereka patut dihubungkan dengan ajaran normatif dari agama yang diyakininya, yakni ketentuan-ketentuan tentang kerjasama pertanian yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam fikih muamalah.

¹⁴⁴ Muhajir, Tokoh Masyarakat Petani, wawancara oleh penulis di Awangpone, tanggal 9 Maret 2017

¹⁴⁵ Andi Sri Wahyuni, "Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah" Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, Volume 4, Nomor 3, Desember 2013, h. 473

¹⁴⁶ Darwis, Petani Penggarap Dengan Perjanjian Bagi Hasil, wawancara oleh penulis di Awangpone, tanggal 10 Maret 2017

Bentuk Perjanjian Bagi Hasil dan Mekanisme Kerjasama Pertanian Masyarakat Bone

1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Masyarakat Kabupaten Bone

Perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan/sawah dengan penggarap atau petani di Kabupaten Bone dilakukan dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis. Hasil data angket menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diberi angket semuanya (100%) menjawab bahwa mereka melakukan perjanjian dalam bentuk tidak tertulis (secara lisan).

Penyebab dilakukannya perjanjian dalam bentuk lisan (tidak tertulis) dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu faktor penyebab utama dan dan faktor pendukung. Yang termasuk faktor penyebab utama adalah:

- a. Karena perjanjian kerjasama bagi hasil dalam bentuk lisan (tidak tertulis) di Kabupaten Bone sudah mernjadi tradisi, sehingga diikuti oleh masyarakat secara turun-temurun tanpa mempermasalahkannya dan menganggap hal yang demikian sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku(55% jawaban dari 100 responden).
- b. Karena masyarakat sudah saling percaya dan menganggap cara itu tidak ada masalah (45% jawaban dari 100 responden).

Adapun yang termasuk faktor penyebab pendukung dilakukannya perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan adalah:

- a. Karena masyarakat petani dan pemilik lahan di Kabupaten Bone tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian hasil kerjasama pertanian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960) (87 % jawaban dari 100 responden).
- b. Karena masyarakat petani dan pemilik lahan di Kabupaten Bone tidak mengetahui tentang keharusan menulis/mencatat perjanjian bagi hasil pertanian dan disaksikan oleh kepala desa (91% jawaban dari 100 responden).
- c. Karena masyarakat petani dan pemilik lahan sekalipun mengetahui adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun belum memahami isinya (1,5% jawaban dari 100 responden).
- d. Tidak ada sosialisasi, arahan, dan bimbingan oleh aparat yang berwenang yang signifikan untuk merubah bentuk perjanjian bagi hasil masyarakat dari tidak tertulis menjadi tertulis dan disaksikan oleh kepala desa (89% jawaban dari 100 responden).

Tradisi perjanjian lisan dalam kerjasama bagi hasil pertanian di kalangan masyarakat Kabupaten Bone terus bertahan dan tetap dipegang karena tidak ada sosialisasi, arahan atau teguran oleh aparat atau pihak yang memiliki kewenangan untuk itu. Sementara itu, masyarakat bersikap pasif, tidak berupaya untuk mengetahui adanya aturan tentang kerjasama pertanian. Keadaan inilah yang semakin melanggengkan kemafanan pola

dan bentuk tidak tertulis perjanjian kerjasama di kalangan masyarakat Kabupaten Bone.

Menurut masyarakat bahwa tidak ada perintah, arahan, bimbingan atau penyuluhan dari pihak pemerintah yang mengharuskan dituliskannya di hadapan kepala desa jika melakukan perjanjian bagi hasil kerjasama pertanian. Dengan tidak adanya perintah itu, maka masyarakat juga menganggap bentuk perjanjian yang sudah berjalan turun-temurun selama ini tidak ada masalah.¹⁴⁷

Sebagian masyarakat memandang bahwa bentuk perjanjian bagi hasil pertanian secara lisan yang berdasar pada adat tidak perlu dilakukan perubahan lagi dengan membuat aturan baru yang mengharuskan dicatat dan disaksikan di hadapan kepala desa, karena hal ini akan menyulitkan masyarakat sendiri. Sementara apa yang biasa dilakukan secara tradisional tidak ada masalah, karena masyarakat petani di desa memiliki rasa saling percaya dan solidaritas yang sangat kuat. Hal ini cukup menunjang berjalannya kerjasama pertanian dengan baik.¹⁴⁸

2. Mekanisme Kerjasama Pertanian Masyarakat Kabupaten Bone

Inisiatif penawaran kerjasama bagi hasil pertanian muncul adakalanya dimulai oleh petani, adakalanya dimulai oleh pemilik sawah, dan adakalanya dimulai oleh keduanya. Tempat pembicaraan perjanjian bagi hasil pertanian dominan dilakukan di rumah pemilik lahan (75%). Hal ini dapat menjadi indikator bahwa posisi tawar pemilik lahan dalam transaksi lebih kuat dibanding petani penggarap. Perjanjian dilakukan dalam bentuk lisan.

Mekanisme pengelolaan dan pembagian hasil kerjasama pertanian bergantung pada apa yang telah dibicarakan/disepakati bersama. Namun dalam melakukan pembicaraan guna mencari kesepakatan tidak menggunakan pedoman dasar. Pembicaraan berjalan mengalir saja tanpa ada patokan tentang unsur-unsur apa saja yang harus disebutkan. Hal ini terbukti dari hasil data angket yang menunjukkan bahwa unsur-unsur yang semestinya dibicarakan ternyata tidak semua dibicarakan pada waktu akad. Misalnya, mengenai jangka waktu kerjasama, 40% responden menyatakan tidak dibicarakan. Mengenai nisbah bagi hasil 10% responden menyatakan tidak dibicarakan. Demikian pula bentuk bagi hasil, porsi tanggungan atas modal dan biaya operasional, dan tanggungan atas resiko usaha jika terjadi kegagalan.

Tidak adanya perhatian masyarakat untuk membicarakan semua unsur yang merupakan bagian dari syarat-syarat sahnya akad sebagaimana yang diatur dalam fikih muamalah (ketentuan syariat) disebabkan karena masyarakat sangat mengandalkan tradisi sebagai landasan. Hal-hal yang

¹⁴⁷Wawancara dengan Muh. Tahir, Pemilik Sawah yang dikerjasamakan dengan Tahang, tanggal 21 Agustus 2017 di Tanete Riattang Barat.

¹⁴⁸Wawancara dengan H. Abu Nawas, pemilik sawah, tanggal 24 Agustus 2017 di Sibulue

belum sempat dibicarakan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil dikembalikan kepada bagaimana lazimnya tradisi yang berlaku di masyarakat.

Tradisi diposisikan sebagai dasar utama pelaksanaan kerjasama pertanian, sehingga pada waktu membicarakan akan dimulainya kerjasama pertanian, masyarakat memandang tidak perlu dibicarakan dengan rinci, karena pada akhirnya akan kembali pada aturan yang sudah menjadi kebiasaan di tempat itu. Perjanjian dibuat dalam bentuk lisan, tidak pernah ada inisiatif untuk meminta agar perjanjian ditulis (100% dari jawaban responden), dan tidak ada yang melibatkan aparat/kepala desa dalam melakukan perjanjian (100% jawaban dari responden).

Hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak dibicarakan, hanya diserahkan pada pengertian masing-masing. Oleh karena itu, mekanisme kerjasama sangat mengandalkan kejujuran pihak pengelola (petani penggarap). Membicarakan hak dan kewajiban secara rinci masih dirasakan hal yang tabu, karena hal itu dapat dipahami sebagai adanya ketidakpercayaan atau kecurigaan pemilik lahan terhadap petani. Nuansa psikologis pedesaan masih kuat pengaruhnya dalam hubungan sosial masyarakat, sehingga tidak semua pekerjaan harus diselesaikan dengan pembicaraan yang tuntas dan rinci.

Setelah adanya kesepakatan yang ditandai dengan adanya pembicaraan bersama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, maka usaha tani pun dimulai. Segala keperluan seperti bibit, peralatan, pupuk, dan biaya disiapkan oleh petani penggarap. Sebagian masyarakat melibatkan pemilik lahan dalam menyiapkan keperluan usaha pertanian, namun sesuai dengan tradisi yang berlaku di Kabupaten Bone, biasanya yang dibantukan oleh pemilik lahan hanyalah pupuk. 45% responden menyatakan bahwa dari sekian banyak modal kerja yang diperlukan, hanya pupuk yang dibicarakan pada waktu akad.

Capaian Keadilan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Masyarakat Bone dalam Kajian Normatif, Sosiologis, Yuridis, dan Ekonomi

a. Keadilan Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Masyarakat Bone dalam Kajian Normatif.

Norma dasar kerjasama pertanian dalam Islam merujuk pada dua istilah yang sudah dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad Saw masih hidup, yaitu *al-muzâra'ah* dan *al-mukhâbarah*. Sesungguhnya kedua praktik kerjasama pertanian itu merupakan warisan dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam datang.

a. Pengertian *al-muzâra'ah* dan *al-mukhâbarah*.

Al-muzâra'ah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-*

zur'ah ialah *al-budzr*), yakni melemparkan benih ke tanah. Dan makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya (*ma'na haqiqiy*), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*).

b. Dasar hukum *muzâra'ah*

Muzâra'ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mudârabah* untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak. Simbiosis mutualisme antara pemilik lahan (tanah) dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.

c. Rukun dan syarat *muzâra'ah*

Menurut Hanafiah rukun *muzâra'ah* ialah “akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunnya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam”.¹⁴⁹ Sedangkan menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam *muzâra'ah*:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek *al-muzaraah*
- 4) Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan.¹⁵⁰

d. Perbedaan pendapat tentang *muzara'ah*

Munculnya Hadis tentang *muzâra'ah* dari Rafi` bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah melarang dilakukannya *muzâra'ah* setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, dengan dalil Hadis yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang *muzâra'ah* yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikaian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya (*muzâra'ah*). Bunyi Haditsnya sebagai berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ¹⁵¹

¹⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 158

¹⁵⁰Haroen Nasreon, *Fiqh Muamalah*, (Cet.II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 278

¹⁵¹Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath la-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, h. 254

Artinya: Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (H.R. Bukhari).

Jadi munculnya hadis tentang *muzara'ah* dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang dilakukannya *muzara'ah* setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, itu memang benar. Namun hal itu tidak bisa dijadikan hujah larangan menyewakan tanah (*muzara'ah*) karena hadits tersebut yang diriwayatkan Rafi' bin Khadij tidak semata-mata dilihat dari apa yang disampaikan Rasulullah saw saja, namun kita lihat dari latar belakang sehingga dikeluarkan hadits tersebut, dengan kata lain harus dilihat secara kontekstual atau dilihat dari asbabul wurudnya dulu.

Simpulan

1. Bentuk perjanjian bagi hasil dan mekanisme kerjasama pertanian masyarakat Bone.

Bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian di kalangan masyarakat Kabupaten Bone adalah tidak tertulis (lisan). Bentuk ini berdasar pada tradisi dan masih bertahan sampai sekarang karena belum ada upaya yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk mengubahnya.

Bentuk bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bone terbagi dua bentuk yaitu; *pertama*, bagi bersih (*profit sharing*), yaitu pemilik tanah mendapat bagian dalam bentuk gabah atau beras atau uang. Dalam hal ini, yang dominan adalah pemilik sawah menerima bagi hasilnya dalam bentuk gabah yang diantarkan ke tempat tinggalnya atau ke gudang tempat penggilingan atau penjualan gabah. Sebagian kecil pemilik lahan meminta diberikan dalam bentuk uang dan beras.

Bentuk bagi hasil seperti ini dari segi cara pembagiannya relatif tidak bermasalah, lebih mudah menghitungnya dan lebih simpel. Akan tetapi sangat dibutuhkan kejujuran dari pihak petani penggarap dalam menghitung dan melaporkan hasil panen yang diperoleh. Sekiranya petani penggarap ingin berlaku curang, maka potensi untuk itu cukup besar. Kunci pencapaian keadilan bagi hasil bentuk ini adalah kejujuran petani penggarap dalam melaporkan dan menghitung jumlah hasil panen.

Bentuk *kedua*, Bagi kotor atau disebut bagi pendapatan (*revenue sharing*), yaitu pemilik lahan mengambil bagiannya di sawah dengan memanen sendiri. Bentuk bagi hasil ini dibagi di atas lahan yang siap panen. Sebelum dipanen petani penggarap membaginya dengan membuat "*turi-turi*" kecil, yaitu batang padi disekat-sekat sehingga

membentuk garis memanjang lurus vertikal atau horisontal. Setelah selesai "dituri-turi" lalu pemilik lahan dipanggil untuk memilih bagian mana yang akan diambil, dengan ketentuan jika pemilik lahan memilih "turi" yang bernomor ganjil, maka ia harus mengambil semua nomor yang ganjil, demikian sebaliknya.

Cara ini mengurangi potensi adanya kecurangan dan perbedaan pendapatan yang tidak proporsional. dan merupakan solusi dari cara bagi pendapatan dengan ketentuan awal bahwa lahan sawah dibagi besar berdasarkan jumlah petak sawah yang ada. Rasulullah Saw melarang pembagian di atas lahan dengan bagi besar berdasarkan jumlah petak sawah, karena potensi terjadinya perbedaan hasil panen sangat besar.

2. Capaian keadilan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian masyarakat Bone dalam kajian normatif, sosiologis, yuridis, dan ekonomi
 - a. Capaian keadilan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian masyarakat Bone dalam kajian normative.

Dengan berdasar pada rukun dan syarat-syarat tersebut maka sepiintas terlihat bahwa praktik kerjasama pertanian yang dilakukan di Kabupaten Bone belum sepenuhnya sesuai dengan norma muamalah. Dari segi rukun telah terpenuhi semuanya. Yang belum terpenuhi semua adalah syarat-syaratnya. Namun demikian, syarat-syarat yang belum disebutkan dalam akad kerjasama bagi hasil oleh masyarakat Kabupaten Bone dianggap dicukupkan dengan mengembalikan hal itu kepada tradisi yang berlaku di kalangan mereka. Sepanjang hal itu telah menjadi tradisi, maka sekalipun tidak disebutkan pada waktu akad secara tersirat dianggap telah disepakati dan berlaku dengan sendirinya.

- b. Capaian keadilan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian masyarakat Bone dalam kajian sosiologis

Masyarakat petani dilihat dari sudut pandang sosiologi adalah masyarakat yang pola hidupnya masih banyak berpedoman pada adat istiadat yang berlaku di desa. Adapun ciri yang menonjol pada masyarakat petani adalah kehidupannya tergantung pada alam (bercocok tanam) di desa, anggotanya saling mengenal, sifat gotong royong, rasa persaudaraan yang tinggi, sedikit perbedaan penghayatan dalam kehidupan, dan keberagamaan lebih kuat. Karakteristik masyarakat petani jika ditinjau dari segi sosiologis, maka hal yang menonjol adalah solidaritas, loyalitas, dan kerjasama (gotong-royong) dalam mengelola pertanian. Demikian pula halnya dengan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Bone.

- c. Capaian keadilan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian masyarakat Bone dalam kajian yuridis

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Bone yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada hukum adat setempat dilakukan secara lisan, hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap, perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari

perbuatan hukum tersebut. Ketentuan imbalan pembagian hasil dengan sistem *"bage dua"* jika pemilik sawah yang menanggung biaya untuk pupuk dan *"bage tellu"* jika pemilik sawah tidak menanggung biaya apa-apa termasuk pupuk. Jangka waktu perjanjian yang dibuat tidak jelas dan tegas, karena selama pemilik sawah masih menginginkan tanahnya digarap oleh penggarap yang sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung. Jangka waktu yang tidak ditentukan secara tegas kurang memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama penggarap karena akan mengakibatkan perjanjian dapat diputus sewaktu-waktu. Pemutusan perjanjian biasanya dilakukan oleh pemilik sawah. Dengan demikian, belum berdasar pada Inpres No. 13 Tahun 1980 dan belum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960.

- d. Capaian keadilan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian masyarakat Bone dalam kajian ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ditemukan bahwa kondisi kemafanan ekonomi petani penggarap rata-rata lebih lemah dibanding pemilik lahan. Pertumbuhan ekonomi petani penggarap juga cenderung mengalami stagnan. Petani penggarap tidak dapat meningkatkan pendapatan ekonominya hanya dengan mengandalkan hasil dari kerjasama pertanian yang dikelolanya.

Pada umumnya petani penggarap melakukan kerjasama pertanian dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang dapat menopang kebutuhan pokok konsumsinya. Kalaupun hasil pertanian mengalami surplus dari kebutuhan pokoknya itupun jumlahnya tidak besar. Tujuan utama mereka bertani adalah agar kebutuhan berasnya tidak lagi dibeli. Pola hidup yang demikian sederhana cenderung dipertahankan dan diwarisi dari orangtua pendahulunya, tidak ada upaya yang signifikan dilakukan untuk mengubah nasibnya, dari petani yang hidup pas-pasan menjadi pengusaha kaya. Hal itu terjadi karena mereka tidak memiliki wawasan kewirausahaan dan SDM yang sangat terbatas.

Lain halnya dengan pemilik lahan, dari profil luar seperti yang terlihat pada kondisi rumah, fasilitas yang dimiliki dan gaya hidupnya terlihat menempati strata ekonomi yang lebih baik/lebih tinggi dibanding petani penggarap. Pertambahan aset yang dimiliki relatif cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hanya saja peningkatannya bervariasi, ada tergolong cepat, sedang, dan ada pula yang lambat.

Kondisi strata ekonomi yang berbeda itulah yang menyebabkan petani penggarap menganggap dengan adanya kerjasama bagi hasil pertanian itu maka ekonomi mereka terbantu. Mereka tidak memiliki persepsi negatif terhadap pola kerjasama yang mereka lakukan itu dengan pemilik lahan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jazairy, *al-Fiqh 'alalMadzahib al-Arba'ah*, (vol.3, t.c., Dar el-Bayan al-'Arobiyy, Mesir, 2005)
- Abu Abdur Rahman Ahmad AnNasa'iy, *Sunan An Nasa'iy* (Cet.III; Beirut: Dar al-Fikr, 1978)
- Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy, *Sunan An Nasa'iy VII*, terj Bey Arifin, Yunus Ali al Mahdor, Ummu Maslamah Rayes, (Cet.I; Semarang: Asy Syifa', 1993)
- Agustianto Mingka, *MaqashidSyariahdalamEkonomidanKeuanganSyariah* (Cet.I; Jakarta: Iqtishad Publishing, 2013)
- Ahmad Muhammad Mahmud Nassar, *Al-Istismâr Bil Musyâarakah Fil Bunûk al-Islâmiyyah*, (t.c., Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, 1971)
- Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath la-Bary bi SyarhShahih al-Bukhary*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.)
- Al-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiah ad-Dasuqoi*, jilid III, (Cet.I; Kairo: Dar al-Kutub, 1992)
- Al-Jazairy, 'Abdurrahman, *al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah*, vol.3, (Cet.I; Dar el-Bayan al-'Arobiyy, Mesir, 2005)
- Al-Naisaburiy, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, Juz 4 (t.c.; Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1992 M.- 1413 H.), h. 206
- Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan* (Cet.I; Pekanbaru: Suska Press, 2011)
- Andi Sri Wahyuni, "Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah" *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2013
- Anton Widyanto, *Dilema Syariat di NegeriSyariat* (Cet.I; Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013)
- Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*(Cet.I; Bandung : Binacipta, 1997)
- B. Jr. Moore, *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World* (Cet.I; Boston: Beacon Press, 1966)
- Chairuman Pasaribu, SuhrawardiK.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*
- Darwis, Petani Penggarap Dengan Perjanjian Bagi Hasil, wawancara oleh penulis di Awangpone, tanggal 10Maret 2017
- Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam* (Cet.I; Bandung: Pustakasetia, 2007)
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet.XII; Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016)
- F. Hermawan, *Pelaksanaan Perjanjian BagiHasil Tanah Pertanian: Studi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk*, (*Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2012)
- Faisal Badroendkk.,*EtikaBisnisdalam Islam* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2012)
- Haroen Nasreon, *FiqhMuamalah*, (Cet.II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 158

- Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Cet. II; Surabaya: Al-Ikhlâs, 1987)
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015)
- James C. Scott, *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in South East Asia* (Cet. II; New Haven: Yale University Press, 1976)
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan* (Cet. I; Yogyakarta : Andi Offset, 1995)
- Ketut Gede Mudiarta, *Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, (Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 29 No. 1, Juli 2011)
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Erlangga, 2012)
- Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al-Syâmil fî muamalat wa amaliyyat al-Masharif al-Islâmiyyah*, (Cet.III; Dar an-Nafais: Yordania, 2007)
- Muammar Bakri, *FiqhPrioritas* (Cet.I; Jakarta: PustakaMapan, 2009)
- Muhajir, *Tokoh Masyarakat Petani*, wawancara oleh penulis di Awangpone, tanggal 9Maret 2017
- Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet.V; Jakarta: Kencana, 2015)
- Nilam Sari, M.Ag., *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet. I; Banda Aceh: Yayasan Pena, 2015)
- Qutb Ibrahim Muhammad, *Politik Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Referensi, 2012)
- Raharjo, *Peran Tripartit Pemerintah-Swasta Masyarakat*, (Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 29 No. 1, Juli 2011)
- Roosganda Elizabeth, *Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani* (Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 25 No. 1, Juli 2007)
- S. Bahari, *Transformasi Agrarian Gerakan Petani di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Petani Era 1980-an*. (Cet.II; Bulan Bintang; Jakarta, 1999, h. 75)
- Scheltma, A.M.P.A., *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Terjemahan oleh Marwan , (Cet.II; Jakarta: YayasanObor Indonesia, 1985)
- Scheltma, A.M.P.A., *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Terjemahan oleh Marwan , (Cet.II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985)
- Smelser J. Neil and Richard Swedberg, "Introducing Economic Sociology" (eds), in *the Handbook of Economic Sociology* (New York, Princeton University Press, 2005)
- Soedigdo Harjosudarmo, *Masalah Tanah di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta, Bharata, 1970)
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Perikatan Adat* (Cet.I; Jakarta :Ghalia1986)
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Poko kAgraria*, (Cet. II; Bandung, Citra Aditya Bakti,1993)
- Sulaeman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet.II; Bandung: Sinar BaruAlgensindo, 1994)

- Teuku Zulkhairi, *Syariat Islam Membangun Peradaban* (Cet.I; Banda Aceh: Pena, 2017)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil¹ Drs. Faisal Badroen, M.BA. dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006)
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmywa Adillatuhu*, (Vol. V, Dar al-Fikr, Damaskus, 2008)
- Yulius Slamet, *Kemiskinan Petani Pedesaan Analisis Mengenai Sebab-sebab dan Alternatif Pemecahannya* (Makalah: Seminar Nasional Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Sebelas Maret, 2011)

Bagian Sosiologi

**KLAIM KEBENARAN DALAM KEBERAGAMAAN
(Studi Analisis terhadap pernikahan Pada Wahda islamiah Kab. Bone)**

Abdul Hakim

Dosen STAIN Watampone

Pendahuluan

Alquran dan Hadis yang merupakan sumber ajaran Islam yang bersifat ilahiyah yang semestinya membawa kemaslahatan dan rahmat bagi semua umat bahkan seluruh alam. Oleh karena itu kehadirannya dari setiap zaman dari peradaban manusia harus dapat menjawab setiap permasalahan umat sebagai konsekuensi dari dialektis antara perkembangan zaman dan prinsip-prinsip agama di sisi lain.¹⁵²

Dewasa ini, karena maksud baik untuk segera mengamalkan apa yang dibaca dari Alquran dan Hadis, maka seringkali seseorang kurang peduli pada proses lahirnya hadis. Ketika kehidupan umat manusia sudah berkembang sedemikian rupa sehingga lewat produk ilmu dan teknologi mereka mampu melewati batas-batas geografis dan kultural. Oleh karena itu umat Islam harus mampu memilih mana yang dianggap lebih sesuai dengan tuntunan agama mereka. Dalam persoalan ibadah murni seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, tidak terlalu banyak masalah (tapi bukan berarti tidak ada masalah), akan tetapi dalam masalah yang sifatnya sosial atau muamalah seringkali agama seringkali dibenturkan dengan perkembangan zaman.. Di kalangan umat Islam sendiri masih sering menjadikan Alquran dan Hadis sebagai legalistas formal untuk menghakimi sebagai *bid'ah dhalalah*, perpecahan dan klaim kebenaran antara yang satu dengan yang lainnya.¹⁵³ Apalagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyangkut persoalan persoalan sosial, ekonomi, politik, tradisi dan budaya.

Hal tersebut di atas yang mendorong untuk perlunya dilakukan penelitian yang mendalam sekaligus perlunya pembaharuan pemahaman dan pemaknaan terhadap hazanah literatur Alquran dan Hadis yang baku tersebut menjadi hidup kembali. Oleh karena itu diperlukan adanya ijtihad atau pemikiran yang keras untuk melahirkan adanya pemikiran yang baru dengan tidak menutup mata terhadap metode ilmiah yang ada,

¹⁵² Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmadc M.Ag, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ma'a>ni al-Ha>dis*, (Cet. II; Makassar: Alauddin Universty Press, 2013), h. 1.

¹⁵³ Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad M.Ag, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ma'a>ni al-Ha>dis*, h. 1.

akan tetapi tidak melupakan nilai-nilai *ilahiyyah* yang ada. Demikian juga sebaliknya jangan sampai pembaharuan pemikiran yang dihasilkan jangan sampai mengabaikan segi normatif dari Alquran dan Hadis.

Oleh karena itu dalam penelitian tentang upacara pernikahan di kalanganan Wahdah Islamiyah Bone adalah sesuatu yang sangat urgen untuk dilihat dengan berdasar pada asumsi bahwa Alquran dan Hadis bukanlah sebuah narasi yang berbicara dalam ruang hampa, namun di balik dari sebuah isi teks terdapat sebuah gagasan yang tersembunyi yang harus menjadi pertimbangan dalam memahaminya. Gagasan tersebut memiliki kekuatan dan berpengaruh secara riil dalam kehidupan sehari-hari bahkan bisa menciptakan sebuah revolusi sosial.¹⁵⁴

Metode

Metode pengumpulan data pustaka digunakan untuk mengambil data-data penelitian yang berkaitan dengan kajian kepustakaan atau kajian teoritis. Teknik pengumpulan data dengan metode ini adalah dengan jalan mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal, artikel atau tulisan-tulisan yang berkenaan dengan persoalan yang akan diteliti. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan jalan mempergunakan teknik kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah mengutip dan mengambil teks yang asli. Sementara kutipan tidak langsung adalah mengambil kutipan dari sebuah sumber dengan merubah teks tetapi tidak merubah makna, baik itu menambah atau mengurangi teks yang asli.

Metode pengumpulan data lapangan dilakukan dalam upaya melacak data yang berkaitan hal yang terjadi di lapangan, dalam hal ini masyarakat. Data-data tersebut dikumpulkan dengan mempergunakan teknik :

a. Observasi

Observasi adalah terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini dilaksanakan untuk melihat keadaan, tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah dalam melangsungkan sebuah pernikahan.

b. Wawancara

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka yang dibutuhkan adalah informan untuk wawancara. Oleh karena itu pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari informan pangkal kemudian informan pangkal inilah yang menunjukkan informan berikutnya. Metode ini mirip dengan model pengambilan sampel bola salju (*snowball sampling*). Teknik seperti ini dilakukan dengan jalan mencari informan pangkal. Kemudian selanjutnya informan pangkal tersebut menjadi sumber informasi baru tentang orang lain yang dapat dijadikan sebagai informan berikutnya. Informan awal yang merupakan informan pangkal adalah Pengurus Wahdah Islamiyah. Demikian prosedur ini

¹⁵⁴ Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, (Cet. II; Jakarta: Teraju, 2004). h. 44.

dilakukan secara berkesinambungan sampai pada jumlah informan yang dianggap bahwa data yang dibutuhkan sudah cukup.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada pada organisasi Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone.

Pelaksanaan Pernikahan Pada Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone

Seperti yang kita ketahui Bersama bahwa pernikahan adalah peristiwa agung bagi setiap individu. Dalam kacamata agama Islam, pernikahan juga mendapat perhatian yang cukup serius. Siapapun yang hendak menikah pasti menggunakan tata acara agama. Maka tidak salah jika peristiwa istimewa ini dirayakan sedemikian rupa oleh para pelakunya. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Islam, maka Wahdah Islamiyah dalam struktur organisasinya membentuk suatu lembaga yang mengurus persoalan ini. Lembaga tersebut diberi nama Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah (LP2KS).

Adapun yang melatar belakangi sehingga Wahdah Islamiyah membentuk LP2KS sebagaimana yang diungkapkan oleh Ervan Muhammad Arsyad adalah:

Latar belakang sehingga terbentuknya LP2KS di Wahdah Islamiyah adalah 1. kondisi masyarakat di mana dalam melaksanakan pernikahan yang karena adat sehingga memakan waktu yang panjang dan biaya yang banyak. Bahkan seringkali dalam pelaksanaannya banyak melanggar syariat agama, padahal pernikahan adalah sebuah ibadah. 2.). Melihat kondisi masyarakat yang menunjukkan banyaknya pasangan suami istri yang bercerai yang disebabkan tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga.¹⁵⁵

Berdasarkan hal ini maka LP2KS ini mempunyai tiga tugas pokok yaitu pernikahan kader, pembinaan keluarga sakinah dan penyelesaian masalah-masalah keluarga. Namun diantara tiga tugas pokok tersebut, maka yang berhubungan dengan penelitian ini adalah masalah pernikahan kader. Wahdah Islamiyah berusaha untuk melaksanakan tata cara pernikahan yang sesuai dengan syariat.

Berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan oleh LP2KS Wahdah Islamiyah ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan kader yaitu:

Standarisasi Pengurusan Pernikahan

Wahdah Islamiyah dalam melaksanakan sebuah pernikahan berusaha agar pernikahan yang dijalankan oleh kader-kadernya dapat terlaksana

¹⁵⁵ Ervan Muhammad Arsyad, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, *Wawancara*, di Rabica coffe Cake, Pada tanggal 8 Oktober 2017.

dengan baik dan sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu mereka telah menetapkan standarisasi pengurusan pernikahan sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada calon

Setiap kader sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dilakukan pembinaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Alimuddin S.Ag. bahwa:

Setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu diberikan pembinaan. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan bekal kepada mempelai dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Pembinaan terhadap mempelai pria, biasanya dilakukan oleh Ihwan yang sudah berpengalaman, sementara pembinaan terhadap calon mempelai wanita, biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Muslimah Wahdah Islamiyah.¹⁵⁶

2. *Ta'aruf*

Sebelum melaksanakan pernikahan, Wahdah Islamiyah juga tidak begitu saja langsung menjodohkan antara seorang *ihwan* (kader laki-laki) dan *akhwat* (kader wanita) yang hendak melangsungkan pernikahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bustam S.Pd.I sebagai berikut:

Biasanya seorang kader yang ingin menikah, terlebih dahulu ditawarkan seorang kader wanita yang dianggap *se-kufu'* dengannya. Akan tetapi jika seorang kader pria ingin melihat foto atau berkenalan (*ta'aruf*) dengan calon mempelai wanita, maka itu boleh-boleh saja. Namun *ta'aruf* atau perkenalan yang dikenal dalam Wahdah Islamiyah tidak sama seperti yang dipahami atau yang terjadi pada masyarakat umum. Wahdah Islamiyah hanya mengenal *ta'aruf* dalam waktu singkat, yaitu hanya diberi waktu untuk bertemu satu sampai dua jam. Setelah itu baru dilanjutkan jika mereka setuju dan apabila tidak setuju maka pernikahan tidak jadi dilaksanakan.¹⁵⁷

3. Negosiasi ke orang tua/wali

Sebelum melaksanakan sebuah pernikahan, maka terlebih dahulu melakukan negosiasi terhadap orang tua atau wali dari kedua calon mempelai. Adapun tata cara melakukan negosiasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Alimuddin S.Ag adalah:

Sebelum melaksanakan sebuah pernikahan, maka kedua calon mempelai diharapkan melakukan negosiasi kepada orang tua atau wali mereka masing-masing sebagai langkah pendahuluan sebelum pihak Wahdah Islamiyah sebagai pihak yang akan menyelenggarakan

¹⁵⁶Alimuddin, S.Ag. Ketua Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, *Wawancara*, di Kampus Ibnu Qayyim, Pada tanggal 11 Oktober 2017.

¹⁵⁷Bustam S.Pd.I Pengurus DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone Yang telah melangsungkan pernikahan dengan model Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, di Kampus Ibnu Qayyim, Pada tanggal 11 Oktober 2017.

pernikahan melakukan negosiasi berikutnya dalam proses melamar dan membicarakan prosesi pernikahan.¹⁵⁸

4. Melamar sekaligus membicarakan prosesi pernikahan

Setelah melakukan negosiasi baik pada pihak pria maupun pihak wanita, maka dilakukan pelamaran dan pembicaraan prosesi pernikahan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Masril S.Ag. sebagai berikut:

Setelah proses negosiasi oleh kedua calon mempelai kepada orang tua atau wali, maka dilanjutkan dengan proses pelamaran oleh pihak Wahdah Islamiyah kepada orang tua atau wali pihak calon mempelai wanita. Dalam proses pelamaran inilah ketika sudah diterima, selanjutnya dibicarakan prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan yang sesuai dengan syari'at Islam menurut versi yang dipahami oleh Wahdah Islamiyah.¹⁵⁹

Standarisasi Regulasi Pernikahan

Wahdah Islamiyah telah menetapkan standarisasi regulasi pernikahan yang menurut mereka sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ervan Muhammad Arsyad sebagai berikut:

Pernikahan adalah suatu ibadah, oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Berangkat dari pandangan ini sehingga Wahdah Islamiyah membuat suatu standarisasi regulasi pernikahan, mulai dari pengurusan, khitbah sampai dengan terlaksananya prosesi pernikahan.¹⁶⁰

Standarisasi ini dimaksudkan agar pernikahan yang dilaksanakan dengan apa yang diharapkan. Adapun standarisasi yang dimaksud akan dijelaskan kemudian dalam pembahasan selanjutnya.

Memperbanyak Keluarga

Disamping standarisasi pengurusan dan regulasi pernikahan, Wahdah Islamiyah juga memandang bahwa pernikahan adalah sarana untuk memperbanyak keluarga. Hal ini bertujuan agar kantong-kantong akselerasi kader semakin banyak. Oleh karena itu Wahdah Islamiyah memotivasi kader agar cepat melaksanakan pernikahan dan memperbanyak keluarga. Hal ini dilaksanakan melalui pendataan kader

¹⁵⁸Alimuddin, S.Ag. Ketua Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, *Wawancara*, di Kampus Ibnu Qayyim, Pada tanggal 11 Oktober 2017.

¹⁵⁹Masril, S.Ag. Pengurus DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, *Wawancara*, di Kampus Ibnu Qayyim, Pada tanggal 11 Oktober 2017.

¹⁶⁰Ervan Muhammad Arsyad, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, *Wawancara*, di Rabica coffe Cake, Pada tanggal 8 Oktober 2017.

yang belum menikah, melakukan ceramah, seminar dan daurah pra nikah.¹⁶¹

Wahdah Islamiyah juga memberikan perhatian khusus terhadap resepsi pernikahan atau yang dalam agama Islam dikenal dengan sebutan *walimatul 'ursy* sehingga membuat standarisasi regulasi pernikahan. Menurut mereka, resepsi pernikahan bukanlah sembarang acara. Islam memandang acara ini bukan sekadar pesta hura-hura. Resepsi pernikahan menurut Islam adalah sebuah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT sekaligus tanda resmi akad nikah.

Selain itu resepsi pernikahan juga menjadi sarana pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Islam yang notabene adalah agama pembawa rahmat bagi seluruh alam, tak luput memberikan petunjuk pelaksanaan resepsi pernikahan. Menurut Wahdah Islamiyah, seorang yang hendak melaksanakan resepsi pernikahan harus memperhatikan adab-adab penyelenggaraan yang sesuai standar syariat Islam berikut ini.

1. Luruskan Niat

Hendaknya pernikahan diselenggarakan dengan niat yang benar yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal saleh, sehingga harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Alimuddin, S.Ag. bahwa :

Pernikahan itu adalah sebuah ibadah, oleh karena itu ketika mau menikah hendaknya diluruskan niat karena ibadah atau karena Allah swt. Sesuatu yang diniatkan buruk akan menjerumuskan pelakunya ke dalam maksiat. Pernikahan bukanlah ajang pamer kekayaan atau ajang pamer suami/istri. Oleh karena itu kembalikan niat yang benar dan lurus sehingga akan selamat dunia akhirat.¹⁶²

2. Membuat dan Menyediakan Hidangan Sesuai Kemampuan

Bersikap sederhana dalam mengadakan resepsi pernikahan akan menghindarkan umat Islam dari terjerat dari utang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Alimuddin S.Ag.

Tuan rumah tidak perlu memberatkan diri di luar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para undangan. Poin pentingnya adalah menjamu para hadirin. Terkait apa yang dihidangkan, bukan perkara yang perlu dibesar-besarkan. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.juga dalam

¹⁶¹Dokumentasi Program Kerja LP2KS Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IX Wahdah Islamiyah.

¹⁶²Alimuddin, S.Ag. Ketua Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, *Wawancara*, di Kampus Ibnu Qayyim, Pada tanggal 11 Oktober 2017.

pelaksanaann resepsi pernikahan yang sederhana ketika mengawini istri-istrinya.¹⁶³

Hal ini bukan berarti bahwa sebuah pernikahan tidak boleh dilaksanakan secara mewah, akan tetapi harus melihat situasi dan kondisi yang memiliki hajat.

3. Tidak Berlebih-lebihan

Ketika tidak mampu, umat Islam diperbolehkan mengadakan resepsi pernikahan seadanya dan semampunya. Demikian juga ketika sedang dalam berkelimpahan rezeki, umat Islam tidak dianjurkan untuk mengadakan resepsi pernikahan secara berlebihan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ervan Muhammad Arsyad bahwa:

Dewasa ini dijumpai banyak orang yang menyelenggarakan resepsi pernikahan secara berlebih-lebihan hingga menghabiskan uang berpuluh dan ratusan bahkan miliaran rupiah. Mereka melakukan ini demi untuk berbangga-bangga dan pamer di hadapan manusia untuk menjaga kedudukan dan gengsi. Padahal jika kita termasuk orang-orang yang berharta lebih, lebih baik kelebihan harta itu dibelanjakan untuk kemaslahatan umat.¹⁶⁴

4. Menyediakan Tempat Terpisah Bagi Tamu Laki-laki dan Perempuan

Menyediakan tempat yang terpisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya *ikhtilath*, yaitu percampuran antara lawan jenis. Sebagaimana disampaikan oleh Ervan Muhammad Arsyad bahwa:

Tujuan dari disediakannya tempat yang terpisah antara laki-laki Meskipun tanpa hijab, setidaknya memberi batas tak kasat mata bagi kursi para tamu. Kita bisa mengatur kursi laki-laki di sebelah kanan dan kursi wanita di sebelah kiri atau sebaliknya. Namun yang paling baik adalah memberikan hijab atau penghalang antara tamu laki-laki dan tamu perempuan demi menghindari adanya saling pandang baik antara sesama tamu maupun antara tamu laki-laki dengan mempelai wanita dan sebaliknya yang nota bene adalah bukan muhrim.¹⁶⁵

5. Tidak Mengisi Acara Resepsi dengan Perkara Mungkar (Maksiat)

Jika undangan sebuah walimah berisi perkara-perkara mungkar, maka wajib bagi yang diundang untuk tidak menghadirinya. Kehadiran lagu-lagu dengan lirik tidak mendidik dapat melalaikan si pendengar dari dzikrullah. Lebih parah lagi jika kehadiran mereka dapat membangkitkan syahwat para tamu undangan. Meski demikian, Islam memperbolehkan penggunaan alat-alat musik yang berupa rebana di resepsi pernikahan.

¹⁶³Alimuddin, S.Ag. Ketua Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, *Wawancara*, di Kampus Ibnu Qayyim, Pada tanggal 11 Oktober 2017.

¹⁶⁴Ervan Muhammad Arsyad, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, *Wawancara*, di Rabica coffe Cake, Pada tanggal 8 Oktober 2017.

¹⁶⁵Ervan Muhammad Arsyad, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, *Wawancara*, di Rabica coffe Cake, Pada tanggal 8 Oktober 2017.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Dzakwan ia berkata; Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afran berkata; suatu ketika, Nabi SAW masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar. Dbolehkan juga jika kamu menghadirkan senandung-senandung islami seperti nasyid yang membawakan lirik-lirik bermanfaat.

6. Sebaiknya Resepsi Pernikahan Diadakan Setelah *Dukhul*

Ulama antar-madzhab sepakat bahwa resepsi pernikahan disunnahkan diadakan setelah *dukhul* atau terjadinya hubungan intim antara suami-istri. Bukan sebelumnya seperti biasa terjadi di Indonesia.

Namun, seandainya diadakan sebelum *dukhul*, tetap dapat sunnahnya walimah. Jadi jika kamu mengadakan resepsi pernikahan tidak bersamaan dengan akad nikah, hal itu justru dianjurkan. Bagi Wahdah Islamiyah persoalan sebelum atau sesudah tidak menjadi persoalan, yang penting tidak melakukan resepsi pernikahan sebelum akad nikah baik berselang maupun hari itu juga. Akan tetapi menurut pandangan mereka akan lebih baik memang dilaksanakan setelah *dukhul*, karena walimah adalah rasa syukur karena telah dijadikan sebagai pasangan suami-istri.¹⁶⁶

Simpulan

1. Pernikahan adalah peristiwa agung bagi setiap individu. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat, maka Wahdah Islamiyah membuat suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah (LP2KS). Melalui dengan lembaga ini Wahdah Islamiyah berusaha untuk melaksanakan proses pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam. Adapun bentuk pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah adalah; 1). Membuat standarisasi pengurusan pernikahan yang meliputi pembinaan kepada calon, *ta'aruf*, negosiasi ke orang tua/wali dan pelamaran sekaligus membicarakan prosesi pernikahan. 2). Membuat standarisasi regulasi pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam yang meliputi; luruskan niat, membuat dan menyediakan hidangan sesuai kemampuan, tidak berlebih-lebihan, menyediakan tempat terpisah bagi tamu laki-laki dan perempuan, tidak mengisi acara resepsi dengan perkara yang mungkar (maksiat) dan sebaiknya resepsi pernikahan itu diadakan setelah *dukhul*. 3). Memperbanyak keluarga, karena mereka memandang bahwa pernikahan adalah sarana untuk memperbanyak keluarga. Hal ini bertujuan agar kantong-kantong akselerasi kader semakin banyak. Oleh karena itu Wahdah Islamiyah memotivasi kader

¹⁶⁶Ervan Muhammad Arsyad, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, *Wawancara*, di Rabica coffe Cake, Pada tanggal 8 Oktober 2017.

- agar cepat melaksanakan pernikahan dan memperbanyak keluarga. Hal ini dilaksanakan melalui pendataan kader yang belum menikah, melakukan ceramah, seminar dan daurah pra nikah.
2. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah jika ditinjau dari perspektif normatif adalah, mereka memandang bahwa pernikahan adalah merupakan ibadah sehingga proses pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Sedangkan kenyataan yang terjadi adalah bahwa pernikahan yang dilaksanakan masyarakat pada umumnya banyak dianggap bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan dalam perspektif sosiologis-antropologis dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu jika ditinjau dari segi teori perubahan sosial budaya kelihatannya menerapkan teori revolusi ketimbang tiga teori yang lainnya (evolusi, dan fungsionalis). Sedangkan jika dilihat dari segi bentuk perubahannya melalui bentuk perubahan milenarisme dan nominasi.

Daftar Pustaka

- Ahmad, H. Arifuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ma'a>ni al-Ha>dis*, Cet. II; Makassar: Alauddin Universty Press, 2013.
- Ahmad MS, Abd. Kadir, *Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* Cet. I; Makassar: Indobis, 2006.
- Badruzzaman, "Peranan Syara' dalam Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan", dalam <http://bz69elzam.blogspot.com>, 17 Mei 2015.
- al-Bukha>ri>, Muhammad Ibn Isma>i>1>, *S{ahi>h al-Bukha>ri>*, juz. VII. Kairo: Da>r al-H{adi>s, 1991.
- Da>hla>n, Abdu>l Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeva, 1996.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Pentafsir Alquran, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jilid III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dokumentasi Program Kerja LP2KS Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IX Wahdah Islamiyah.
- Hidayat, Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Cet. II; Jakarta: Teraju, 2004.
- Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al- Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz, III Kairo: Dar al-Hadis. 1991.
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'a>ni al- Hadi>s tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- al-Istanbu>li>, Mahmud Mahdi>>, *Kado Pernikahan* Cet. 19; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006..

- al-Jama>l, Ibra>him Muhammad, *Fiqih Wanita Terjemahan Anshori Uma>r* Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa>', 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Garamedia, 1991.
- Lamallongeng, Asmat Riady, *Dinamika Pernikahan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007.
- Latif, Syarifuddin, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumppocoe*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2016.
- Mame, A. Rahim, *Adat dan Upacara Pernikahan Sulawesi Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muna>wir, Ahmad Warso, *Kamus Ara>b Indonesia t.c.* Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- al- Naisaburi, Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz, III Kairo: Dar al-Hadis. 1991.
- Najamuddin, Andi, "Sekretaris Lembaga Adat Kab. Bone, "wawancara" dalam Syarifuddin Latif, *Budaya Pernikahan Masyarakat Bugis Tellumpocoe Perspektif Hukum Islam*.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nonci, *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis* Cet. I; Makassar: CV Karya Mandiri Jaya 2002.
- Pelras, Cristian, *Manusia Bugis t.c.* Jakarta: Forum Jakarta-Faris École Français, 2006.
- Tim Penyusun Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*, Makassar: Bulletin Wahdah Islamiyah, 2002.
- Sa>biq, As-Sayi>d, *Fiqh as-Sunnah Jilid II* Cet. VIII; Bai>rut Kita>b al-Ara>bi, 1987 M atau 1407 H.
- Salim, Abd. Muin, *Metode Penelitian Tafsir*, Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1994.
- al-Sijista>ni>, Abu> Da>u>d Sulaima>n Ibn al-Asy'as\ *Sunan Abu> Da>u>d*, Beirut : Da>r Al-Fikr, t.th.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suprayogo, Imam dan Drs. Tabroni M.Si., *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Syani, Abdul, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Bandar Lampung: Pustaka Jaya, 1995.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia antara Fiqih Munaq>hat dan Undang-Undang Pernikahan Cet. V*; Jakarta: Kencana, 2014.
- Suriasumantri, Jujun, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan", dalam Mastuhu dkk, *Tradisi Penelitian Agama Islam*, Bandung: Nuansa, 1998.
- Tasrif, M., *Kajian Hadis di Indonesia*, cet.I; Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Tim Penyusun Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*, Makassar: Bullettin Wahdah Islamiyah, 2002.

**SOSIOLINGUISTIK DALAM KONTEKTUALISASI
NASKAH KEAGAMAAN ISLAM KLASIK
AGH. JUNAID SULAEMAN**

Nursyirwan

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Ide yang melatarbelakangi permasalahan ini timbul dari beberapa fenomena bahwa umat Islam Indonesia mempunyai warisan khazanah kekayaan intelektual yang terpendam dari para ulama terdahulu. Hasil penelitian Balitbang diklat Kementerian Agama RI Tahun 2004 pada 8 propinsi, telah ditemukan 916 naskah dan yang sudah dianalisis baru sekitar 20 naskah sehingga dapat dipahami begitu banyak naskah keagamaan, sebagai hasil karya para ulama yang belum dikaji dan dianalisis. Khususnya di Sulawesi Selatan dari 271 naskah yang ditemukan baru ada dua yang telah dianalisis.

Jenis huruf yang digunakan pada naskah karya AGH. Junaid Sulaeman adalah khat *riq'ah*, dengan varian *riq'ah mufarraq*, hanya saja menggunakan alat tulis yang tidak mempunyai sisi tebal-tipis sehingga bentuk dan penampakan tulisan tidak sama betul dengan khat *riq'ah* yang dibuat khusus dalam kaligrafi Islam.

Gaya bahasa yang digunakan oleh AGH. Junaid Sulaeman dalam naskah syair-syairnya merupakan gaya penulisan yang tidak lepas dari kehidupan AGH. Junaid Sulaeman sehari-hari. Hal tersebut tercermin secara spesifik pada penyisipan nama hari secara konsisten dalam catatan harian tersebut dan penggunaan uslub Alquran yang digunakan. Hal itu sangat memungkinkan karena sebagai seorang ulama yang *ha>fiz*, tentu keseharian beliau banyak diisi dengan membaca Alquran.

Kandungan isi teks karya catatan harian AGH. Junaid Sulaeman dalam perspektif sosiologi bahasa dapat tercermin dari 3 nilai yaitu (1) nilai spritual yang berisi perilaku kesyukuran dan menerapkan perilaku tasawwuf, (2) nilai sosial, dan (3) nilai kemanusiaan.

Pendahuluan

Naskah keagamaan Islam klasik merupakan sebuah khazanah keilmuaan klasik yang berbentuk tekstual yang selama ini belum banyak diteliti dari sisi sosiolinguistik. Penelitian terhadap naskah keagamaan

Islam klasik masih terpusat pada studi naskah dengan menggunakan beberapa pendekatana, misalnya filologi, sastra, dan sejarah. Naskah tersebut kemudian diolah melalui tahapan inventarisasi naskah, deskripsi naskah, kritik naskah, penerjemahan, dan analisis isi naskah.

Pendekatan filologi digunakan sebagai suatu kajian yang berhubungan dengan naskah klasik yang berupa teks, tulisan, atau manuskrip. Kajian terhadap naskah klasik dilakukan karena ikan dalam kehidupan sekarang ini. Di lain sisi, naskah klasik tersebut menggunakan struktur kalimat yang berbeda dengan struktur kalimat yang baku sekarang ini. Demikian pula, pemilihan kosa kata yang tidak lagi dikenal dan digunakan dalam bahasa tulisan ataupun lisan sekarang ini. Padahal keberadaan naskah klasik tersebut, menarik perhatian untuk diketahui isi kandungannya sebagai pengetahuan klasik yang perlu dikaji secara mendalam. Dengan demikian, naskah klasik tersebut tidak selalu dapat diterima dan tidak mudah dipahami dan dituntut pendekatan yang memadai, salah satunya adalah pendekatan filologi.

Pendekatan kritik sastra dengan karakter yang mengacu pada upaya dekonstruksi dengan mengasumsikan adanya kesalahan yang telah dibuat pada saat proses penetapan naskahnya. Ada beberapa ragam pendekatan kritik yang bisa digunakan dalam kritik sastra, antara lain kritik naskah (*textual criticism*), kritik bentuk (*form cirticism*), dan kritik redaksi (*redaction criticism*). Keempat ragam kritik ini mengacu pada kajian biblikal.

Kajian biblikal dilakukan awal mulanya di kalangan intelektual Kristen, yang melakukan kritisi terhadap keorisinalan dan keotentikan kitab suci mereka. Pada akhirnya mereka menemukan fakta bahwa Bibel tidak ditulis langsung melalui diktasi al-Masih. Menurut mereka, sebagian isi Bibel hanya berupa rekaman atas peristiwa-peristiwa yang dialami al-Masih bersama Hawari (murid setia al-Masih), Bahkan belakangan ditemukan isi Bibel dari surat-surat yang ditulis oleh ulama-ulama Kristen kepada pengikutnya.¹⁶⁷

Pendekatan sejarah bertujuan untuk untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.¹⁶⁸

¹⁶⁷Andi Asdar Yusup, "Metode Bibel Dalam Pemaknaan Alquran (Kajian Kritis terhadap Pandangan Orientalis)". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 1, Juni 2016: 35-65, h. 36.

¹⁶⁸M.Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h.222.

Gambaran Naskah Karya Catatan Harian AGH. Junaid Sulaeman

Ulama nusantara menunjukkan produktivitas yang luar biasa dalam menghasilkan karya-karya atau naskah tertulis. Karya teks para ulama nusantara tidak dapat dilepaskan antara pengarang dengan konteks karya teks tersebut.

Gambaran naskah karya catatan harian AGH. Junaid Sulaeman dapat dikategorikan ada tiga bagian, yaitu (1) aksara dan bahasa, dan (2) jenis teks, dan (3) kandungan isi teks. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aksara dan bahasa

Sebagai seorang ulama yang lama menetap dan menuntut ilmu di Makkah al-Mukarramah yang notabeneanya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari, maka kompetensi dan keterampilan bahasa AGH. Junaid Sulaeman, baik dari segi bahasa lisan maupun bahasa tulisan tidak dapat diragukan. Karya peninggalannya yang berbentuk catatan harian yang berbahasa Arab dengan genre puisi (*syair; syi'r*) merupakan bukti kompetensi dan keterampilan bahasa yang dimilikinya. Meskipun demikian, tidak serta merta semua ulama yang pernah menetap dan menuntut ilmu di Makkah dapat membuat karya berbentuk puisi Arab.

Bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan sederajat yang kedudukannya sama tinggi. Kebudayaan dan bahasa merupakan satu kesatuan yang terdapat pada diri manusia. Dengan demikian, keduanya mempunyai hubungan bahasa yang erat sekali, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling membutuhkan.

Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan manusia, sebaliknya kebudayaan hanya dapat tumbuh dan berkembang karena adanya bahasa sebagai penopangnya. Bahasa merupakan sarana untuk menjaga keberlangsungan suatu kebudayaan. Pada akhirnya, kebudayaan dapat dimengerti, dipahami, dan dijunjung oleh manusia jika menggunakan bahasa tertentu sebagai sarana berkomunikasi dalam kebudayaan tersebut. Sering wajar jika ada ungkapan bahwa kebudayaan lahir karena adanya bahasa, tanpa adanya bahasa tidak akan pernah budaya itu eksis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Arab sangat memberi perhatian yang besar terhadap ungkapan-ungkapan yang bernuansa puitis, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, tidak heran banyak dijumpai dalam literatur Arab klasik maupun modern literatur dalam bentuk puisi. Meskipun literatur tersebut bukan secara khusus membahas tentang sastra. Dalam bidang ilmu sejarah, dikenal karya sejarawan Islam awal tokoh Ibn Ishaq (704M-768M) dan Ibn Hisyam yang menyusun buku sejarah kehidupan Rasulullah dalam bentuk puisi. Demikian pula dengan Ibn Malik dengan karya monumentalnya yang berjudul *Alfiah ibn*

Ma>lik sebagai suatu karya dalam bidang ilmu bahasa Arab yang disusun dalam bentuk bait-bait syair Arab.

2. Jenis huruf (*font*)

Jenis huruf atau *font* yang dimaksudkan adalah karakter huruf bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan naskah oleh AGH. Junaid Sulaeman. Secara umum, jenis huruf atau *font* yang digunakan dalam karya AGH. Junaid Sulaeman adalah jenis khat *riq'ah*. Khat *riq'ah* merupakan jenis kaligrafi yang populer dipakai dalam menulis sehari-hari dalam di lingkungan masyarakat, meskipun tidak sebanyak dengan penggunaan jenis khat *naskh*. Keindahan jenis khat *riq'ah* terletak pada konsistensi bentuk dan ketajaman bagian hurufnya yang lentur pada bagian ujung dan sambungan antarhuruf. Selain itu, jenis ini pada umumnya mudah dibaca, kecuali pada penggalan yang sengaja ditulis untuk memunculkan sisi keindahan. Dalam khat *riq'ah*, ada beberapa huruf yang tidak lazim disambung, tetapi disambung sehingga terkesan sulit dibaca, namun menambah keindahan dan kekuatan susunannya. Meskipun demikian, pada karya AGH. Junaid Sulaeman karakter tebal tipis yang menjadi ciri umum untuk kaligrafi, termasuk keniscayaan pada khat *riq'ah*, tidak kelihatan pada naskah hasil karya AGH. Junaid Sulaeman. Hal itu disebabkan, alat tulis yang digunakan adalah pulpen yang tidak mempunyai sisi tebal tipis.

3. Media tulis menulis

Alat tulis yang umumnya digunakan adalah pena dengan tinta cair yang bisa diisi ulang. Alat tulis tersebut adalah *fountain pen*. Di Indonesia, *fountain pen* ini adalah alat tulis yang umumnya digunakan di era tahun 50-an s.d. 90-an.

Keunikan alat tulis ini karena dapat tintanya dapat ditambah oleh pengguna secara mandiri. Alat tulis ini pulalah yang dimodifikasi oleh para kaligrafer dalam menulis khat di atas kertas karena pada bagian *nib* (metal bagian ujung pena yang bersentuhan langsung dengan kertas) tersebut dapat di asah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sisi yang dapat digoreskan di atas kertas secara tebal dan tipis. Pena hasil modifikasi inilah yang biasa digunakan oleh para kaligrafer Arab atau kaligrafer Bugis dalam menulis indah akrasa lontarak bugis yang juga mempunyai sisi tebal tipis.

Fountain pen atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pulpen yang di adopsi dari bahasa Belanda *vulfen*, mengacu kepada alat tulis dengan tinta cair yang dapat diisi ulang dan memiliki komponen spesifik yang berbeda dengan alat tulis yang umumnya dikenal saat ini.

Sejarah *fountain pen* dimulai dari abad ke-10 pada masa khalifah Ma'ad al-Mui'zz dari Mesir. Beberapa sket yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16 juga diketahui menggunakan alat yang mirip *fountain*

pen. Bahan yang digunakan pada proses pembuatan adalah logam anti karat seperti *stainless steel* dan plastik. Bahkan, beberapa seri premium menggunakan logam mulia, seperti seri *sonnet* keluaran Parker menggunakan emas untuk *nib* dan beberapa bagian lainnya. *Fountain pen* mempunyai bagian-bagian utama yang menunjukkan keutamaan dan kelebihan alat tulis tersebut, apalagi di era penulisan naskah karya AGH. Junaid Sulaeman. Bagian-bagian tersebut adalah:

- a. *Nib*, adalah bagian ujung *fountain pen* yang bersentuhan dengan kertas tulis terbuat dari baja tahan karat atau emas, bagian ini masih terbagi lagi berdasarkan ukuran maupun bentuk mata *nib* yang disesuaikan dengan kegunaannya.
- b. *Fed*, adalah bagian yang menempel pada *nib*, terbuat dari plastic bergerigi, bertujuan untuk menahan tinta agar tidak tumpah ke kertas.
- c. *Tube*, adalah bagian dari *fed* untuk menyalurkan tinta ke *nib*.
- d. *Tank*, adalah tempat penyimpanan tinta dengan sistem pompa atau *cardrige*.¹⁶⁹

Berdasarkan analisis atas setting waktu dan media alat tulis yang digunakan, maka dapat dikemukakan bahwa alat tulis yang digunakan dalam penulisan naskah syair catatan harian AGH. Junaid Sulaeman adalah menggunakan jenis alat tulis pulpen *fountain pen*. Hal ini didasarkan tahun penulisan naskah syair tersebut adalah tahun 1966 M./1285 H. Pada era tersebut pulpen tinta cair yang ada digunakan secara umum hanya jenis *fountain pen*. Merk pabrikan pulpen yang populer adalah merk Hero dan Parker.

4. Karakteristik Catatan Harian AGH. Junaid Sulaeman

Tidak dapat dipungkiri bahwa para ulama di nusantara mempunyai produktivitas menulis. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mempunyai pandangan yang cukup moderat dalam memahami ajaran Islam. Pengkajian atas karya-karya ulama nusantara sebagai warisan keilmuan perlu dikembangkan, termasuk di antaranya hasil karya AGH. Junaid Sulaeman. AGH. Junaid Sulaeman dikenal penghafal Alquran, mufassir, dan ahli sastra. Karya yang monumentalnya adalah catatan harian yang ditulis dalam bentuk syair-syair.

Berdasarkan penelusuran penulis kepada ahli waris AGH. Junaid Sulaeman, H. Hamzah Junaid, manuskrip tersebut disimpan oleh Prof. Dr. H. Najmuddin HS, M.A. Guru Besar Bahasa Arab Universitas Hasanuddin Makassar, dengan harapan dapat menjadi bahan penelitian untuk memperkaya khazanah keilmuan islam nusantara, di kawasan Sulawesi Selatan secara umum dan lokal Bone pada khususnya.

¹⁶⁹ <https://armansyahputra.com/2017/05/21/fountain-pen/>

Manuskrip catatan harian AGH. Junaid Sulaeman yang sampai di tangan penulis berbentuk file jpeg yang hanya terdiri atas 11 (sebelas) file. Catatan harian yang terdapat dalam kesebelas file itu meliputi catatan harian yang terbagi dua, yaitu (a) catatan harian dari tanggal 9 Ramadhan 1385 H. sampai dengan tanggal 12 Syawal 1385 H. dan (b) adalah catatan harian dari tanggal 15 Zu> al-Haj 1385 H. sampai dengan tanggal 22 Zu> al-Haj 1385 H.

Dalam satu hari, AGH. Junaid Sulaeman tidak mempunyai target membuat berapa syair. Dengan demikian, jumlah bait-bait yang dibuat tidak menentu. Secara rutin AGH. Junaid Sulaeman menulis catatan hariannya dengan tekun. Dalam satu hari AGH. Junaid Sulaeman tidak hanya membuat satu bait syair saja, tetapi paling sedikit mengubah syair sebanyak 3 (tiga) buah bait puisi. Bahkan catatan bait syair terbanyak adalah 14 (empat belas) bait syair.

Bait-bait syair AGH. Junaid Sulaeman dapat dikategorikan sebagai puisi atau karangan terikat. Karangan terikat karena puisi dibuat berdasarkan aturan kesusastraan yang cukup ketat, yaitu aturan bait, baris, jumlah kata dan pola sajak, terutama sajak akhir. *Syi'ir* atau puisi Arab adalah ucapan atau tulisan yang memiliki *wazan* atau *bahr* (mengikuti prosodi atau ritme gaya lama) dan *qafiyah* (rima akhir atau kesesuaian akhir baris/*syat'r*) serta unsur ekspresi rasa dan imajinasi yang harus lebih dominan dibanding prosa.

Gaya Bahasa Karya Catatan Harian AGH. Junaid Sulaeman

Gaya bahasa yang digunakan oleh AGH. Junaid Sulaeman dalam naskah syair-syairnya merupakan gaya penulisan yang tidak lepas dari kehidupan AGH. Junaid Sulaeman sehari-hari. Hal itu dapat dipahami karena bahasa seseorang dapat berpengaruh terhadap kehidupan berbudaya seseorang. Kehidupan sosial yang melingkupi kehidupannya sehari-hari yang identik dengan lingkungan ulama, tidak dapat lepas dari gaya bahasa yang digunakannya, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan.

Dalam analisis secara kebahasaan dan kesusatraan, dapat diuraikan beberapa keunikan pada gaya bahasa sastra AGH. Junaid Sulaeman pada catatan harian yang dengan tekun dan konsisten senantiasa setiap hari, meskipun beliau tidak mempunyai target jumlah bait syair yang harus diselesaikan dalam satu hari, namun paling sedikit satu hari beliau menulis syair minimal tiga baris.

Gaya bahasa lain dari AGH. Junaid Sulaeman adalah dalam bait-bait syair yang berisi catatan harian beliau, meskipun selalu mencantumkan penanggalan yang berisi Hari, tanggal, bulan dan Tahun, namun pada bait-

bait pertamanya selalu menyebutkan nama hari dalam catatannya. Di antara bait-bait yang diteliti hanya ada satu catatan harian saja yang tidak menyebutkan nama, yaitu pada catatan harian pada tanggal 12 Syawal 1385 H.

Hanya saja, gaya bahasa yang digunakan berbeda-beda. Berdasarkan urutan naskah yang diteliti dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Kosa Kata Hari Dalam Catatan Harian AGH. Junaid Sulaeman

No.	Tanggal Pembuatan	Jumlah Bait	Hari	Diksi Hari
1	9 Ramadhan 1385 H.	9	Sabtu	سبتي
2	10 Ramadhan 1385 H.	9	Ahad	أحد
3	11 Ramadhan 1385 H.	14	Senin	الإثنين
4	12 Ramadhan 1385 H.	9	Selasa	الثلاث
5	13 Ramadhan 1385 H.	12	Rabu	الربوع
6	14 Ramadhan 1385 H.	11	Kamis	الخميس
7	15 Ramadhan 1385 H.	12	Jumat	جمعتي
8	16 Ramadhan 1385 H.	7	Sabtu	سبتي
9	17 Ramadhan 1385 H.	12	Ahad	أحد
10	18 Ramadhan 1385 H.	11	Senin	الإثنين
11	19 Ramadhan 1385 H.	9	Selasa	ثلاثونا
12	20 Ramadhan 1385 H.	9	Rabu	الربوع
13	21 Ramadhan 1385 H.	10	Kamis	الخميس
14	22 Ramadhan 1385 H.	12	Jumat	جمعتي
15	23 Ramadhan 1385 H.	11	Sabtu	السبت
16	24 Ramadhan 1385 H.	12	Ahad	احدى
17	25 Ramadhan 1385 H.	11	Senin	الإثنين
18	26 Ramadhan 1385 H.	11	Selasa	ثلاثونا
19	27 Ramadhan 1385 H.	11	Rabu	الربوع
20	28 Ramadhan 1385 H.	11	Kamis	الخميس
21	29 Ramadhan 1385 H.	3	Jumat	جمعتي
22	30 Ramadhan 1385 H.	3	Sabtu	السبت
23	1 Syawal 1385 H.	7	Ahad	أحد
24	2 Syawal 1385 H.	5	Senin	الإثنين
25	3 Syawal 1385 H.	5	Selasa	الثلاث
26	4 Syawal 1385 H.	7	Rabu	الربوع
27	5 Syawal 1385 H.	7	Kamis	الخميس

28	6 Syawal 1385 H.	7	Jumat	جمعتي
29	7 Syawal 1385 H.	3	Sabtu	سبتى
30	8 Syawal 1385 H.	4	Ahad	الأحد
31	9 Syawal 1385 H.	4	Senin	الاثنين
32	10 Syawal 1385 H.	3	Selasa	الثلاثاء
33	11 Syawal 1385 H.	11	Rabu	الربوع
34	12 Syawal 1385 H.	3	Kamis	Tidak ada
35	15 Z u> al-H}aj 1385 H.	8	Sabtu	السبت
36	16 Z u> al-H}aj 1385 H.	11	Ahad	الأحد
37	17 Z u> al-H}aj 1385 H.	9	Senin	الاثنين
38	18 Z u> al-H}aj 1385 H.	6	Selasa	الثلاثاء
39	19 Z u> al-H}aj 1385 H.	5	Rabu	الربوع
40	20 Z u> al-H}aj 1385 H.	6	Kamis	الخميس
41	21 Z u> al-H}aj 1385 H.	12	Jumat	جمعتي
42	22 Z u> al-H}aj 1385 H.	12	Sabtu	السبت
43	23 Z u> al-H}aj 1385 H.	12	Ahad	احد
44	24 Z u> al-H}aj 1385 H.	11	Senin	الاثنين

Adapun syair-syair yang menggunakan nama hari pada setiap bait pertama, tiap harinya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bait pertama, dari 9 (sembilan) bait pada syair-syair pada Hari Sabtu, 9 Ramadhan 1385 H. disebutkan sebagai berikut:

¹⁷⁰ سبتى لقد مررت عند الوعد ☐ أجلسنا إلها في الوعد

Artinya:

Di hari Sabtu (ku), saya mengikat janji, Tuhan kami mendudukkan kami pada janji.

Ungkapan syair di atas, diawali dengan kata سبتى. Penggunaan kata سبتى, yang referensinya menunjukkan hari Sabtu, tetapi AGH. Junaid Sulaeman menambahkan kata ganti orang pertama (*ya mutakallim*) di belakang kata سبتى menjadi سبتى sebagai bentuk penguatan atas pernyataan berikutnya. Pernyataan berikutnya menggambarkan seorang hamba yang terikat janji dengan sesama manusia. Ikatan janji itu dapat diwujudkan dengan baik jika Allah memberi kedudukan/sikap konsisten terhadap janji yang telah diikrarkan tersebut.

Pada hari berikutnya, Ahad 10 Ramadhan 1385 H. AGH. Junaid Sulaeman kembali menulis syair-syair sebanyak 9 (sembilan) bait. Pada bait pertama, tertera nama hari Ahad, sebagaimana berikut ini:

¹⁷¹ وقتت عند أحد في الحجر ☐ قراءت في الصبح عند الفجر

¹⁷⁰AGH. Junaid Sulaeman, *Catatan Harian AGH. Junaid Sulaeman*, manuskrip. (Makassar, Disimpan oleh Prof. Dr. H. Najmuddin, M.A., 1966), h. 49.

Artinya:

Di hari Ahad, saya mewaqafkan bacaan surat *al-hijr*, Saya membacanya di shubuh hari waktu fajar.

Ungkapan syair di atas, juga menyebut nama hari, yaitu hari Ahad pada *s}adr*¹⁷². Penggunaan kata Ahad, dalam bait ini, murni kesengajaan penulis sebagai bentuk penggambaran *setting* waktu terjadinya suatu peristiwa.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

Naskah karya catatan harian AGH. Junaid Sulaeman adalah catatan harian yang rutin ditulis oleh beliau. Naskah catatan yang diteliti adalah manuskrip catatan harian AGH. Junaid Sulaeman yang sampai di tangan penulis berbentuk file jpeg yang hanya terdiri atas 11 (sebelas) file. Catatan harian yang terdapat dalam kesebelas file itu meliputi catatan harian yang terbagi dua, yaitu (a) catatan harian dari tanggal 9 Ramadhan 1385 H. sampai dengan tanggal 12 Syawal 1385 H. dan (b) adalah catatan harian dari tanggal 15 Zu> al-Haj 1385 H. sampai dengan tanggal 22 Zu> al-Haj 1385 H.

Tulisan aksara Arab yang ada dalam masyarakat Bone dapat dikategorikan pada dua hal yaitu (a) tulisan Arab yang menggunakan huruf dan bahasa Arab, baik yang menggunakan baris (*lisan*), seperti dalam tulisan/cetakan Alquran, maupun yang tidak menggunakan baris (kitab kuning/kitab gundul), dan (b) tulisan Arab yang menggunakan huruf-huruf Arab (*hijaiyah*), tetapi kosa kata yang digunakan bukan kosa kata Arab, melainkan kosa kata Indonesia yang ditulis menggunakan huruf-huruf Arab, umumnya tidak menggunakan tanda baca (*syakal*).

Jenis huruf yang digunakan pada naskah karya AGH. Junaid Sulaeman adalah khat *riq'ah*, dengan varian *riq'ah mufarraq*, hanya saja menggunakan alat tulis yang tidak mempunyai sisi tebal-tipis sehingga bentuk dan penampakan tulisan tidak sama betul dengan khat *riq'ah* yang dibuat khusus dalam kaligrafi Islam.

Berdasarkan analisis atas setting waktu dan media alat tulis yang digunakan, maka dapat dikemukakan bahwa alat tulis yang digunakan dalam penulisan naskah syair catatan harian AGH. Junaid Sulaeman adalah menggunakan jenis alat tulis pulpen *fountail pen*. Hal ini didasarkan tahun penulisan naskah syair tersebut adalah tahun 1966 M./1285 H. Pada era tersebut pupen tinta cair yang ada digunakan secara umum hanya jenis

¹⁷¹AGH. Junaid Sulaeman, *Catatan Harian AGH. Junaid Sulaeman*, manuskrip. (Makassar, Disimpan oleh Prof. Dr. H. Najmuddin, M.A., 1966), h. 49.

¹⁷²Dalam sebuah *bait* syair terdiri atas dua bagian, bagian pertama disebut *al-s}adr* (الصدر). *al-S}adr* biasa juga disebut *al-mas}ra>' al-awwal* (المصراع الأول) atau *al-syat}r al-awwal* (الشطر الأول), sedangkan bagian kedua adalah *al-'ajz* (العجز), biasa pula disebut *al-mas}ra>' al-s}a>ni>* (المصراع الثاني) atau *al-syat}r al-s}a>ni>* (الشطر الثاني).

fountail pen. Adapun tinta yang digunakan dalam penulisan naskah syair catatan harian AGH. Junaid Sulaeman adalah menggunakan tinta cair yang merupakan pasangan dari pulpen *fountail pen* tersebut Kertas yang digunakan sebagai wadah mengungkapkan syair-syair AGH. Junaid Sulaeman adalah kertas yang berbentuk buku agenda tahun 1964.

Gaya bahasa yang digunakan oleh AGH. Junaid Sulaeman dalam naskah syair-syairnya merupakan gaya penulisan yang tidak lepas dari kehidupan AGH. Junaid Sulaeman sehari-hari. Hal tersebut tercermin secara spesifik pada penyisipan nama hari secara konsisten dalam catatan harian tersebut dan penggunaan uslub Alquran yang digunakan. Hal itu sangat memungkinkan karena sebagai seorang ulama yang *ha>fiz*, tentu keseharian beliau banyak diisi dengan membaca Alquran.

Kandungan isi teks karya catatan harian AGH. Junaid Sulaeman dalam perspektif sosiologi bahasa dapat tercermin dari 3 nilai yaitu (1) nilai spritual yang berisi perilaku kesyukuran dan menerapkan perilaku tasawwuf, (2) nilai sosial, dan (3) nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M.Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Baried, S.B., S.C. Soeratno, Sawoe, S. Sutrisno, dan M. Syakir, *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
- Baried, S.B.S. Sutrisno, S.C., Soeratno, Sawu, dan K.Z. Istanti.. *Pengantar Teori Filologi*, Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1994.
- Chaer, Abdul. dan Leoni Agustina, *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*, Edisi Revisi, Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Fathurahman. *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Fishman, J.A.. *Reading in the Sociology of Language*. Den Haag-Paris: Mouton, 1968.
- George A. Makdisi, *The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West*, terj. A. Syamsu Rizal dan Nur Hidayah, *Cita Humanisme Islam; Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaisans Barat*, Cet. I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of the Arab*, Cet. I: Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Khoeron, Moh. "Benang Merah Huffaz di Indonesia, Studi Penelitian Biografi Huffaz", *Ṣuḥuf*, Vol. 4, No. 2, 2011.

- Kridalaksana, Harimurti. *Kamus Linguistik*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Muhammad, Firdaus. *Anregurutta Literasi Ulama Sulselbar*. Cet. I; Makassar: Nala Cipta Litera, 2017.
- Nababan, P.W.J. *Sosiolinguistik*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, *Hermeneutika Teori Bru Mengenai Interpretasi*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005.
- Poloma, Margaret M. *Contemporary Sociological Theory*, terj. Tim Penerjemah Yasogama, *Sosiologi Kontemporer*, Ed. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ruslan, Muhammad dan Waspada Santing, ed., *Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Dakwah*, Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sulawesi Selatan, 2007.
- Saputra, *Pengantar Filologi Jawa*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2013.
- Soebadio, Haryati. *Relevansi Pernaskahandengan Berbagai Bidang Ilmu*, Penerbitan Ilmiah FS UI, 12 hlm 1-17).
- Subroto, Edi. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007.
- Sulaeman, AGH. Junaid. *Catatan Harian AGH. Junaid Sulaeman*, manuskrip. Makassar, Disimpan oleh Prof. Dr. H. Najmuddin, M.A., 1966.
- Yusup, Andi Asdar. "Metode Bibel Dalam Pemaknaan Alquran (Kajian Kritis terhadap Pandangan Orientalis)". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 1, Juni 2016: 35-65.
- <https://armansyahputra.com/2017/05/21/fountain-pen/>

**RITUS BATU TANRE:
Paham dan Praktik Keagamaan Masyarakat Cakkeware Cenrana-Bone**

Sudirman¹ dan Misbahuddin²
Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Penelitian ini mengungkap paham dan praktik keberagaman masyarakat Cakkeware-Bone. Metode interpretasi digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana makna ritus *Batu Tanre* dikonstruksikan. Penggalan data kualitatif diproses dengan metode observasi dan wawancara kepada informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah dan praktik ritual "*Batu Tanre*" dilihat secara genealogi diawali aspek penamaan, kemunculan dan asal mula praktik ritus tersebut dilakukan. Pada perkembangannya ritual ini mendapat resistensi, sehingga dalam konteks kekinian terdapat perubahan bentuk. Beberapa tahapan telah dilalui dalam proses kemunculannya. Pertama keyakinan terhadap adanya sosok metafisis di *Batu Tanre* dijadikan awal dipraktikkan ritual, sekaligus dijadikan awal mula faktor munculnya *Batu Tanre*. Keyakinan orang Cakkeware terhadap mitos *Batu Tanre* dianggap selalu merasa hadir dalam kehidupan masyarakat, dijadikan motivasi bekerja, sebagai warisan tradisi leluhur atau kelanjutan tradisi yang diajarkan oleh orang tua, serta bagian dari tradisi keagamaan. Praktik ritual di *Batu Tanre* digunakan simbol-simbol keagamaan sebagai sarana penghubung (*washilah*) kepada Allah swt. Simbol yang dimaksudkan seperti Batu di dua tempat (laki-laki dan perempuan) dan simbol makanan yang variatif. Ada tiga proses harus dilalui ketika dilakukan ritual. *Pertama*, menentukan jenis acara apa yang harus dilakukan. *Kedua*, disediakan berbagi jenis hidangan. *Ketiga*, dilakukan upacara ritual di dua tempat, yaitu di rumah dan *Batu Tanre*. Pola ritual yang dipraktikkan di rumah disimbolkan dalam bentuk 7 jenis makanan dan minuman. Di *Batu Tanre* cukup dibawa 3 jenis makanan. Simbol lain adalah dua jenis batu-batuan, yaitu jenis batu laki-laki dan perempuan. Aktor yang terlibat setiap aktivitas ritual di *Batu Tanre* ada empat, yaitu; tokoh masyarakat, imam dusun, pabbaca, dan sanro bola. Sedang partisipan adalah pemuka agama, dan tokoh pendidik. Ritual *Batu Tanre* dianggap memiliki fungsi atau tujuan, di antaranya; latent (tersembunyi), manifest (nampak), menguatkan jaringan sosial keagamaan, dan fungsinya secara psikologis.

Implikasinya, praktik dan pemahaman ritual *Batu Tanre* di Cakkeware-Bone menarik perhatian masyarakat luar yang bukan berasal dari masyarakat Cakkeware. Mereka mengunjungi dan melakukan ritual hanya di *Batu Tanre*, meskipun tidak ada ritual yang dilakukan di rumah. Kedatangannya cukup melepaskan hajat dan niat yang telah dijanjikan sebelumnya. Ritual ini berlangsung terus-menerus selama masih ada pengakuan terhadap eksistensinya.

Key Words: *Ritual, Batu Tanre, Makna, Praktik, Prosesi, dan Fungsi.*

Pendahuluan

Batu Tanre adalah sebuah nama dusun sekaligus tempat dilakukan ritual sesembahan yang selalu didatangi oleh warga desa Cakkeware kecamatan Cenrana kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Penamaan dusun tersebut dilatar belakangi adanya batu besar dan tinggi yang diistilahkan dalam bahasa Bugis "*Batu Tanre*", "*batu*" di sini adalah sepasang bongkahan batu yang diyakini masyarakat setempat sebagai batu yang hidup dan tumbuh membesar. Sedang "*tanre*" berarti tinggi dan besar. Pada batu besar dan tinggi hitam keputih-putihan inilah pusat ritual dan pemujaan dilakukan. Prilaku seperti ini banyak ditemukan di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, khususnya di kabupaten Bone, misalnya tradisi angkat batu di Pallime yang dipercaya mendatangkan rezeki jika berhasil diangkat, kemudian ritual "*Addewatang*" di desa Ujung,¹⁷³ yang kerap dikunjungi sebagai tempat diwujudkannya segala permintaan.

Sejarah Geneologi Desa Cakkeware

Secara historis geneologis penamaan Cakkeware berasal dari istilah Bugis yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "*cakke*" dan "*mpaare*". Istilah ini dikenal dalam pemaknaan "*ada cakke yang mpare*" sehingga menjadi *Cakkeware*. Makna *mpaare* kemudian diubah menjadi *mawere* karena dalam istilah bahasa setempat "*nangkulului anrianna nassulappei anrena*",¹⁷⁴ maksudnya "*ikannya dijadikan bantal, sedang bantal gulingnya adalah makanannya*". Hal ini lebih dimaknai bahwa untuk kebutuhan pokok makanan dan lauk pauk sehari-hari bagi masyarakat Cakkeware tidak menjadi kekurangan, bahkan melimpah. Karenanya, makna Cakkeware juga dapat dikatakan sebagai lumbung padi.¹⁷⁵ sebab sejak dulu hingga sekarang desa ini dianggap sebagai desa subur dengan ikan dan makanan yang melimpah.

¹⁷³ Muhammad Rais, *Hegemoni Elit dalam Ritus Agama Lokal: Keberagamaan Masyarakat Bugis Bone Sulawesi Selatan*, el-Harakah, Jurnal Budaya Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 12 No. 2. h. 23.

¹⁷⁴ Haji Ahmad, Mantan Kepala Desa Cakkeware, "*Wawancara*" pada tanggal 20 Agustus 2017 di Cakkeware.

¹⁷⁵ Haji Ahmad, Mantan Kepala Desa Cakkeware, "*Wawancara*" pada tanggal 20 Agustus 2017 di Cakkeware.

Tahun 1932 merupakan tahun awal penamaan Cakkeware sebagai dusun dengan luas wilayah yang terhampar sampai perbatasan wilayah kabupaten tetangga, yaitu kabupaten Wajo.¹⁷⁶ Lokasinya yang berada di timur dan tidak jauh dari laut, serta banyaknya empang yang tersebar dijadikan sebagaipenandabahwa perkampungan tersebut adalah Cakkeware yang dikenal subur dan makmur.

Pada awalnya Cakkeware adalah dusun dan diubah menjadi desa pada tahun 1999 atas inisiasi H. Ahmad AS, kepala desa pada saat itu yang memprakarsai perubahan nama dan lokasi beberapa desa yang dianggapnya kurang tepat. Sebagai putra daerah setempat, beliau merasa terpenggil untuk meluruskan kebenaran status desa yang selama ini dianggap salah. misalnya dulu terdapat desa Labotto dan Watang Labotto. Kebetulan dusun Labotto berada di wilayah Cakkeware dan setelah dilakukan perubahan, maka Labotto menjadi desa Cakkeware dan Watang Labotto menjadi desa Labotto.

Kepiawaian kepala desa Ahmad dalam periode kepemimpinannya di Cakkeware diakui oleh masyarakat sebagai kepala desa yang sukses mengangkat dan membangun Cakkeware sebagai desa yang terpancang dari desa-desa lainnya di kecamatan Cenrana. Kekuatan politiknya dalam melakukan negosiasi, terutama ketika perubahan nama status desa di tingkat legislasi sebagai bukti keberhasilan beliau dalam berdiplomasi. Pada kepemimpinan inilah nama dusun Labotto menjadi desa Cakkeware.

Kehidupan Budaya dan Keagamaan

Budaya yang berkembang di masyarakat Cakkeware tidak jauh berbeda dengan budaya kebanyakan masyarakat Bugis Bone. Kuatnya memegang tradisi, menjunjung tinggi adat kesopanan (etika), gigih dalam pekerjaan, berani, dan bertanggung jawab adalah prototype masyarakat Cakkeware secara umum. Ada dua faktor yang dapat dilihat dalam konteks ini, yaitu; *Pertama*, masyarakat Cakkeware dikenal sebagai masyarakat religious, sehingga *basic religious* yang kerap mewarnai kehidupan sosial mereka. *Kedua*, kuatnya memegang tradisi leluhur yang banyak mengajarkan kearifan lokal (*local wisdom*), sehingga terformulasi menjadi sebuah nilai atau etika. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa antara *basic religious* dan tradisi leluhur tidak dapat dipisahkan, bahkan saling menguatkan satu sama lain. Implikasinya terdapat sebuah tradisi lokal yang dilakukan masyarakat Cakkeware yang merepresentasikan kedua faktor tersebut.

Perpaduan budaya yang berbasis religious dengan tradisi lokal yang masih dipertahankan masyarakat Cakkeware tergambar dalam tradisi perayaan keagamaan, seperti maulid dan isra' mi'raj, serta rangkaian

¹⁷⁶ Haji Ahmad, Mantan Kepala Desa Cakkeware, "Wawancara" pada tanggal 20 Agustus 2017 di Cakkeware.

perayaan hasil panen, seperti "*passempe*". Hampir setiap tahun kedua acara tersebut dirayakan oleh masyarakat yang tentu saja dibawah tanggung jawab kepala desa. Acara "*passempe*" misalnya, yang dilakukan oleh masyarakat tergantung kesiapan dan kemampuan desa. Pasalnya dibutuhkan banyak persiapan karena mengundang banyak orang dari berbagai unsur. Tradisi perayaan "*passempe*" merupakan bentuk kesyukuran para petani dengan hasil pertanian yang melimpah. Dalam konteks inilah tradisi ritus batu tanre dirangkaikan dengan acara mengunjungi lokasi batu tanre sambil menyiapkan berbagai makanan.

Berbeda perayaan "*passempe*" yang tidak setiap tahun dilakukan, karena tergantung kondisi dan kesiapan masyarakat. Lain halnya dengan kegiatan keagamaan, seperti perayaan maulid nabi besar Muhammad saw, yang dilakukan setiap tahun tepat pada tanggal kelahiran Rasulullah saw dengan mengadakan banyak rangkaian acara. Menghadirkan ulama dari Sengkang untuk menyampaikan ceramah dan masyarakat Cakkeware menyiapkan berbagai makanan dan segala kebutuhan yang diperlukan pada saat perayaan maulid.

Selama ini, perayaan maulid nabi besar Muhammad saw diselenggarakan dengan persiapan yang matang. Pasalnya, banyak rangkaian acara yang menyertai perayaan tersebut. Rangkaian acara yang dimaksud antara lain, pembuatan "*male*", jenis makanan yang berasal dari beras ketan dalam jumlah tertentu, sertatelur ayam dan itik yang direbus dengan diberikan pewarna pada kulitnya. Selain itu, dilakukan pelatihan dan kompetisi lomba pidato bagi anak-anak remaja antar sekolah, sehingga seminggu sebelum acara dilaksanakan perlombaan ini telah digelar dan juaranya ditampilkan pada saat perayaan maulid.

Antusias masyarakat Cakkeware terhadap perayaan acara keagamaan lebih direspon dibandingkan dengan aktivitas lainnya, seperti olahraga. Menurut Tina,¹⁷⁷ salah seorang ibu rumah tangga di Cakkeware dijelaskan bahwa "*kami lebih senang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh desa, karena anak-anak kami dilatih berpidato atau ceramah agama sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan psikologi anak. Berbeda kalau kegiatan olahraga, seperti sepak bola. Mayoritas ibu-ibu di Cakkeware kurang respek terhadap kegiatan sepak bola*". Ada tiga hal yang menyebabkan demikian, *pertama*, kegiatan sepak bola dibutuhkan biaya yang banyak. *Kedua*, durasi waktu atau jadwal pertandingan yang panjang dan lama. *Ketiga*, masyarakat direpotkan karena umumnya para pemain dilayani dan diberikan makanan. Karenanya, kegiatan sepak bola tidak rutin setiap tahun dilaksanakan dan berbeda dengan acara keagamaan yang pasti dilaksanakan setiap tahunnya.

¹⁷⁷Tina, Ibu Rumah Tangga, "*Wawancara*" pada tanggal 20 Agustus 2017 di Cakkeware.

Keyakinan terhadap “*Batu Tanre*”

Ternyata bahwa ritual yang ada di *Batu Tanre* berbeda dengan ritual yang berkembang dan dipraktikkan masyarakat Bugis Bone. Perbedaan itu terlihat dalam dua hal, *Pertama*, eksistensi ritual dalam pemahaman masyarakat Cakkeware tidak dapat bertahan, sehingga semakin hari masyarakat yang mempraktikkan upacara tersebut semakin berkurang. *Kedua*, dukungan kepada aktor “Pabbaca” tidak maksimal. Maksudnya masyarakat tidak memberikan apresiasi berlebihan kepada Pabbaca sehingga yang bersangkutan tidak diberikan kebebasan untuk meminta segala bentuk keinginan kepada masyarakat, baik secara implisit mau nyata. Karenanya, diprediksi bahwa ritus yang ada *Batu Tanre* semakin hari akan ditinggal sendiri oleh penganutnya seiring dengan waktu.

Secara historis geneologi praktik *Batu Tanre* dapat dilihat tiga aspek, yaitu historis penamaan, kemunculan, dan asal muasal praktik ritus. Sebagai salah satu nama dusun di desa Cakkeware, penamaan *Batu Tanre* menjadi fenomenal karena lahir dari sebuah mitologi batu yang diyakini masyarakat sebagai batu hidup dan membesar. Ia merupakan sepasang batu dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang ada di sebuah ladang masyarakat. Begitu populernya mitos ini sampai masyarakat Cakkeware melekatkan nama *Batu Tanre* sebagai sebuah kampung.

Sejarah kemunculan *Batu Tanre* yang dipandang kuat oleh masyarakat dipahami sebagai penanda adanya penunggu hutan atau kebun, sehingga ditakuti oleh penduduk setempat. Pada tahun 1950 adalah tahun awal dimulai praktik ritual di *Bantu Tanre*. Tradisi ini dilakukan pertamakali ketika hasil panen para petani berhasil. Sebagai wujud rasa syukur, maka masyarakat melakukan acara pesta rakyat, seperti *massempe* dan *mappadandang*. Pada momentum inilah masyarakat mulai melakukan tradisi dengan menyandingkan acara tersebut dengan rangkaian acara membawa makanan ke *Batu Tanre*.

Awal mula *Batu Tanre* ditetapkan sebagai tempat dilakukan ritual oleh masyarakat setempat ketika mayoritas mereka meyakini bahwa batu tersebut memang hidup dan memberikan pengaruh mistis pada masyarakat. Eksistensi paham dan praktik ritual *Batu Tanre* bukan tanpa perlawanan dari masyarakat. Setidaknya ada empat bentuk resistensi yang ditunjukkan, seperti ketidaksetujuan terhadap paham dan praktik ini. Kemudian, mundurnya imam desa dari jabatannya dan sebelumnya imam desa tidak mau memberikan ceramah di masjid dan membiarkan praktik ini tetap berjalan yang penting dilakukan secara sembunyi. Kini, ritual *Batu Tanre* dijadikan sebagai bagian kehidupan masyarakat dan bukan hanya acara syukuran saja dilakukan ritual melainkan berbagai tradisi mulai disertakan, seperti tradisi sumur di *Batu Tanre*, lebaran, penganting (*mappabotting*) dan pindah rumah. Semua kegiatan tersebut dilakukan pembacaan doa oleh *Pabbaca* (orang yang spesialis pembacaan

doa) dan disiapkan makanan yang bersumber dari alamiah, seperti telur mentah, beras dan kelapa muda. Kondisi *Batu Tanre* sebagai tempat aktivitas ritual semakin dijaga dan dipelihara. Hal itu terlihat dengan diberikannya atap pada *Batu Tanre* yang berjenis kelamin perempuan.

Sebagaimana lazimnya sebuah kepercayaan yang dimitoskan selalu disimbolkan dengan sebuah benda atau semacamnya untuk menegaskan eksistensinya. Kepercayaan masyarakat Cakkeware terhadap mitos *Batu Tanre* pun demikian. Mereka tidak hanya memahami pada tingkat kognitif saja, tetapi dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk perilaku ke suatu tempat. Oleh masyarakat Cakkeware tempat itu dinamai "*Batu Tanre*", artinya sebagai tempat atau lokasi sakral yang diziarahi masyarakat dan dianggap dapat memberikan perubahan hidup.

Faktormunculnya *Batu Tanre* ada dua, yaitu *pertama*, karena adanya mitos makhluk metafisis yang bersemayang di *Batu Tanre*. Kedua, dianggap sebagai fenomena alam. Dalam konteks ini mayoritas masyarakat cenderung meyakini faktor pertama. Munculnya *Batu Tanre* sebagai sebuah ritual secara komunal telah diakui oleh masyarakat Cakkeware. Hal itu termanifestasi dari pegakuan itu hingga bertahannya (*survaiv*) *Batu Tanre* dalam kognitif masyarakat Cakkeware.

Perkembangan perilaku ritual *Batu Tanre* tidak terlepas dengan relasinya orang-orang Cakkeware yang sukses di luar daerah. Dapat dibayangkan kalau mereka mengagendakan waktunya untuk selalu datang ke *Batu Tanre*. Alasan utama hal itu dilakukan karena bentuk kesyukuran, kesuksesan dan keberhasilan kepada Tuhan atas usaha mereka di perantauan atau di luar daerah. Karenanya, aktivitas yang dilakukan ditandai dengan ritual di *Batu Tanre*.

Keyakinan orang Cakkeware terhadap mitos *Batu Tanre* dianggap mendalam dan dekat di hati setiap orang (penganut) sehingga selalu merasa hadir dalam kehidupan masyarakat Cakkewar. Selain itu, juga pada diri setiap orang yang kesurupan, dianggapnya sebagai bentuk hadirnya sosok makhluk ini di *Batu Tanre* atau dalam kehidupan keseharian orang-orang Cakkeware. Eksistensi ritual di *Batu Tanre* sangat dipentingkan oleh masyarakat, bahkan dijadikan sebagai motivasi dalam bekerja.

Keyakinan orang-orang Cakkeware dalam merespons mitologi *Batu Tanre* sebagai warisan tradisi leluhur. Bagi sebagian orang Cakkeware tidak mengikuti tradisi ini merupakan sebuah penghianatan kepada leluhur. Karenanya, sikap dan perilaku yang diambil sesuai dengan apa yang telah dan pernah dilakukan leluhur mereka, seperti menyiapkan dan melakukan upacara ritual sebagaimana mestinya.

Sikap seperti ini juga berbeda responnya ketika orang-orang Cakkeware meyakini atau memahami bahwa praktik ritual ini merupakan kelanjutan dari tradisi yang diajarkan oleh orang tua mereka. Bedanya dengan praktek ritual dengan berdasarkan warisan leluhur terletak pada

pola-pola dan bentuk ritualnya karena orang-orang Cakkeware yang menganggap ritual ini adalah warisan leluhur cenderung mempertahankan pola lama dalam upacara, misalnya dari komposisi makanan yang harus disiapkan sesuai dan sama persis jenis dan jumlahnya yang mestinya disediakan.

Sementara bagi orang-orang Cakkeware yang melihat ritual ini sekedar sebagai bentuk ketaatannya pada orang tua lebih memilih memodifikasinya. Orang-orang Cakkeware pelaku ritual berikut ini berbeda dengan orang-orang yang meyakini ritual sebagai bagian dalam kehidupannya. Pada prinsipnya mereka melakukan praktik ini hanya sebatas ikut-ikutan atau dengan istilah lain partisipan semu (*virtual reality*). Sikap dan perilaku yang paling menyolok dari orang-orang seperti ini adalah ambivalens dalam meyakini eksistensi *Batu Tanre*.

Kepercayaan mengenai perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Cakkeware selama ini merupakan bagian dari tradisi keagamaan. Hal itu dibuktikan dengan adanya praktik syariat dari budaya masyarakat tradisional, seperti pembacaan kitab barazanji dan pembacaan doa-doa keselamatan dengan menggunakan ayat-ayat suci Alquran. Aqidah orang-orang Cakkeware, mayoritas tetap menyandarkan diri dan kehidupannya hanya kepada Allah swt. Demikian juga dengan praktik ritual yang dilakukan, setiap hidangan yang disajikan sebelum dimakan terlebih dahulu dibacakan doa-doa keselamatan dan niatnya dengan tegas bahwa doa yang sekaligus shalawat ini diperuntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw.

Jadi, praktik ritual *Batu Tanre* yang menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Cakkeware dipahami sebagai sarana penghubung (*washilah*) kepada Allah swt. Orang-orang Cakkeware memahami dan menyadari bahwa kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh *Batu Tanre* merupakan kekuatan dan kekuasaan yang datangnya dari Allah swt. Orang-orang Cakkeware menganalogikan bahwa permintaan keselamatan, kesejahteraan, keberhasilan dan lain sebagainya itu kepada *Batu Tanre* dapat disamakan dengan permohonan atau permintaan seseorang kepada kedua orang tuanya.

Wujud pemaknaan simbol agama adalah munculnya espresi keagamaan yang beragam pula. Ekspresi ini bisa terlihat dari pemikiran, ritual, dan persekutuan. Orang-orang yang mempunyai pemikiran keagamaan yang sama akan melakukan ritual keagamaan yang sama dan akan berkumpul dalam kelompok yang sama.

Pandangan negatif dari komunitas luar, seperti dua institusi religius yang relatif lama mendiami wilayah Desa Cakkeware, yaitu madrasah ibtidaiyah As'adiyah dan para tokoh pendidik. Para pendidik dan pembina pesantren As'adiyah mempunyai cara tersendiri dalam menerapkan pembinaan religius kepada orang-orang Cakkeware.

Meskipun sikap tegas madrasah tetap dinyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Cakkeware itu sama sekali bertentangan dengan syariat agama. Perbuatan itu sudah masuk dalam kategori perbuatan syirik. Namun sikap yang ditempuh oleh pihak madrasah tidak anarkis, apalagi dengan kontak fisik. Hal-hal seperti itu bagi madrasah tetap dihindari, karena itu sebagai institusi pendidikan keagamaan cara yang ditempuh adalah diberikan ceramah agama kepada masyarakat secara umum. Kedua, kalau orang tua mereka susah diarahkan, maka pemahaman keislaman yang benar diberikan kepada anak-anak mereka, terutama yang sedang menempuh pendidikan agama di madrasah dan sekolah agama lainnya di Desa Cakkeware.

Sedikitnya ada tiga proses yang harus dilalui ketika akan dilakukan upacara/acara ritual. *Pertama*, menentukan jenis acara atau hajatan apa yang harus dilakukan. *Kedua*, disediakan berbagai jenis hidangan. *Ketiga*, dilakukan upacara ritual di dua tempat, yaitu di rumah dan *Batu Tanre*.

Prosesi upacara ritual yang dilakukan oleh masyarakat Cakkeware tersebut menunjukkan polarisasi dua hal yang sangat berbeda. *Pertama*, sebagai seorang muslim tidak melupakan kewajibannya mensyukuri segala kenikmatan yang diperoleh dari Allah swt. Dan juga menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah saw. Keduanya dimanifestasikan dalam bentuk mengirimkan doa dan membaca kitab barazanji yang mengandung shalawat kepadanya. *Kedua*, di sisi lain warga penganut ritual juga meyakini eksistensi mitos *Batu Tanre* yang diwujudkan dengan memberikan sesembahan dalam bentuk makanan yang dibawa ke lokasi *Batu Tanre*. Apa yang dilakukan oleh warga penganut di *Batu Tanre* merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan *Batu Tanre*. Selain itu, kedatangan mereka juga merekonstruksi makna bahwa mitos *Batu Tanre* itu benar adanya.

Pola ritual yang dipraktikkan orang Cakkeware terhadap *Batu Tanre* yang disiapkan di rumah disimbolkan dalam bentuk makanan, seperti: 1. ikan, 2. ayam/kambing/sapi 3. beras ketan (*sokko*) dua warna (hitam dan putih), 4. pisang kepo, 5. nasi putih 6. kelapa muda. 7. air minum. Ketujuh dari jenis makanan ini masing-masing memiliki fungsi, misalnya 1. ikan berfungsi sebagai tanda rasa kecukupan untuk sebuah sesajian dan sebagai simbol seringnya dibuat pekerjaan di muka bumi. 2. ayam (*manu'*; *manneng nungeng pigau jamang-jamang'e*) dimaknai kekalnya dilakukan sebuah pekerjaan, 3. beras ketan (*sokkoi*) yang terdiri dari dua warna yang disimbolkan kehidupan manusia, misalnya beras ketan warna hitam dimaknai simbol tanah, warna putih disimbolkan air. 4. pisang kepo (*utti*), sebagai tanda atas apa yang telah dikehendaki telah dibuktikan oleh Allah swt., 5. nasi putih yang disimbolkan makna kesucian hati dalam setiap tindakan, 6. kelapa muda, dimaknai sebagai simbol kekuatan yang selalu merasa muda dan perkasa, 7. air yang ditandai sebagai bentuk kemuliaan yang dibawa manusia dari sejak lahir.

Simbol lain yang dipraktikkan masyarakat Cakkeware di *Batu Tanre* adalah dua jenis/bentuk batu-batuan di dalamnya, yaitu: 1. Jenis batu laki-laki dengan ukuran kl.2,30 cm dengan posisi berdiri lurus dan tampak seperti terbelah dengan adanya garis terpotong di tengah batu, 2. Batu jenis perempuan di lokasi yang berbeda dengan posisi seperti menumpuk dan membesar.

Aktor adalah pelaku atau orang yang terlibat dan dilibatkan dalam setiap aktivitas ritual di *Batu Tanre*. Terdapat empat aktor dalam konteks ini, yaitu; tokoh masyarakat, imam dusun, pabbaca, dan sanro bola. Tokoh masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang aktif memelihara dan mempertahankan tradisi ritual *Batu Tanre*. Selanjutnya Imam dusun yang merupakan pemuka agama yang bertugas sebagai pelayan masyarakat di bidang keagamaan di tingkat dusun. Kemudian Pabbaca merupakan aktor utama dalam praktik ritual adalah seorang Pabbaca. Ia adalah orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan makhluk metaphisis. Dalam konteks masyarakat Cakkeware ada dua aktor yang masing-masing mempunyai fungsi dan peran berbeda di masyarakat. Pabbaca adalah orang yang memimpin dan memandu setiap upacara ritual *Batu Tanre*. Kedua, sanro bola yang khusus dipanggil untuk pembacaan doa keselamatan rumah.

Partisipant yang dimaksud di sini adalah orang yang terkena akibat dari sesuatu itu. Meskipun ia merupakan bagian dari Aktor (*agency*) tapi dalam hal ini partisipan bukan subjek utama dari perilaku ritual ini. Dalam konteks masyarakat Cakkeware ada tiga yang dapat diklasifikasi sebagai partisipant, yaitu imam desa/dusun, tokoh agama dan pendidik. Imam desa selalu dipanggil untuk membacakan doa-doa selamat di samping pembacaan kitab barazanji.

Selanjutnya pemuka agama adalah seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan agama yang bisa membina masyarakat dengan nilai, akhlak dan moralitas. Partisipant kemudian adalah berasal dari tokoh pendidik yang berdomisili di Desa Cakkeware. Bagi penganut ritual disadari bahwa orang yang paling menentang atas perilaku yang dilakukan selama ini adalah tokoh pendidik, seperti guru-guru agama. Sekalipun demikian, ketika dilakukan acara syukuran atau selamat yang dilakukan di rumah, para tokoh agama dan pendidik ini tetap diundang dan hadir dalam acara tersebut.

Bagi masyarakat Cakkeware ritual *Batu Tanre* dianggap memiliki sejumlah fungsi atau tujuan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya; yang latent (tersembunyi), manifest (nampak), menguatkan jaringan sosial keagamaan, dan fungsinya secara psikologis.

Simpulan

Ternyata bahwa ritual yang ada di *Batu Tanre* berbeda dengan ritual yang berkembang dan dipraktikkan masyarakat Bugis Bone. Perbedaan itu

terlihat dalam dua hal, *Pertama*, eksistensi ritual dalam pemahaman masyarakat Cakkeware tidak dapat bertahan, sehingga semakin hari masyarakat yang mempraktikkan upacara tersebut semakin berkurang. *Kedua*, dukungan kepada aktor "Pabbaca" tidak maksimal. Maksudnya masyarakat tidak memberikan apresiasi berlebihan kepada Pabbaca sehingga yang bersangkutan tidak diberikan kebebasan untuk meminta segala bentuk keinginan kepada masyarakat, baik secara implisit mau nyata. Karenanya, diprediksi bahwa ritus yang ada *Batu Tanre* semakin hari akan ditinggal sendiri oleh penganutnya seiring dengan waktu.

Secara historis geneologi praktik *Batu Tanre* dapat dilihat tiga aspek, yaitu historis penamaan, kemunculan, dan asal muasal praktik ritus. Sebagai salah satu nama dusun di desa Cakkeware, penamaan *Batu Tanre* menjadi fenomenal karena lahir dari sebuah mitologi batu yang diyakini masyarakat sebagai batu hidup dan membesar. Ia merupakan sepasang batu dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang ada di sebuah ladang masyarakat. Begitu populernya mitos ini sampai masyarakat Cakkeware melekatkan nama *Batu Tanre* sebagai sebuah kampung.

Sejarah kemunculan *Batu Tanre* yang dipandang kuat oleh masyarakat dipahami sebagai penanda adanya penunggu hutan atau kebun, sehingga ditakuti oleh penduduk setempat. Pada tahun 1950 adalah tahun awal dimulai praktik ritual di *Batu Tanre*. Tradisi ini dilakukan pertamakali ketika hasil panen para petani berhasil. Sebagai wujud rasa syukur, maka masyarakat melakukan acara pesta rakyat, seperti *massempe* dan *mappadendang*. Pada momentum inilah masyarakat mulai melakukan tradisi dengan menyandingkan acara tersebut dengan rangkaian acara membawa makanan ke *Batu Tanre*.

Awal mula *Batu Tanre* ditetapkan sebagai tempat dilakukan ritual oleh masyarakat setempat ketika mayoritas mereka meyakini bahwa batu tersebut memang hidup dan memberikan pengaruh mistis pada masyarakat. Eksistensi paham dan praktik ritual *Batu Tanre* bukan tanpa perlawanan dari masyarakat. Setidaknya ada empat bentuk resistensi yang ditunjukkan, seperti ketidaksetujuan terhadap paham dan praktik ini. Kemudian, mundurnya imam desa dari jabatannya dan sebelumnya imam desa tidak mau memberikan ceramah di masjid dan membiarkan praktik ini tetap berjalan yang penting dilakukan secara sembunyi. Kini, ritual *Batu Tanre* dijadikan sebagai bagian kehidupan masyarakat dan bukan hanya acara syukuran saja dilakukan ritual melainkan berbagai tradisi mulai disertakan, seperti tradisi sumur di *Batu Tanre*, lebaran, penganting (*mappabotting*) dan pindah rumah. Semua kegiatan tersebut dilakukan pembacaan doa oleh *Pabbaca* (orang yang spesialis pembacaan doa) dan disiapkan makanan yang bersumber dari alamiah, seperti telur mentah, beras dan kelapa muda. Kondisi *Batu Tanre* sebagai tempat

aktivitas ritual semakin dijaga dan dipelihara. Hal itu terlihat dengan diberikannya atap pada *Batu Tanre* yang berjenis kelamin perempuan.

Sebagaimana lazimnya sebuah kepercayaan yang dimitoskan selalu disimbolkan dengan sebuah benda atau semacamnya untuk menegaskan eksistensinya. Kepercayaan masyarakat Cakkeware terhadap mitos *Batu Tanre* pun demikian. Mereka tidak hanya memahami pada tingkat kognitif saja, tetapi dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk perilaku ke suatu tempat. Oleh masyarakat Cakkeware tempat itu dinamai "*Batu Tanre*", artinya sebagai tempat atau lokasi sakral yang diziarahi masyarakat dan dianggap dapat memberikan perubahan hidup.

Faktormunculnya *Batu Tanre* ada dua, yaitu *pertama*, karena adanya mitos makhluk metafisis yang bersemayang di *Batu Tanre*. Kedua, dianggap sebagai fenomena alam. Dalam konteks ini mayoritas masyarakat cenderung meyakini faktor pertama. Munculnya *Batu Tanre* sebagai sebuah ritual secara komunal telah diakui oleh masyarakat Cakkeware. Hal itu termanifestasi dari pegakuan itu hingga bertahannya (*survival*) *Batu Tanre* dalam kognitif masyarakat Cakkeware.

Perkembangan perilaku ritual *Batu Tanre* tidak terlepas dengan relasinya orang-orang Cakkeware yang sukses di luar daerah. Dapat dibayangkan kalau mereka mengagendakan waktunya untuk selalu datang ke *Batu Tanre*. Alasan utama hal itu dilakukan karena bentuk kesyukuran, kesuksesan dan keberhasilan kepada Tuhan atas usaha mereka di perantauan atau di luar daerah. Karenanya, aktivitas yang dilakukan ditandai dengan ritual di *Batu Tanre*.

Keyakinan orang Cakkeware terhadap mitos *Batu Tanre* dianggap mendalam dan dekat di hati setiap orang (penganut) sehingga selalu merasa hadir dalam kehidupan masyarakat Cakkeware. Selain itu, juga pada diri setiap orang yang kesurupan, dianggapnya sebagai bentuk hadirnya sosok makhluk ini di *Batu Tanre* atau dalam kehidupan keseharian orang-orang Cakkeware. Eksistensi ritual di *Batu Tanre* sangat dipentingkan oleh masyarakat, bahkan dijadikan sebagai motivasi dalam bekerja.

Keyakinan orang-orang Cakkeware dalam merespons mitologi *Batu Tanre* sebagai warisan tradisi leluhur. Bagi sebagian orang Cakkeware tidak mengikuti tradisi ini merupakan sebuah penghianatan kepada leluhur. Karenanya, sikap dan perilaku yang diambil sesuai dengan apa yang telah dan pernah dilakukan leluhur mereka, seperti menyiapkan dan melakukan upacara ritual sebagaimana mestinya.

Sikap seperti ini juga berbeda responnya ketika orang-orang Cakkeware meyakini atau memahami bahwa praktik ritual ini merupakan kelanjutan dari tradisi yang diajarkan oleh orang tua mereka. Bedanya dengan praktik ritual dengan berdasarkan warisan leluhur terletak pada pola-pola dan bentuk ritualnya karena orang-orang Cakkeware yang menganggap ritual ini adalah warisan leluhur cenderung

mempertahankan pola lama dalam upacara, misalnya dari komposisi makanan yang harus disiapkan sesuai dan sama persis jenis dan jumlahnya yang mestinya disediakan.

Sementara bagi orang-orang Cakkeware yang melihat ritual ini sekedar sebagai bentuk ketaatannya pada orang tua lebih memilih memodifikasinya. Orang-orang Cakkeware pelaku ritual berikut ini berbeda dengan orang-orang yang meyakini ritual sebagai bagian dalam kehidupannya. Pada prinsipnya mereka melakukan praktik ini hanya sebatas ikut-ikutan atau dengan istilah lain partisipan semu (*virtual reality*). Sikap dan perilaku yang paling menyolok dari orang-orang seperti ini adalah ambivalens dalam meyakini eksistensi *Batu Tanre*.

Kepercayaan mengenai perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Cakkeware selama ini merupakan bagian dari tradisi keagamaan. Hal itu dibuktikan dengan adanya praktik syariat dari budaya masyarakat tradisional, seperti pembacaan kitab barazanji dan pembacaan doa-doa keselamatan dengan menggunakan ayat-ayat suci Alquran. Aqidah orang-orang Cakkeware, mayoritas tetap menyandarkan diri dan kehidupannya hanya kepada Allah swt. Demikian juga dengan praktik ritual yang dilakukan, setiap hidangan yang disajikan sebelum dimakan terlebih dahulu dibacakan doa-doa keselamatan dan niatnya dengan tegas bahwa doa yang sekaligus shalawat ini diperuntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw.

Jadi, praktik ritual *Batu Tanre* yang menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Cakkeware dipahami sebagai sarana penghubung (*washilah*) kepada Allah swt. Orang-orang Cakkeware memahami dan menyadari bahwa kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh *Batu Tanre* merupakan kekuatan dan kekuasaan yang datangnya dari Allah swt. Orang-orang Cakkeware menganalogikan bahwa permintaan keselamatan, kesejahteraan, keberhasilan dan lain sebagainya itu kepada *Batu Tanre* dapat disamakan dengan permohonan atau permintaan seseorang kepada kedua orang tuanya.

Wujud pemaknaan simbol agama adalah munculnya espresi keagamaan yang beragam pula. Ekspresi ini bisa terlihat dari pemikiran, ritual, dan persekutuan. Orang-orang yang mempunyai pemikiran keagamaan yang sama akan melakukan ritual keagamaan yang sama dan akan berkumpul dalam kelompok yang sama.

Pandangan negatif dari komunitas luar, seperti dua institusi religius yang relatif lama mendiami wilayah Desa Cakkeware, yaitu madrasah ibtidaiyah As'adiyah dan para tokoh pendidik. Para pendidik dan pembina pesantren As'adiyah mempunyai cara tersendiri dalam menerapkan pembinaan religius kepada orang-orang Cakkeware. Meskipun sikap tegas madrasah tetap dinyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Cakkeware itu sama sekali bertentangan

dengan syariat agama. Perbuatan itu sudah masuk dalam kategori perbuatan syirik. Namun sikap yang ditempuh oleh pihak madrasah tidak anarkis, apalagi dengan kontak fisik. Hal-hal seperti itu bagi madrasah tetap dihindari, karena itu sebagai institusi pendidikan keagamaan cara yang ditempuh adalah diberikan ceramah agama kepada masyarakat secara umum. Kedua, kalau orang tua mereka susah diarahkan, maka pemahaman keislaman yang benar diberikan kepada anak-anak mereka, terutama yang sedang menempuh pendidikan agama di madrasah dan sekolah agama lainnya di Desa Cakkeware.

Sedikitnya ada tiga proses yang harus dilalui ketika akan dilakukan upacara/acara ritual. *Pertama*, menentukan jenis acara atau hajatan apa yang harus dilakukan. *Kedua*, disediakan berbagai jenis hidangan. *Ketiga*, dilakukan upacara ritual di dua tempat, yaitu di rumah dan *Batu Tanre*.

Prosesi upacara ritual yang dilakukan oleh masyarakat Cakkeware tersebut menunjukkan polarisasi dua hal yang sangat berbeda. *Pertama*, sebagai seorang muslim tidak melupakan kewajibannya mensyukuri segala kenikmatan yang diperoleh dari Allah swt. Dan juga menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah saw. Keduanya dimanifestasikan dalam bentuk mengirimkan doa dan membaca kitab barazanji yang mengandung shalawat kepadanya. *Kedua*, di sisi lain warga penganut ritual juga meyakini eksistensi mitos *Batu Tanre* yang diwujudkan dengan memberikan sesembahan dalam bentuk makanan yang dibawa ke lokasi *Batu Tanre*. Apa yang dilakukan oleh warga penganut di *Batu Tanre* merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan *Batu Tanre*. Selain itu, kedatangan mereka juga merekonstruksi makna bahwa mitos *Batu Tanre* itu benar adanya.

Pola ritual yang dipraktikkan orang Cakkeware terhadap *Batu Tanre* yang disiapkan di rumah disimbolkan dalam bentuk makanan, seperti: 1. ikan, 2. ayam/kambing/sapi 3. beras ketan (*sokko*) dua warna (hitam dan putih), 4. pisang kepo, 5. nasi putih 6. kelapa muda. 7. air minum. Ketujuh dari jenis makanan ini masing-masing memiliki fungsi, misalnya 1. ikan berfungsi sebagai tanda rasa kecukupan untuk sebuah sesajian dan sebagai simbol seringnya dibuat pekerjaan di muka bumi. 2. ayam (*manu'*; *manneng nungeng pigai jamang-jamang'e*) dimaknai kekalnya dilakukan sebuah pekerjaan, 3. beras ketan (*sokkoi*) yang terdiri dari dua warna yang disimbolkan kehidupan manusia, misalnya beras ketan warna hitam dimaknai simbol tanah, warna putih disimbolkan air. 4. pisang kepo (*utti*), sebagai tanda atas apa yang telah dikehendaki telah dibuktikan oleh Allah swt., 5. nasi putih yang disimbolkan makna kesucian hati dalam setiap tindakan, 6. kelapa muda, dimaknai sebagai simbol kekuatan yang selalu merasa muda dan perkasa, 7. air yang ditandai sebagai bentuk kemuliaan yang dibawa manusia dari sejak lahir.

Simbol lain yang dipraktikkan masyarakat Cakkeware di *Batu Tanre* adalah dua jenis/bentuk batu-batuan di dalamnya, yaitu: 1. Jenis batu laki-

laki dengan ukuran kl.2,30 cm dengan posisi berdiri lurus dan tampak seperti terbelah dengan adanya garis terpotong di tengah batu, 2. Batu jenis perempuan di lokasi yang berbeda dengan posisi seperti menumpuk dan membesar.

Aktor adalah pelaku atau orang yang terlibat dan dilibatkan dalam setiap aktivitas ritual di *Batu Tanre*. terdapat empat aktor dalam konteks ini, yaitu; tokoh masyarakat, imam dusun, pabbaca, dan sanro bola. Tokoh masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang aktif memelihara dan mempertahankan tradisi ritual *Batu Tanre*. Selanjutnya Imam dusun yang merupakan pemuka agama yang bertugas sebagai pelayan masyarakat di bidang keagamaan di tingkat dusun. Kemudian Pabbaca merupakan aktor utama dalam praktik ritual adalah seorang Pabbaca. Ia adalah orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan makhluk metafisis. Dalam konteks masyarakat Cakkeware ada dua aktor yang masing-masing memunyai fungsi dan peran berbeda di masyarakat. Pabbaca adalah orang yang memimpin dan memandu setiap upacara ritual *Batu Tanre*. Kedua, sanro bola yang khusus dipanggil untuk pembacaan doa keselamatan rumah.

Partisipant yang dimaksud di sini adalah orang yang terkena akibat dari sesuatu itu. Meskipun ia merupakan bagian dari Aktor (*agency*) tapi dalam hal ini partisipan bukan subjek utama dari perilaku ritual ini. Dalam konteks masyarakat Cakkeware ada tiga yang dapat diklasifikasi sebagai partisipant, yaitu imam desa/dusun, tokoh agama dan pendidik. imam desa selalu dipanggil untuk membacakan doa-doa selamat di samping pembacaan kitab barazanji.

Selanjutnya pemuka agama adalah seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan agama yang bisa membina masyarakat dengan nilai, akhlak dan moralitas. Partisipant kemudian adalah berasal dari tokoh pendidik yang berdomisili di Desa Cakkeware. Bagi penganut ritual disadari bahwa orang yang paling menentang atas perilaku yang dilakukan selama ini adalah tokoh pendidik, seperti guru-guru agama. Sekalipun demikian, ketika dilakukan acara syukuran atau selamat yang dilakukan di rumah, para tokoh agama dan pendidik ini tetap diundang dan hadir dalam acara tersebut.

Bagi masyarakat Cakkeware ritual *Batu Tanre* dianggap memiliki sejumlah fungsi atau tujuan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya; yang latent (tersembunyi), manifest (nampak), menguatkan jaringan sosial keagamaan, dan fungsinya secara psikologis.

Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan. *Simbol, Makna dan Pandangan Hidup Jawa: Analisis Gunungan pada Upacara Garebeg*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2002.

- *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- "Market, Consumption, and Lifestyle Management". Makalah yang disampaikan dalam *International Seminar on Social and Cultural Dimension of Market Expansion*, Batam,, 3-5 Oktober 1994.
- "Kraton, Upacara dan Politik Simbol: Kosmologi dan Sinkretisme di Jawa," *Humaniora*, Vol. 9, No. 2.
- Privatisasi Agama: Globalisasi Gaya Hidup dan Komodifikasi Agama di Indonesia", dalam buku "*Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*". Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Acciaioli, Greg. "Utang Piutang dan Sistem Kekerabatan Struktur Sosial Masyarakat Bugis Perantauan dan Pemasaran Ikan di Danau Lindu, Sulawesi Tengah" dalam buku "*Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*" yang diedit oleh Roger Tol, Kees Van Dijk, dan Greg Acciaioli. Cet.I; Makassar Innawa; Jakarta-KITLV, Jakarta, 2009.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "*Penutup: Suatu Refleksi Antropologis*", dalam J.W.M. Bakker, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984.
- *Sungai dan Air Ciliwung: Sebuah Kajian Etnoekologi*. Jurnal Prisma, 1 Januari 1997.
- *Paradigma, Epistemologi dan Metode Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pemetaan*. Makalah disampaikan dalam pelatihan "Metodologi Penelitian", yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari - 19 Maret 2007. CRCS - UGM, Yogyakarta.
- *Strukturalisme Levi'-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*. Cet. I; Yogyakarta: Kepel Press, 2006.
- Appadurai, Arjun. "Global Ethnocapes: Notes and Queries for Transnational Anthropology", dalam R.G. Fox (ed.), *Recapturing Anthropology: Working in the Present*. Santa Fe, NM: School of American Research Press, 1994.
- Arbain, Autik. *Strategi Migran Banjar*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2009.

PENYEBAB DAN MOTIF PENGUASAAN TANA SOMPA PADA ETNIK BUGIS BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

A.Sarjan¹ dan Syarifuddin Yusmar²

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah pembayaran mahar dalam tradisi perkawinan etnik Bugis Bone. Dalam tradisi perkawinan mereka, mahar lebih dikenal dengan sebutan sompa. Bagi etnik Bugis pada umumnya, dan etnik Bugis Bone pada khususnya, sompa adalah sebuah keharusan bagi calon mempelai lak-laki menurut ketentuan syara' (*pattaro sara*). Kekhasan mahar etnik Bugis Bone bahwa jenis benda yang dijadikan mahar adalah tanah. Dengan jenis benda mahar tersebut banyak kasus ketidakjelasan objek mahar, sehingga terjadi penguasaan atas *tana sompa*. Masalah penelitian ini adalah :

1. Apa makna filosofi bagi etnik Bugis Bone mengahruskan mahar dengan tanah dalam tradisi perkawinan mereka?
2. Mengapa terjadi penguasaan atas *tana sompa* di kalangan etnik Bugis Bone?
3. Bagaimana bentuk-bentuk penguasaan *tana sompa* oleh etnik Bugis Bone?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mengkaji realitas dengan pembatasan masalah sebagaimana tersebut dalam pertanyaan penelitian, peneliti memakai beberapa pendekatan keilmuan yaitu pendekatan teologis normatif, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis formal. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini didukung oleh bahan hukum dari referensi tertulis dan data lapangan yang dihimpun dengan metode wawancara dan dokumentasi. Bentuk analisis datanya adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa etnik Bugis Bone melakukan pembayaran *sompa* sebagai sebuah ketentuan syara, dan mereka memahami pula bahwa benda mahar adalah hak milik isteri melalui pemberian/ hibah oleh suami ketika ijab qabul nikah dilakukan. Dengan demikian, secara hukum, benda mahar tersebut adalah dalam penguasaan isteri baik kepemilikannya maupun pemanfaatannya. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa banyak kasus objek *sompa* tersebut tidak jelas dasar kepemilikannya bagi isteri, dan juga pemanfaatannya. Ha ini muncul

bagai gunung es ketika terjadi perceraian antara suami dengan isterinya dengan banyaknya gugatan rekonsvansi oleh si isteri pada saat terjadi perceraian. Penyebabnya adalah karena pembayaran mahar bagi orang-orang Bugis Bone cukup dengan lisan saja akibat tidak adanya alas hak yang kuat. Motif penguasaan *tana sompa* tersebut di antaranya karena belum dibagi secara warisan terutama bagi orang-orang Bone yang menganut prinsip mayorat dan pewarisan kolektif.

Dengan hasil penelitian sebagaimana tersebut, maka seharusnya *tana sompa* dikuatkan legalitasnya sesuai dengan perundang-undangan, di samping sebagai pengamalan syariat Islam. *Tana Sompa* harus memenuhi syarat kepemilikannya menurut undang-undang pokok keagrariaan dan segera di balik nama dari kepemilikan induk agar penguasaan *tana sompa* oleh yang tidak berhak dapat ditekan seminimal mungkin agar tidak lagi menjadi fenomena gunung es.

Pendahuluan

Bugis Bone adalah salah satu sub etnik Bugis yang mendiami salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan.. Etnik Bugis itu sendiri mendiami sejumlah kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan. Dari segi keyakinan, etnik Bugis Bone beragama Islam dan memiliki ragam budaya dalam kehidupan sosialnya.

Bagi masyarakat Bugis Bone yang menganut agama Islam, model perkawinannya memadukan unsur syara' dengan adat kebiasaan. Salah satu wujudnya adalah pada persoalan mahar. Menurut etnik Bugis Bone dan etnik Bugis pada umumnya, mahar dinamai "*sompa*". *Sompa* adalah hal yang selalu ditemukan dalam tiap perkawinan. Bagi etnik Bugis Bone, jenis mahar yang banyak disepakati adalah tanah. Selain itu kadang juga mahar berupa benda yang dapat disaksikan secara nyata di majelis akad nikah, misalnya mahar dengan seperangkat perhiasan perempuan dan lainnya.

Tanah sebagai mahar bagi etnik Bugis Bone tidak diketahui pasti asal mulanya dan filosofinya. Hanya saja dapat dipastikan bahwa bagi masyarakat agraris, tanah memiliki arti penting untuk kelangsungan kehidupan mereka. Tanah merupakan media mencari nafkah, tanah sebagai tempat pemakaman, tanah sebagai tempat mendirikan rumah dan sebagainya. Tanah adalah salah satu benda objek transaksi, tidak terkecuali dalam perkawinan.

Tanah adalah benda penting dalam kehidupan manusia sejak dahulu dan sekarang. Oleh karena itu, tanah telah diatur oleh hukum dan prundang-undangan, sehingga tanah itu tidak cukup lagi dipunyai secara tradisonal. Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agraria dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa hak kepemilikan atas tanah harus dibuktikan dengan akta/sertifikat hak milik (SHM).

Dalam tradisi perkawinan etnik Bugis Bone, tanah adalah objek mahar. Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Secara normatif, benda mahar adalah milik isteri sejak dinyatakannya dalam akad nikah. Dengan demikian, secara hukum telah terjadi perpindahan kepemilikan benda mahar sebelumnya kepada pemilik yang baru, yaitu isteri. Karena itu mahar dengan tanah dalam kebiasaan etnik Bugis Bone harus tunduk pada hukum dan peraturan tentang kepemilikan tanah.

Bagi etnik Bugis Bone mahar dengan tanah telah berlangsung turun temurun dan diakui sebagai pranata sosial khas. Ternyata membayar mahar dengan tanah dalam tradisi etnik Bugis Bone tidak jarang menimbulkan sengketa antara pihak isteri dengan suami ketika terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif (hukum Islam) masyarakat Bugis Bone telah memahaminya dengan baik bahwa mahar itu adalah hak milik isteri, namun alas haknya lemah menurut perundang-undangan.

Tanah yang dijadikan objek mahar biasanya hanya disebut secara lisan tanpa catatan, atau terkadang juga dengan catatan tentang letak dan luas tanah mahar tersebut. Biasanya hanya sampai di sini, dan ironisnya mahar tak pernah diungkit lagi ketika rumah tangga terbangun dan berlangsung harmonis, karena membicarakan mahar dalam rumah tangga yang sudah terbangun dengan baik tersebut menjadi tabu dan tidak etis. Pada hal kepemilikan tanah, tidak terkecuali tanah mahar harus disertai dokumen-dokumen kepemilikan menurut hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia.

Status Kepemilikan Tana Sompaa Bagi Perempuan Bugis Bone

Dalam perkawinan adat Bugis Bone, dan etnik Bugis pada umumnya, mahar disebut dengan “*sompaa/ sunreng*”. Mattulada menjelaskan, *sompaa* atau *sunreng* adalah uang mahar atau maskawin.¹⁷⁸ Berdasarkan hasil bacaan, *sompaa/ sunreng* dalam perkawinan adat Bugis, khusus etnik Bugis Bone adalah disandarkan pada tanah. A. Najamuddin Petta Ile menjelaskan “Tanah sebagai sandaran mahar atas perkawinan etnik Bugis Bone karena sembilan puluh persen orang Bugis mata pencahariannya bersumber dari tanah. Di samping itu tanah merupakan tempat untuk membangun rumah kediaman untuk beranak cucu sebagai salah satu tujuan perkawinan yaitu terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa-rahmah”.¹⁷⁹ Hemat penulis adalah sebuah kekhasan dalam perkawinan etnik Bugis berlaku sejak

¹⁷⁸Mattulada, *Latoa Satu lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 47.

¹⁷⁹A. Najamuddin, Tokoh adat, *Wawancara*, Watampone, 25 Oktober 2017.

dahulu hingga sekarang. *Sompa* tidak dapat diartikan secara sederhana sebagai pemberian sesuatu dalam perkawinan.

Dalam *pangngadereng*, menurut Mattulada, *sompa* itu bertingkat-tingkat sesuai dengan status sosial perempuan yang dipinang. *Sompa* biasanya dihitung dalam nilai "rela" (real). *Sompa* di kalangan perkawinan adat etnik Bugis di tiga wilayah kerajaan Bugis yaitu tana Wajo, tana Bone dan tana Soppeng adalah menjadi acuan ketika hendak menetapkan berapa jumlah *sompa* seorang perempuan Bugis yang dipinang. Ditegaskan juga oleh A.Najamuddin Petta Ile *sompa pattaro syara' balanca pattaro ade'*.

Kalau diperhatikan ketentuan *sompa* dalam perkawinan etnik Bugis, tidak terkecuali etnik Bugis Bone, maka terlihat dengan jelas bahwa itu adalah simbol-simbol yang berkategori berdasarkan stratifikasi sosial perempuan, sehingga sulit dipahami jika dikaitkan dengan hukum syara'. Ada penjelasan singkat Mattulada yang memberi kejelasan *sompa* dan *sunreng* tersebut, yaitu maskawin yang diberi nilai nominal menurut harga real dapat saja terdiri atas sebidang tanah, sepetak sawah, sebidang kebun, atau benda-benda pusaka lainnya.¹⁸⁰

Jumlah mahar dengan simbol-simbol *sompa* seiring dengan tidak ketatnya perijodohan etnik Bugis Bone lagi dengan stratifikasi sosial, maka simbol-simbol *sompa* tersebut sudah mulai juga disederhanakan oleh etnik Bugis Bone saat sekarang. *Sompa* yang umum dipakai sekarang adalah *sompa* berkategori 88 rela untuk perempuan bangsawan, dan 44 rela untuk perempuan *to deceng* dan *to sama/maradeka*. Di samping itu, jumlah *sompa* adat sudah ada juga yang menafsirkan berdasarkan kurs uang rial dengan rupiah sekarang, sehingga jumlah *sompa* itu tidak besar dan tidak memberatkan. Yang berat/ besar bagi perkawinan etnik Bugis adalah uang belanja (*doi' balanca*).

Sebagaimana disebutkan bawa bagi etnik Bugis umumnya dan etnik Bugis Bone khususnya, *sompa* atau *sundreng* adalah sebuah pemberian. Pemberian itu dapat berupa tanah dan bukan tanah. Hal ini sesuai dengan hukum Islam (syara') selama benda-benda *sompa* bukan berkategori haram. Pengalaman peneliti, bagi masyarakat Bone yang memegang kuat tradisi, maka biasanya wujud benda *sompa* itu adalah tanah, apakah itu, sawah, kebun atau jenis tanah yang lain. Dalam peraktiknya, benda-benda berupa tanah tersebut biasa disebut dengan *tadangeng sompa*. Misalnya, *sompanya* 88 rela nilainya adalah sepetak sawah. Inilah cara kompromi pengaruh adat dengan pengaruh Islam dalam hal mahar.

Bentuk mahar/ *sompa* dalam perkawinan etnik Bugis pada umijmnya dan etnik Bugis Bone khususnya sudah mulai dibicarakan ketika

¹⁸⁰Mattulada, *Latoa Satu lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 47

meminang bersamaan dengan jumlah uang belanja. Ada dua pemberian wajib bagi mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, yaitu / mahar dan *doi' menre* atau *doi' balanca*.¹⁸¹ Kedua pemberian tersebut diperkuat pada acara *mappettu ada/ mappasierekeng*, walau hanya formalitas karena sudah dinegosiasikan sebelumnya.

Etnik Bugis Bone sudah memenuhi syarat syariah dalam adat perkawinan mereka tentang *sompa/ mahar*. *Sompa* adalah sebuah pemberian bendawi oleh laki-laki kepada perempuan dalam perkawinan. Seperti telah disebutkan, benda-benda mahar itu dapat berupa tanah, sawah, kebun dan benda-benda lainnya. Namun, dalam perkawinan adat etnik Bugis Bone, hampir semuanya berwujud tanah, dan sedikit benda-benda bukan tanah.

Berbeda dengan etnik lainnya di Sulawesi Selatan, misalnya etnik Makassar, *sundrang* tidak mesti tanah, melainkan boleh dengan benda-benda berharga apa saja, bahkan sudah mulai ada yang memberikan mahar dengan mushaf al-Qur'an dan seperangkat alat salat. Mahar seperti ini mulai terjadi pada tahun delapanpuluhan, tetapi hal ini tidak populer karena *sundrang* semacam itu biasanya orang kota yang melakukannya.¹⁸²

Penguasaan Tana Sompa di Kalangan Etnik Bugis Bone

Dalam perkawinan adat etnik Bugis Bone, umumnya penyerahan benda-benda *sompa* berlangsung secara tidak tertulis, tetapi disebut secara lisan saja pada saat ijab qabul. Semua tetamu di majelis akad nikah mendengar dan menyaksikannya. Secara turun temurun benda *sompa* umumnya disebut saja jenisnya, misalnya sepetak sawah, sebidang kebun, sebidang tanah dan sebagainya, sehingga tidak kuat kepemilkannya secara hukum. Akibatnya isteri tidak menikmati hak-haknya sendiri seperti halnya mahar almarhum H. Marhali kepada Isterinya Miraya. Selama bersama dengan suaminya ia tidak pernah mengetahui tempat dan batas-batas *tana sompa* yang diberikan oleh suaminya secara jelas karena tidak memiliki dokumen tertulis sama sekali. Anak pasangan suami isteri tersebut mengetahui setelah ayahnya meninggal dan terjadi pembagian warisan, ternyata mahar ibunya itu masih menyatu dengan harta warisan yang lainnya dan dikuasai oleh keluarganya yang tinggal di kampung. Demikian penjelasan ahli warisnya ketika peneliti melakukan wawancara dengannya.¹⁸³

Selain itu penulis juga menelusuri kasus penguasaan *tana sompa* antara seorang lelaki, Budiman, dengan perempuan sdr. Rosna dengan *sompa* sepetak sawah yang terletak di dusun Kajuara, desa Awang Cenrana,

¹⁸¹Lihat Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*, h. xi

¹⁸²Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, h. 65-66

¹⁸³Maryana, guru MAN 2 Bone, *Wawancara*, tanggal 15 Oktober 2017.

kecamatan Cenrana tidak diserahkan pada saat jatuh talak dengan alasan digunakan untuk menyelesaikan hutang piutang yang masih berlangsung.

Kasus yang lain juga memiliki kesamaan motif dan sebab penguasaan tana sumpa seperti yang terjadi antara sdr. Tamrin bin Beddu dengan perempuan/ isteri bernama Hasma binti Mappaduli dengan objek mahar yang terletak di Desa Cenrana, Kecamatan Cenrana. Mahar tidak diserahkan kepada sang isteri karena tanah tersebut masih milik warisan sehingga dikuasai oleh salah seorang ahlli waris bernama Hj. Nani Binti Beddu, meskipun pengakuan Tamrin warisan tersebut sudah dihibahkan oleh orang tuanya sebelum meninggal.¹⁸⁴

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPA yaitu: "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Menurut pasal tersebut secara analisis dapat dipahami bahwa beralih dan dialihkan tanah mahar yaitu ;

a. Beralih

Beralih berarti berpindahnya hak milik atas tanah mahar dari pemiliknya kepada mantan suaminya dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum. Misalnya terjadi perceraian sebelum persenggamaan (percampuran) atau *khulu'* karna hukum menghendaki tanah mahar harus dikembalikan, sehingga secara hukum kepemilikan haknya berpindah kepada kepada mantang suaminya.

b. Dialihkan atau pemindahan hak milik tanah mahar

Dialihkan atau pemindahan hak artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemilik awal (calon suami) kepada pihak (calon isteri) dikarenakan adanya perkawinan.

Pasal 23 ayat (2) "pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembambanan hak tersebut".¹⁸⁵ Berdasarkan pasal diatas bahwa sahnya peralihan hak milik tanah mahar menurut Undang-undang ini harus didaftarkan.

UUPA telah menjamin hak milik atas tanah termasuk tanah mahar kepada perorangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah" serta diberikan alat bukti yang kuat ketika terjadi sangketa dipengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sub. c "pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

¹⁸⁴Supriadi. *Kepastian Kepemilikan Tanah Mahar Menurut Hukum Islam* (td).

¹⁸⁵A. Sholihul, *Undang-undang Pokok Agraria dan Pendaftaran Tanan*,h.39

tentang pendaftaran tanah merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa salinan buku tanah dan surat ukur.¹⁸⁶

Simpulan

1. Berdasarkan hasil bacaan sejumlah refrensi dan hasil wawancara dengan tokoh adat, makna filosofis *sompa* dengan tanah sedikit terkuak. Makna filosofis bermahar dengan tanah oleh etnik Bugis Bone karena umumnya mata pencaharian mereka adalah bertani, sehingga benda yang paling mudah untuk pembayaran mahar adalah tanah yang mereka miliki. Di samping makna ini, bermahar dengan tanah mengisyaratkan bahwa rumah tangga yang baru terbangun sudah memiliki sumber penghasilan. *Tana sompa* tersebut dapat dikelola langsung oleh suami atau oleh orang lain. Makna filosofis lain adalah masyarakat Bugis Bone lebih tanggap dengan kondisi yang akan dihadapi oleh perempuan. Seorang isteri suatu ketika akan bercerai dengan suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, maka dengan mahar tanah tersebut menjadi sumber penghidupan seorang isteri yang menjanda, apalagi jika isteri yang janda itu adalah *single parent* bagi anak-anaknya..
2. Kasus penguasaan *tana sompa* yang banyak ditemukan di kalangan etnik Bugis Bone adalah bentuk-bentuk penyimpangan karena orang Bone telah paham benar bahwa mahar adalah *pattaro sara'*/ kewajiban syara' berupa pemberian benda oleh calon suami kepada calon isterinya yang barakibat kepemilikan. Dengan demikian *sompa* adalah milik isteri secara penuh, sehingga penguasaan *tana sompa* milik isteri adalah penyimpangan hukum hibah. Hal ini terjadi karena mahar hanya disebut secara lisan dalam akad nikah dengan tidak disertai dokumen tertulis yang resmi (akta hibah). Penyebab lain adalah membicarakan mahar setelah hidup bersama dianggap tabu/ kurang etis menurut kultur etnik Bugis Bone.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan dan sejumlah putusan Pengadilan Agama tentang gugat rekonvensi mahar, bentuk-bentuk penguasaan *tana sompa* adalah sebagai berikut:
 - a. Penggarapan *tana sompa* masih dikuasai oleh pihak keluarga atau mempelai laki-laki yang berlangsung relatif lama.
 - b. Mahar berupa tanah lazimnya adalah penghibahan orang tua mempelai laki-laki secara lisan, sehingga tetap di bawah penguasaan

¹⁸⁶Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Pertanahan* (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), h. 81

keluarga mempelai laki-laki. Umumnya *tana sompa* tersebut tidak dipisahkan dari harta orang tua, belum atau bahkan tidak pernah dilakukan balik nama sama sekali atas nama isteri.

- c. *Tana sompa* dikuasai oleh suami atau pihak keluarganya karena tersangkut dengan kepentingan/ hak pihak ketiga, misalnya menjadi agunan hutang piutang.

Daftar Pustaka

- Abu Dāud. *Sunan Abī Dāud*. Jilid I. Cetakan I. t.t: Dār al-Fikr, 1990.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Cetakan I. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Abu Hamid dkk. *Siri' Filosofi Suku Bugis Makassar Toraja Mandar*. Cetakan III. Makassar: Arus Timur, 2017.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad, Abdul Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Barat*. Cetakan I. Makassar: Indobis Publishing, 2006.
- Arikunto, Suharismi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2005.
- A. Sholihul, *Undang-undang Pokok Agraria dan Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: Rona Publishing, t.th.
- Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Juz VI. t.t: Dār al-Fikr, t.th.
- Darmapoetra, Juma. *Suku Bugis Pewaris Kebranian Leluhur*. Cetakan II. Makassar: Arus Timur, 2017.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2012.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Qāhirah: Dār al-fikr al-`Arabi, t.th.
- Mulyana D, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda Karya, 2003.
- Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Cetakan II. Makassar: Hasanuddin University Press, 1995.
- Pelras, Christian. *The Bugis*, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk dengan judul "Manusia Bugis". Cetakan II. Jakarta: Nalar, 2006.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Supriadi. *Kepastian Kepemilikan Tanah Mahar Menurut Hukum Islam*. Tesis (td).
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah: Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*. Jakarta: Rineka

- Cipta, 2003.
- S. Hutagalung, Arie. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Pertanahan*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Suhadi dan Rofi Wahasiswa, *Buku Ajar Pendaftaran Tanah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2008.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tim redaksi. *Mengenal Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan*. Pamulang-Tangsel: Sari Ilmu Persada, t.th.
- Usman, Husain dan Purnomo Detyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bina Aksara, 1995.

Bagian Dakwah

KEBERAGAMAN MUBALLIG DI KOTA WATAMPONE DALAM MENGAMALKAN HADIS DA'IF SEBAGAI SUMBER DAKWAH

Junaid Bin Junaid

Dosen STAIN Watampone

Abstrak

Penelitian itu berjudul tentang keberagaman muballig di Kota Watampone dalam mengamalkan Hadis da'if sebagai sumber dakwah. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana para muballig di Kota Watampone dalam mengaplikasikan hadis da'if dalam berdakwah Islamiyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini adalah mengarah kepada tentang adanya para muballig di Kota Watampone dalam mengamalkan hadis da'if sebagai salah satu sumber dalam berdakwah. Hal ini peneliti lebih fokus penelitian yang dikaji tentang hadis-hadis da'if yang dijadikan dasar atau sumber dalam berdakwah. Karena para muballig di Kota Watampone memiliki keberagaman menggunakan hadis da'if, dan juga dalam mengamalkannya. Disamping itu juga menggunakan metode library research. Dalam hal ini, merupakan dasar daripada landasan teori, khususnya tentang buku-buku yang berkaitan dengan hadis da'if dan dakwah.

Ada tiga hal yang menjadi inti pembahasan dari penelitian ini, yaitu pertama, Ada enam hadis da'if yang sering dikemukakan dan diamalkan oleh para muballig di kota Watampone dalam berdakwah, yaitu; a. Hadis Tentang Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri Cina. Hadis Tentang Tuntutlah Dunia. Hadis Tentang Surat Yasin Hatinya Al-Qur'an. Hadis Tentang Perselisihan Umatku adalah Rahmat. Hadis Barang Siapa Mengenal Dirinya, Dia Akan Mengenal Rabb-nya. Hadis Tentang Keutamaan Menamatkan Al-Qur'an. Kedua, bahwasanya hukum yang hadis da'if yang diamalkan oleh para muballig di Kota Watampone adalah Hadis dhaif sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai materi dakwah, karena tidak boleh mengada-ada tentang sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Ketiga, dampak terhadap mad'u tentang hadis da'if yang diamalkan oleh muballig di Kota Watampone adalah terdiri dari dua faktor, yaitu faktor positif, peneliti menemukan adanya pengaruh yang besar terhadap mad'u, yaitu dengan adanya membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang

baik disekitar lingkungan dalam hal bagaimana mengamalkan satu bentuk silaturahmi melalui social masyarakat yang ada. Sedangkan pada faktor negatifnya adalah menjadikan pengamalan atau kandungan daripada hadis da'if sebagai bentuk keharusan yang mutlak diaplikasikan dan dilkaskan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal da'if itu tidak harus atau wajib diamalkan.

Pendahuluan

Hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alqur'an. Dimana keduanya merupakan pedoman dan pengontrol segala tingkah laku dan perbuatan manusia. Untuk Alqur'an semua periwayatan ayat-ayatnya mempunyai kedudukan sebagai suatu yang mutlak kebenaran beritanya sedangkan hadis Nabi belum dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya berasal dari Nabi atau tidak.

Namun demikian hadis memiliki peranan dalam menjelaskan setiap ayat-ayat Alqur'an yang turun baik yang bersifat *muhkamat* maupun *mutasyabihat*, sehingga hadis ini sangat perlu untuk dijadikan sebagai sandaran umat Islam dalam menguasai inti-inti ajaran Islam. Dan dalam kondisi faktualnya terdapat hadis-hadis yang dalam periwayatannya yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diterimanya sebagai sebuah hadits atau yang dikenal dengan hadis *maqbul* (diterima); *Shahih dan hasan*. Namun disisi lain terdapat hadits-hadits yang dalam periwayatannya tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau lebih dikenal dengan istilah hadits *mardud* (ditolak); da'if atau bahkan ada yang palsu (*maudhu'*), hal ini dihasilkan setelah adanya upaya penelitian kritik *sanad* maupun *matan* oleh para ulama untuk yang memiliki komitmen tinggi terhadap hadis. Hal ini terjadi disebabkan keragaman orang yang menerima maupun meriwayatkan hadis Rasulullah. Berbagai macam hadis yang menimbulkan kontraversi dari berbagai kalangan. berbagai analisis atas kesahihan sebuah hadits baik dari segi putusanya *Sanad* dan tumpah tindihnya makna dari *matan* pun bermunculan untuk menentukan kualitas sebuah hadis.

Da'if dalam ilmu hadis berarti lemah. Hadis da'if adalah hadis yang tidak terdapat di dalamnya sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan.¹⁸⁷ Hadis da'if dapat ditemukan pada sanad maupun matan hadis. Adapun hadis da'if pada sanad dapat disebabkan oleh gugurnya periwayat dan kecacatan periwayat. Dari segi kehujjahan, mayoritas ulama menolak pengamalan hadis ini terlebih kepada pokok ajaran Islam. Sedangkan dalam hal berdakwah hadis da'if dapat dijadikan rujukan, karena dakwah merupakan salah satu sarana atau alat untuk mendapatkan pencerahan bagi umat, khususnya umat Islam.

¹⁸⁷Abu Amr Usman ibn Abd al-Rahman Ibnu S}alah, *'Ulum al-Hadis* (Madinah: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), h. 37.

Pengertian Hadis Da'if

Kata daif dalam bahasa Arab terdiri atas huruf ض ع ف yang mempunyai dua arti pokok yang pada dasarnya sama mengarah pada lawan dari kata *quwwah* (*khilaf al-quwwah*, tidak kuat atau lemah).¹⁸⁸ Daif menurut etimologi berarti lemah¹⁸⁹, ia juga berarti *saqim* yakni sakit.¹⁹⁰ Maka hadis daif secara etimologi adalah hadis yang lemah, yang sakit, yang tidak kuat. Daif dalam mustalah al-hadis adalah hadis yang tingkatan atau golongannya di bawah hasan.¹⁹¹ Adapun hadis daif menurut terminologi, para ulama mempunyai definisi yang berbeda redaksi, tetapi mengandung makna yang sama. Definisi tersebut antara lain:

1. Ibn al-Salah dan Mahmud Abu Ruyyah mengemukakan definisi yang sama bahwa hadis daif adalah hadis yang tidak memiliki sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan.¹⁹²
2. M. Ajjaj al-Khatib menyebutkan bahwa hadis daif adalah segala hadis yang di dalamnya tidak berkumpul sifat-sifat makbul.¹⁹³
3. Manna' al-Qattan dan al-Nawawi memiliki definisi yang sama bahwa hadis daif adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan.¹⁹⁴
4. Ibrahim Dasuki al-Syahawiy memberi definisi hadis daif adalah hadis yang hilang semua sifat-sifat makbul atau sebagiannya.¹⁹⁵
5. Nur al-Din Itr mengatakan bahwa hadis daif adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis yang *maqbul*.¹⁹⁶

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis

¹⁸⁸Abu> al-H}usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lughah*, tah}qi>q Abd al-Sala>m Muha}ammad Ha>ru>n, Juz.III (Beirut: Da>r al-Fikr, 1979M), h. 362 Dan Ibnu Manzhur, *Lisa>n al-'Arab*, Juz. IX (Bairut: Dar Shadir, t.th), h. 209.

¹⁸⁹A.W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Cet.XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 880.

¹⁹⁰Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, *Filsafat Ilmu Hadis* (Cet.I; Surakarta: Zadahana, 2011), h. 27.

¹⁹¹Ibrahim Musthafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th), h. 1120

¹⁹²Abu Amr Usman ibn Abd al-Rahman Ibnu S}alah, '*Ulu>m al-Hadi>s*, h. 37. Dan Muhammad Abu Rayyah, *Ad}a 'ala Sunnah al-Muhammadiyah* (Mesir: Dar> al-Ma'a>rif, t.th), h. 282.

¹⁹³M. Ajjaj al-Khatib, *Us}u>l al-Hadi>s \ 'Ulu>m wa Mus}t}ala>huhu>* (Bairut: Da>r al-Fikr, 1989), h. 337. Sifat-sifat makbul yang dimaksud adalah sifat-sifat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan yang keduanya memenuhi sifat-sifat makbul.

¹⁹⁴Manna al-Qat}an, *Mabhis \ fi> 'Ulu>m al-Hadi>s*, terj. Mifdhol Abdurrahman, Lc., *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Cet.IV; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 129. Dan Al-Nawa>wi, *al-Taqrif li al-Nawa>wi Fann Us}u>l al-Hadi>s* (Kairo: Abd. Rahman Muhammad, t.th), h. 19.

¹⁹⁵Ibrahim al-Duski al-Syahawy, *Mus}t}alah al-Hadi>s* \ (Kairo: Syarikah al-T}iba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971), h. 22.

¹⁹⁶Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd Fi> 'Ulu>m al-Hadi>s* \ (Beirut: Da>r al-Fikr, 1979), h. 286.

sahih dan hadis hasan, yakni tidak bersambung sanadnya, tidak adil, tidak dabit, mengandung *syaz* dan *'illat*.

Pendapat Ulama Tentang Hadis Da'if Dalam Dakwah

a. Ulama dan Hadis Da'if

Hadis da'if merupakan salah satu bagian dari kualitas hadis. Dan memiliki posisi sebagai hadis yang berkualitas dibawa tingkatan daripada hadis sahih dan hadis hasan. Hal ini sudah menjadi masyhur dan kemufakatan para muhaddisin itu sendiri.

Oleh karena itulah dalam hal pengamalan daripada hadis da'if tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kehujahan dan pengaplikasian hadis daif tersebut. Di antara pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Imam al-Bukhariy, Muslim, Ibn Hazm dan Abu Bakr ibn al-'Arabiyy mengatakan, hadis daif sama sekali tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujjah baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal.
- b. Imam Ahmad ibn Hambal, 'Abd al-Rahman ibn Mahdi dan Ibn Hajr al-'asqalaniy mangatakan bahwa hadis daif dapat dijadikan hujjah atau diamalkan hanya untuk dasar keutamaan amal (*fadail al-a'mal*), dengan syarat, 1) Para periwayat yang meriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah, 2) Masalah yang dikemukakan oleh hadis itu mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis *sahih*, dan; 3) Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.¹⁹⁷

Ulama hadis mengingatkan agar orang yang meriwayatkan hadis daif tidak meriwayatkannya dengan redaksi yang menunjukkan kemantapan penuh bahwa ia merupakan hadis. Sehingga yang meriwayatkan tidak diperkenankan mengatakan: "Rasulullah saw. bersabada begini dan begini" dan sejenisnya. Bahkan dia harus meriwayatkannya dengan redaksi yang menunjukkan keraguan akan ke-*sahih*-an yang disampaikannya. Misalnya dengan memakai sigat "*ruwiya*", "*nuqila*", "*fi ma yurwa*" dan sejenisnya.¹⁹⁸

Adapun meriwayatkan hadis-hadis daif lengkap dengan sanadnya tidak dimakruhkan menggunakan redaksi yang menunjukkan kemantapan, apabila diriwayatkan kepada ahli ilmu. Apabila diriwayatkan kepada orang awam. Maka harus digunakan redaksi yang tidak menunjukkan kemantapan penuh, sama seperti ketika meriwayatkannya tanpa sanad.¹⁹⁹

Pendapat paling baik, aman dan terkuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa hadis makbul dapat dijadikan hujjah dan diamalkan.

¹⁹⁷Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, h. 187.

¹⁹⁸'Ajjaj al-Khatijib, *Usjul al-Hadis*, h. 316.

¹⁹⁹'Ajjaj al-Khatijib, *Usjul al-Hadis*, h. 317.

Pendapat ini lebih selamat, sebab masalah keutamaan amal dan nasehat adalah bagian dari pokok ajaran Islam sebagaimana halnya masalah hukum.²⁰⁰

Untuk hadis daif, karena jenis hadis ini adalah yang terbanyak dari semua jenis pembagian hadis, jadi bisa ditemukan pada banyak kitab-kitab hadis seperti *al-Kutub al-Tis'ah* selain dua kitab *sahih* al-Bukhariy dan Muslim, serta beberapa kitab lain yang memang tidak mengkhususkan memuat hadis-hadis *sahih* sebagaimana yang dilakukan oleh al-Bukhariy dan Muslim.

b. Ulama dan Dakwah

Apabila dikatakan sebagai dakwah Islamiyah, maka yang dimaksudkan adalah Risalah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah dalam bentuk kitab yang tidak ada kebatilan di dalamnya, baik di depan atau belakangnya, dengan kalam-Nya yang bernilai mukjizat, dan yang ditulis di dalam mushaf yang diriwayatkan dari Nabi Saw dengan Sand yang mutawatir, yang membacanya bernilai ibadah.

Dengan penjabaran demikian, dakwah Islam memiliki beberapa karakter yang membedakannya dari dakwah-dakwah yang lain. Ada beberapa karakteristik di antaranya ialah: *Rabaniyah*, artinya bersumber dari wahyu Allah Swt. *Wasathiyah*, artinya tengah-tengah atau seimbang. *Ijabiyah*, artinya positif dalam memandang alam, manusia, dan kehidupan. *Waqi'iyah*, artinya realistik dalam memperlakukan individu dan masyarakat. *Akhlaqiyah*, artinya sarat dengan nilai kebenaran, baik dalam sarana maupun tujuannya. *Syumuliyah*, artinya utuh dan menyeluruh dalam manhajnya. *Alamiyah*, bersifat mendunia. *Syuriyah*, berpijak di atas prinsip musyawarah dalam menentukan segala sesuatunya. *Jihadiyah*, artinya terus memerangi siapa saja yang berani menghalang-halangi Islam, dan mencegah tersebarnya dakwah. *Salafiyah*, artinya menjaga orisinalitas dalam pemahaman dan akidah.²⁰¹

Tampak sekali, bahwa dakwah tidak akan berhasil apabila seorang da'i tidak menyerahkan dirinya secara totalitas untuk berjuang di jalan Allah. Dakwah yang berhasil ialah dakwah yang efektif membimbing manusia untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Banyak faktor yang mendukung keberhasilan dakwah ini, di antaranya ialah: Pemahaman yang mendalam. Keimanan yang kuat. Kecintaan yang kokoh. Dan kesadaran yang sempurna Kerja yang kontinu

Dalam rangka mencapai tujuan yang mulia itu, seorang muslim harus bersedia menjual diri dan hartanya kepada Allah, sampai dia tidak memiliki apa-apa. Dia menjadikan dunia hanya untuk dakwahnya, demi

²⁰⁰Ajja>j al-Khat}i>b, *Us}u>l al-Hadi>s* \, h. 352.

²⁰¹Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Figih Dakwah; Studi Atas Berbagai Prinsip dan Kaidah yang Harus dijadikan Acuan Dalam Dakwah Islamiah*, h. 11.

untuk memperoleh keberhasilan akhirat, sebagai pembalasan atas pengorbanannya. Sehingga dengan pemahaman yang benar terhadap dakwah, kita berupaya melaksanakan pemahaman ini agar terjelma dalam kehidupan yang nyata, dan prinsip-prinsip yang dilaksanakan dapat disaksikan dan dirasakan pengaruhnya oleh manusia.

Hadis-Hadis Da'if yang Diamalkan oleh Muballig di Kota Watampone

Kota Watampone sebagai Ibukota daripada Kabupaten Bone memiliki banyak muballig yang berasal dari berbagai kalangan. Dalam hal ini, ada muballig yang benar-benar profesinya sebagai muballig saja. Ada juga memiliki profesi ganda, disamping sebagai muballig juga sebagai akademisi, sehingga pengamalan daripada hadis da'if daripada muballig di Kota Watampone tentunya yang perbedaan yang cukup signifikan.

Oleh karena itulah, peneliti dalam hal ini lebih mengacu kepada penelitian yang sifatnya umum. Dalam hal ini muballig yang dijadikan objek penelitian adalah mereka (muballig) yang memiliki profesi yang berbeda, sehingga hasil yang didapatkan dalam sebuah penelitian lebih bervariasi dengan adanya sumber yang berbeda-beda dalam pengamalan hadis da'if bagi para muballig di Kota Watampone.

Hadis da'if sebagai satu macam hadis yang memiliki tingkatan kualitas yang lemah dibawa tingkatan atau derajat daripada hadis sahih dan hadis hasan. Dan hadis da'if inilah yang lebih banyak tersebar di kalangan kaum muslimin yang diaplikasikan langsung oleh muballig dalam berdakwah atau bertauziah. Hanya saja, umat Islam khususnya yang awam tentang hadis da'if dan penggunaannya atau pengamalannya tidak menyadari bahwa hadis tersebut bukanlah berasal dari Rasulullah SAW.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada beberapa masjid dan kegiatan-kegiatan majelis taklim yang ada di Kota Watampone, bahwa ada beberapa hadis yang seringkali diutarakan oleh seorang muballig dalam berdakwah. Di mana hadis yang diutarakan tersebut merupakan hadis da'if atau hadis yang berkualitas lemah. Dalam di antara hadis-hadis da'if yang seringkali diamalkan oleh muballig di Kota Watampone adalah sebagai berikut:

1. Hadis Tentang Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri Cina

Hadis da'if yang masyhur digunakan oleh para muballig dalam mendorong manusia untuk menuntut ilmu di mana pun tempatnya sekalipun jauhnya sampai ke Negeri Tirai Bambu, Cina, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. dari Nabi SAW, beliau bersabda;

اطلبوا العلم ولو بالصين

Terjemahnya:

“Tuntutlah ilmu pengetahuan itu walapun di negeri Cina”

2. Tuntutlah Duniamu

Hadis da'if yang seringkali diungkapkan dan diamalkan oleh muballig di Kota Watampone dalam menyampaikan dakwahnya adalah tentang masalah menuntut atau mencari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berbunyi;

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا , وَإِعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Terjemahnya:

“Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup akan selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok”.

3. Surat Yasin Hatinya Al-Qur'an

Banyak hadits-hadits yang tersebar di kalangan masyarakat menjelaskan keutamaan-keutamaan sebagian surat-surat Al-Qur'an. Namun sayangnya, banyak di antara hadits itu yang lemah, bahkan palsu. Seperti teks hadis dibawa ini;

إِن لِّكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا , وَإِن لِّقَلْبِ الْقُرْآنِ (يس) , مِنْ قَرَأَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَاتٍ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati, sedang hatinya Al-Qur'an adalah Surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka seakan-akan ia telah membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali”.

4. Perselisihan Umatku adalah Rahmat

Sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla, adanya perpecahan di dalam Islam dan memang hal tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di negara kita sendiri, sekte-sekte dan aliran sesat yang menyandarkan diri kepada Islam sudah terlalu banyak. Apabila kita memperingatkan dan membantah kesesatan aliran-aliran tersebut, maka sebagian kaum muslimin membela aliran-aliran tersebut. Mereka berdalil dengan hadits berikut,

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

Terjemahnya:

“Perbedaan di antara ummatku adalah merupakan sebuah rahmat.”

Disamping itupula dengan berdasar pada hasil wawancara peneliti terhadap seorang muballig dengan mengatakan, bahwa;

Hadis da'if yang selalu digunakan dalam berdakwah terhadap umat Islam adalah hadis yang berkaitan dengan ilmu (hadis n.1) dan tentang urusan dunia dan akhirat (hadis no. 2). Karena kedua hadis tersebut bagi masyarakat, khususnya di Kota Watampone sudah masyhur diaplikasikan oleh para muballig.²⁰²

²⁰² Abdul Kallang, *Wawancara*, Tanggal 8 Agustus 2017, di Watampone.

Simpulan

1. Bahwasanya hukum yang hadis da'if yang diamalkan oleh para muballig di Kota Watampone adalah Hadis dhaif sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai materi dakwah, karena tidak boleh mengada-ada tentang sesuatu yang dating dari Nabi SAW. Oleh karena itu, walaupun materi hadis dhaif itu sesuai dengan al-Qur'an, hadis mutawatir dan rasional, tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk dijadikan sebagai materi dakwah dengan menyandarkannya dari Rasulullah SAW. Hal penting karena menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah, padahal hal itu tidak pernah disabdakan, dilakukan dan ditaqirirkan oleh Nabi SAW, maka hal itu sama dengan melakukan kebohongan kepada Rasulullah. Melakukan kebohongan kepada Rasulullah berarti dengan sengaja menjerumuskan dirinya dalam dosa. Hadis dhaif dapat dijadikan sebagai materi dakwah apabila materi hadis dhaif itu tidak merusak aqidah. Pandangan ini didasarkan atas suatu alasan bahwa dalam hal melakukan kebaikan atau amal shaleh, tidak harus didasarkan pada hadis shahih, akan tetapi cukup diketahui bahwa perbuatan itu tidak merusak akidah dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Bahkan lebih dari pada itu, ungkapan orang bijak yang non Islam sekalipun dapat dijadikan sebagai materi dakwah apabila tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Epistemologi pandangan ini bersumber dari suatu pandangan bijak atau kata hikmah, bahwa "ambillah pelajaran atau hikmah sekalipun kata-kata itu keluar dari mulut orang gila". Disamping itu, dalam hal berdakwah seseorang diminta untuk tidak melihat siapa yang mengatakan, tetapi yang harus dilihat adalah apa yang dikatakan. Ini berarti bahwa materi dakwah harus dilihat secara objektif tanpa harus dikaitkan kepada sumbernya. Jika materi hadis dhaif itu memang benar, baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak ditemukan alasan yang argumentatif untuk tidak menerimanya. Hadis dhaif dapat dijadikan sebagai materi dakwah apabila hanya menyangkut masalah-masalah ibadah *ghair al-mahdah*, sedangkan pada ibadah *mahdah* tidak boleh dijadikan sebagai materi dakwah. Demikian pula, hadis dhaif dapat digunakan dalam berdakwah apabila materi dakwah menyangkut masalah anjuran untuk beramal kebajikan dan hal itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an, seperti anjuran untuk bersadaqah, saling tolong menolong, menjaga kebersihan, membangun persatuan dan kesatuan dan lain-lain. Sedangkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan penetapan hukum atau hukum sesuatu. Maka hadis da'if tidak dapat dijadikan sebagai materi dakwah, seperti hukum dalam jual beli, hukum kewarisan, perkawinan, perceraian dan lain-lain.
2. Dampak terhadap mad'u tentang hadis da'if yang diamalkan oleh muballig di Kota Watampone adalah terdiredi dari dua faktor, yaitu

faktor positif, peneliti menemukan adanya pengaruh yang besar terhadap mad'u, yaitu dengan adanya membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang baik disekitar lingkungan dalam hal bagaimana mengamalkan satu bentuk silaturahmi melalui social masyarakat yang ada. Sedangkan pada faktor negatifnya adalah menjadikan pengamalan atau kandungan daripada hadis da'if sebagai bentuk keharusan yang mutlak diaplikasikan dan dilkaskan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal da'if itu tidak harus atau wajib diamalkan.

Daftar Pustaka

- Arifin, H.M. *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Aziz, Jum'ah Amin Abdul. , *Fiqih Dakwah; Studi Atas Berbagai Prinsip dan Kaidah yang Harus dijadikan Acuan Dalam Dakwah Islamiah*, Solo: Ramadhani, 2011.
- Amri. Darwis. *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipyta, 2002.
- Bahtiar, Wahdi. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Darwis, Amri. *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Teori, Konsep Dasar dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Fayyad, Muh. Ali. *Manhaj Al-Muhaddisin Fi Dab al-Sunnah*, ditermahkan oleh A. Zarkasyi Chumaidy dengan judul *Metodologi Penelitian Kesahihan Hadis* . Cet. I; Bandung: Pustaka Setia 2000.
- Habib, M. Syafaat. *Pedoman Dakwah*. Cet. I; Jakarta: Wijaya 1998.
- Ismail, Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Jayadi, *Metodologi Kajian Hadis* Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Khuly, Bahyul. *Tazkirah Al-Duat*. Kairo: Darul Kitabi al-Arabi.t.th.
- Kokom, Komalasari. *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*, Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ma'luf, Louis. *Munjid fi al-Lugah al-Arabiyah*, (Beirut: Darul Fikr, 1999.

- Masy'ari, Anwar. *Studi Tentang Ilmu Dakwah* . Cet. I; Surabaya Bina ilmu, 1992.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Nana, Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Poerdarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Kualitatif* . Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
- Salah, Abu Amr Usman ibn Abd al-Rahman Ibnu. *'Ulum al-Hadis* (Madinah: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. X; Bandung: Mizan, 1995.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KREDIBILITAS MUBALLIG STAIN WATAMPONE DALAM MENYAMPAIKAN CERAMAH AGAMA DI KOTA WATAMPONE

Ruslan S

Dosen STAIN Watampone

Pendahuluan

Masyarakat Bone tergolong masyarakat yang kuat memegang nilai-nilai Islam. Sejak masuknya Islam di Bone dan menjadikan syariat Islam sebagai salah satu bagian dalam sistem *panggadereng*, maka pranata-paranata sosial masyarakat Bone mendapat warna baru dan mulai sejalan dengan hukum Islam.²⁰³ Seiring dengan perkembangan zaman, sampai saat ini masyarakat Bone tetap mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal dan peran muballig²⁰⁴ didalamnya tidak bisa dipisahkan.

Di era sekarang ini, perkembangan masyarakat menuju ke arah globalisasi, mau atau tidak mau akan melahirkan tantangan bagi para muballig. Tantangan yang dihadapi para muballig tidaklah ringan, melainkan semakin berat dan kompleks. Kegiatan *tablig* atau penyampaian ajaran Islam saat ini memerlukan perhatian lebih, seiring dengan munculnya problematika sosial, politik, ekonomi dan budaya di Indonesia. Agama dan kekerasan sosial seringkali dibenturkan, titik singgung itulah kemudian memunculkan lagi persoalan misalnya dengan mencuatnya istilah radikalisme atau ekstremisme keagamaan.²⁰⁵ Disinilah posisi dan peran muballig sangat diharapkan, bukan jauh meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan di tengah masyarakat. Umat Islam membutuhkan pencerahan mengenai ajaran agamanya, bukan malah membingungkan dan meninggalkan ketidakjelasan.

²⁰³Salah seorang yang sangat bersemangat menganjurkan pengamalan ajaran Islam khususnya di lingkungan kerajaan Bone adalah La Maddaremmeng (Raja Bone ke-13) yang memerintah pada tahun 1613-1640. Lihat Nurman Said, *Masyarakat Muslim Makassar: Studi Pola-Pola Integrasi Sosial antara Muslim Pagama dengan Muslim Sossorang* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI., 2009), h.24

²⁰⁴Muballig adalah orang yang melakukan tablig. Sedangkan tablig adalah usaha menyampaikan dan menyiarkan pesan Islam yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Lihat Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 21

²⁰⁵Abdurrahman dkk., *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2011), h. 37

Para muballig perlu ditingkatkan kualitasnya, karena peran dan fungsinya semakin berat. Muballig bisa disebut sebagai pengawal akhlak, karena posisinya sebagai penyampai pesan kebaikan yang secara tidak langsung ikut mewarnai perjalanan masyarakat. Sejarah telah mencatat bahwa moral atau akhlak sangat menentukan martabat suatu bangsa atau kaum. Jika moral atau akhlak hancur, maka hancur pula bangsa atau kaum itu.²⁰⁶

Muballig sebagai informator dan penerang sangat dibutuhkan masyarakat. Kehadirannya pada suatu moment mendapat tempat lebih dibanding pihak lainnya. Namun demikian, agar informasi, petunjuk dan penerangan yang disampaikan tidak menyesatkan masyarakat, maka para muballig harus melengkapi dirinya dengan kompetensi yang akurat dan dapat dipercaya. Sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), para muballig juga harus menyadari dirinya sebagai aktor yang dapat melakukan pembaharuan pemikiran Islam. Permasalahan-permasalahan aktual terus saja muncul dan membutuhkan analisis kritis serta pertimbangan moral dari seorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keislaman semisal muballig.

Persepsi Masyarakat Bone terhadap Kompetensi Muballig STAIN Watampone dalam Menyampaikan Ceramah Agama

Persepsi masyarakat dalam penelitian ini adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan dan penilaian terhadap hal-hal tertentu pada lingkungan tempat tinggal mereka. Adapun yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang hidup di wilayah kota Watampone. Batas wilayah perkotaan bone yang menjadi sasaran penelitian adalah hanya mencakup tiga kecamatan yaitu kecamatan tanete riattang, kecamatan tanete riattang timur, dan kecamatan tanete riattang barat.

Ketiga wilayah kecamatan ini merupakan wilayah yang paling banyak menggunakan jasa para muballig STAIN Watampone menyampaikan ceramah tentang ajaran Islam. Keberadaan muballig disini tidak hanya disorot ketika mereka menyampaikan ceramah di Mesjid, tetapi termasuk pada saat menghadiri acara-acara tertentu lainnya seperti pengajian di rumah-rumah penduduk, atau acara-acara hari besar Islam yang dilaksanakan di instansi atau lembaga tertentu dimana muballig STAIN Watampone menjadi nara sumbernya.

²⁰⁶ Banyak ayat dalam Alquran menggambarkan bahwa sebuah bangsa atau negeri hancur dan binasa akibat perilaku mereka sendiri. Lihat misalnya QS. Al-A'raf/7:3-5. Lihat juga Imam Fuadi, *Sejarah Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Lingkar Media, 2014), h. 148

Masyarakat kota Watampone dalam penelitian ini juga dibatasi pada anggota masyarakat atau jama'ah masjid yang aktif dalam kegiatan pengajian dalam majelis taklim, termasuk pengurus masjid. Mereka yang diminta tanggapannya adalah mulai dari usia 17 tahun. Mereka ini dianggap sudah cakap dalam memberi penilaian dan tanggapan. Jadi ketika dilakukan survai, pada umumnya dalam menjawab pertanyaan dianggap tidak mungkin lagi diintervensi oleh orang lain, karena jawaban yang dikehendaki adalah benar-benar murni dari pengamatan dan hasil penilaian mereka sendiri.

Kompetensi muballig dalam menyampaikan ceramah agama adalah sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan sebagai seorang muballig dalam menyampaikan ceramah berdasarkan teori James Mc Croskey yang dibangun sebelumnya. Adapun kompetensi yang dimaksud adalah penguasaan yang dimiliki muballig pada masalah yang dibahasnya misalnya: wawasan yang luas tentang materi, penjelasan yang tepat dan sangat dimengerti, dalil dan contoh yang digunakan tepat dan mengena serta aktual.

Jawaban-jawaban yang telah diklasifikasi berdasarkan komponennya akan dihitung dan diberi kategori sebagai hasil penelitian dengan menggunakan skala interval sebagai berikut:

No	Skala Interval	Kategori
1.	40 - 50	Sangat Tinggi
2.	30 - 39	Tinggi
3.	20 - 29	Sedang
4.	10 - 19	Rendah
5.	1 - 9	Sangat Rendah

Tabel 1: *Skala Interval*

Adapun hasil angket yang disebar pada masyarakat kota watampone tentang persepsi masyarakat Bone mengenai kompetensi muballig STAIN Watampone dalam menyampaikan ceramah Islam dapat dilihat sebagai berikut:

No	Keterangan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	Jumlah
	Kompetensi					
1.	Memiliki wawasan luas tentang materi	30	28	2	0	60
2.	Tepat dalam menjelaskan dan sangat dimengerti	19	35	6	0	60
3.	Dalam					

	mengangkat contoh dan dalil sudah tepat dan aktual	26	28	6	0	60
5.	Menjelaskan materi sesuai dengan kemampuan dan daya tangkap jama'ah	22	32	6	0	60

Tabel 2: persepsi masyarakat Bone mengenai kompetensi muballig STAIN Watampone dalam menyampaikan ceramah Islam

Berdasarkan tabel di atas, dari 60 responden yang telah memberi penilaian terhadap muballig yang memiliki wawasan luas tentang materi yang disampaikan, terdapat 30 responden yang sangat setuju menilai muballig STAIN Watampone memiliki wawasan luas mengenai materi yang disampaikan. Kemudian, terdapat 28 responden mengatakan setuju. Penguasaan materi dan kemampuan mengembangkan materi adalah dua hal yang memang perlu diperhatikan oleh muballig, karena indikator ini menjadi suatu keniscayaan kalau seorang muballig memiliki wawasan luas. Dari 30 responden yang sangat setuju itu menandakan nilainya tinggi.

Adapun yang dinilai sedang, ada dua kompetensi yaitu pertama, kemampuan muballig mengangkat contoh dan dalil serta keaktualan contoh yang disampaikan, dan yang kedua, adalah kemampuan muballig menjelaskan materi sesuai dengan kemampuan dan daya tangkap jama'ah. Masing-masing kompetensi ini dinyatakan sangat setuju oleh 26 dan 22 responden ditambah 28 dan 32 yang setuju.

Kemampuan seorang muballig menyampaikan contoh yang disertai dalil serta keaktualan informasinya adalah sangat mendukung materi yang dikemukakan di depan *mad'u*. Apalagi kalau ditunjang dengan bahasa yang mudah dicerna oleh jama'ah.

Persepsi Masyarakat Bone terhadap Kepribadian Muballig STAIN Watampone dalam Menyampaikan Ceramah Agama

Kepribadian Muballig STAIN Watampone dalam menyampaikan ceramah agama dimaksudkan adalah menunjukkan tampilan pribadi muballig. Kepribadian (*personality*) menunjukkan apakah pembicara memiliki pribadi yang hangat dan bersahabat; dalam menyampaikan materi tidak sok tahu, merespon pertanyaan pendengar dengan baik dan jawaban yang membuat puas, bahasa yang digunakan menyejukkan hati.

Adapun hasil dari angket yang disebar pada masyarakat kota watampone tentang persepsi masyarakat Bone mengenai kepribadian

muballig STAIN Watampone dalam menyampaikan ceramah Islam dapat dilihat sebagai berikut:

No	Keterangan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	Jumlah
	Personaliti					
1.	Memiliki pribadi yang sangat bersahabat	27	27	6	0	60
2.	Menyampaikan materi tidak sok tahu	30	25	3	2	60
3.	Menggunakan bahasa yang menyejukkan hati	25	31	4	0	60
5.	Dapat menjadi teladan	30	28	2	0	60

Tabel 3: persepsi masyarakat Bone mengenai personaliti muballig STAIN Watampone dalam menyampaikan ceramah Islam

Persoalan kepribadian atau yang dikenal personaliti sama pentingnya untuk diperhatikan oleh muballig dengan persoalan kompetensi yang telah disebutkan sebelumnya. Personaliti muballig tergolong erat kaitannya dengan penampilan secara fisik dan non fisik, atau dengan kata lain, karakter dan sifat-sifat muballig termasuk salah satu sasaran penilaian. Mata audiens atau *mad'u* dalam hal ini masyarakat mutlak akan memandang kearah muballig. Dari pandangan mereka akan menyisakan penilaian berdasarkan apa yang tampak pada saat itu.

Keterangan penilaian yang terdapat pada aspek personaliti adalah pertama, muballig memiliki pribadi yang hangat dan bersahabat. Kedua, muballig menyampaikan materi tidak sok tahu. Ketiga, muballig gunakan bahasa yang menyejukkan hati. Keempat, muballig dapat menjadi teladan.

Keempat hal yang dinilai di atas, cukup mewakili aspek personal masing-masing muballig.

Dari 60 responden, masing-masing aspek kedua dan keempat mendapatkan nilai kategori tinggi. Muballig menyampaikan ceramah bukan sok tahu dan muballig dapat menjadi teladan.

Persepsi Masyarakat Bone terhadap Dinamika Muballig STAIN Watampone dalam Menyampaikan Ceramah Agama

Dinamika (*dynamic*) adalah menunjukkan apakah hal yang disampaikan itu menarik atau sebaliknya membosankan; menyampaikan

materi diselingi humor, cara penyampaian menarik dan membuat rindu ingin mendengar lagi ceramah dari seorang muballig.

Adapun hasil dari angket yang disebar pada masyarakat kota watampone tentang persepsi masyarakat Bone mengenai dinamika muballig STAIN Watampone dalam menyampaikan ceramah Islam dapat dilihat sebagai berikut:

No	Keterangan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	Jumlah
	Dinamika					
1.	Menyampaikan materi tidak membosankan	26	26	7	1	60
2.	Menyampaikan materi diselingi humor	8	31	17	4	60
3.	Cara penyampaiannya memberi kesan dan rindu mendengar kembali	25	30	5	0	60
5.	Menyampaikan materi dalam banyak aspek (aqidah, ibadah, muamalah dan akhlaq	24	31	4	1	60

Tabel 4: persepsi masyarakat Bone mengenai dinamika muballig STAIN Watampone dalam menyampaikan ceramah Islam

Pertanyaan mengenai apakah muballig STAIN Watampone menyampaikan materi dengan tidak membosankan, dijawab oleh 26 responden dengan sangat setuju. Angka ini menunjukkan kategori sedang, tidak pada level tinggi dan juga bukan pada level rendah. Hal yang sama juga terjadi pada cara penyampaian muballig yang tergolong selalu ditunggu-tunggu kembali, dimana 25 responden sangat setuju dan 30 responden mengatakan setuju. Ini merupakan indikator kalau metode atau teknik penyampaian ceramah muballig mampu mempengaruhi audiens. Keinginan kembali mendengar ceramah seseorang menandakan penceramah tersebut telah sukses menyampaikan ceramahnya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, dengan mengacu pada submasalah yang dikonstruksi sebelumnya, yakni secara umum mempertanyakan kredibilitas muballig STAIN Watampone dalam

menyampaikan ceramah agama di tengah masyarakat Watampone meliputi tiga komponen, yaitu kompetensi, personaliti dan dinamika muballig, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Watampone menilai kredibilitas muballig STAIN Watampone dari segi kompetensinya tergolong tinggi. Gambaran penilaian masyarakat Watampone ini mengacu pada keterangan responden: (a) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig memiliki wawasan luas tentang materi yang disampaikan dengan jumlah 58 orang (96,7%). (b) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig tepat dalam menjelaskan dan sangat dimengerti dengan jumlah 54 orang (90%). (c) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig mampu mengangkat contoh dan dalil secara tepat dan actual dengan jumlah 54 orang (90%). (d) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig mampu menyampaikan materi sesuai atau berdasarkan kemampuan dan daya tangkap jama'ah dengan jumlah 54 orang (90%).
2. Masyarakat Watampone menilai kredibilitas muballig STAIN Watampone dari segi personalitinya dalam menyampaikan ceramah tergolong tinggi. Gambaran penilaian masyarakat Watampone ini mengacu pada keterangan responden: (a) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig memiliki pribadi yang hangat dan bersahabat dengan jumlah 54 orang (90%). (b) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig menyampaikan materi tidak sok tahu dengan jumlah 55 orang (91,7%). (c) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig menggunakan bahasa yang menyejukkan hati dengan jumlah 56 orang (93,3%). (d) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig dapat menjadi teladan dengan jumlah 58 orang (96,7%).
3. Masyarakat Watampone menilai kredibilitas muballig STAIN Watampone dari segi dinamikanya tergolong tinggi. Gambaran penilaian masyarakat Watampone ini mengacu pada keterangan responden: (a) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig menyampaikan materi yang tidak membosankan dan monoton dengan jumlah 52 orang (86,7%). (b) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig menyampaikan materi ceramah dan diselingi humor dengan jumlah 39 orang (65%). (c) memilih sangat setuju dan setuju bahwa penyampaian muballig memberi kesan dan rindu mendengar kembali dengan jumlah 55 orang (91,7%). (d) memilih sangat setuju dan setuju bahwa muballig dalam menyampaikan materi dalam banyak aspek yaitu aqidah, ibadah, mu'amalah dan akhlak dengan jumlah 55 orang (91,7%).

Daftar Pustaka

Alqur'ān al-Karīm

Abdurrahman dkk. *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: ELSAQ Press, 2011

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2009
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya* Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Fuadi, Imam. *Sejarah Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Lingkar Media, 2014.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Umum*. Bandung: 1984.
- Maharani, Vivin dan Ahmad Sani Supriyanto. *Metodologi Penelitian Manajemen Sumberdaya Manusia: Teori, Kuisisioner, dan Analisis Data*. Malang: UIN- Maliki Press, 2013.
- Mulyana, Dedi. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Partanto, Pitus A., M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Rahman, Gozali. "Paradigma Komunikasi Politik". Kumpul8. Blogspot.com. 20 April 2017.
- Robbins. *Perilaku Organisasi*. Jilid I. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Garmedia, 2013.
- Said, Nurman. *Masyarakat Muslim Makassar: Studi Pola-Pola Integrasi Sosial antara Muslim Pagama dengan Muslim Sossorang*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI., 2009.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Surovai*. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2004.
- Saputra, Lukman Surya. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarak Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Thomas, Ekwado. "Konsep Persepsi", ekwadothomasfikers.blogspot.co.id.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

**KHALIFAH, AL-DA'WAH LLA AL-KHAIR, AMR MA'RUF NAHYI AL-MUNKAR DALAM ALQURAN MENURUT PENAPFSIRAN HIJBU TAHRIR INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP MAHASISWA ISLAM
(Studi Kasus di Sulawesi Selatan pada Tahun 2017)**

A. Sumpeno

Dosen STAIN Watampone

Pendahuluan

Allah menurunkan ayat-ayat al-Qur'an kepada Rasul-Nya; Muhammad Saw. sebagai informasi dan petunjuk bagi hidup dan kehidupan manusia. Melalui ayat al-Qur'an yang ke 30 dari surat al-Baqarah tujuan Allah menciptakan Adam untuk menjadi *khalifah* (pemimpin) di muka bumi. Dalam hal ini Allah berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَحَنُوۡنٌۭ نُّسِیۡحٌ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیۡۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ ﴿ۙ﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka ber-kata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."²⁰⁷

Untuk kepentingan kelahiran keturunan Adam, maka Allah-pun menciptakan Hawa sebagai isterinya. Dari keduanya, lahirlah berbagai suku bangsa di dunia. Sistem keyakinan dan ritual mereka terhadap Allah-pun berbeda-beda pula satu sama lain. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa alam semesta dan manusia adalah ciptaan Allah. Mereka disebut al-Qur'an sebagai *Mu'mininun*. Sedangkan yang menolak dan menyekutukan-Nya, masing-masing disebut dengan *Kâfirun* dan *Musyrikun*. Setiap person dari mereka adalah penerus ke-*khalifah-an* Adam.

Sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, setiap person dari kalangan mereka dituntut untuk memakmurkan dunia. Akan tetapi, dengan konsep hidup yang tidak sesuai petunjuk Allah di dalam al-Qur'an dan

²⁰⁷ Tim Penerjemah, Yayasan Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. Ke 1, Jakarta, 1990, h. 13

dicontohkan Rasul-Nya, orang-orang Kâfir dan Musyrik telah membawa kerusakan dunia. Untuk menyelamatkannya, maka Allah memerintahkan kaum *mu'minin* untuk mengajak mereka ke jalan yang baik atau benar sesuai tuntunan Islam, menegakkan *al-Ma'rûf* dan memberantas *al-Munkar* yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sebagaimana difirmankan-Nya pada ayat 104 surat Ali Imran. Bunyinya sebagai berikut :

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; Merekalah orang-orang yang beruntung."²⁰⁸

Sejalan perintah Allah di atas, Muhammad Ibn Abdillah sebagai Rasul dan sekaligus *Khalîfah*-Nya telah sukses memperjuangkan perintah Allah di atas semasa hidup sejak dari usia ke 25 tahun(571+25=596 M) hingga kewafatannya tiba pada 632 M²⁰⁹ di Madinah melalui Piagam Madinah²¹⁰. Piagam Madinah adalah Sistem Konsitusi Negara Pluralisme yang menjamin setiap warganya yang berbeda suku dan agamanya, untuk menjadi saudara sebagai sesama warga negara Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah. Kaum Kafir dan Musyrik yang tunduk kepada kepemimpinan Rasulullah dilindunginya. Mereka disebut dengan *Kâfir Dzimmi*. Sedangkan yang menentang dan memerangnya, diperangnya. Mereka disebut dengan *Kâfir Harbi*.

Perintah Allah agar kaum mu'min sebagai *Khalîfah* untuk mengajak Non Islam menjadi penganut Islam, menegakakn *ma'rûf* dan memberantas kemunkaran sukses dilanjutkan para sahabat Rasulullah: Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali dari 634-650 M²¹¹dengan sistem *Khilâfah Islâmiyah* sebagai dasar pemerintahan. Sistem ini berdasar al-Qur'an, al-Hadist dan hasil *Ijtihâd* mereka.

Khalîfah dan Khilâfah Islâmiyah

Meskipun *Khalîfah* , *Khilâfah Islâmiyah* populer di kalangan umat Islam Indonesia, tapi bukan asli bahasa mereka, melainkan serapan dari Arab. Menurut bahasa Arab, *Khalîfah* (خليفة) adalah subject (*Ismu Fâil*) dari kata kerja Lampau (*Fi'lun Mâdin* : فعل ماض) dan yang sedang atau akan berlangsung (*Fi'lun Mudhâri'u*: فعل مضارع). Kata kerja Lampau dan Sedang

²⁰⁸ *Ibid*, h. 93

²⁰⁹Syiril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Cet.Ke -1,Pt.RajaGrafindo Persada,Jakarta,1996, h.275-77

²¹⁰Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Cet. Ke -3, Dar al-Fikri, Bairut, 1999, h. 501

²¹¹ Yoesoef Soeyb, *Sejarah Daulah Khulafa al-Rasyidin*, Ce. Ke 1,Bulan Bintang, Jakarta, 1979, h. 463

atau Akan Berlangsung dari *Khalîfah* (خلیفة) adalah *Khalafa-Yakhlifu* (خلف-)²¹² Sedangkan *masdar* (مصدر) atau *abstractnoun*-nya adalah *Khilâfatan* (خلیفة).

Khalîfah (خلیفة) adalah *mufradun*: مفرد (kata tunggal). Jamak-nya, *Khalâifu* (خلائف), bukan *Khulafâu* (خلفاء), karena ia merupakan jamak dari *Khalîfun* (خلیف), bukan jamak dari kata *Khalîfah* (خلیفة).²¹³ Sinonimnya adalah *Mâlikun*²¹⁴ *Imâmun*, *Sultânun*, dan *Amîrun*. Jamak masing-masing kata itu *Mulûkun*, *Aimmah*, *Salâtinu* dan *Umarâu*. *Masdar* atau *abstractnoun* masing-masing: *Mamlakah*, *Imâmah*, *Sultânah*, dan *Imârah*.²¹⁵ Istilah itu sama dengan *khilâfah*. Bahasa Indonesianya; Ke-rajaan atau Kesultanan atau Keemiratan sebagai sistem pemerintahan. Se-dangkan *Khalîfah* sama dengan *Mâlikun* atau *Amîrun* dan *Sultânun*. Ba-hasa Indonesia; Pemimpin; Raja atau Penguasa. *Khalîfah* itu juga dapat diartikan sebagai pengganti atau penerus pemimpin yang wafat atau karena ada udzur atau nama bagi seseorang yang menggantikan posisi lainnya atau yang mengganti pihak lain dalam me-nangani berbagai masalah.

Jika *khalîfah* atau *khilâfah*, atau *sultânah*, atau *imârah* di-kaitkan dengan *Islâm*, maka akan menjdi *khalîfah* atau *khilâfah*, atau *sultânah*, atau *imârah Islâmiyah*. Islam *abstractnoun* dari akar kata *Aslama-Yaslam* (أسلم-يسلم-إسلاما).²¹⁶ Bahasa Indonesianya, menyelamatkan. Jadi, *khilâfah* atau *sultânah*, atau *imârah Islâmiyah*, dalam bahasa Indonesia, berarti sistem kepemimpinan yang dapat menyelamatkan manusia dari murka atau siksaan Allah sebagai pencipta-Nya. Murka Allah itu seba-gaimana difirmankan dalam wahyu Allah (al-Qur'an) dan penjelasannya dari Rasulullah (Muhammad Ibn 'Abdillah) yang disebut ; al-Hadist.

Menurut al-Qur'an dan al-Hadist, Islam berazaskan *Monotheisme* (Ajaran yang Meng Esa-kan Tuhan) atau *Tauhîdullah*, bukan *Atheisme* (Ajaran Menolak Tuhan) atau *Kufur* dan bukan pula *Polytheisme* (Ajaran menyekutukan Allah dengan Tuhan lain). Allah murka kepada *Kâfirun* (Orang yang tidak beriman kepada-Nya), dan *Musyrikun* (Orang yang menyekutukan Tuhan lain dengan-Nya. Sebaliknya, Allah akan menyayangi manusia yang beriman dan yang beramal saleh hanya

²¹² Abu Lois Ma'lûf, *al-Munjid Fî al-Lughati wa al-'Alâm*, Cet. Ke 39 , Dar-Masyriq, Bairut, 2002, h.192

²¹³ Iyâdu Kâmil Ibrâhîm, al- Zâbârî, *al-Tadâwul al-Silmî Li al-Sultâh Fî Nidlâmî al-Hukmi al-Islâmîy*, Cet. Pertama, Dâr Kutub al-Ilmiah, Bairut, 20012, h.

²¹⁴ *Ibid.* h.17-18

²¹⁵ Abu Lois Ma'luf, *Ibid.* h.18

²¹⁶ Abu Lois Ma'luf, *Ibid.* h.

kepada-Nya (*Muwahhidun dan Mukhlisun*), baik di dunia maupun akhirat kelak.

Untuk menghin dari murka Allah maka *khalîfah* dengan *khilâfah Islâmiyah* sebagai sistem kekuasaannya bertugas membimbing umat, memberi ajaran agar jangan sampai menjadi orang kafir, musyrik dan berbuat maksiat kepada-Nya. Perbuatan maksiat atau menentang petunjuk-Nya dalam menjalani hidup dan kehidupan, akan melahirkan kerusakan di muka bumi. Akibatnya, kebahagiaan hidup yang diburu, penderitaan yang akan didapat.

Dalam membimbing umat, baik al-Qur'an maupun al-Hadist, membuka ruang agar ulama sebagai penerus atau *Khalîfatu Rasulillah* (Muhammad Ibn 'Abdillah) melakukan *ijtihâdun*: إجتihad (pendapat) dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul ke permukaan, namun secara tektual tidak dimuat oleh al-Qur'an dan al-Hadist itu. *Ijtihâdun* dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama (*Ijmâun*: إجماع) atau *qiyâs*: قياس (*analogy*) atau *istihsan*: إستحسان (mencari yang terbaik berdasar pertimbangan akal), sebagai cara atau metodenya. Di antara *ijma'* adalah *Ijma'* para Sahabat Rasulullah (الإجماع الصحابي). *Ijma'* ini jauh lebih unggul dari pada *ijma'* ulama yang datang kemudian.

Pengertiannya Menurut Istilah Ulama

al-Khalîfatu adalah orang yang menggantikan kedudukan orang yang digantinya (الخليفة من يخلف غيره مقامه)²¹⁷. Maknanya akan serupa dengan *successor* dalam bahasa Inggris. Sedangkan *Khilâfah Islamiyah* : خلافة إسلامية adalah sistem kepemimpinan Islam. Lawannya adalah *Khilâfah Thâgutiyah* خلافة طغوتية (*Kâfiriyah* dan *Musyrikiah*).

Menurut Imâm al-Mâwardi, *al-Khilâfatu* adalah sistem kepemimpinan yang mengemban amanat misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur politik dunia.²¹⁸

Dari devinisi itu dapat diketahui maksud dari *khilâfah*, yakni: sistem kepemimpinan pengganti dan penerus misi kenabian nabi Muhammad Saw. *al-Khalîfah* dan *Khilâfah* di sini, bukan *Khalîfatullah* atau *Khilâfatu-Nya* melainkan *Khalîfatu Rasulillah* dan *Khilâfah-nya*. Mengapa demikian? Karena yang dimaksud dengan *Khalîfatullah* adalah Nabi dan Rasulul-Nya itu sendiri, yakni : Muhammad Saw. Sedangkan para Sahabat dan Tabi'in (تابع) atau *Tâbi'it Tâbi'in* (تابع التابعين) dan seterusnya adalah *Khalîfatu Rasulillah Saw*. Misalnya, ketika Abu Bakar al-Shiddiq ketika diangkat menjadi *Khalîfah*, dia tidak mengatakan: Aku adalah *Khalifatullah* melaiian

²¹⁷Abu Lois, *Loc.Cit* .

²¹⁸ Imâm al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sultâniyah*, Cet. Ke-1, Dâr al-Fikr, Bairut, Tanpa Tahun, h. 4

Khalifah Rasulullah.²¹⁹ Jadi, Abu Bakar al-Shiddik bukan Rasulullah. Ia hanyalah pemegang amanat kenabian dan kerasulan Muhammad Ibn 'Ab-dillah untuk ditegakkan dan dilaksanakan di muka bumi.

Dasar Hukum dan Tujuan *Khalifah* dan *Khilâfah*

Dasar Hukum *al-Khalifah* dan *al-Khilâfah* adalah al-Qur'an, al-Hadist dan Ijma' serta pertimbangan akal. Secara tektual *Khalifah* di-sebutkan al-Qur'an pada ayat 30 surat al-Baqarah. Teknya berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."²²⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa *Khalifah* di muka bumi itu adalah Adam sebagai bapak moyang manusia. Keturunannya-pun berstatus sebagai *khalifah*. Jadi, setiap manusia itu *khalifah*. Akan tetapi, karena ada yang beriman dan ada pula yang tidak, maka *khalifah* itu menjadi dua macam : *Kâfirah* atau *Musyrikah* dan *Muwahhidah* (*Ahli Tau-hîdullah*). Sistem *Khilâfah*-annya disebut dengan *Khilâfah Kâfiriyyah* atau *Musyrikiyyah* dan *Tauhîdiyyah*. Yang pertama disebut *Tagûfiyyah* sedangkan yang kedua disebut *Khilâfah Islâmiyyah*.

Melalui *Khalifah Islâmiyyah*, *khalifah* mempunyai tugas. Di antaranya adalah menegakkan hukum Allah di tengah-tengah umat ma-nusia di muka bumi. Hal ini dapat difahami dari isi ayat 58 - 59 surat al-Nisa dalam al-Qur'an, yaitu:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يٰمُرُّكُمْ اَنْ تُوْدُوْا اِلَآءَ مَنْتَ اِلَىٰ اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا

بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمًا يَّعْظُمُكُمْ بِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".²²¹

Ayat ini kemudian diperkuat oleh firman Allah yang lainnya yang berbunyi:

²¹⁹ Iyâdu Kâmil Ibrâhîm, Loc.Cit.

²²⁰ Departemen Agama, RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.ke 1, Intermedia, Jakarta, 1971, h.13

²²¹ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.128

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٢٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²²²

Meskipun secara *mantûq* (tektual), *khalîfah* dan *khilâfah* dalam ayat ini, tidak disebutkan, namun ada isyaratnya. Isyarat itu adalah Keharusan orang-orang yang beriman untuk mentaati *Uli al-Amri* (Peme-rintah). Pemerintah memiliki amanat untuk menegakkan hukum secara adil fi tengah-tengah kehidupan umat manusia. Jadi, pengangkatan pemerintah menjadi kebutuhan sebagai syarat tegaknya keadilan di antara sesama manusia. Posisinya, sejalan kaidah Ushul al-Fiqh:

ملا يتم الواجب الآ به فهو واجب²²³

(*Sesuatu yang dapat memenuhi kewajiban, maka mendirikan atau melaksanakannya termasuk wajib pula*).

Karena Allah mengamanatkan untuk menegakkan hukum di antara sesama manusia, maka *Uli al-Amri* sebagai yang memegang amanat untuk menegakkannya mebjadi wajib hukumnya untuk didirikan atau dibentuk. Penegakkan hukum yang dimaksud harus berdasar atas al-Qur’an yang dijelaskan oleh al-Hadist. al-Qur’an dan al-Hadist membuka ruang *Ijtihâdun* bagi *Uli al-Amr* dalam memecahkan masalah yang secara tektual tidak dimuat oleh keduanya.

Dalam kontek memperjelas ayat ini, Rasulullah dalam al-Hadist mengatakan bahwa:”Apabila tiga orang di antara kalian melakukan bepergian, hendaklah mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.”²²⁴ (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم)

Jika tiga orang saja yang berkumpul harus memilih pemimpinnya, maka apa lagi dalam suatu komunitas yang lebih banyak lagi. al-Hadist di atas menunjukkan kepada kewajiban untuk memilih atau mengangkat *khalîfah*. Hadist ini diperkuat pula oleh hadist:

من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له²²⁵

Maksudnya, orang yang tidak memilih pemimpin, maka kelak di hari Qiyamat akan berjumpa dengan Allah untuk dihitung amal perbuatannya, maka tidak akan ada pembelanya. Kemudian Rasulullah juga,

²²² Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.128

²²³ Iyâdu Kâmil Ibrâhîm, al- Zâbârî, *Op.Cit* h. 205

²²⁴ Iyâdu Kâmil Ibrâhîm, al- Zâbârî, *Ibid.*, h.204

²²⁵ Iyâdu Kâmil Ibrâhîm, al- Zâbârî, *Ibid.*, h.204

memberikan umpama terhadap orang yang tidak pernah berbait kepada pemimpinnya, jika dia mati maka dia mati dalam keadaan sebagaimana matinya orang *Jâhiliyah*.²²⁶

Bertolak dari ayat al-Qur'an dan al-Hadist di atas, maka para ulama menyepakati bahwa :” Hukum mengangkat *Khalîfah* itu wajib un-tuk menjalankan politik agama dan dunia kaum muslimin.²²⁷Sejalan dengan ini, maka halnya sebagaimana Abu Bakar untuk pertama kalinya setelah Rasulullah wafat, dia disepakati para sahabat Rasulullah untuk diangkat menjadi *Khalîfah*-nya dalam rangka menyelamatkan umat Islam. Adalah logis, jika ada bahaya yang mengancam dari luar, maka diperlukan suatu comando yang harus dita'ati oleh setiap umat Islam. Dalam sistem kepemimpinan Islam (*al-Khilâfatu al-Islâmiyatu*) comando ini datang dari person pemimpin (*Khalîfah*) sesuai petunjuk al-Qur'an dan al-Hadist.

Simpulan

Hubungan antara tawaran dengan respon sangat signivicant. Masyarakat mahasiswa Sulawesi yang dilatarbelakangi semnagat DI/TII yang dibu-barkan, maka ditawarkan Hizbu Tahrir sebagai wadar yang sama, maka mereka-pun berbondong-bondong memasukinya. Mereka sangat bersema-ngat untuk menumbuh-kembangkan pemikiran dan gerakkan para pen-dahulunya, yakni tegaknya : Negara Islam dengan dasar *Khilafah Islamiyah*. Selain karena merupakan bagian penting dalam Islam, khilafah juga me-rupakan sunnah Rasulullah yang telah disepakati para Sahabat untuk ditem-puh atau ditegakkan. Memplam memperjuangkannya merupakan dari jihad Fi Sabilillah. Para pemikir dan pejuangnya, jika dalam perjuangannya mati, maka kematiannya akan masuk kepada kelompok Syuhada.

Spirit seperti itu akan membawa setiap person anggota Hizbu tahrir Indonesia menjadi rela berkorban Jiwa Raga untuk mencapai Khilafah Islamiyah itu Exsis atau tegak. Khalifah yang dimaksudkan. Khalifah tidak mesti dari keturunan orang Qurais. Siapa-pun bisa menjadi khalifah asal disetujui oleh umat .

Daftar Pustaka

- Abd al-Fattâh Ahmad Fuadz,(DR.) *Ibn Taimiah wa Mauqû'uhu inda al-Fikr al-Islâmî*, Cet. ke-1, al- Haiah al-Misriyah, (Iskandariyah, 1980 M)
Abû al-Tsanâ Syihâbuddîn Sayyid Mahmûd Afandî al-Ulûsî al-Bagdâdî, *Rûh al-Ma'ânî Fî Tafsîr al-Qur'an al-Adlîm Wa al-Samb'u al-Matsânî*, Jilid III, Cet. Ke-1, Dâr al-Kutub al-Ilmiah, (Bairut : 2001 M)

²²⁶ Iyâdu Kâmil Ibrâhîm, al- Zâbârî *Ibid*, h. 204

²²⁷ Iyâdu Kâmil Ibrâhîm, al- Zâbârî , *Ibid*, h.204

- Abû Khalîl, Syaûqî , Dr., *Aḥḥas al-Qur'an (Amâkin -Aqwâm-A'lâm)*, Penerjemah ke bahasa Indonesia, Ahsin Sakho Muhammad, Dr. dan A.Sayuti Anshari Nasution, MA. Dr. H., dengan judul *Atlas al-Qur'an, Jejak Rasulullah*, Cet. Ke-1 , PT. Kharisma Ilmu, Jakarta
- Abu Lois Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughati Wa al-'Alam*, Cet. Ke 37 , Dar al-Masyriq Bairut, 1972 M
- Ahmad Âmîn, *Fajru al-Isam*, Jilid II, *Syirkah Ṭaba'ah al-Fanniah al-Muttahidah*, T.Tp : T.Thn
- al-Alusiy al-Bagdadiy, Abu al-ŜanÁ SyihÁb al-DÐn al-Sayyid MaÎmÙd, *RÛÎ al-Ma'Ániy fiy TafsÐr al-Qur'Án al-'AÛÐm wa al-Sab' al-MaŝÁniy*. Cet. I; Beirut: DÁr al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- al-Asya'arî, Syaekh Ahli al-Sunnah wa al-Jamá'ah al-Imâm Abî al-Hasan 'Alî Ibn Ismá'îl (w. 320 H), *Maqâlâtu al-Islâmiyyîn wa Ikhtilâfi al-Muŝallîn*, Juz. I. Cet. Ke-1, Maktabah al-Nahdlah al-Miŝriah, 1950
- al-Jazâiri, Abu Bakr al-Jâbir, *Minhâj al-Muslim*, Cet.Baru,Dâr al-Fikr,Beirut, 2003 M
- al-Nabhani, Taqiyyudin, *al-Daulah al-Islâmiyah*, Cet.7 (Beirut: Dâr al Ummah, 1953 M),
- al-Quraisyi al-Damsyiqi,Imâm al-HâfiZ 'Imâduddîn Abû al-Fidâi Ismâ'îl Ibn Katsîr (W. 774 H), *Tafsîr al-Qur'an al-'Azîm*, Juz. III. Dâr Misr Litaba'ah, (Said Juwdah al-Sahar And Co : T.Thn Cet. Panitia Printing dan Publishing, T.Tpt : 1938 M
- al-Râzi al-Jaŝŝâs, Imâm Abû Bakr Ahmad (W. 370 H), *Ahkâm al-Qur'an* , I. Cet. Baru, 1993 M
- al-Ṭabari, Abû Ja'far Muhammad Jarîr *al-Musammâ Jâmi'u al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'an*, al-Mujalad al-Râbi', Cet ke 3, Muhammad 'Ali Baidlawi, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1999
- al-Ṭabṭâbâ'i, Sayyid Muhammad Husaian, *al-Mîzân Fî Tafsîr al-Qur'an*, Juz. V. Cet. Ke-5 Muassasah al- A'lâmi., Beirut , 1983 M
- al-Ya'qûbî al-Bagdâdî,Ahmad Ishâq Ibn Ja'far Ibn Wahhâb Ibn Wadlîkh (W. 292 H) ,*Târîkh al-Ya'qûbî*, Juz. ke-2. Cet. I., Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1999 M
- al-Zamakhsyari, Imâm Abû al-Qâsim Jârullah Mahmûd Ibn 'Umar Ibn Muhammad, *al-Kasyyâf*, Juz.II, Cet. ke- 1, Muhammad Ali Baidlawy, Dâr Kutub al-'Ilmiyah, Beirut: 1995 M
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara :Transpormasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1998
- Bernarld Lewis, *Retern of Islam*, diterjemahkan oleh Hamid Luthfi, dengan judul " *Kebangkitan Islam Di Mata Seorang Sarjana Barat*, Cet. Ke-1, Mizan (Bandung : 1983 M)
- Deddy Mulyana, DR. MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.Keempat, PT. Rosda Karya (Bandung 2004 M)
- Departeman Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Intermedia (Jakarta : 1971 M)

- Fuad Hashem, H. *Sirah Muhammad Rasulullah Kurun Mekkah Suatu Penafsiran Baru*, Cet Kelima, Mizan (Bandung : 1996 M)
- Hermawati, *Sejarah Agama dan bangsa Yahudi*, Cet. Ke-1., Raja Grafindo Persada., Jakarta, 2005
- Hijbu Tahrir Indonesia, *Mengenal Hijbu Tahrir Politik Islam Idiologis*, Jakarta, Tahriqul Izzah, 2002 M
- Ibn al-'Āsir, *al-Kāmil Fī al-Tārīkh*, I, Cet. Ke- 3, Muhammad 'Ali Baidlawī, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut : 1998 M
- Ibn al-Mandlur, *Lisan al-Arab*, Cet. Ke-1, Dār al-Kutub al-Ilmiyah(Bairut:2003M)
- Imam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, terjemahan Abd Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, Logos Jakarta, 1996
- Itzutsu,Toshihiko,*God and Man in The Qur'an*,Islamic Book Truth, Cet. Ke-1, Kuala Lumpur, 2001
- J. Goode, William, and K.Hatt, Paul, *Methodes In Social Research*, Cet. Ke-1. M.c. Graw-Hill Kogakusha, Ltd., New York, 1952 M
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. Pertama, Pt. Gramedia, (Jakarta : 1983 M)
- L. Esposito, John (Ed), *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic World*, Volume V, Oxford University Press, New York 1995 M
- Muhammad al-Ghazali, *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, Cet. Keempat, Mitra Pustaka (Yogyakarta : 2005 M)
- Muhammad Farīd Wajdi, *Dâiratu al-Ma'ârif al-Qarnu al-Râbi'u al-Asyara*, Cet. ke 1, Dâr al-Ma'ârif, Libanon: T.Th.
- Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsîr Wa al-Mufasssîrûn. I*, Kairo, 2000M
- Muhammad Natsir dkk, *Dasar-Dasar Negara Islam dan Pancasila*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 2001
- Muhammad Waṣfâ, *Târīkh al-Anbiyâ Wa al-Rusul Wa Irṭibat al-Zamânî Wa al-'Itiqâdî*, Cet. ke-1, Dâr al-Fadlîlah, Kairo: T.Thn.
- Mujahid.(Dr. H. M.Ag). *Politik Dalam Perspektif Hadist: Analisis Terhadap Dasar Pemikiran Ali Abd Roaziq*, Lukman al-Hakim Pres, Cet ke 2. Watampone 2015
- Sunanto Musyrifah, Prof. Dr. *Sejarah Islam Klasik*, Cet. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2003 M